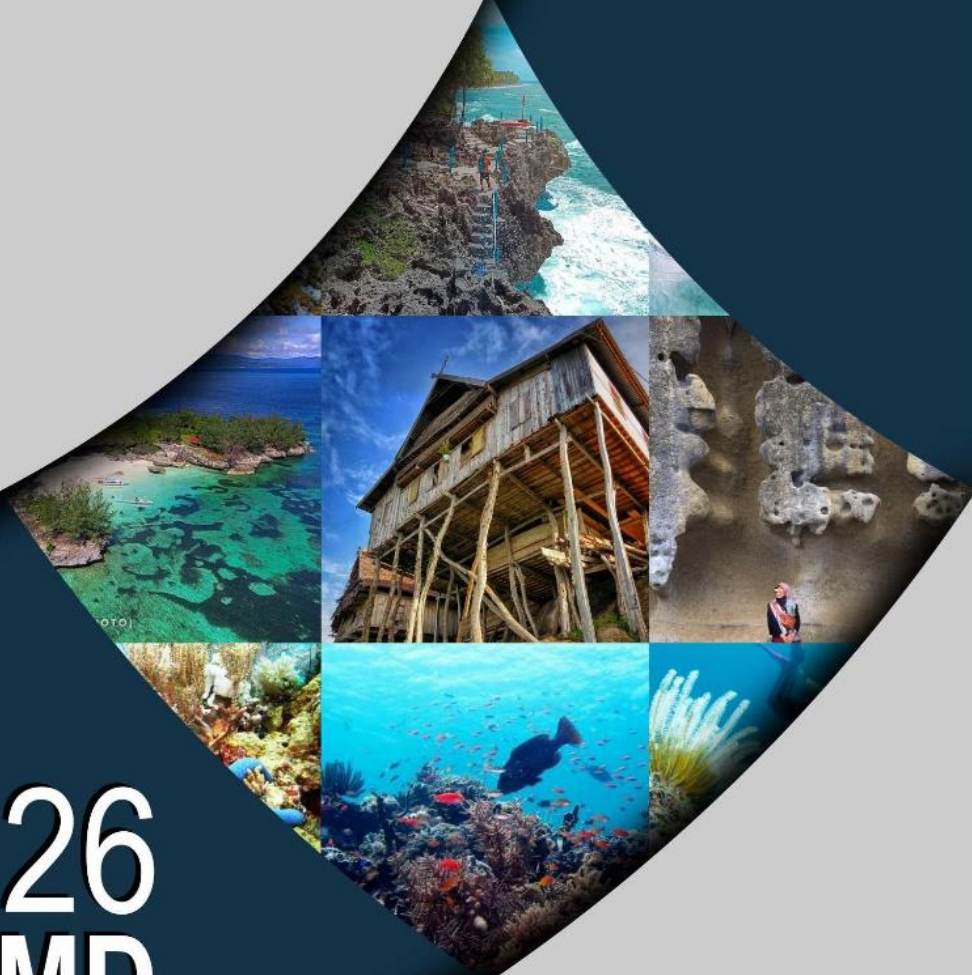




Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Benteng



2021-2026 KLHS RPJMD

LAPORAN KLHS RPJMD
TAHUN 2021-2026
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola pemerintahan.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak baik pemerintah, swasta, akademisi LSM, dan masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangan pemikiran dan saran. Proses penyusunan yang telah dilakukan diharapkan dapat merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. MUH. BASLI ALI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Metodologi Pendekatan	7
1.5 Ruang Lingkup.....	9
BAB 2 KONDISI UMUM DAERAH	12
2.1 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar.....	12
2.2 Kondisi Fisik Wilayah.....	15
2.3 Potensi Dan Sumber Daya Mineral	32
2.4 Potensi Ekonomi Wilayah	33
2.5 Potensi Bencana Alam.....	45
2.6 Kependudukan	46
2.7 Perekonomian Daerah	57
2.8 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.....	66
2.9 Kondisi Keuangan Daerah.....	73
BAB 3 KAJIAN MUATAN KLHS	92
3.1 Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan.....	83
3.2 Perkiraan Mengenai Dampak Dan Resiko Lingkungan.....	104
3.3 Jasa Lingkungan	113
3.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	134
3.5 Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Terhadap Perubahan Iklim.....	141
3.6 Tingkat Ketahanan Dan Potensi Kehati.....	149
BAB 4 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	154
4.1 Capaian TPB Menurut Kategori Capaian.....	154
4.2 Capaian TPB Menurut Pilar Pembangunan	213
4.3 Pencapaian Indikator TPB Untuk Setiap Organisasi Perangkat Daerah.....	216



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



4.4	Indikator TPB Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	220
4.5	Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB	236
BAB 5	ALTERNATIF & SKENARIO PENCAPAIAN TPB	246
5.1	Mekanisme Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	246
5.2	Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDTLH	249
5.3	Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDTLH	276
BAB 6	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	356
6.1	Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	356
6.2	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Melalui Konsultasi Publik	359
6.3	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	379
6.4	Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	386
6.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan Perioritas	392
BAB 7	REKOMENDASI DAN INTEGRASI KLHS RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	395
7.1	Rekomendasi KLHS RPJMD	395
7.2	Integrasi KLHS RPJMD	429
	DAFTAR PUSTAKA	432



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pulau dan Garis Pantai Di Kabupaten Kepulauan Selayar	13
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019	14
Tabel 2.3	Jumlah Hari Dan Curah Hujan	17
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar	27
Tabel 2.5	Potensi dan Kendala Pengembangan Sektor Potensial.....	36
Tabel 2.6	Perkembangan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2020.....	46
Tabel 2.7	Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	47
Tabel 2.8	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	48
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019	49
Tabel 2.10	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019	53
Tabel 2.11	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar	52
Tabel 2.12	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar	52
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019	53
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019	54
Tabel 2.15	Nilai Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	56
Tabel 2.16	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Nilai Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar	57
Tabel 2.17	PDRB Perkapita Tahun 2015-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	60
Tabel 2.18	Data Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	63
Tabel 2.19	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	63
Tabel 2.20	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	69
Tabel 2.21	Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	70



Tabel 2.22	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	70
Tabel 2.23	Analisis Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	72
Tabel 2.24	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	73
Tabel 3.1	Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan.....	95
Tabel 3.2	Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	96
Tabel 3.3	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	99
Tabel 3.4	Status Air Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	93
Tabel 3.5	Proyek Volume Air Kabupaten Kepulauan Selayar	94
Tabel 3.6	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	95
Tabel 3.7	Status Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	101
Tabel 3.8	Proyeksi Volume Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	103
Tabel 3.9	Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar	106
Tabel 3.10	Resiko Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar.....	107
Tabel 3.11	Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar	108
Tabel 3.12	Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Selayar	111
Tabel 3.13	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Penyedia Air Kabupaten Kepulauan Selayar.....	115
Tabel 3.14	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	117
Tabel 3.15	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pengatur Air	121
Tabel 3.16	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pengatur Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar.....	124
Tabel 3.17	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar	126
Tabel 3.18	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor	129
Tabel 3.19	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Karhutla Kabupaten Kepulauan Selayar.....	132
Tabel 3.20	Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar	144
Tabel 3.21	Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar	146





Tabel 3.22	Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar	150
Tabel 4.1	Capaian Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar.....	155
Tabel 4.2	Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Selayar.....	157
Tabel 4.3	Realisasi Capaian Indikator TPB yang Terlaksana dan Mencapai Target	160
Tabel 4.4	Realisasi Capaian Indikator TPB yang Terlaksana dan Belum Mencapai Target	185
Tabel 4.5	Indikator TPB Belum/Tidak ada data	207
Tabel 4.6	Indikator TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Mencapai Target Nasional.....	222
Tabel 4.7	Indikator TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Belum Mencapai Target	228
Tabel 4.8	Indikator TPB Tiap OPD yang Belum Melaksanakan dan Belum Mencapai Target	232
Tabel 4.9	Indikator TPB Tiap OPD yang Belum/Tidak Memiliki Data	234
Tabel 4.10	Peran Perangkat Daerah Dalam Pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar	239
Tabel 4.11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019	242
Tabel 4.12	Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pihak ke3	244
Tabel 6.1	Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	357
Tabel 6.2	Daftar Isu Lingkungan Hasil Survei di Kabupaten Kepulauan Selayar	363
Tabel 6.3	Daftar Isu Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Hasil Survei di Kabupaten Kepulauan Selayar	373
Tabel 6.4	Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Saat Curah hujan tinggi.....	382
Tabel 6.5	Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Saat Curah hujan rendah.....	383
Tabel 6.6	Kelompok Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Proyeksi Indikator TPB	387
Tabel 6.7	Proyeksi Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar	391
Tabel 7.1	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD.....	395
Tabel 7.2	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD.....	402





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Kepulauan Selayar.....	14
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Hari dan Curah Hujan	17
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lahan	28
Gambar 2.4	Penggunaan Lahan.....	28
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah.....	29
Gambar 2.6	Peta Kepadatan Penduduk.....	48
Gambar 3.1	Grafik Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar	96
Gambar 3.2	Grafik persentase Kelas Kemampuan Lahan	97
Gambar 3.3	Peta Kalas Kemampuan Lahan.....	98
Gambar 3.4	Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.5	Peta Ketersediaan Air.....	92
Gambar 3.6	Peta Kebutuhan Air	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.7	Grafik Status Daya Dukung Air Tahun 2019.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.8	Peta Status Daya Dukung Air	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.9	Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019	99
Gambar 3.10	Peta Ketersediaan Pangan	100
Gambar 3.11	Peta Kebutuhan Pangan.....	101
Gambar 3.12	Grafik Status Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	102
Gambar 3.13	Peta Status Daya Dukung.....	102
Gambar 3.14	Grafik Resiko Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar	108
Gambar 3.15	Peta Resiko Bencana Banjir.....	108
Gambar 3.16	Grafik Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar	110
Gambar 3.17	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Longsor	111
Gambar 3.18	Grafik Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Selayar	112
Gambar 3.19	Peta Resiko Bencana Tsunami	113
Gambar 3.20	Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Penyedia Air	116
Gambar 3.21	Grafik Jasa Lingkungan Penyedia Air.....	116
Gambar 3.22	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air	117
Gambar 3.23	Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Penyedia Pangan	118
Gambar 3.24	Grafik Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	119





Gambar 3.25 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan.....	120
Gambar 3.26 Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Pengatur Air.....	122
Gambar 3.27 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Air	122
Gambar 3.28 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Air	123
Gambar 3.29 Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Pengatur Iklim.....	125
Gambar 3.30 Grafik Jasa Lingkungan Pengatur Iklim.....	125
Gambar 3.31 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Perubahan Iklim	126
Gambar 3.32 Grafik Jasa Lingkungan Pengatur Bencana Banjir.....	128
Gambar 3.33 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Bencana Banjir.....	128
Gambar 3.34 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir.....	129
Gambar 3.35 Grafik Distribusi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor.....	130
Gambar 3.36 Jasa Lingkungan Pengatur Bencana Longsor.....	131
Gambar 3.37 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Longsor	131
Gambar 3.38 Grafik Distribusi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Karhutla	133
Gambar 3.39 Grafik Jasa Lingkungan Pengatur Bencana Karhutla	133
Gambar 3.40 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	133
Gambar 3.41 Kerangka Pikir Perumusan Resiko Terhadap Penyimpangan Iklim.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.42 Sistem Kuadran Indeks Kapasitas dan Indeks Kerentanan	143
Gambar 3.43 Kategorisasi Resiko Iklim dan Berdasarkan Tingkat Kerentanan dan Peluang Bencana Iklim.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.44 Grafik Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (Ha).....	145
Gambar 3.45 Grafik Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim	147
Gambar 3.46 Grafik Jumlah Desa Terhadap Status Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim	148
Gambar 3.47 Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim	149
Gambar 3.48 Grafik Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar.....	151
Gambar 3.49 Grafik Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversity	152
Gambar 3.50 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversity	153
Gambar 4.1 Grafik Presentase Jumlah Indikator	156
Gambar 4.2 Grafik Total Indikator Terlaksana Pada Setiap Tujuan TPB.....	158
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target.....	159





Gambar 4.4	Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	183
Gambar 4.5	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	199
Gambar 4.6	Realisasi Capaian Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	201
Gambar 4.7	Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum/Tidak Ada Data	205
Gambar 4.8	Grafik Capaian Indikator TPB Terlaksana dan Mencapai Target Menurut Pilar Pembangunan	214
Gambar 4.9	Grafik Capaian Indikator TPB Terlaksana dan Belum Mencapai Target Menurut Pilar Pembangunan.....	215
Gambar 4.10	Grafik Capaian Indikator TPB Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target Menurut Pilar Pembangunan.....	216
Gambar 4.11	Grafik Capaian Indikator Belum/Tidak Memiliki Data	217
Gambar 4.12	Grafik Capaian TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Mencapai Target Nasional	218
Gambar 4.13	Grafik Capaian TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional.....	219
Gambar 4.14	Grafik Capaian TPB Tiap OPD yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional.....	220
Gambar 4.15	Grafik Capaian Indikator Tiap OPD yang Belum/Tidak Memiliki Data	221
Gambar 5.1	Contoh proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan dan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan	247
Gambar 6.1	Partisipasi dalam Survei Isu Pembangunan Berkelanjutan	360
Gambar 6.2	Hasil Survei TPB Prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar	361
Gambar 6.3	Hasil Survei Isu Bencana Yang Sering Terjadi dan Mengkhawatirkan di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	362
Gambar 6.4	Hasil Survei Isu Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar	363
Gambar 6.5	Peta Kemampuan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	381
Gambar 6.6	Grafik Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Saat Curah hujan tinggi.....	381
Gambar 6.7	Grafik Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Saat Curah hujan rendah.....	382
Gambar 6.8	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Kepulauan Selayar	384
Gambar 6.9	Peta jasa lingkungan pengaturan tata aliran air	385



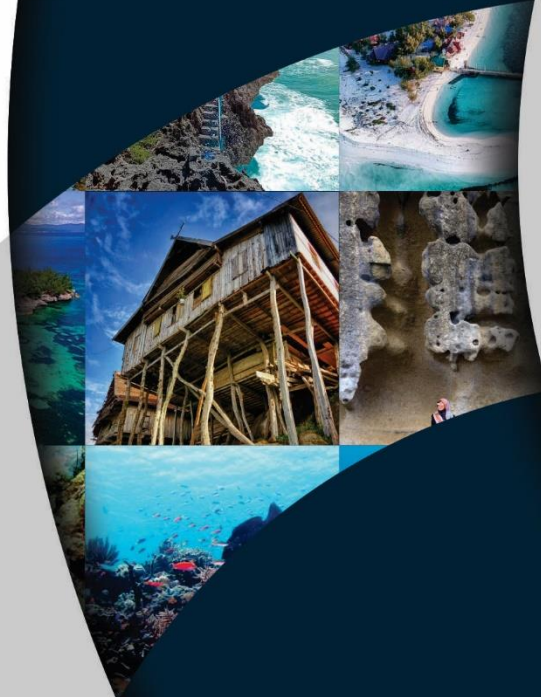


Gambar 6.10 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Mitigasi Banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar	386
Gambar 6.11 Diagram Model Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar	390
Gambar 6.12 Gafik Proyeksi Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar	391
Gambar 6.13 Klasifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar	392
Gambar 6.14 Model System Thingking Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Selayar.....	393
Gambar 7.1 Rencana Integrasi KLHS RPJMD Ke Dalam Dokumen RPJMD	429



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 262 menyatakan bahwa rencana pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pada akhirnya akan memanfaatkan sumber daya alam. Sesuai amanat UU 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Salah satu instrumen pengendalian yang wajib disusun daerah pada penyusunan rencana pembangunan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu diantara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 11 kecamatan, 7 kelurahan, dan 81 desa. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara





jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

Secara topografis, fisiografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, terbagi menjadi 3 satuan morfologi, yaitu berupa satuan morfologi daratan alluvial pantai, satuan morfologi perbukitan dan bergelombang, dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal. Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di wilayah pantai Pulau Selayar yang terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas, dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan bergelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal dengan ketinggian 356 -657 meter diantara puncak Gunung Bontoharu (435 m) dan Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lava, konglomerat, tufa dengan selingan batuan sediment laut. Sementara itu tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September. Secara umum curah hujan yang terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musiman.

Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2019 mencapai 6,44 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,59 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 0,63 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 3,42 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 3,68 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,66 %. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Peranan





terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 44,67% (angka ini menurun dari 46,13 % di tahun 2015), diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 21,28 % (naik dari 19,54 % di tahun 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor unggulan tersebut masih mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Meski pertumbuhannya cenderung melambat dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan akibat terjadinya gagal panen sektor tanaman pangan yang disebabkan adanya kemarau yang cukup panjang dan banjir besar yang melanda beberapa wilayah.

Secara umum, lapangan usaha dominan di Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap Sumber Daya Alam, khususnya bila dimanfaatkan tidak secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari isu-isu lingkungan seperti banjir, kekeringan, alih fungsi lahan, pencemaran sampah, *illegal fishing*, kerusakan pesisir dan pantai. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menemui momentumnya sejalan dengan periode pemilihan kepala daerah, harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program RPJMD. Integrasi prinsip pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan KLHS RPJMD.

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) juga disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah adalah RPJMD. Sekaitan dengan penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang





Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 15 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020 ini, Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, sehingga pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan menetapkan RPJMD Periode 2021-2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tahapan penyusunan KLHS RPJMD dilaksanakan sebelum rancangan awal RPJMD yang difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).





3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).





10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan





Selayar 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar serta terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
2. Membantu pemerintah kabupaten mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui usulan pencapaian indikator-indikator TPB;
3. Memastikan potensi dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir, dengan melakukan langkah-langkah perlindungan serta memelihara jasa ekosistem;
4. Memastikan pembangunan telah sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Memastikan terintegrasinya arahan-arahan berdasarkan kajian berlandaskan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen rencana pembangunan.

1.4 Metodologi Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengacu pada pendekatan tata cara yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendekatan dalam penyusunan KLHS RPJMD disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian target





TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang digunakan adalah pendekatan Ex-Ante, dimana KLHS disusun sebelum dokumen KRP dalam hal ini dokumen RPJMD. Dokumen KLHS yang disusun sebelum KRP akan menjadi bahan bagi dokumen RPJMD itu sendiri. Dokumen KLHS tidak dimasukkan untuk mengkaji dampak dari KRP, tetapi dokumen KLHS dimasukkan untuk mengarahkan bentuk KRP yang akan dibuat sesuai dengan konteks kewilayahan yang dikaji. Fokus kajian pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah pada pencapaian target TPB yang dikaitkan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Sementara isu strategis yang akan diangkat berasal dari isu strategis TPB.

KLHS RPJMD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.

Penyusunan KLHS RPJMD memenuhi dua prinsip yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Dalam Negeri tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan





2. KLHS RPJMD menjadi alat analisis dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Lingkup substansi dalam pengkajian KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2026 tidak terlepas dari peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu UU No 32 Tahun 2009 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Substansi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Umum Daerah
Dalam hal ini, dilakukan identifikasi terkait kondisi daerah meliputi kondisi geografis, daya dukung dan daya tampung, kependudukan dan kondisi keuangan daerah
2. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
3. Kajian Pembangunan Berkelanjutan
Hasil kajian akan menghasilkan identifikasi permasalahan eksisting daerah pada setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
4. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Hasil perumusan tersebut berupa alternatif proyeksi terhadap rencana dan target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
5. Alternatif Proyeksi
Alternatif yang dihasilkan berupa target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar ini mencakup



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Bontomatene, Bontosikuyu, Buki, Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Taka Bonerate.



BAB II

KONDISI UMUM DAERAH



BAB II

KONDISI UMUM DAERAH



Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan penting terkait kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Informasi yang relevan dan penting tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi Kabupaten Kepulauan Selayar, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Dengan demikian gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar

Secara administrasi, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tipologi wilayah kepulauan yang terletak di ujung Selatan Pulau Sulawesi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5° 42' dan 70 35' LS dan 120° 15' dan 122° 30' BT. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah pulau sebanyak 130, sedangkan luas wilayah 10.503,69 km² meliputi luas daratan 1.357,03 km² dan luas wilayah perairan laut 9.146,66 km².



Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bone dan Perairan Bulukumba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar.

Pulau-pulau yang berjumlah 130 tersebut semuanya bernama dan hanya 34 Pulau di antaranya yang berpenghuni. Sementara panjang garis pantai keseluruhan adalah 6.440,89 km. Selengkapnya mengenai pulau dan garis pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Tabel 2.1** berikut ini.

Tabel 2.1 Pulau dan Garis Pantai Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Pulau Berpenghuni	Buah	34
2.	Pulau Tidak Berpenghuni	Buah	96
3.	Pulau Bernama	Buah	130
4.	Pulau Tidak Bernama	Buah	-
5.	Panjang Garis Pantai	Km	6,440.89

Sumber: - Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2020
- RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar

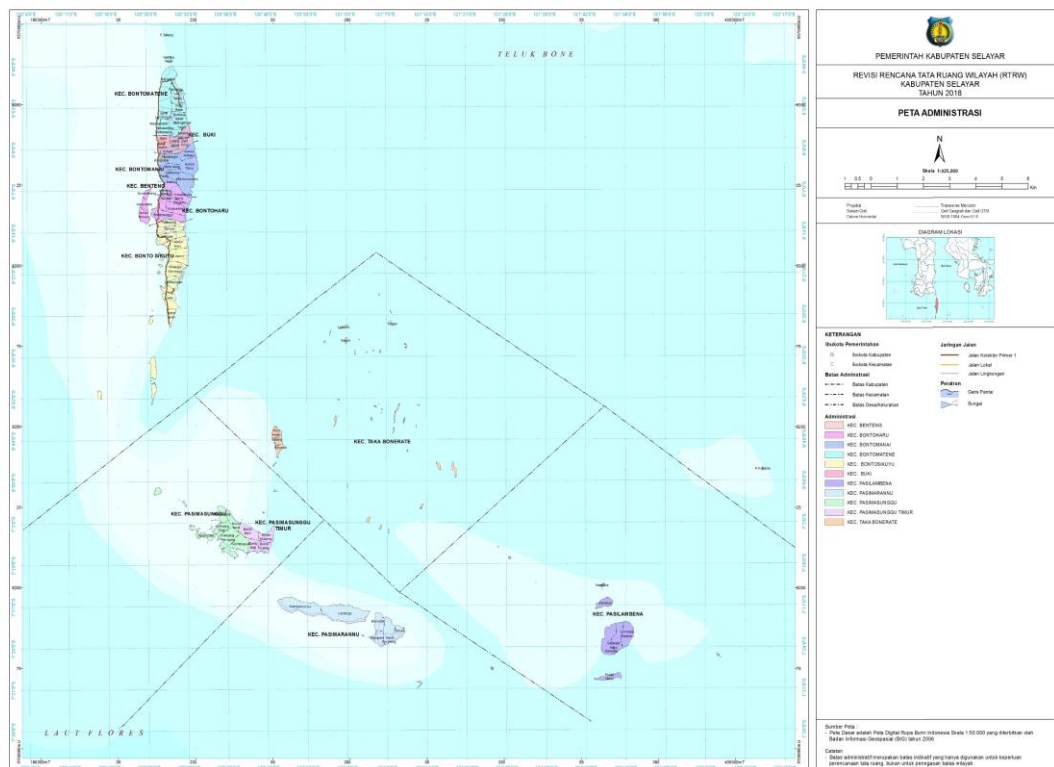
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada Tahun 2019 wilayah administratifnya mencakup 11 kecamatan, yakni Kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimasunggu, Taka Bonerate, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Benteng, Bontomatene dan Buki dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 88. Selengkapnya mengenai luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.2 Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Pasimarannu	195,33	8	-
2.	Pasilambena	114,88	6	-
3.	Pasimasunggu	131,8	7	-
4.	Pasimasunggu Timur	67,14	6	-
5.	Takabonerate	49,3	9	-
6.	Bontosikuyu	248,22	12	-
7.	Bontoharu	128,12	6	2
8.	Bontomanai	136,42	10	-
9.	Benteng	24,63	-	3
10.	Bontomatene	193,05	10	2
11.	Buki	68,14	7	-
Jumlah		1.357,03	81	7

Sumber : BPS; Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2019



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar



2.2 Kondisi Fisik Wilayah

Tinjauan terhadap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengembangkan wilayahnya di periode selanjutnya. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian, meliputi: aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumber daya manusia, aspek perekonomian, potensi bencana alam, potensi sumber daya alam, dan berbagai aspek lainnya.

2.2.1 Topografi

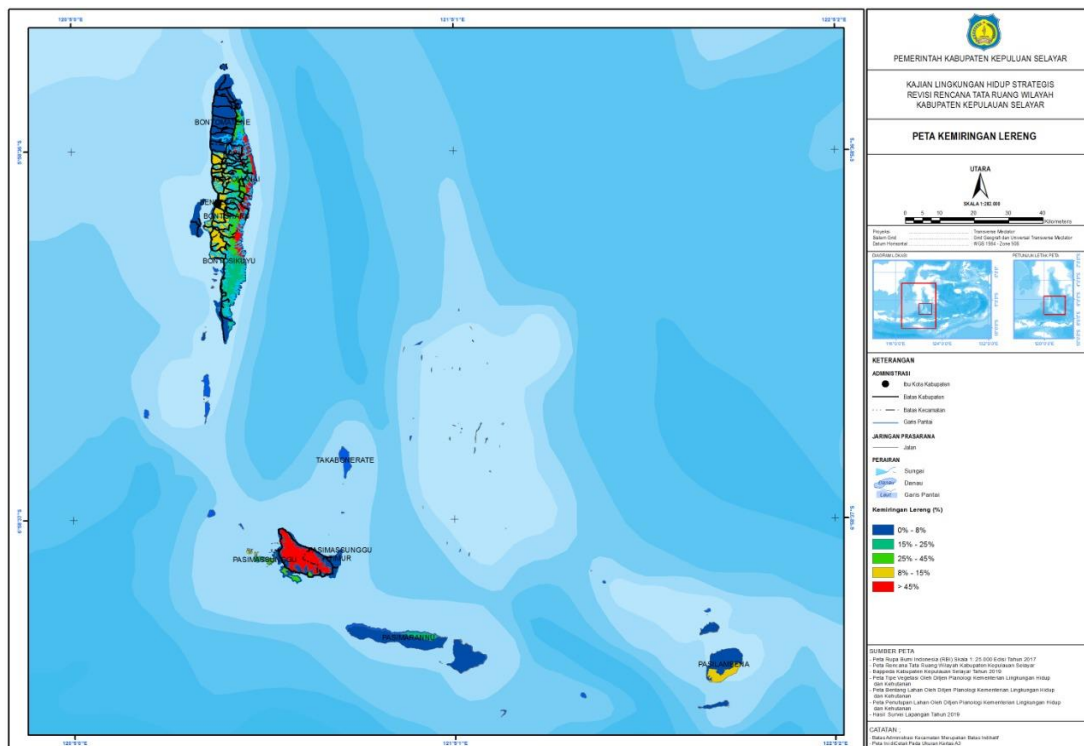
Fisiografi Pulau Selayar terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan Pulau Selayar dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi daratan alluvial pantai;
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang;
- 3) Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan dan struktur dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai Barat Pulau Selayar terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan, batuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal umumnya menempati bagian Barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut di antaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut. persentase kelas lereng Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), semakin ke selatan semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat



terjal mencapai 33,12%, akan tetapi di Kecamatan Bontomatene lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.



Gambar 2.2 Peta Kelerengan di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2.2 Klimatologi

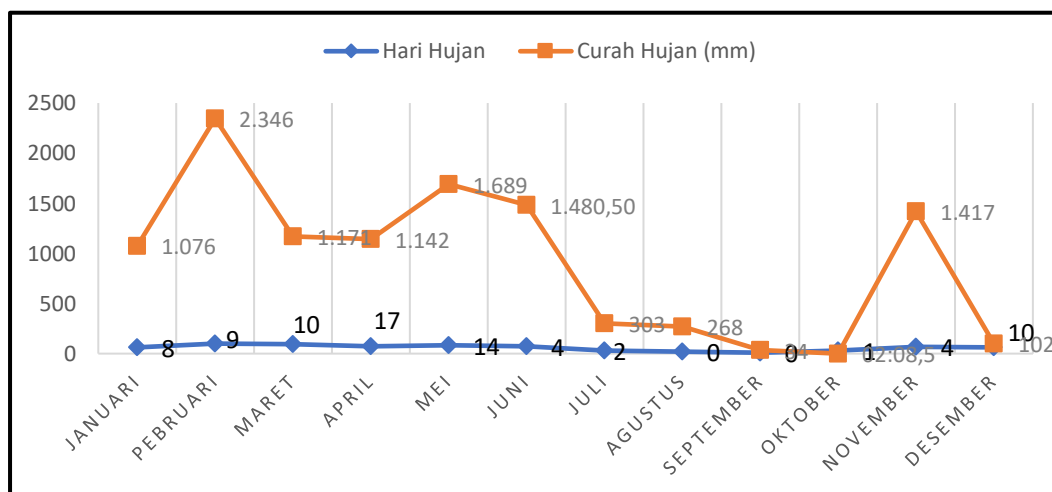
Kondisi iklim wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya secara umum dapat tergambar dari curah hujan dan pengaruh angin musiman, sebab wilayahnya berbatasan langsung dengan laut lepas. Data pada Stasiun Meteorologi Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersebar di beberapa Kecamatan, rata-rata curah hujan per Tahun 1.059 mm dan hari hujan per Tahun rata-rata 79 hari. Perbedaan curah hujan umumnya berbeda-beda di Kabupaten Kepulauan Selayar dikarenakan oleh pengaruh iklim, keadaan geografi, dan perputaran/pertemuan arus udara. Selengkapnya mengenai kondisi iklim di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tergambar dari curah hujan dan hari hujan terlihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:



Tabel 2.3 Jumlah Hari Dan Curah Hujan

Bulan	Jumlah	
	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Januari	8	110
Pebruari	9	164
Maret	10	187
April	17	284
Mei	14	141
Juni	4	37
Juli	2	1
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	1	0
November	4	46
Desember	10	89
Total	79	1.059

Sumber : BPS; Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020



Gambar 2.3 Grafik Jumlah Hari dan Curah Hujan

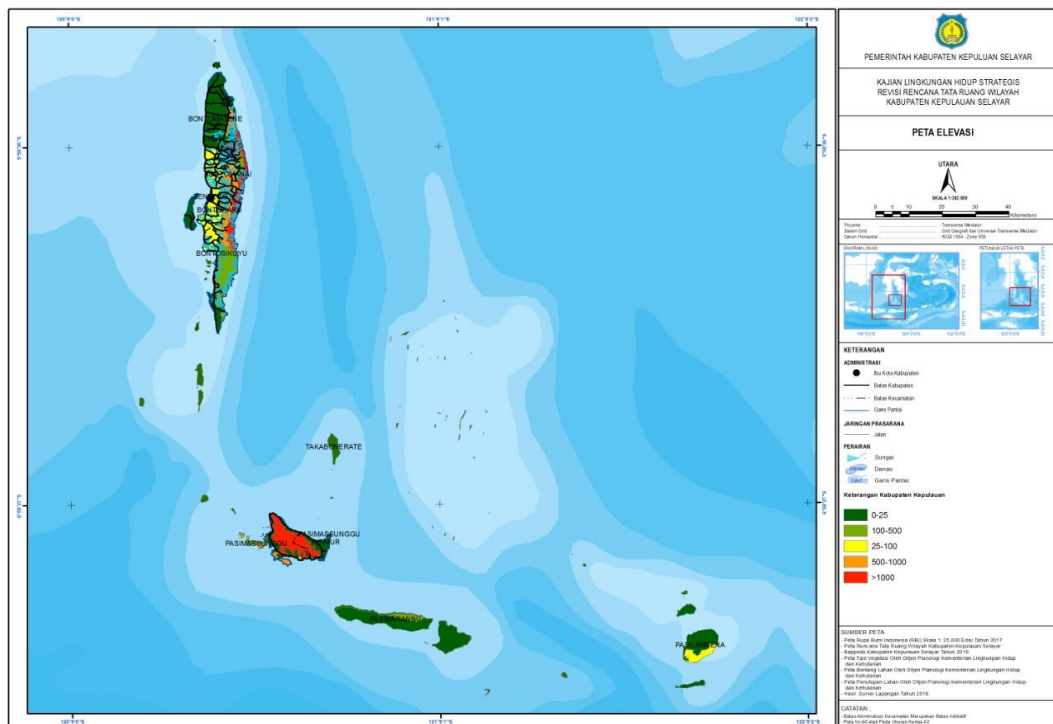
2.2.3 Morfologi

Kawasan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah pesisir, dengan bentuk morfologi daerah pantai yang landai dan sebagian curam berbatu, dikelilingi oleh gunung-gunung serta barisan perbukitan dengan bentuk morfologi daratan berupa alluvial pantai yang memanjang dan perbukitan bergelombang serta berbukit dan berbatu dengan lereng terjal. Umumnya, daerah ini terbentuk oleh endapan pasir,



lempung, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis koral. Secara garis besar, tipe-tipe kelaandaian perairan Selayar dikategorikan ke dalam 4 tipe:

- 1) Tipe pantai I dengan sebaran sempit pada daerah pantai dengan kelaandaian datar yang panjang dan di daerah luar memiliki kelaandaian yang agak curam;
- 2) Tipe pantai II berbentuk reef plat dengan kondisi dasar ditumbuhi terumbu karang dan pengendapan sedimen. Sebaran jenis ini terdapat di lokasi antara 40 – 200 m dari pantai;
- 3) Tipe pantai III memiliki kelaandaian antara 2 – 10% dan merupakan daerah sedimentasi pasir halus hingga pasir kasar. Tipe pantai III ini banyak menjadi daerah permukiman. Tipe ini terdapat secara luas di pulau-pulau sebelah timur dan di sebelah barat Pulau Selayar;
- 4) Tipe pantai IV adalah pantai dengan jarak kedalaman luar sungai sangat sempit dan curam. Tipe ini mendominasi sebagian besar pulau-pulau di Selayar.



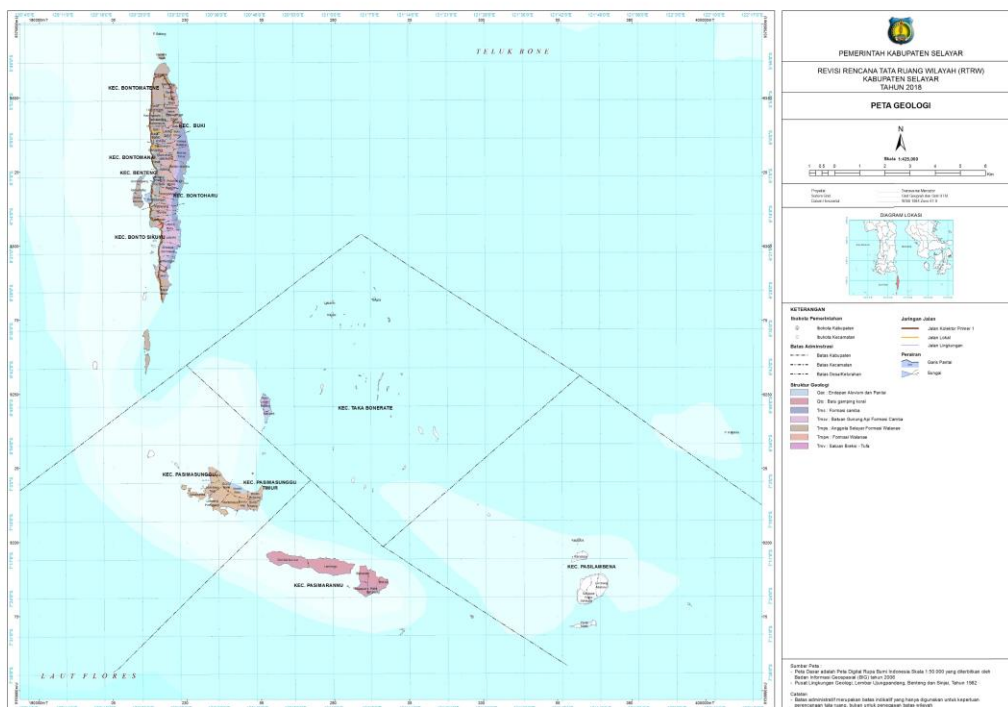
Gambar 2.4 Peta Elevasi/Ketinggian di Kabupaten Kepulauan Selayar



2.2.4 Geologi

Kondisi geologi Kepulauan Selayar merupakan lanjutan dari wilayah geologi Sulawesi Selatan bagian Timur yang tersusun dari jenis batuan sedimen. Struktur batuan Pulau Selayar menunjukkan struktur dan pola penyebaran batuan dari arah Utara-Selatan dan miring melandai ke arah Barat, sedangkan pantai Timur umumnya terjal dan langsung dibatasi dengan laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar. Batuan tertua yang tersingkap di Pulau Selayar adalah satuan Gunung Api Formasi Camba yang berumur awal miosen tengah sampai awal miosen akhir yang terdiri atas breksi, sehingga kemungkinan adanya air tanah tertekan sangat kecil. Stratigrafi batuan di Pulau Selayar terdiri atas:

- 1) Endapan alluvium dan endapan pantai yang terdiri atas kerikil, pasir, lempung, lumpur dan batuan gamping koral (Qac);
- 2) Satuan formasi Selayar Walanae yang terdiri atas batu gamping, batu pasir, batu lempung, konglomerat, dan tuffa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat hingga ujung Pulau Selayar;
- 3) Satuan formasi batuan Gunung Api Camba terdiri atas breksi, lava, konglomerat dan tuffa yang terdapat pada sisi tengah bagian Selatan Pulau Selayar (Tmcs);
- 4) Formasi Camba terdiri atas batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api (Tmc), yang terdapat di sepanjang pantai Timur Pulau Selayar;
- 5) Formasi Walanae terdiri atas batu pasir, konglomerat, batu danau, batu gamping dan nopal (Tmpv), terdapat pada ujung bawah pantai Barat Pulau Selayar.



Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Kepulauan Selayar

Konglomerat dan tufa pasir sampai lempungan satuan ini berlapis tebal dan terlipat miring ke arah Barat dimana di dalamnya diduga terdapat susunan “*interpping*”. Satuan gunung api formasi Camba ini ditutupi di atasnya oleh satuan sedimen laut dari formasi yang sama berumur miosen tengah terdiri atas batuan sedimen laut, seperti batu lempung, naval, batu gamping berselingan dengan batuan gunung api seperti tufa dan breksi. Kedua satuan formasi Camba ini ditutupi selasar oleh formasi Walanae yang terdiri atas dua satuan yakni satuan yang berumur miosen akhir dengan batas jari jemari dengan lapisan atas formasi Camba, terdiri atas batu pasir sebagian tufaan dan sebagian lagi gampingan, konglomerat, tufa, batu lempung, batu gamping dan naval. Satuan ini mempunyai struktur berlapis dan terlipat lemah sampai sedang. Sedangkan lainnya, merupakan batu gamping anggota Selayar dari formasi Walanae berumur Miosen akhir, dari batu gamping terumbu dan batu gamping klastik yang berlapis serta berbutir halus sungai sedang yang menunjukkan terlipat lemah. Endapan yang termuda adalah alluvial dan



endapan pantai terdiri atas kerikil, pasir, lempung yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral.

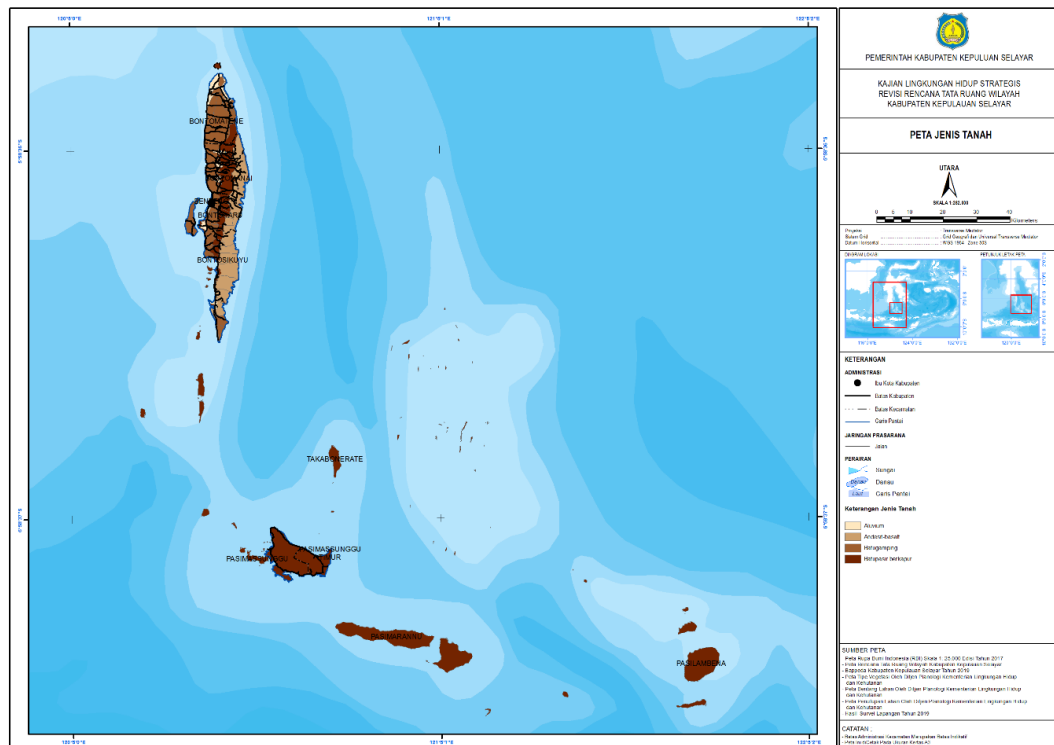
2.2.5 Jenis Tanah

Jenis tanah adalah turunan atau rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat lapisan perinci atau horizon tanah. Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian lebih dari 100 meter, bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua, lempung berdebu, gumpal semampai pejal, agak keras;
- 2) Tanah Regosal Kelabu. Terdapat sepanjang pantai Barat Pulau Selayar dari utara sampai ke Kota Benteng pada ketinggian hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas lapisan bawah kelabu muda, pasir, berbutir tunggal lepas;
- 3) Kompleks Rensine dan Regosal. Tanah ini terdapat pada batuan tua dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua lempung berliat remah dan gemur. Tanah sedalam lebih kurang 25 cm, terletak di atas pada kapur lunak. Regosol berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil, gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil di permukaan dan di dalam penampang tanah;
- 4) Mediteran coklat tua, terdapat memanjang dari Utara-Selatan dari Bontomatene sampai Barang-Barang, ketinggian antara 15 dan 50



- meter di permukaan, bentuk wilayahnya berombak sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa. Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat, lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai sangat keras. Lapisan tanah bawah coklat tua kekuningan sampai coklat kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras;
- 5) Kompleks mediteran merah dan litosal, terdapat di bagian Utara Pulau Selayar, bentuk wilayahnya bergelombang dan miring ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah sampai agak gempur. Tanah litosol mempunyai lapisan tanah sangat tipis dengan singkapan-singkapan batu kapur.



Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar



2.2.6 Hidrologi

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar. Pada umumnya, debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai sebagai wadah tadah hujan (catchment area) dan sistem sungainya. Sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kep. Selayar sehingga sulit diukur besaran debit airnya.

Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (*aresian aquifes*) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (*watertable groundwater*) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempat oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 dan 6 meter yang sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi adanya mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain Batangmata Sapo, Lembang-Lembang, Bonto dan sebelah Timur Tile-Tile, dengan besaran debit airnya relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).



Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan (laut). Akuifer pada umumnya terdapat pada lapisan pasir, pasir kerikil, dan lapisan tipis batu gamping terumbu yang berumur Holosen dengan pergerakan airnya melalui ruang antar butir atau rongga-rongga. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongoia dengan debit air yang bervariasi. Terdapatnya air tanah pada satuan batu gamping ini dijumpai pada beberapa tempat pada batas kontak dengan satuan batu gamping dan lempung pasiran dengan debit yang relatif kecil.

Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu, arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air di limitasi untuk kawasan budidaya dan penggalan sumber air tanah khususnya kawasan utara.

2.2.7 Hidro-Oseanografi

Karakteristik hidro-oseanografi Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan oleh parameter-parameter seperti tinggi gelombang, salinitas dan temperatur, arus pantai, pasang surut, bathimetri, tingkat kecerahan perairan, tipe pantai, dan dinamika proses pantai. Parameter-parameter tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Tinggi Gelombang

Ombak merupakan pergerakan molekul air laut. Besarnya ombak di laut tergantung pada kelajuan angin yang bertiup di permukaan laut, panjang atau jarak hembusan angin (*fetch length*), dan lamanya angin berhembus.

Di perairan Kepulauan Selayar, arah dan besarnya ombak sangat tergantung pada musim. Pada musim Timur, ombak datang dari arah



Timur, sedang pada musim Barat ombak datang dari arah Barat. Tinggi ombak yang diukur pada bulan September di perairan Kepulauan Selayar berkisar antara 0,02 dan 0,82 meter. Di pulau-pulau kecil, selain oleh musim, besar dan arah ombak dipengaruhi oleh letak geografisnya.

2) Salinitas dan Temperatur

Salinitas atau sering disebut dengan kadar garam, merupakan jumlah garam terlarut dalam satu liter air. Salinitas air biasanya dinyatakan dalam satuan 0/00 (ppm). Besarnya salinitas air laut sangat dipengaruhi oleh tumpahan air tawar dari daratan dan fluktuasi temperatur perairan.

Salinitas air laut pada umumnya relatif lebih stabil dibandingkan salinitas pada air payau. Pada daerah pantai salinitasnya selalu mengalami perubahan, terutama pada musim penghujan, karena banyaknya air permukaan yang masuk ke laut. Salinitas air laut pada perairan di sekitar Pulau Selayar berkisar antara 30 dan 37 ppm. Nilai salinitas yang rendah pada umumnya pada daerah dimana terdapat muara sungai atau pada daerah yang ditumbuhi mangrove. Pada perairan pulau-pulau yang berbatasan dengan Laut Flores, seperti di Pulau Bonerate, Pulau Kalatoa, dan Pulau Kalao, salinitasnya relatif lebih tinggi kecuali Pulau Jampea yang salinitasnya sekitar 30 ppm.

Temperatur sangat berpengaruh terhadap lingkungan perairan laut. Kisaran temperatur dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan, salinitas air laut dan arus-arus global. Temperatur juga berpengaruh terhadap kehidupan organisme di perairan laut, terutama pada proses fotosintesis, proses metabolisme, dan daur reproduksi. Untuk pemanfaatan perairan sebagai kawasan budidaya dibutuhkan kisaran



temperatur antara 27°C dan 32°C. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, temperatur perairannya bervariasi antara 27° dan 32°C. Tingginya kisaran temperatur di kawasan ini disebabkan oleh letak geografis kabupaten ini di antara Laut Flores, Teluk Bone, dan Laut Banda. Temperatur di perairan sekitar Pulau Selayar berkisar antara 27°C dan 30°C di perairan bagian Barat, dan antara 30°C dan 32°C di perairan bagian Timur. Di Pulau Kalatoa, kisaran temperatur mencapai 32°C–33°C. Hal ini disebabkan oleh letak pulau ini berhadapan langsung dengan Laut Flores.

3) Arus Pantai

Arus dapat dibangkitkan oleh ombak yang mencapai perairan pantai, dan oleh pasang surut. Arus yang terbangkitkan tersebut dapat berupa arus susur pantai dan arus tolak pantai. Arus susur pantai merupakan arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai. Arus ini terbangkitkan oleh ombak yang datang menyudut terhadap garis pantai. Sedangkan, arus tolak pantai merupakan arus yang bergerak tegak lurus garis pantai. Arus ini terbentuk oleh ombak yang datang tegak lurus terhadap garis pantai. Arus susur pantai mempunyai kecenderungan mengangkut material sedimen menyusur pantai. Sedangkan arus tolak pantai mengangkut sedimen dari pantai ke arah laut.

Kecepatan arus di perairan Pulau Selayar berkisar antara 0,027 dan 0,156 m/detik. Di sini, arus dominan dibangkitkan oleh pasang surut. Arah arus berubah-ubah, pada bulan Oktober arah arus menuju ke Timur, sedang pada bulan Desember arah arus menuju ke Barat dan Barat daya. Di Pulau Kayuadi, arah arus relatif ke Barat dengan kelajuan berkisar antara 0,09 m/det. dan 0,14 m/det. Di Pulau Jampea, kelajuan arus berkisar antara 0,04 m/det dan 0,22 m/det dan arahnya relatif ke Utara. Di Pulau



Bonerate, arah arus relatif ke Barat dengan kelajuan antara 0,17 m/det dan 0,23 m/det. Di Pulau Kalatoa kelajuan arus berkisar antara 0,03 m/det dan 0,34 m/det. dan arah arus relatif ke Barat.

4) Pasang Surut

Pasang surut merupakan dinamika air laut yang dipengaruhi oleh peredaran bulan mengelilingi bumi. Pola pasang surut suatu perairan juga tergantung pada letaknya terhadap garis khatulistiwa. Proses naik turunnya muka laut yang hampir teratur dibangkitkan oleh gaya tarik bulan dan matahari dengan siklus harian. Karena posisi bulan terhadap matahari dan bumi selalu berubah secara hampir teratur. Jika perairan tersebut mengalami satu kali pasang surut per-hari, maka kawasan tersebut dikatakan bertipe pasang tunggal. Jika terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu hari, maka pasutnya dikatakan bertipe pasut ganda. Tipe pasut lainnya merupakan peralihan antara tipe tunggal dan tipe ganda yang merupakan tipe pasut bercampur.

Tipe pasut dapat berubah tergantung pada kondisi terutama perubahan kedalaman perairan atau geomorfologi setempat. Tipe pasang surut perairan Selayar dengan menggunakan persamaan *Formzahl* ditandai dengan nilai F (0,89) berada pada interval nilai $0,25 < F < 1,5$ merupakan tipe pasang surut campuran diurnal ganda (*Mixed tide prevailing semidiurnal*). Nilai muka surutan (*Chart Datum Level-CDL*) sebesar 120,67 cm, berada di bawah nilai rata-rata muka air (*Mean Sea Level-MSL*) sebesar 226,10 cm dari kurva pasang surut dapat diperkirakan nilai rata-rata muka air (*MSL*) berada dalam interval 200 – 250 cm. Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap kondisi pasang surut ini adalah bahwa tipe pasang surut di perairan Pulau Selayar termasuk dalam tipe pasang surut campuran condong diurnal ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*). Sedangkan, hasil pengukuran yang dilakukan di perairan Takabonerate juga



menghasilkan tipe pasang surut campuran condong diurnal ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*).

5) Bathimetri

Kedalaman perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar relatif dalam. Di Pulau Selayar, perairan pantai bagian Barat kedalamannya berbeda dengan di bagian Utara dan Selatan. Di bagian Utara, dataran pantainya relatif lebar ke arah laut dengan kelerengan yang sangat landai. Pada saat surut, paparan ini kelihatan sampai sejauh lebih dari 100 meter. Sedangkan, di bagian Selatan, dataran pantai relatif sangat sempit, bahkan di beberapa tempat tidak dijumpai dataran pantai, dasar perairan pantai relatif terjal.

Kondisi gelombang dari prediksi tinggi ombak dengan data kecepatan angin maksimum yang bertiup pada daerah Selayar. Musim angin Barat terjadi pada Bulan Januari – Maret dengan angin yang sangat kencang ke arah Timur dengan gelombang besar berkisar antara 0,93 dan 1,97 m. Pada awal musim pancaroba, pada Bulan April sampai Juni, kisaran gelombang semakin menurun, yaitu antara 0,74 dan 1,88 m. Musim Timur terjadi pada Bulan Juni sampai September dengan angin bertiup ke arah Barat dengan gelombang laut tenang berkisar 1,1 – 1,86 m. Selanjutnya, pada akhir musim Timur dan memasuki pancaroba dimana angin bertiup ke arah Barat kisaran tinggi gelombang yaitu 1,09 – 1,96 m.

Di bagian Timur Pulau Selayar, perairan pantainya relatif dalam. Dataran pantai walaupun ada relatif sempit, hanya sekitar 25 meter atau kurang, kemudian kedalamannya mencapai lebih dari 5 meter. Pada pulau-pulau kecil yang terletak di Laut Flores, seperti Pulau Kayuadi, Pulau Jampea, Pulau Bonerate, dan Pulau Kalatoa, perairan pantainya juga relatif dalam. Hanya pada pulau-pulau yang terbentuk oleh terumbu karang, perairan lautnya relatif dangkal.



6) Tipe Pantai

Pantai-pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya merupakan pantai terbuka, sehingga karakteristik pantainya sangat dipengaruhi oleh arah dan besarnya ombak yang datang ke pantai. Hanya di beberapa tempat di Pulau Selayar merupakan pantai tertutup seperti yang dijumpai di belakang Pulau Pasi. Meskipun sama-sama terbuka, proses- proses yang terjadi di pantai belum tentu sama. Perbedaan proses yang terjadi di pantai disebabkan oleh adanya perbedaan morfologi kawasan pantai, batuan penyusun dan tentunya juga besarnya energi ombak yang datang. Sedangkan, pada beberapa tempat di pulau-pulau kecil merupakan tipe pantai teluk, seperti di Kayuadi, dan Jampea. Pada tipe pantai semacam ini pantainya relatif landai.

7) Tingkat Kecerahan Perairan

Tingkat kecerahan perairan atau tingkat kekeruhan perairan ditentukan oleh jumlah material pada yang tersuspensi. Semakin besar jumlah bahan padat yang tersuspensi menyebabkan cahaya matahari kurang dapat menembus perairan sampai ke tempat yang dalam. Hal ini akan mempengaruhi jumlah organisme yang dapat hidup pada tempat tersebut.

Di sekitar Pulau Selayar pada umumnya jumlah bahan yang tersuspensi relatif lebih besar dibandingkan dengan tempat lainnya. Tingkat kekeruhan berkisar antara 0,005 dan 0,44 ppm. dan kecerahan maksimum rata-rata terjadi mulai kedalaman 10 meter. Sedangkan di pulau-pulau kecil, kandungan bahan tersuspensi pada perairan lautnya relatif lebih rendah. Pulau Bonerate, tingkat kekeruhan sangat rendah antara 0 dan 0,23 ppm. Pulau Kalatoa, kandungan bahan tersuspensi antara 0,19 dan 0,3 ppm.

8) Dinamika Proses Pantai



Pantai merupakan suatu wilayah yang sangat dinamik, karena wilayah ini selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada pantai dapat berupa perubahan dalam waktu yang singkat (pendek), menengah dan lama (panjang). Perubahan dalam waktu pendek merupakan perubahan dalam hitungan harian sampai bulanan, Perubahan dalam waktu menengah terjadi dalam kurun waktu bulanan atau tahunan, sedangkan perubahan dalam waktu panjang merupakan perubahan dalam waktu puluhan sampai jutaan tahun. Dinamika proses pantai sangat terkait dengan proses geomorfik pantai dan proses ini dipengaruhi oleh geomorfologi pantai, kondisi geologi pantai, dan hidrodinamika pantai di daerah tersebut. Termasuk di dalam geomorfologi pantai adalah bentuk garis pantai, dan morfologi pantai. Kondisi geologi yang sangat berpengaruh adalah jenis batuan penyusun dan struktur geologi pantai. Sedangkan, hidrodinamika pantai berperan dalam dinamika pantai adalah sifat ombak, arus, pasang surut dan transpor sedimen.

Dinamika proses pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dinamika proses pantai Pulau Selayar dan pulau-pulau kecil yang termasuk dalam wilayah kabupaten ini. Di Pulau Selayar, dinamika proses pantai bagian Barat berbeda dengan di bagian Timur. Pada Bagian Timur, proses abrasi relatif lebih dominan dibandingkan proses pantai di Bagian Barat. Hal ini ditunjukkan oleh dasar perairan yang relatif terjal.

Dinamika proses pantai pada pulau-pulau kecil relatif sama pada semua bagian pulau. Hal ini terjadi karena pulaunya relatif sangat kecil dibandingkan perairan laut di sekitarnya yang sangat luas. Perbedaan dapat terjadi pada perubahan bentuk garis pantai. Pada garis pantai yang merupakan teluk terjadi proses sedimentasi, sedangkan pada garis pantai yang berupa tanjung,



terjadi proses abrasi. Perbedaan ini mengakibatkan pantai di daerah teluk relatif landai, sedang di daerah tanjung pantainya relatif terjal dan dalam.

2.2.8 Penutupan Lahan Lahan

Penutupan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penutupan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu definisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda. Hal ini mungkin, misalnya melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*).

Tabel 2.4 Penutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar

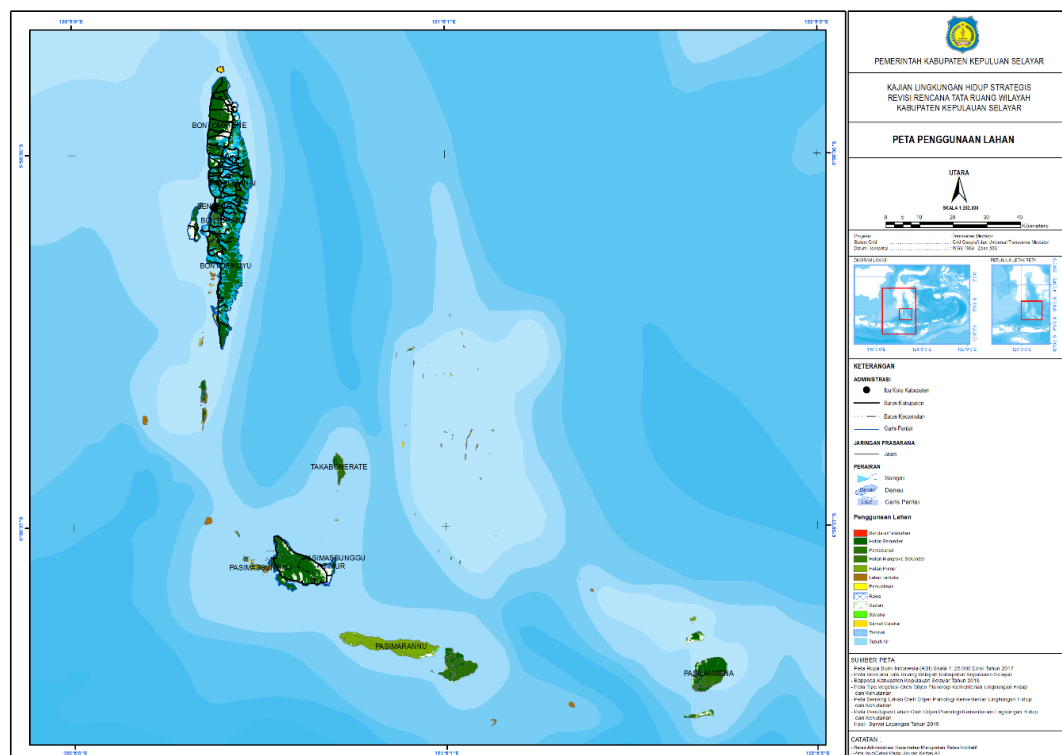
Penutupan Lahan	Luas (Ha)
Bandara/Pelabuhan	38,31
Hutan Mangrove Sekunder	312,80
Hutan Primer	10.575,92
Hutan Sekunder	70.332,79
Lahan Terbuka	2.562,23
Permukiman	1.857,80
Perkebunan	12.623,50
Rawa	87,84
Savana	121,16
Sawah	16.313,12
Semak Belukar	1.849,80
Tambak	784,66
Tubuh Air	4,94



Penutupan Lahan	Luas (Ha)
Grand Total (Ha)	117.445,87

Sumber : BIG, 2019

Berdasarkan hasil olah data penutupan lahan dominan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Hutan Sekunder seluas 70.332,79 Ha, kemudian diikuti Sawah 16.313,12 Ha. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya berupa penggunaan untuk Hutan Sekunder dan Sawah.



Gambar 2.7 Peta Penutupan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.3 Potensi dan Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup tersedia dan memiliki potensi untuk di eksplorasi. Adapun potensi tersebut dengan uraian penjelasan berikut ini adalah:

- a. Fosfat, jenis sumber daya mineral ini adalah fosfat guano yang berasal dari breksi antara batu gamping dan kotoran burung.



Endapan ini antara lain tersebar di bagian Barat dan Utara Pulau Selayar, Pulau Jampea bagian Timur, Pulau Bonerate bagian Tengah dan Pulau Kakabia. Jumlah potensial cadangannya belum teridentifikasi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

- b. Pasir Besi, endapan pasir besi tersingkap di sekitar pantai Pulau Jampea yang diduga merupakan konsentrasi pengendapan mineral besi yang terkandung dalam batuan gunung api yang terdapat di bagian tengah pulau ini. Jenis endapan ini berupa titanomagnetit yang diperlukan bagi industri besi dan baja;
- c. Batu Gamping, penyebarannya meliputi bagian Utara Pulau Selayar, Pulau Pasi, Pulau Kalao dan pulau-pulau lainnya;
- d. Tanah liat (lempung), endapan yang tersebar di Pulau Selayar ini merupakan endapan alluvial. Endapan ini dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri bangunan;
- e. Pasir dan kerikil, terdapat di beberapa aliran sungai di Pulau Selayar dan Pulau Jampea;
- f. Rembesan minyak bumi, ditemukan di wilayah Pariangan Kecamatan Bontosikuyu dengan potensi dan cadangan minyak bumi masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Potensi sumber daya mineral tersebut di atas sebagian telah dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Sistem eksploitasi sumberdaya mineral yang dikembangkan secara tradisional perlu pengawasan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Tumbuhnya industri tersebut terindikasi pada daerah aliran sungai yang dapat berakibat buruk terhadap alur sungai.

2.4 Potensi Ekonomi Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam konteks pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk wilayah pengembangan bagian Selatan yang dengan pusat berada di Kota Makassar, yang diarahkan untuk



pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, aneka industri dasar, perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa perbankan/perusahaan. Berdasarkan potensi wilayah dan prospek pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan yang berbasis kekuatan ekonomi lokal yakni pengembangan wilayah daratan dan maritim.

Hal tersebut terlihat pada banyaknya potensi kelautan yang belum tergarap secara optimal dan pengusaha wilayah daratan diperlukan pengkajian lebih dalam terhadap kecocokan usaha berdasarkan lingkungan alamnya. Salah satu potensi wilayah dengan nilai strategis yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kawasan Taman Laut Taka Bonerate. Status Kawasan Taka Bonerate berawal dari diterapkannya sebagai cagar alam laut pada tahun 1989 berdasarkan SK Menteri kehutanan No. 280/KPTS-II/1992 Tanggal 26 Februari 1992. Setelah itu diperkuat dengan diterapkannya sebagai Taman Nasional Taka Bonerate dengan SK Menteri Kehutanan No. 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 530.765 Ha. Atas dasar potensi tersebut maka pengembangan pariwisata diarahkan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) jenis wisata pulau yang berpusat di Benteng dengan pusat pengembangan sekunder di Takabonerate dan Pamatata. Sistem pengembangan ruang kabupaten harus bertumpu pada potensi alam dan nilai strategis wilayah sehingga pembangunan wilayah dapat berkembang secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pendekatan kewilayahan yang selaras dengan tuntutan dan tantangan ke depan membagi wilayahnya dalam 11 subwilayah (11 kecamatan) yang diidentifikasi sebagai subwilayah pengembangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam kerangka pengembangan kota tersebut di atas, maka pusat pertumbuhan didorong untuk meningkatkan efektivitas fungsi dan peranan kotanya sebagai katalisator pengembangan wilayah. Pembangunan sistem kota harus dihubungkan dengan kawasan andalan sebab hubungan antara sistem kota-kota kawasan andalan mempengaruhi



kota-kota dalam kawasan andalan lainnya. Oleh sebab itu, pengaturan distribusi sistem kota-kota sesuai dengan hirarkinya melalui strategi makro dan mikro membentuk fungsi dan peran masing-masing kota. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan pada masa yang akan datang, menghindari pemusatan kegiatan pada suatu kawasan tertentu dan menghindari kemampuan daya dukung wilayah, upaya peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan pada setiap subwilayah mutlak dilakukan. Besarnya potensi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melihat prospek ke depan, daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan, maka disusun strategi pengembangan kawasan-kawasan fungsional dalam kerangka pengembangan wilayah meliputi:

- a. Pengembangan kawasan industri hilir (depo BBM dan jasa kepelabuhanan) di Kecamatan Bontomatene, meliputi Desa Menara Indah, Pamatata dan Bungaiya.
- b. Pengembangan kawasan agroindustri di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontosikuyu.
- c. Pengembangan kawasan pusat pengembangan dan permukiman di Kecamatan Bontoharu serta pusat kecamatan dan pusat-pusat permukiman di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontoharu yang berlokasi di sepanjang koridor pesisir, serta beberapa pulau-pulau kecil yang terletak di Kecamatan Taka Bonerate, Pasimasunggu, Pasimarannu dan Pasilambena.
- e. Pengembangan kawasan industri kelautan dan industri perahu di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.
- f. Pengembangan kawasan industri pariwisata di Kecamatan Takabonerate, serta beberapa wisata khusus di Kecamatan Bontoharu



dan Bontosikuyu, meliputi Desa Lowa, Appatana dan Desa Lantibongan, maupun wisata pantai yang tersebar di pulau-pulau kecil lainnya

- g. Pengembangan kawasan Bandara Padang di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
- h. Pengembangan kawasan pelabuhan laut di Pamatata, Benteng, Appatana, Patumbukang, Kayuadi, Pulau Jampea, Bonerate dan Kalaotoa.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai gugus kepulauan serta dengan kondisi topografi daratannya yang sangat heterogen terdapat beberapa potensi yang menonjol dan khas yang dapat diidentifikasi:

a. Perikanan Dan Kelautan

Dengan luas wilayah laut 9.146,66 Ha atau 94,68% dari keseluruhan wilayah, serta dengan luasan terumbu karang yang hampir 50% dari perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka potensi perikanan laut sangatlah kaya akan biota laut lainnya. Untuk potensi perikanan tangkap pada umumnya didominasi oleh jenis ikan kerapu, lencam, kakap dan ikan bambangan atau ikan merah, baronang, julung-julung, sunu, tembang, cakalang, tongkol serta ikan cucut.

Sedangkan, daerah penangkapannya terkonsentrasi pada perairan sepanjang pantai pulau Selayar bagian barat, Pulau Pasi dan Pulau Bahuluang. Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal, sehingga angka yang dicapai masih rendah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam sektor perikanan adalah kegiatan perikanan masih dilakukan secara tradisional, terutama kegiatan perikanan tangkap masih menggunakan perahu kecil-menengah. Kegiatan di sektor kelautan dan perikanan yang cukup berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah budidaya laut dan perikanan tangkap.



Kegiatan ini tersebar hampir di seluruh kawasan pesisir dan perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2017 dari sebelas kecamatan yang ada, wilayah yang memiliki sumbangan terbesar dalam produksi hasil laut yaitu Kecamatan Takabonerate dengan produksi sebesar 4.429,40 ton disusul Kec. Bontosikuyu sebesar 3.421,30 ton. Sementara itu, untuk perikanan darat (budidaya) yang berkembang di daerah ini adalah budidaya tambak untuk komoditas seperti udang dan bandeng. Infrastruktur yang telah dibangun antara lain Tempat Pelelangan Ikan tersebar di beberapa kecamatan. Pelabuhan perikanan besar yang telah ada saat ini antara lain PPI Bonehalang, PPI Labuang Beropa, PPI Latoddo.

b. Pariwisata

Beberapa kriteria potensi keindahan alam, sosial, budaya, dan peninggalan sejarah/purbakala banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, variasinya cukup beragam dan spesifik sehingga jika dikemas menjadi ODTW nasional secara terintegrasi dengan ODTW lainnya pada daerah-daerah tujuan wisata manca negara akan memberi keragaman (diversifikasi obyek) yang menarik dan adanya pilihan variasi kunjungan. Untuk kawasan wisata bahari tersebar luas di seluruh Kepulauan Selayar. Potensi wisata bahari di kepulauan ini adalah Keberadaan terumbu karang beserta flora dan faunanya di sekitar perairan Takabonerate. Takabonerate telah dipromosikan sebagai kawasan wisata bahari ke mancanegara. Potensi wisata alam lainnya adalah wisata budaya dan wisata alam. Obyek wisata budaya adalah bagian dari adat masyarakat berupa tari-tarian menyebar antara Pulau Rajuni, Pulau Kayuadi, Pulau Tanajampea dan Pulau Kalotoa. Sedangkan, wisata alam berupa kegiatan yang menjadikan alam sebagai daerah target. Jenis wisata alam berupa pasir putih dan terumbu karang diarahkan pengembangannya di pesisir Selayar dan pada setiap pulau sebelah



timur Pulau Selayar, dari Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu dan Kecamatan Benteng. Kepulauan Takabonerate, Pulau-pulau di Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimarannu.

c. Pertanian

Dari kondisi topografi daratan gugus kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar yang heterogen memberikan berbagai potensi pertanian yang sangat beragam, di antaranya terdapat potensi pertanian khas dan unggulan seperti: komoditas jeruk keprok Selayar dengan cita rasa dan aroma spesifik yang berbeda dengan jeruk di daerah lain dan komoditas kelapa merupakan tanaman yang menjadi panorama alam pulau, juga terdapat potensi vanili yang sedang giat dikembangkan masyarakat dan telah memberikan kontribusi produksi yang cukup signifikan di Sulawesi.

d. Perkebunan

Hasil Produksi tanaman perkebunan yang paling dominan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tanaman kelapa, terutama kelapa dalam. Disamping tanaman tersebut masih ada tanaman yang produksinya cukup besar yaitu tanaman kemiri. Produksi tanaman kelapa dalam pada tahun 2019 sebesar 24.202,01 ton dari luas produksi 18.341,57 Ha, sedangkan untuk kemiri sebesar 2.758,20 ton dari luas produksi 2.009,00 Ha. Selain tanaman tersebut di atas ada juga tanaman lainnya yang tersebar dan produksinya juga dapat membantu perekonomian di daerah ini, yaitu : Kapuk, Kopi Robusta, Cengkeh, Lada, Jambu Mete, Kelapa Hibrida, Pala, Kakao, Vanili, Kenari, Sagu, Asam Jawa, Aren dan Jarak Pagar.

e. Peternakan

Populasi Ternak besar di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Sapi, Kerbau dan Kuda. Pada tahun 2019 populasi ternak besar



mengalami perubahan yaitu sapi Bertambah menjadi 21.823 ekor, kerbau menjadi 4.847 ekor dan kuda bertambah menjadi 4.108 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil dan unggas pada tahun 2019 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, populasi ternak kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar seperti Kambing sebanyak 90.582 ekor dan Domba sebanyak 35 ekor. Sedangkan populasi unggas pada tahun 2019 mengalami perubahan yang cukup besar yaitu ayam ras sebanyak 285.766 ekor, ayam petelur sebanyak 15.897 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 11.030 ekor dan itik sebanyak 7.643 ekor.

f. **Pertambangan dan Industri**

Potensi pertambangan dan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup besar, diantaranya mineral logam dan non logam yaitu Pasir Besi, gamping, lempung, fosfat, pasir, pasir laut, riolit, tanah liat, tanah urug, batu gunung, batu kali, kerikil dan sirtu yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan Potensi Industri cukup bagus pula dikembangkan diantaranya adalah industri perikanan, mengingat wilayah ini adalah merupakan wilayah yang didominasi oleh perairan/laut. Untuk industri besar dimungkinkan ke depan mengingat Pemerintah Daerah dalam proses negosiasi dengan investor untuk pembangunan kilang minyak di wilayah Kecamatan Bontomatene, sedangkan untuk industri sedang salah satunya sudah masuk dalam destinasi perindustrian dari kementerian perindustrian yaitu industri kelapa terpadu.

Pada **Tabel 2.5** berikut disajikan potensi dan kendala pengembangan sektor potensial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.5 Potensi dan Kendala Pengembangan Sektor Potensial

	ASPEK
--	-------

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



BIDANG	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumberdaya Manusia
KELAUTAN	1. Kawasan Laut Dalam <ul style="list-style-type: none"> Selayar dikelilingi laut dalam yang dapat dilayari berbagai ukuran kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki penyeberangan ferry dari Pamatata ke Tanjung Bira 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya industri galangan kapal dan perahu (skala kecil) yang perlu ditingkatkan melalui teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dipertimbangkan pengaruh musim, besarnya ombak, dan kemungkinan adanya palung 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana transportasi di Pamatata perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya industri pandai besi (skala kecil) 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja pandai besi perlu ditingkatkan keterampilannya
	2. Kawasan pantai <ul style="list-style-type: none"> Adanya pantai yang strategis di Benteng 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelayaran wisata yang dikelola Spice Island Explorer 		
	<ul style="list-style-type: none"> Perluantisipasi dan rencana penataan dan pemantauan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelabuhan rakyat di Jampea dan Bonerate (kini masih skala kecil) Ada jalur PELNI dari Makassar, Bantaeng, Benteng Selayar, Jampea, Pasilambena. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jalan propinsi (90 km) dengan kondisi mantap, menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km) Sarana dan prasarana transportasi masih berorientasi ke utara 		

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



BIDANG	ASPEK			
	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumberdaya Manusia
PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan taman laut dan terumbu karang di 7 kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Ada penyeberangan ferry dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira (perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi pengembangan wisata) 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas masih terbatas pada 5 buah hotel dan 1 museum yg semuanya ada di Benteng 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar pen-duduk ber-pendidikan SD dan SLTP
	<ul style="list-style-type: none"> Taman laut di Takabonerate memiliki keunggulan kompetitif berskala international 	<ul style="list-style-type: none"> Ada penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu penyediaan/ pengembangan fasilitas penginapan, restoran, toko cenderamata, tempat penyewaan perahu, alat ski, dan alat selam 	<ul style="list-style-type: none"> Struktur penduduk didominasi golongan usia muda dan anak-anak, yang rentan terhadap pengaruh budaya luar
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dipertimbangkan pengaruh musim dan iklim untuk penjadwalan kegiatan wisata bahari 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelayaran wisata yang dikelola Spice Island Explorer 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu penyediaan fasilitas pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, dan pusat pelayanan informasi kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu upaya peningkatan mutu SDM (bahasa, pengetahuan, ketrampilan, dan manajemen pariwisata)
	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya peraturan perlindungan lingkungan sebagai antisipasi terhadap pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Ada jalan provinsi (90 km) yg menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng Patori (50 km) 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ditekankan dan diupayakan penanaman dan penguatan nilai, norma agama, dan budaya timur

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



BIDANG	ASPEK			
	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumberdaya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pantai laut dan pasir putih di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan transportasi regional belum mencapai seluruh wilayah (wilayah selatan relatif belum terlayani optimal) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hutan wisata di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu pembukaan aksesibilitas ke luar Kabupaten Kepulauan Selayar dan arah selatan 		
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya air terjun di pegunungan di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu 			
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya taman buru di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Pasimasunggu 			
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya sumber air panas di desa Bontobulaeng dan Maminasa (Pasimasunggu) 			
PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki berbagai jenis produk penangkapan ikan laut, budidaya pantai (rumput laut) dan ikan tambak yang tersebar di 7 kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penyeberangan ferry dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya tempat pelelangan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat penguasaan IPTEK perikanan para nelayan masih kurang /tradisional
	<ul style="list-style-type: none"> Luasnya lahan budidaya tambak, sebagian besar di Bontoharu, Bontosikuyu dan Pasimasunggu 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya tambak ikan yang tersebar di seluruh Kecamatan 	

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



BIDANG	ASPEK			
	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumberdaya Manusia
		<ul style="list-style-type: none"> Ada pelabuhan rakyat (untuk nelayan) di Jampea dan Bonerate, walau berskala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya industri rumah tangga untuk pengeringan hasil laut (ikan kering, teripang, cumi kering, rumput laut, sirip ekor hiu) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Jalan propinsi (90 km) dengan kondisi mantap, menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km) 		
		<ul style="list-style-type: none"> Sarana transportasi untuk penangkapan ikan masih tradisional 		

BIDANG	ASPEK			
	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumber daya Manusia
		<ul style="list-style-type: none"> Ada rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Perlu aksesibilitas ke arah selatan (ke luar Sulawesi) untuk pemasaran 		
PERTANIAN	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas andalan subsektor tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, padi 	<ul style="list-style-type: none"> Ada penyeberangan ferry dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kantor Dinas Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu upaya pembinaan, pelatihan bidang pertanian (karena umumnya pendidikan SD-SLTP)

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



BIDANG	ASPEK			
	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumber daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> Masih tersedia lahan (19.831 ha) untuk perluasan 	<ul style="list-style-type: none"> Ada penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya koperasi unit desa 	
	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah-buahan, sayuran 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan propinsi (90 km) dengan kondisi mantap, menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km) 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi alami untuk irigasi terbatas, sehingga pengembangan pertanian lebih diarahkan pada jagung yang tak butuh air banyak 	
	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas yang berpotensi besar untuk subsektor perkebunan adalah kelapa dalam (coconut), kemiri, pala, jambu mete 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan kuantitas moda transpor 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya industri kecil dan rumah tangga pengolah hasil pertanian lokal (industri minyak goreng, pengupasan/pembersihan biji-bijian, kopra, krupuk, gula merah) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan masih luas 			
	<ul style="list-style-type: none"> Produk potensial dari subsektor kehutanan baru berupa rotan 			
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hutan produksi (7.250 ha) dan hutan semak belukar (5.869 ha) memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi komoditas lainnya 			



BIDANG	ASPEK			
	Fisik Alami	Sarana dan Prasarana Transportasi	Fasilitas Pendukung	Sumber daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komoditas potensial untuk subsektor peternakan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik 			

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012

2.5 Potensi Bencana Alam

a. Rawan Abrasi Pantai

Kabupaten Kepulauan Selayar terutama lokasi-lokasi yang rendah di sepanjang pantai sangat rawan terhadap abrasi, karena adanya pasang surut air laut serta gelombang yang terjadi sepanjang tahun.

b. Rawan Gempa Bumi

Wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada jalur rawan gempa sehingga akan rawan terjadi tsunami apabila kekuatan gempa di atas 5,0 SR kurang dari 30 km di dasar laut. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan rawan gempa. Beberapa faktor yang menyebabkan kawasan ini rawan gempa adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya potensi gempa yang berpusat di laut dan data menunjukkan bahwa mayoritas gempa bumi di Indonesia berpusat di laut.
- 2) Pembangkit terjadinya gempa adalah patahan vertikal. Beberapa penelitian menunjukkan pertemuan beberapa lempeng Asia dan Pasifik merupakan daerah rawan gempa.

c. Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Pasang

Kabupaten Kepulauan Selayar karena berada di antara pulau Jawa dan Sulawesi sehingga menjadi rawan terhadap angin kencang yang datang dari laut. Seiring dengan hal tersebut potensi



Gelombang Pasang yang datang disertai angin kencang cukup tinggi pada saat musim barat, sepanjang pesisir pantai barat pulau dan Kepulauan Selayar.

d. Rawan Bencana Kenaikan Paras Air Laut/Abrasi Pantai

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana kondisi wilayahnya sebagian besar berada pada dataran rendah dekat pantai tentunya tidak terlepas dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kenaikan muka air laut. Ekosistem pesisir yang bernilai penting baik secara ekonomi maupun ekologis akan mengalami kerusakan, terjadinya intrusi air asin, terganggunya air tanah dan penyediaan air bersih. Infrastruktur dan aset-aset sosial budaya dan ekonomi penting di wilayah pantai akan mengalami gangguan dan kerusakan. Pantai-pantai yang ada di bagian barat Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengalami laju abrasi yang tinggi bahkan beberapa dataran rendah di wilayah pantai akan tergenang.

2.6 Kependudukan

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Se jauh ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

2.6.1 Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah



penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), dan adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan statistik dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 tahun terakhir.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Pertumbuhan penduduk dapat diukur dari data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya, minimal dalam series lima tahun sebelumnya. Berdasarkan Data yang ada pada Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar ada sebanyak 128.744 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 131.605 jiwa pada tahun 2017, dan seterusnya meningkat hingga pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 135.624 jiwa. Perkembangan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis	Laju Pertumbuhan
	Laki-	Perempuan			



	Laki			Kelamin	
2015	61.813	66.931	128.744	92,35	0,008
2016	62.590	67.609	130.199	92,58	0,007
2017	63.292	68.313	131.605	93	0,006
2018	63.968	69.035	133.003	92,61	0,004
2019	64.672	69.608	134.280	92,91	0
2020	65.424	70.200	135.624	93,20	1,0

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2020

2.6.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk yang didasarkan pada batasan administrasi wilayah yang bersangkutan. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

Apabila dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antara kecamatan dengan penduduk terbanyak dan kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari persebaran jumlah penduduk yang ada pada **Tabel 2.7** dapat diketahui bahwa Kecamatan Benteng merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 26.701 jiwa. Sementara itu Kecamatan Buki merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 6.463 jiwa.

Tabel 2.7 Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kel/Desa	Penduduk		Jumlah	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
				Laki-Laki	Perempuan		
1.	Pasimarannu	195,33	8	4.364	5.003	9.367	47,95
2.	Pasilambena	114,88	6	3.779	4.016	7.795	67,85
3.	Pasimasunggu	131,8	7	4.077	4.508	8.585	65,14
4.	Takabonerate	49,3	6	6.889	7.071	13.960	283,16
5.	Pasimasunggu Timur	67,14	9	3.599	3.978	7.577	112,85
6.	Bontosikuyu	248,22	12	7.490	7.866	15.356	61,86
7.	Bontoharu	128,12	8	6.682	7.001	13.683	106,79
8.	Benteng	24,63	10	12.892	13.809	26.701	1084,08



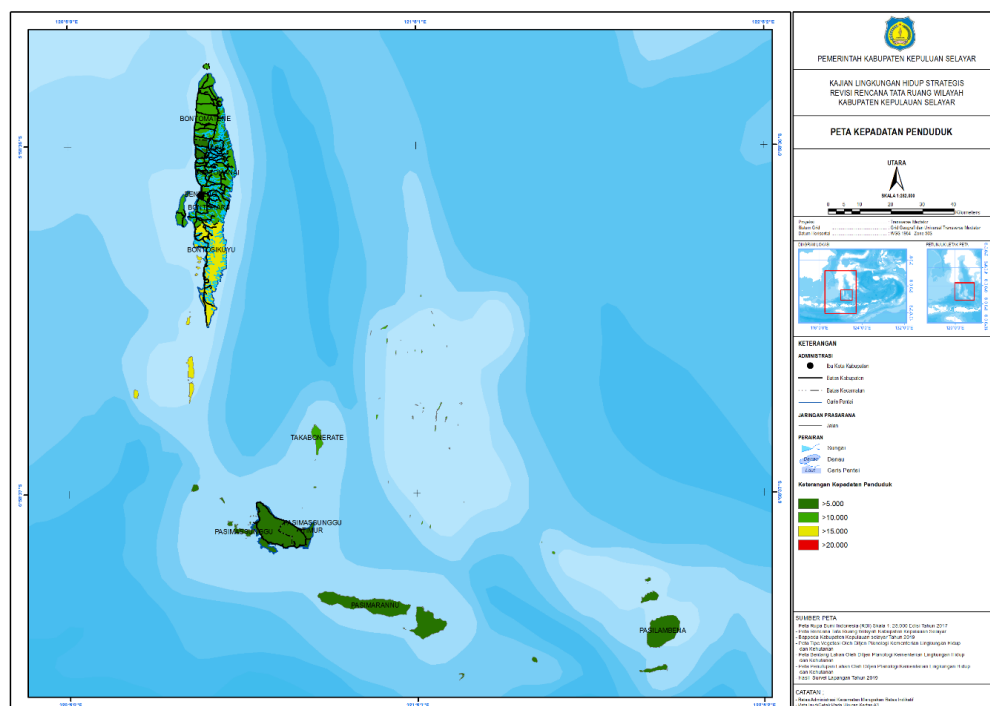
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kel/Desa	Penduduk		Jumlah	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
				Laki-Laki	Perempuan		
9.	Bontomanai	136,42	3	6.367	6.522	12.889	94,48
10.	Bontomatene	193,05	12	6.190	7.058	13.248	68,62
11.	Buki	68,14	7	3.095	3.368	6.463	94,84
Total		1.357,03	88	65.424	70.200	135.624	99,94

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2020

2.6.3 Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, pada umumnya angka kelahiran anak perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Namun demikian angka kematian perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dan perbedaannya semakin tinggi menurut kelompok umur, sehingga keadaan inilah yang menyebabkan jumlah perempuan pada umur muda lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dan sebaliknya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak pada kelompok umur sedang dan tua.

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 untuk laki-laki berjumlah 65.424 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 70.200 jiwa.



Gambar 2.2 Peta Kepadatan Penduduk

Dari angka tersebut dapat diperoleh rasio jenis kelamin sebesar 93.20% dengan membagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin Sex		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Pasimarannu	4.364	5.003	9.367	87,23
2.	Pasilambena	3.779	4.016	7.795	94,10
3.	Pasimasunggu	4.077	4.508	8.585	90,44
4.	Takabonerate	6.889	7.071	13.960	97,43
5.	Pasimasunggu Timur	3.599	3.978	7.577	90,47
6.	Bontosikuyu	7.490	7.866	15.356	95,22
7.	Bontoharu	6.682	7.001	13.683	95,44
8.	Benteng	12.892	13.809	26.701	93,36
9.	Bontomanai	6.367	6.522	12.889	97,62
10.	Bontomatene	6.190	7.058	13.248	87,70
11.	Buki	3.095	3.368	6.463	91,89
TOTAL		65.424	70.200	135.624	93,20

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2020



2.6.4 Komposisi Kependudukan

2.6.4.1 Struktur Usia

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat muda (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 81.493 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	7.032	6.762	13,794
5-9	6.981	6.573	13.554
10-14	5.571	5.261	10.832
15-19	4.735	4.478	9.213
19-24	4.653	4.923	9.576
25-29	5.069	5.541	10.610
30-34	4.496	4.835	9.331
35-39	4.225	4.774	8.999
40-44	4.182	4.884	9.066
45-49	4.419	4.774	9.193
50-54	3.980	4.634	8.614
55-59	3.216	3.675	6.891
60-64	2.412	3.005	5.417
65-69	1.822	2.111	3.933
70-74	1.282	1.813	3.095
75+	1.349	2.157	3.506



Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah	65.424	70.200	135.624

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2020

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.

Berdasarkan data tahun 2020, penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh kelompok umur 0-4 tahun, kelompok produktif yang pada umumnya merupakan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah. Terlihat pula bahwa besaran jumlah penduduk terjadi pada usia 5-19 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih besar sehingga diharapkan menjadi tulang punggung pelaksana pembangunan yang berkualitas di masa-masa yang akan datang.

2.6.4.2 Struktur Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan dapat dibedakan atas angkatan kerja atau usia kerja dan pencari kerja. Penduduk angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yaitu usia 15-54 tahun, sedangkan pencari kerja penduduk angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok



angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Tabel 2.10 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	TPAK (%)	66,16	64,81
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,88	1,17
3.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	98,12	98,83

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2019 & 2020

Tabel 2.10 menjelaskan, dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan dari 66,16% pada tahun 2018 menjadi 64,81% pada tahun 2019. Menurut BPS (2020), pada tahun 2018 angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 101.673 orang, terdiri dari 62.538 orang bekerja dan menganggur 1.201 orang. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja 101.173 orang yang terdiri dari bekerja 62.702 orang dan menganggur 743 orang.

Pasar tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar tergambar dari persentase penduduk usia kerja yang bekerja, hal ini ditunjukkan melalui angka kesempatan kerja yang meningkat dari 98,12% pada tahun 2018 menjadi 98,83% pada tahun 2019. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,71%, yakni dari 1,88% pada tahun 2018 menjadi 1,17% di tahun 2019.



Tabel 2.11 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019

Jenis Kegiatan Utama	Tahun 2018		Jumlah	Tahun 2019		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	38.659	25.090	63.749	37.614	25.830	63.444
Bekerja	37.751	24.797	62.548	37.067	25.635	62.702
Pengangguran Terbuka	908	953	1.201	547	195	742
Bukan Angkatan Kerja	6.587	26.020	32.607	8.326	26.125	34.451
Sekolah	3.109	3.842	6.951	3.172	2.871	6.043
Mengurus Rumah Tangga	407	20.163	20.570	1.375	20.567	21.942
Lainnya	3.071	2.015	5.086	3.779	2.687	6.466
Jumlah	45.246	51.110	96.356	45.940	51.955	97.895

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2019 & 2020

Tabel 2.12 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar 2018-2019

Status Pekerjaan Utama	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Lain	12.469	8.298	20.767	12.495	6.866	19.361
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	6.070	3.008	9.078	5.348	2.043	7.391
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3.478	532	4.010	2.987	382	3.369
Buruh/Karyawan/Pegawai	13.132	8.990	22.122	12.409	11.252	23.661
Pekerja Bebas di Non Pertanian	634	275	909	2.129	852	2.981
Pekerja Tak Dibayar	1.968	3.694	5.662	1.699	4.240	5.939
Jumlah	37.751	24.797	62.548	37.067	25.635	62.702

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 2019 & 2020

Tabel 2.11 menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar proyeksi 2018-2019 tingkat ketenagakerjaan lebih banyak yang bekerja dibandingkan pengangguran. Umumnya penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar status pekerjaan utamanya dominan melakukan usaha sendiri tanpa terikat instansi, lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.12**.



2.6.5 Pendidikan

2.6.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut tabel yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2019.

Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2018	2019
SD/MI	108,41	108,75
SMP/MTs	94,42	89,42
SMA/SMK/MA	61,06	76,84

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020

Tabel 2.13 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SD/MI di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 108,41% menurun menjadi 108,75% pada tahun 2019. Sementara untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/Mts adalah 94,42% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 89,42%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA adalah 61,06% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 76,84%.



2.6.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), Angka partisipasi murni (APM) dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. %. Berikut tabel yang menunjukkan Angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2019.

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2019

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	2018	2019
SD/MI	99,63	99,20
SMP/MTs	80,55	79,68
SMA/SMK/MA	50,52	49,60

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020

Tabel 2.14 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan SD/MI di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 99,63% menurun menjadi 99,20% pada tahun 2019. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2018 adalah 80,55% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 79,68%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA MTs tahun 2018 adalah 50,52% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 49,60%.

2.6.5.3 Budaya Keagamaan dan Adat Istiadat

Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenitasnya kultur



budaya pada suatu daerah. Terjadinya dinamika perkembangan akan tidak lagi memandang kultur budaya dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat (norma etika) yang berlaku, akan tetapi tergantikan oleh sifat individualistis dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan. Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri.

Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas suatu komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pembauran nilai religius keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan kekeluargaan.

Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis-Makassar. Keragaman kultur sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Bugis-Makassar. Perbedaan dalam hal budaya umumnya terletak pada dialek, dan sistem upacara adat dan ritual keagamaan, dan bentuk bangunan.

2.7 Perekonomian Daerah

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari perkembangan perputaran ekonomi masyarakat yang ada di dalam Kabupaten Kepulauan Selayar dan bahan pokok kebutuhan masyarakat keluar dari daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



2.7.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s/d 2019 atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Nilai Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.913,85	2.161,14	2.394,85	2.645,71	2.878,09
2	Pertambangan dan Penggalian	40,30	47,59	49,64	53,84	56,67
3	Industri Pengolahan	108,40	121,41	135,96	142,46	177,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	3,40	4,52	4,97	5,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,20	4,51	4,97	5,41	6,12
6	Konstruksi	810,69	956,22	1.093,82	1.261,88	1.370,81
7	Perdagangan Besar dan Enceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	301,65	350,45	389,42	440,51	495,76
8	Transportasi dan Pergudangan	99,03	110,68	119,71	134,51	156,45



No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	9,30	10,45	120,89	15,73
10	Informasi dan Komunikasi	85,96	95,93	108,38	120,89	143,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	50,54	59,69	65,71	73,78	81,80
12	Real Estat	60,02	66,82	73,84	79,41	84,00
13	Jasa Perusahaan	0,69	0,80	0,91	1,04	1,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	363,86	336,02	364,79	436,99	475,38
15	Jasa Pendidikan	214,45	245,79	294,46	314,60	340,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,69	76,59	88,86	100,60	119,45
17	Jasa Lainnya	16,89	18,75	22,92	27,93	34,39
Produk Domestik Bruto		4.148,37	4.666,09	5.223,20	5.857,28	6.442,68

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020

Sementara Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s/d 2019 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Nilai Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.188,49	1.296,94	1.390,77	1.501,93	1.615,70
2	Pertambangan dan Penggalian	22,16	24,42	26,44	27,94	29,13
3	Industri Pengolahan	84,96	90,95	97,78	99,65	118,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,87	4,32	4,58	4,90	5,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,57	3,78	4,11	4,44	4,85
6	Konstruksi	473,44	521,08	565,62	624,29	648,26

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	237,82	261,44	273,41	297,72	324,34
8	Transportasi dan Pergudangan	62,60	68,41	75,39	83,22	95,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,98	6,53	7,16	8,54	10,07
10	Informasi dan Komunikasi	84,88	92,46	101,00	110,41	125,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,68	36,49	37,98	40,39	42,87
12	Real Estat	46,44	49,92	54,01	56,27	58,43
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,49	0,53	0,58	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	255,03	227,79	240,29	278,14	295,64
15	Jasa Pendidikan	161,67	173,13	193,69	202,32	218,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,94	52,89	59,38	64,80	71,61
17	Jasa Lainnya	12,43	13,69	15,23	17,14	20,88
Produk Domestik Bruto		2.724,40	2.924,72	3.147,39	3.422,67	3.684,74

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 sampai dengan 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana selama periode tersebut berdasarkan data PDRB harga berlaku tahun dasar 2010 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp 1.398.766.000.000, - terhadap ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya yaitu sektor Konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar **Rp. 471.850.000.000, -**. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor



Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode 2015-2019 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp. 4.150.000.000, - terhadap ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.7.2 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 6,4 triliun rupiah dengan kontribusi peranan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 44,67%. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada tahun 2019, nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga konstan mencapai 3,68 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 3,42 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,66 %, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 8,75 %. Pertumbuhan ekonomi selama 2019 mengalami perlambatan disebabkan melambatnya perekonomian pada beberapa lapangan usaha utama seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya produksi pertanian akibat



kemarau, menurunnya kegiatan konstruksi pemerintah dan belanja pegawai yang tidak lagi meningkat signifikan karena adanya TPP seperti pada tahun 2018.

2.7.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar 31,86 juta rupiah. Kemudian secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 47.50 juta rupiah. Selanjutnya PDRB Perkapita Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 PDRB Perkapita Tahun 2015-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Nilai PDRB	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB	4.148,37	4.666,09	5.223,20	5.857,28	6.442,68
ADHK	2.724,40	2.924,72	3.147,39	3.422,67	3.684,74
PDRB per Kapita					
ADHB	31.861,76	35.455,23	39.271,29	43.619,88	47.503,96
ADHK	20.924,88	22.223,44	23.664,04	25.489,05	27.168,78
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	8,83	7,35	7,61	8,75	7,66
Jumlah Penduduk	130.199	131.605	133.003	134.280	135.624
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,13	1,08	1,06	0,96	1,00

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020



2.7.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019:

Tabel 2.18 Data Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	16.90	17.21	17.62	17.59	17.36
persentase Penduduk Miskin	12,94	13,11	13,28	13,13	12,83
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	286.032	296.540	310.978	348.608	370.380

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020

Pada kurun 2015-2019, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 16.90 jiwa (12.94%), pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 17.21 jiwa (13,11%), pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 17.62 jiwa (13,28%). Sedangkan pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar 17.59 jiwa (13,13%) dan pada tahun 2019 angka kemiskinan kembali ditekan turun



sebesar 17.36 jiwa (12,83%) Penurunan merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang pro program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin, dan beberapa program lainnya. Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2019 garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 370.380, - meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp. 348.608, -. Kabupaten Kepulauan Selayar, pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah.

2.7.5 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan,



kesehatan dan komponen daya beli. Berikut tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2019:

Tabel 2.19 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar			
		2016	2017	2018	2019
1	Kesehatan	-	-	-	-
	a. Angka Harapan Hidup	67,76	67,82	68,03	68,34
	b. Indeks Kesehatan	73,48	73,57	73,89	74,37
2	Pendidikan	-	-	-	-
	a. Angka Harapan Lama Sekolah	12,44	12,45	12,46	12,48
	b. Rata-Rata Lama Sekolah	7,17	7,14	7,40	7,63
	c. Indeks Pendidikan	58,46	58,52	59,28	60,10
3	Hidup Layak	-	-	-	-
	a. Paritas Daya Beli (Ribuan)	8.123	8.436	8.666	9.028
	b. Indeks Daya Beli	64,78	64,94	65,76	67,01
IPM		64,95	65,39	66,04	66,91

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas kenaikan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2016-2019 sebesar 1,96 poin. Pada tahun 2019 angka pengeluaran perkapita sebesar Rp 9.028.000,- sedangkan rata-rata lama sekolah 7,63 tahun, harapan lama sekolah 12,48 tahun, dan angka harapan hidup selama 68,34 tahun.

Angka capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Kenaikan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2016-2019 sebesar 1,96 poin. Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2016 AHH sebesar 67,76 tahun meningkat pada tahun 2018 sebesar 68,03 tahun. Rata-rata lama Sekolah pada tahun 2016 sebesar 7,17 tahun meningkat pada tahun 2019 sebesar 7,63 tahun. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita, pada tahun 2016 sebesar



Rp.8.123.000, - mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp.9.028.000, -. Jika dibandingkan capaian IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan maka pada tahun 2019 posisi IPM Kabupaten Kepulauan Selayar menempati peringkat 22 dari 24 Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang mengalami perubahan sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat masuk 10 besar peraih IPM terbaik, mengingat poin IPM Kab/Kota relatif perbedaannya kecil.

2.8 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

2.8.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001:262). Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern}} \times 100$$

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta



pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)".

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010:77).

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 2.20 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya sendiri, selain itu pula mampu bersaing secara sehat dengan Kabupaten lainnya dalam mencapai cita-cita otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan.

Tabel 2.21 Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern	Tahun 2019 (Rp)	PAD (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan			
A	Dana Perimbangan	828.217.727.831,00	63.692.350.911,00	3,71%	Instruktif			
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	21.870.838.000,00						
2.	Dana Bagi Hasil bukan pajak	5.388.498.847,00						
2	Dana Alokasi Umum	580.780.803.000,00						
3	Dana Alokasi Khusus	232.128.162.002,00						
B	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	19.284.920.000,00						
C	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	25.622.918.867,00						
D	Bantuan Keuangan	3.150.871.200,00						
Total		1.716.444.739.747,00				63.692.350.911,00	3,71%	Instruktif

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020



Hasil Rasio Kemandirian dapat diketahui dengan menggunakan Rumus, yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan Total Pendapatan Dari Pihak Ekstern dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat, seperti yang bisa kita lihat pada tabel diatas, dimana Rasio kemandirian pada tahun 2019 adalah 3,71 % ini menunjukkan pola hubungan Rasio Kemandirian yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 adalah Instrukturif (Sangat Rendah). Hasil tersebut menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar belum mampu membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber PAD.

2.8.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Merupakan cara yang digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah artinya dengan menghitung derajat desentralisasi maka dapat diketahui atau diukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dalam mengolah PAD. Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100$$

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa: "Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:



Menurut Bisma (2010:78) mengatakan bahwa: “Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.22 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

persentase PAD Tabel Terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78).

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengolah pendapatan asli daerah (PAD)-nya. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 2.23 Analisis Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan
63.692.350.911,00	1.716.444.739.747,00	3,71%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2020



Tabel diatas menunjukkan bagaimana pola perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020, perhitungan dengan menggunakan Rumus, dimana Pendapatan Asli Daerah dibagikan dengan Total Penerimaan Daerah dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat seperti yang bisa kita lihat pada tabel diatas. Dimana derajat desentralisasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 3,71%. Kontribusi PAD belum mampu membiayai belanja pemerintah dikarenakan pendapatan daerah masih bergantung dengan Dana perimbangan dan pendapatan yang sah lainnya.

2.8.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.799.957.861.000, - dan terealisasi sebesar Rp. 1.822.382.834.382, - atau 98,77%, dengan rincian:

Tabel 2.24 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.524.920.000,00	63.692.350.911,00	89,05
	Hasil Pajak Daerah	6.837.500.000,00	9.357.488.233,00	136,86
	Hasil Retribusi Daerah	2.042.500.000,00	1.734.268.155,00	84,91
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	49.603.100.000,00	43.105.192.254,00	115,07
2	Dana Perimbangan	837.960.298.000,00	828.217.727.831,00	98,83
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.477.898.000,00	15.308.761.929,00	120,70
	Dana Alokasi Umum	580.780.803.000,00	580.780.803.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	238.701.597.000,00	232.128.162.002,00	97,24
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	20.612.000.000,00	19.284.290.000,00	93,56
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	20.690.573.000,00	25.622.918.867,00	95,99
4	Bantuan Keuangan	6.726.672.000,00	3.150.871.200,00	46,84
5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	141.515.496.000,00	142.895.496.000,00	99,03
Total Pendapatan Daerah		1.799.957.861.000,00	1.822.382.834.382,00	98,77

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Kepulauan Selayar 2020



2.8.4 Permasalahan dan Solusi

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 masih diperhadapkan pada masalahmasalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Regulasi ini menggunakan sistem closed list yaitu telah menetapkan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan penambahan objek pajak dan objek retribusi selain dari apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah sulit untuk melakukan ekstensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih perlu terus ditingkatkan, sistem jemput bola yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya sukses meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Animo masyarakat kita untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah masih perlu terus ditingkatkan, sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat akan lebih diperluas cakupannya.
- d. Faktor budaya masyarakat kita yang cenderung memiliki keinginan untuk free rider akan dikurangi melalui penegakan perda yang ada.
- e. PBB-P2 yang telah di daerahkan pada Tahun 2014 yang potensinya masih rendah dibanding penerimaan bagi hasil sebelumnya dari Pemerintah Pusat sehingga perlu dikaji potensinya dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
- f. Pendapatan daerah yang bersumber dari APBN atau dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



Untuk mengatasi masalah tersebut solusinya adalah dengan melakukan perbaikan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Daerah, Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan regulasi baru tentang pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kualitas SDM pengelola pendapatan dan melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pengelola pendapatan, dan optimalisasi pengelolaan obyek pendapatan.

2.9 Kondisi Keuangan daerah

Gambaran keuangan daerah menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah terakhir. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, kerangka pendanaan, dan sumber pendanaan pembangunan lainnya. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir sebagai *existing condition*, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun yang akan datang.

2.9.1 Pendapatan Daerah

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan perkembangan neraca daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah serta perkembangan pembiayaan daerah



Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020, sebagai berikut.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Gambar 2.7 Grafik Komposisi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa angka ketergantungan fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar masih relatif tinggi. Hal ini tercermin dari proporsi pendapatan transfer yang mencapai kisaran 89,27 persen di tahun 2016 hingga 82,47 persen di tahun 2020. Pada sisi lain perkembangan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2016 kontribusi PAD sebesar 4,93 persen dan merupakan tahun dengan PAD terendah, kemudian meningkat tajam di tahun 2017 sebesar 8,60 persen, menurun di tahun 2018 menjadi 6,12 persen, kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 7,31 persen, lalu turun



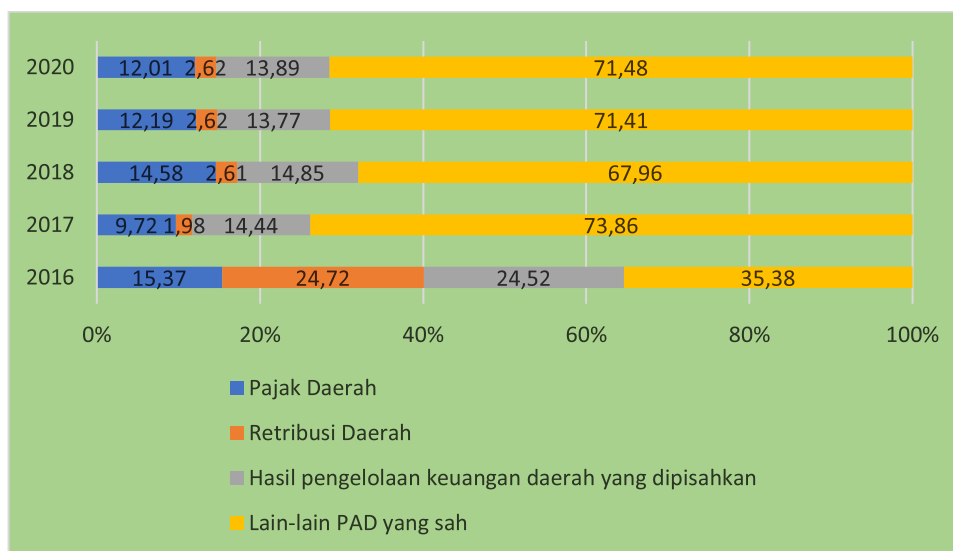
kembali di tahun 2020 menjadi 6,74 persen. Kinerja PAD yang masih rendah sebagai unsur pendapatan yang fundamental ini merupakan hal yang harus dicermati, mengingat PAD merupakan penopang utama kemandirian pembiayaan daerah.

Tabel 2.25 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
(1)	(2)	2016	2017	2018	2019	2020	(8)
1.	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	43,167,309,586	77,300,086,267	63,941,473,429	73,170,334,485	66,359,401,904	16.73
1.1.1	Pajak Daerah	6,635,495,792	7,512,613,362	9,325,798,483	8,919,725,943	7,963,533,659	5.57
1.1.2	Retribusi Daerah	10,672,596,122	1,527,406,655	1,668,715,105	1,919,871,020	1,735,588,105	(17.75)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,584,859,991	11,164,786,664	9,492,702,269	10,078,930,064	9,219,514,000	(2.96)
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15,274,357,681	57,095,279,585	43,454,257,572	52,251,807,458	47,440,766,140	65.24
1.2	Dana Perimbangan	751,553,019,395	709,530,394,275	828,217,727,831	784,863,362,311	760,088,689,963	0.69
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	21,649,329,164	13,908,386,187	15,308,762,829	11,997,709,967	15,606,065,342	(4.31)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	535,836,163,000	531,175,255,000	580,780,803,000	600,422,533,000	565,134,101,000	1.49
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	194,067,527,231	164,446,753,088	232,128,162,002	172,443,119,344	179,348,523,621	1.05
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81,116,612,120	111,751,040,540	152,264,018,067	142,416,342,059	158,466,275,466	19.71
1.3.1	Hibah	-	15,000,000,000	690,000,000	-	674,000,000	(97.70)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	23,958,749,370	26,850,357,340	25,622,918,867	34,096,963,259	30,697,311,466	7.65
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	52,042,480,000	22,245,960,000	36,297,259,000	2.95
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,310,877,750	5,191,299,200	3,150,871,200	3,851,064,800	6,264,748,000	6.96
1.3.6	Dana Desa	50,846,985,000	64,709,384,000	70,757,748,000	82,222,354,000	84,532,957,000	13.91
JUMLAH PENDAPATAN		875,836,941,101	898,581,521,082	1,044,423,219,327	1,000,450,038,855	984,914,367,333	3.27



Perkembangan pendapatan secara detail disajikan pada Tabel 2.25. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.25. diketahui bahwa peningkatan PAD tersebut di atas ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari dua komponen utama yaitu sektor pajak daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu masing-masing sebesar 5,57 persen dan 65,23 persen rata-rata per tahun. Sementara, sumber PAD dari sektor retribusi daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -17,75 persen dan dari sektor hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tumbuh negatif sebesar -2,96 persen rata-rata per tahun. Pada tahun 2016, PAD Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai Rp.43,17 miliar, yang selanjutnya mengalami peningkatan menjadi Rp.66,36 miliar pada tahun 2020. PAD Kabupaten Kepulauan Selayar berkontribusi sebesar 4,93 persen di tahun 2016 dan kontribusinya terus mengalami peningkatan hingga mampu mencapai 6,74 persen di tahun 2020. Komposisi pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Grafik berikut.



Gambar 2.8 Grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

Dana perimbangan sebagai komponen kedua pendapatan daerah, nilainya ditentukan oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Nilai dana perimbangan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara (APBN). Besarnya dana perimbangan mengindikasikan besarnya angka ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dana perimbangan memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan sebesar 85,81 persen di tahun 2016 dan hingga tahun 2020 menurun menjadi 77,17 persen. Dana perimbangan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,69 persen selama periode 2016-2020. Secara nominal, pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp.751,56 miliar pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar Rp.760,09 miliar pada tahun 2020. Melalui peningkatan capaian PAD dan langkah efisiensi sisi belanja daerah diharapkan kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkat dengan proporsional secara bertahap.

Peningkatan pendapatan transfer ditopang oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,49 persen rata-rata per tahun. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata peningkatan per tahun sebesar 1,05 persen selama periode 2016-2020. Perolehan pendapatan yang bersumber dari DAU dari Rp.535,84 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.565,13 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, DAK mengalami penurunan dari sebesar Rp.194,07 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.179,35 miliar pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 1,05 persen rata-rata per tahun.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai komponen ketiga pendapatan daerah juga memiliki perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016, komponen ini memiliki kontribusi sebesar 9,26 persen dan capaian sebesar Rp 81,12 miliar, mengalami peningkatan tahun 2017 menjadi 12,44 persen dan capaian sebesar Rp.111,75 miliar, kembali naik di tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 14,58 persen dan capaian hingga Rp152,26 miliar, menurun di tahun 2019 dengan besaran kontribusi 14,24 persen dan capaian



142,42 miliar, sedangkan di tahun 2020 kembali naik menjadi 16,09 persen dan capaian sebesar Rp.158,47 miliar.

Struktur pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komposisi yang kurang proporsional, dimana peran PAD dalam pembangunan masih sangat kecil dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat kemandirian Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah dan sangat bergantung terhadap pemerintah pusat.

2.9.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang memiliki sifat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah. Belanja Daerah juga merupakan komitmen dan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan administratif dan seluruh aspek pembangunan kepada publik dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat melalui alokasi dana dalam APBD yang berkualitas. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini. Belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif karena adanya penyesuaian dengan tingkat inflasi dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.26. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	BELANJA DAERAH						
2.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	420,070,471,665	449,103,663,142	468,414,818,545	522,094,315,960	565,199,066,706	7.73
2.1.1	Belanja Pegawai	305,142,646,709	279,578,969,730	322,253,152,475	358,602,299,599	348,018,683,522	3.80
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi		681,336,000	3,902,121,499	41,931,628		91.26
2.1.4	Belanja Hibah	5,050,000,000	42,675,494,880	6,032,400,000	10,574,300,000	38,637,800,000	249.97

KLHS RPJMD

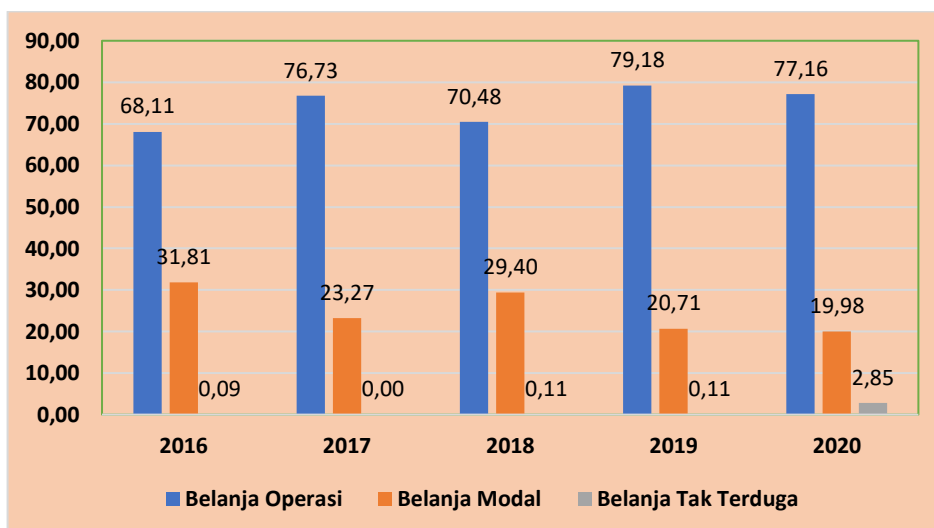
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



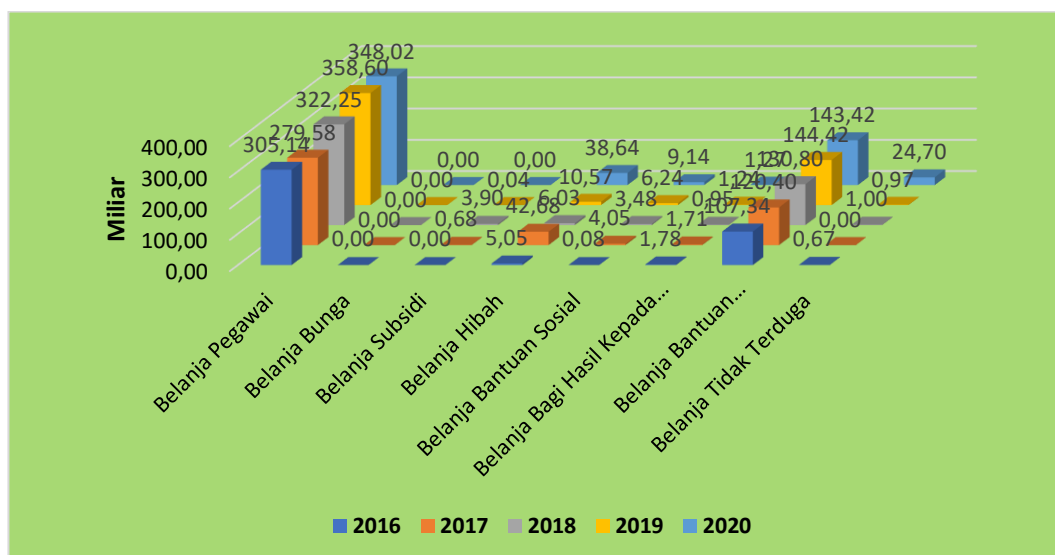
NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	84,500,000	4,051,400,000	3,477,600,000	6,244,900,000	9,144,800,000	1,201.60
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1,782,378,000	1,712,125,000	948,300,000	1,242,601,930	1,273,327,000	(3.76)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	107,342,222,456	120,404,337,532	130,801,244,571	144,418,163,356	143,423,655,529	7.63
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	668,724,500	-	1,000,000,000	970,119,447	24,700,800,655	781.06
2.2	Belanja Langsung	459,913,172,174	416,596,117,738	555,316,233,780	487,725,387,072	444,836,304,948	0.73
2.2.1	Belanja Pegawai	37,221,242,200	78,817,815,909	38,448,721,164	50,298,688,744	57,700,192,630	26.52
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177,503,508,934	164,770,331,320	254,585,757,232	258,435,893,427	214,205,939,961	7.93
2.2.3	Belanja Modal	245,188,421,040	173,007,970,509	262,281,755,384	178,990,804,901	172,930,172,357	(3.25)
JUMLAH BELANJA		879,983,643,839	865,699,780,880	1,023,731,052,325	1,009,819,703,032	1,010,035,371,654	3.82

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Struktur belanja Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Belanja tidak langsung cenderung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan belanja langsung. Baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dari tahun ke tahun nilainya fluktuatif. Proporsi belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar 47,74 persen dan di tahun 2020 naik menjadi sebesar 55,96 persen. Sedangkan proporsi belanja tidak langsung pada tahun 2016 sebesar 52,26 persen dan mengalami penurunan menjadi 44,04 persen di tahun 2020.



Gambar 2.9 Grafik Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020



Gambar 2.10 Komposisi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Guna meningkatkan komitmen dan keberpihakan kepada penguatan daya dukung pembangunan masyarakat, maka pemerintah daerah pada periode 2021-2026 akan terus berupaya agar proporsi belanja tidak



langsung dapat terus ditekan dan pada sisi lain proporsi belanja langsung akan terus ditingkatkan.

Dari komposisi belanja tidak langsung pada grafik di atas, pada tahun 2020 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp.348,02 miliar, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan pemerintah desa sebesar Rp143,42 miliar. Efisiensi terhadap belanja pegawai terus dilakukan, hal ini terbukti dengan nilai belanja pegawai yang menurun dari Rp358,60 miliar di tahun 2019 menjadi Rp348,02 miliar di tahun 2020. Belanja hibah merupakan komponen belanja tidak langsung yang berada pada urutan ketiga dengan nilai sebesar Rp38,64 miliar di tahun 2020. Selanjutnya untuk komponen belanja tidak terduga sebesar Rp24,70 miliar, belanja bantuan sosial senilai Rp9,14 miliar, dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan pemerintah desa sebesar Rp1,27 miliar. Peningkatan efisiensi melalui pengelolaan belanja pegawai perlu menjadi perhatian. Kontribusinya yang sangat besar pada pos belanja tidak langsung memiliki dampak dan pengaruh yang sangat signifikan bagi langkah efisiensi belanja secara keseluruhan.

Komponen penyusun belanja langsung ditunjukkan pada Grafik 3.5. Berdasarkan grafik, pada tahun 2016-2018 komponen belanja langsung didominasi oleh belanja modal, namun pada tahun 2019-2020 terjadi perubahan, komponen belanja barang dan jasa mengambil porsi terbesar untuk belanja langsung. Pada tahun 2020 sebagian besar belanja langsung dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.214,21 miliar, selanjutnya belanja modal sebesar Rp172,93 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp57,70 miliar.

KLHS RPJMD

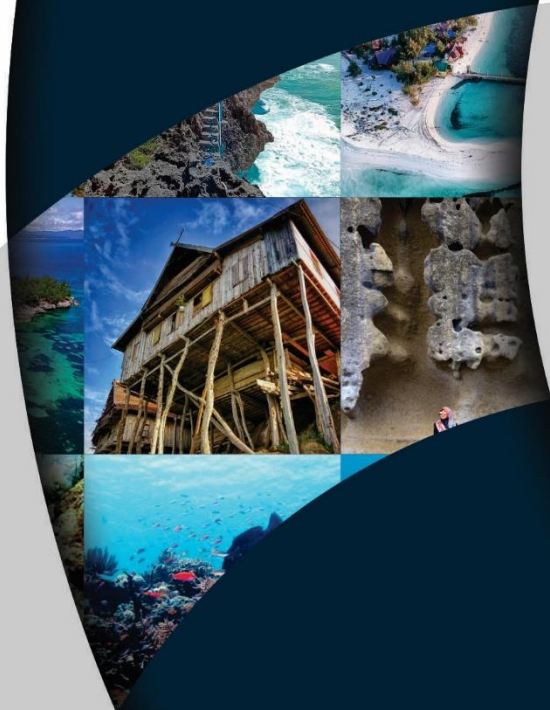
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Gambar 2.11 Komposisi Belanja Langsung Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

BAB III

KAJIAN MUATAN KLHS



BAB III

KAJIAN MUATAN KLHS



3.1 Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Percepatan penambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktifitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hal inilah yang menyebabkan sebagian keadaan Sumber daya Alam potensinya menurun.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan





kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada kapasitas lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:





1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);
3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan dengan 2 cara : (1) Menggunakan tehnik AHP, (2) Teknik skoring dan pembobotan. (1) Teknik AHP menggunakan parameter Peta Ekoregion dan Peta Tutupan Lahan, sedangkan (2) Teknik Skoring dan Pembobotan menggunakan parameter: Peta Ekoregion, Peta Vegetasi Alami, dan Peta Tutupan Lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 1 – 5, dimana semakin mendekati 5 (lima), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai





ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Kepulauan Selayar akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

3.1.1 Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961, *diringkas*) dan Fenton (2014)



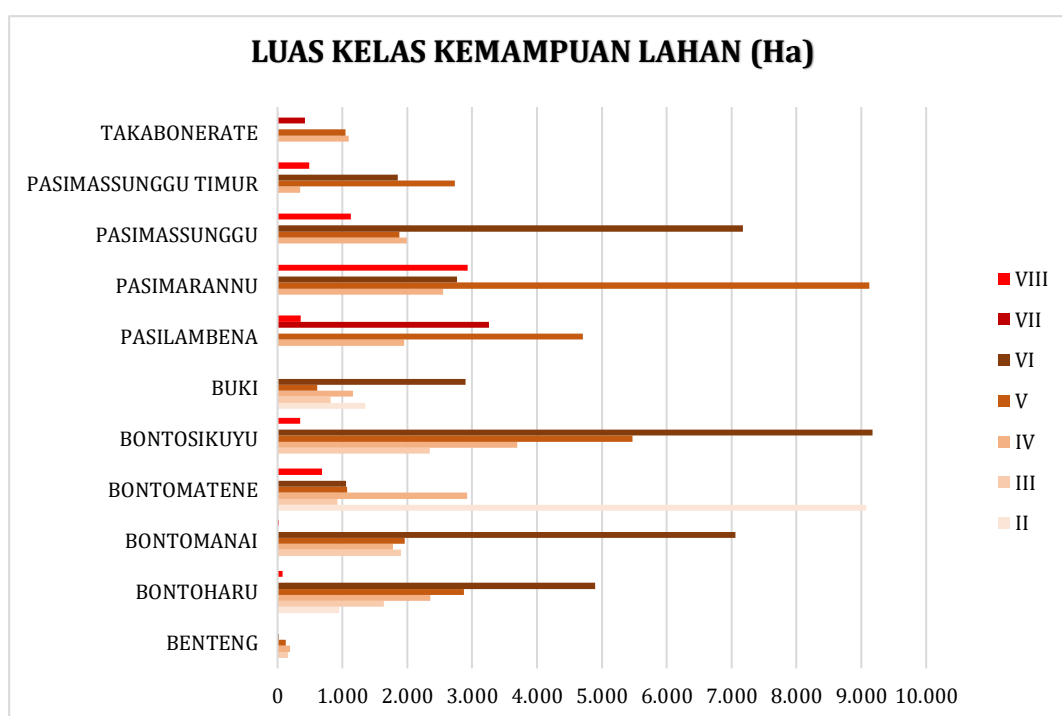


Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: pengembalaan intensif; Pgsd: pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.

Tabel 3.2 Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar

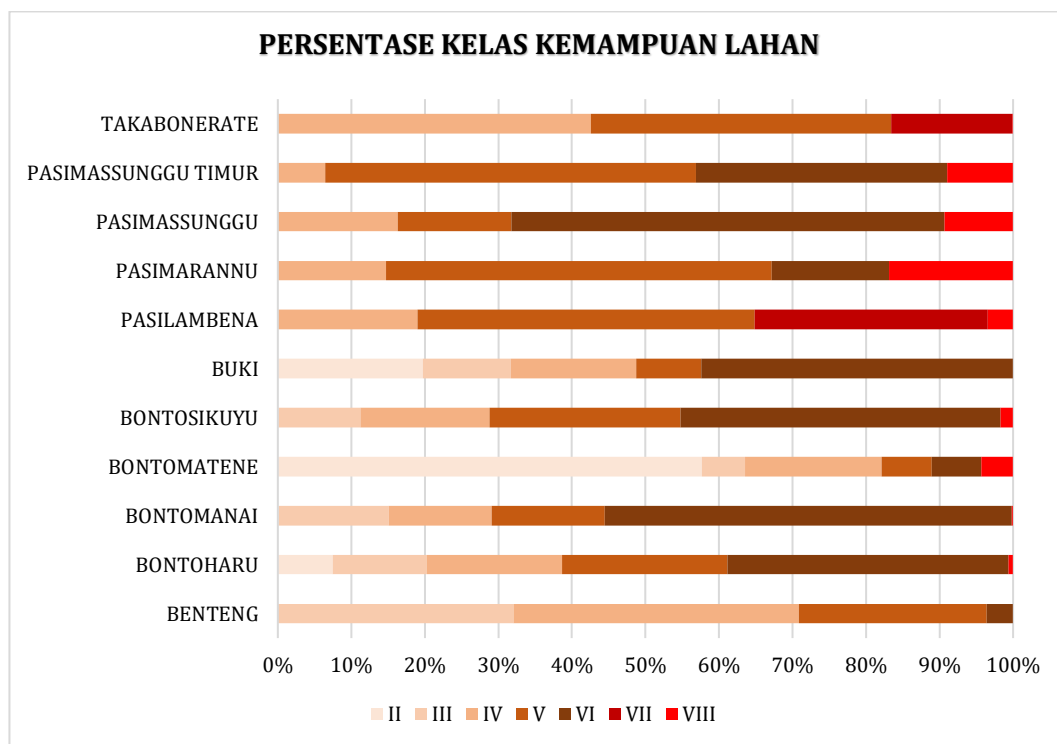
Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pasimarannu	-	-	2.556,25	9.127,37	2.767,91	-	2.933,59
Pasilambena	-	-	1.948,97	4.703,97	-	3.257,85	353,12
Pasimasunggu	-	-	1.989,53	1.874,98	7.174,56	-	1.133,65
Pasimasunggu Timur	-	-	350,66	2.729,98	1.853,84	-	485,20
Takabonerate	-	-	1.095,88	1.051,37	-	424,57	3,21
Bontosikuyu	15,83	2.344,40	3.695,48	5.470,01	9.170,02	-	352,57
Bontoharu	950,54	1.639,94	2.357,57	2.869,57	4.894,55	-	78,30
Bontomanai	19,76	1.899,44	1.782,02	1.964,04	7.055,80	-	19,06
Benteng	-	158,91	192,45	126,50	17,83	-	-
Bontomatene	9.074,16	920,95	2.920,56	1.071,73	1.056,96	-	684,00
Buki	1.348,79	817,93	1.163,40	609,65	2.896,68	-	-
Total (Ha)	11.409,08	7.781,57	20.052,78	31.599,18	36.888,15	3.682,43	6.042,69
Total (%)	9,71	6,63	17,07	26,90	31,41	3,14	5,14

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020.



Gambar 3.1 Grafik Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar





Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.2 Grafik persentase Kelas Kemampuan Lahan

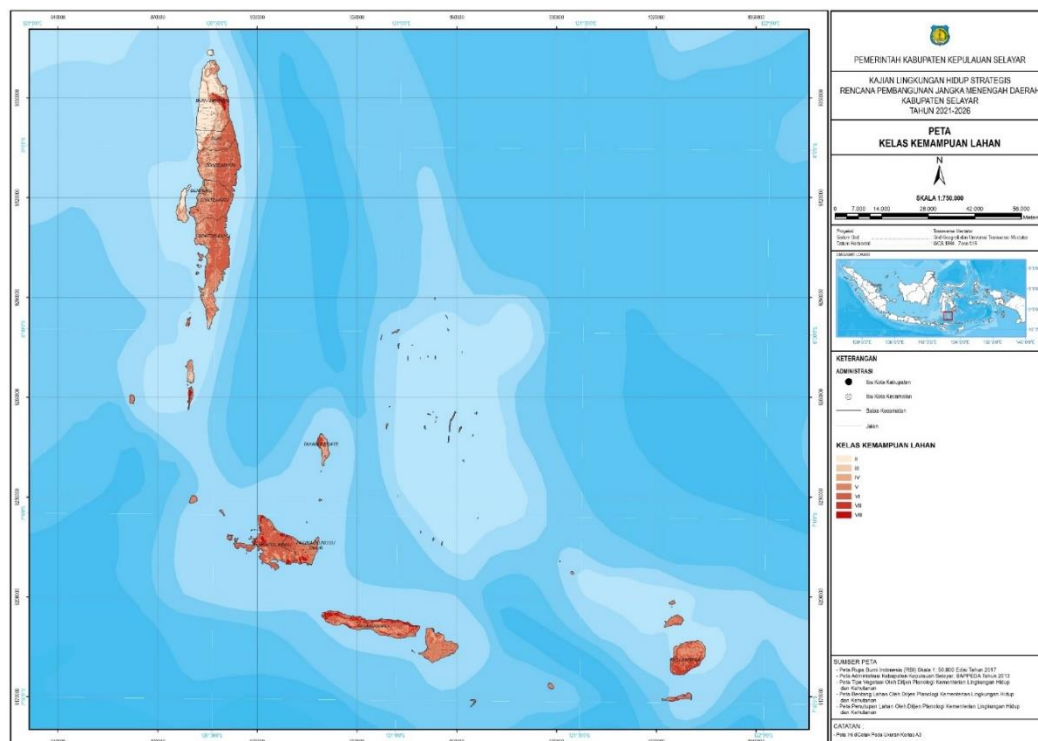
Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar 31,41 % dari luasan Kabupaten Kepulauan Selayar, diikuti kelas lahan V sebesar 26,90 %, kelas lahan IV 17,07 %, kelas lahan II 9,71 %, kelas lahan III 6,63 %, kelas lahan VIII 5,14 % dan yang terakhir kelas lahan VII 3,14 %. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif.

Gambar grafik diatas menunjukkan semakin redup warnanya, maka akan semakin cocok untuk semua penggunaan lahan baik untuk pertanian, kegiatan perkebunan ataupun lainnya. Sebaliknya jika berwarna sangat





terang (merah) berarti kelas kemampuan lahannya hanya diperuntukkan untuk cagar alam dan hutan lindung.



Gambar 3.3 Peta Kalas Kemampuan Lahan

3.1.2 Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Data yang diperlukan adalah debit wilayah sungai tahunan. Total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air wilayah sungai dan total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air kabupaten. Persamaan untuk menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten adalah sebagai berikut:





Potensi Ketersediaan Air_{prov/kab/kota}

$$= \sum_{i=1}^n (\text{Potensi Ketersediaan Air Wilayah Sungai}_i \times \frac{\text{Total Indeks Jasa Lingkungan Hidup Prov/Kab/Kota pada Wilayah Sungai}_i}{\text{Total Indeks Jasa Lingkungan Wilayah Sungai}_i})$$

Potensi air dihitung berdasarkan data debit andalan bulanan setiap Wilayah Sungai di Indonesia tahun 2016 yang bersumber dari Ditjen SDA, Kementerian PUPR dan hasil penghitungan indeks jasa lingkungan nasional dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah itu kemudian dibuat pendistribusian potensi ketersediaan air ke dalam sistem grid. Hal ini dilakukan dengan mendistribusikan total potensi ketersediaan air Kabupaten kedalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan masing-masing grid dengan Nilai Indeks total Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten. Persamaan yang digunakan untuk menghitung potensi ketersediaan air masing-masing grid adalah sebagai berikut:

$$W_{ij} = \text{Potensi ketersediaan air pada Grid}_i \\ = \text{Potensi Ketersediaan Air}_{prov/kab/kota} \times \frac{\text{Nilai Indeks Jasa Lingkungan}_i}{\text{Total Nilai Indeks Jasa Lingkungan}_{Prov/Kota/kab}}$$

Hasil penghitungan potensi ketersediaan air pada setiap grid kemudian disajikan dalam bentuk peta. Cara penyajiannya digunakan pengelompokan potensi ketersediaan air dengan sistem pewarnaan gradasi. Penggunaan air untuk rumah tangga tiap grid dihitung dengan menggunakan asumsi kebutuhan air rumah tangga sebesar 43,20 m³ per tahun (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009). Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Adapun penyediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada tabel dibawah ini :





**Tabel 3.3 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m ³ /tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Pasimarannu	14.803.091,00	402.149,00	14.400.924,20
Pasilambena	9.139.644,00	332.726,00	8.806.917,60
Pasimasunggu	11.178.884,00	373.248,00	10.805.636,00
Pasimasunggu Timur	5.563.514,00	331.376,00	5.232.083,00
Takabonerate	3.764.289,00	596.376,00	3.167.913,00
Bontosikuyu	18.305.814,00	659.621,00	17.646.193,20
Bontoharu	12.158.546,00	1.236.298,00	10.922.248,40
Bontomanai	10.314.005,00	655.560,00	9.658.445,00
Benteng	618.163,00	1.240.056,00	-621.893,00
Bontomatene	14.011.209,00	582.120,00	13.429.089,00
Buki	6.641.100,00	324.346,00	6.316.754,40
Total	106.498.259,00	6.733.930,00	99.764.329,40

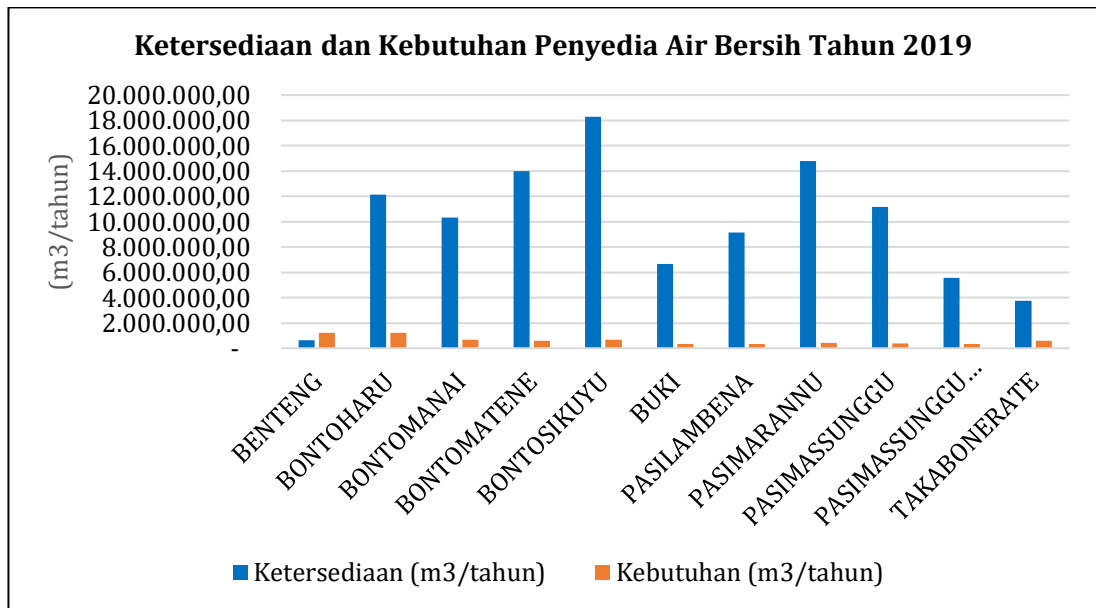
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 106.498.259,00 m³/tahun, sementara kebutuhan air sebesar 6.733.930,00 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 99.764.329,40 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Bontosikuyu (17.646.193,20 m³/tahun), dan Pasimarannu (14.400.924,20m³/tahun). Hal ini dapat dipahami karena Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimarannu merupakan kecamatan yang memiliki vegetasi yang cukup baik dan masih memiliki kawasan hutan yang luas. Sementara itu, untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Benteng (-621.893,00 m³/tahun). Hal ini menjadi suatu informasi bahwa di Kecamatan Benteng perlu dilakukan pengelolaan air yang tepat mengingat bahwa di daerah tersebut merupakan Ibu Kota Kabupaten.



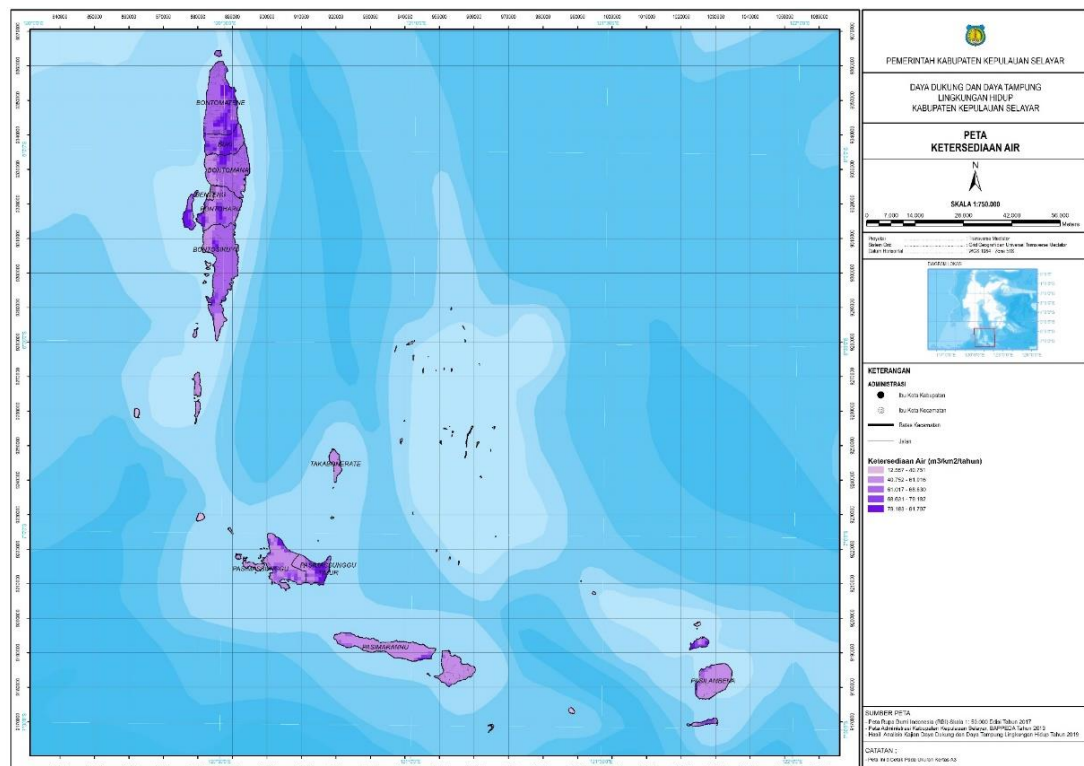
KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.4 Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019

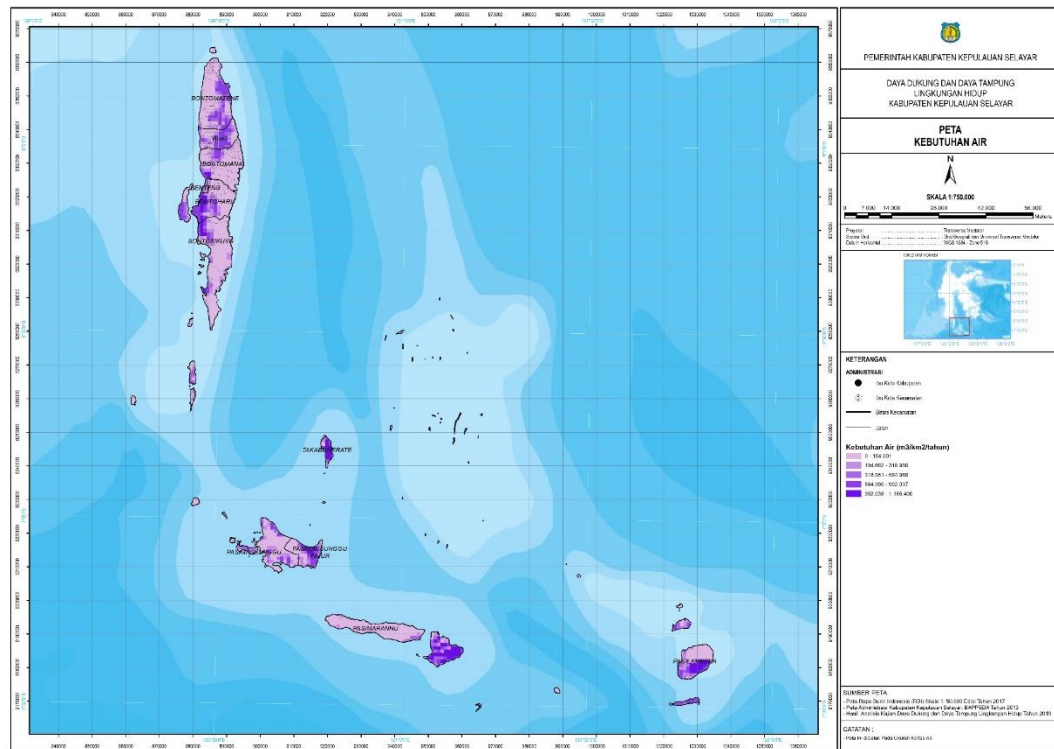


Gambar 3.5 Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Kepulauan Selayar



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Gambar 3.6 Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Kepulauan Selayar

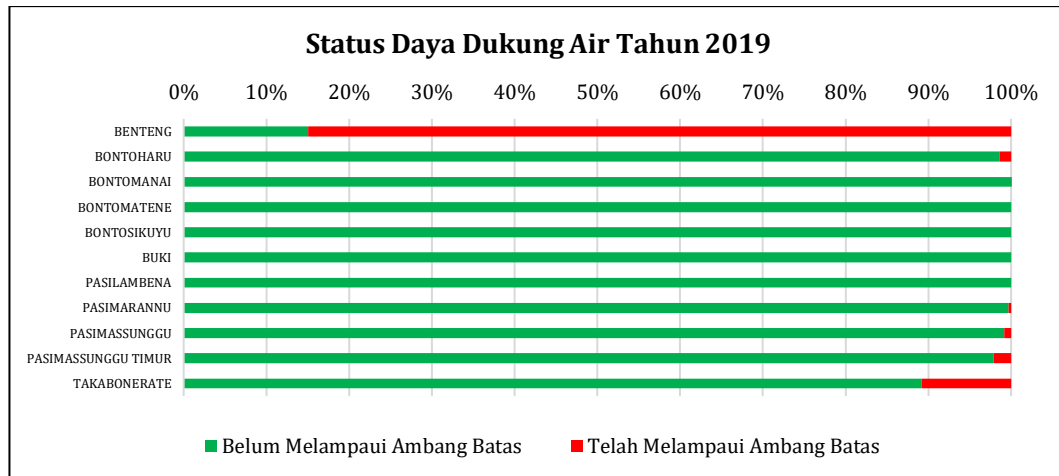
Tabel 3.4 Status Air Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimarannu	17.327,73	99,67	57,40	0,33
Pasilambena	10.263,91	100,00	-	-
Pasimasunggu	12.072,72	99,18	100,00	0,82
Pasimasunggu Timur	5.305,63	97,90	114,05	2,10
Takabonerate	2.296,07	89,17	278,97	10,83
Bontosikuyu	21.048,31	100,00	-	-
Bontoharu	12.608,55	98,58	181,94	1,42
Bontomanai	12.738,78	99,99	1,33	0,01
Benteng	74,53	15,04	421,15	84,96
Bontomatene	15.728,35	100,00	-	-
Buki	6.836,45	100,00	-	-
Total	116.301,03	99,02	1.154,83	0,98

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

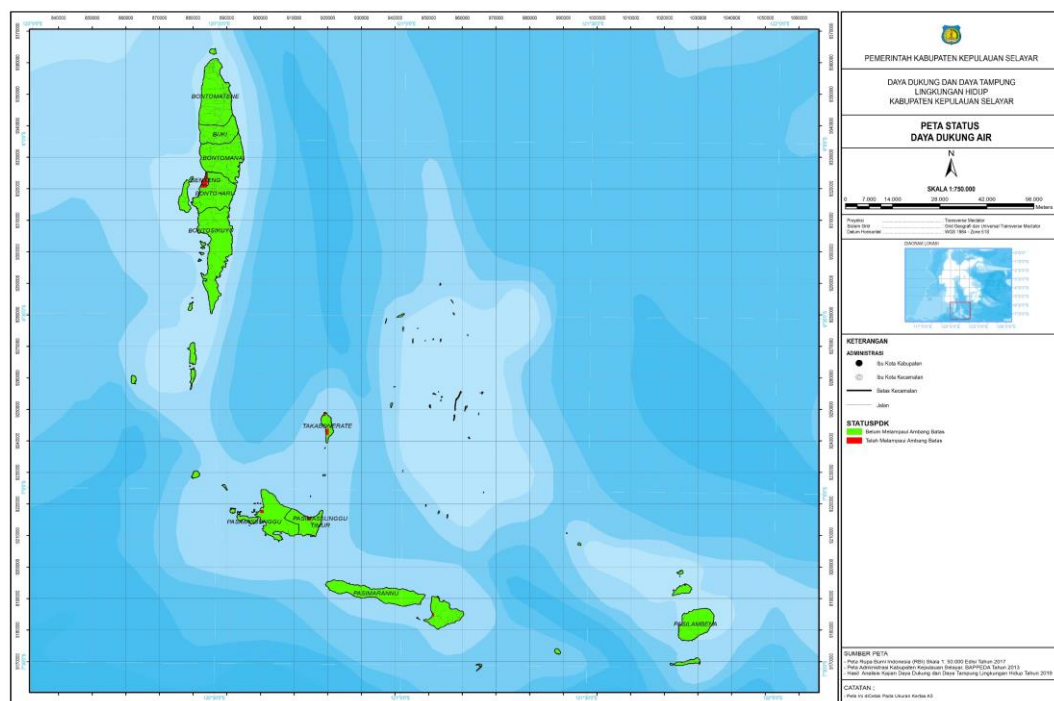


Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status air pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 116.301,03 Ha atau sekitar 99,02 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 1.154,83 Ha atau sekitar 0,98 %. Hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui.



Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.7 Grafik Status Daya Dukung Air Tahun 2019



Gambar 3.8 Peta Status Daya Dukung Air di Kab. Kepulauan Selayar





Tabel 3.5 Proyeksi Volume Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Proyeksi Volume Air (m ³ /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan 2019	Kebutuhan 2026
Pasimarannu	14.803.091,00	402.149,00	7.568.402,63
Pasilambena	9.139.644,00	332.726,00	6.501.044,62
Pasimasunggu	11.178.884,00	373.248,00	7.243.603,19
Pasimasunggu Timur	5.563.514,00	331.376,00	6.218.859,14
Takabonerate	3.764.289,00	596.376,00	11.598.163,96
Bontosikuyu	18.305.814,00	659.621,00	12.523.462,19
Bontoharu	12.158.546,00	1.236.298,00	23.685.467,77
Bontomanai	10.314.005,00	655.560,00	12.365.457,30
Benteng	618.163,00	1.240.056,00	25.115.147,81
Bontomatene	14.011.209,00	582.120,00	10.980.583,04
Buki	6.641.100,00	324.346,00	6.110.392,86
Grand Total	106.498.259,00	6.733.930,00	129.910.584,51

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa ketersediaan tidak tercukupi hingga tahun 2026. Namun jika diperhatikan data kebutuhan air di tahun 2019 mengalami peningkatan jika diproyeksikan ke tahun 2026 (selisih 7 tahun) sebesar 123.176.618,51 m³/tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Adapun hasil analisis ketersediaan air yang paling banyak terdapat di Kecamatan Pasimarannu dan Bontomatene, sedangkan yang paling sedikit ketersediaan airnya terdapat di Kecamatan Benteng. Selanjutnya, untuk kategori kebutuhan air yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Benteng dan Bontoharu.

3.1.3 Analisis Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Untuk perhitungan ketersediaan pangan, data yang digunakan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan energi bahan pangan di wilayah tersebut. Total energi pangan merupakan total produksi bahan pangan di tiap kabupaten yang





dikonversikan menjadi satuan energi atau kilo kalori (kcal). Energi untuk tiap jenis bahan pangan masing-masing berbeda. Untuk dapat menghitung ketersediaan pangan, data yang diperlukan adalah total produksi pangan untuk masing-masing jenis bahan pangan. Persamaan untuk menghitung ketersediaan pangan atau ketersediaan energi pangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

$$EP_j = \text{Total Ketersediaan Energi Pangan}_j = \sum_{i=1}^n (\text{Produksi bahan pangan}_i \times \text{Nilai kandungan Kalori}_i)$$

Pendistribusian ketersediaan energi pangan ke dalam sistem grid dilakukan dengan mendistribusikan total ketersediaan energi pangan Kabupaten ke dalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Pangan masing-masing grid dengan Nilai Indeks total Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten. Persamaan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan energy pangan masing-masing grid adalah sebagai berikut:

$$EP_{ij} = \text{Ketersediaan energi pangan pada Grid}_i \\ = \text{Total Ketersediaan Energi pangan}_{prov/kab/kota} \times \frac{\text{Indeks Jasa Penyedia Pangan}_i}{\text{Total Indeks Jasa Penyedia Pangan}_{prov/Kota/kab}}$$

Hasil penghitungan ketersediaan energi pangan pada setiap grid kemudian disajikan dalam bentuk peta. Cara penyajiannya digunakan pengelompokan ketersediaan energi pangan dengan sistem pewarnaan gradasi.

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk tiap grid diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk tiap grid selama setahun. AKE merupakan besar kebutuhan energi bahan pangan suatu individu untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas harian (Hardinsyah, 2012).

Untuk dapat menghitung kebutuhan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan masing-masing grid perlu diketahui jumlah penduduk tiap-tiap grid. Rumus yang digunakan untuk pendistribusian jumlah penduduk dalam satu





provinsi, kabupaten, atau kota didistribusikan ke dalam system grid adalah sama dengan rumus pendistribusian penduduk pada saat penentuan DDLH jasa lingkungan penyedia air yaitu menggunakan Model Densitas Populasi.

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk tiap grid dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa Angka Kebutuhan Energi (AKE) per kapita sebesar 2.150 kkal/hari/kapita. Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Bahan Pangan/Energi Pangan untuk masing-masing grid adalah sebagai berikut:

$$K_i = P_{ij} \times AKE \times 365$$

dengan:

K_i = kebutuhan energi pangan per kapita per tahun untuk grid ke- i
(kkal/tahun)

P_{ij} = jumlah penduduk grid ke - i di provinsi/kabupaten/kota j

AKE = Angka Kebutuhan Energi per kapita = 2.150 kkal/hari/kapita

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Ambang batas penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TP_{ij} = \frac{EP_{ij}}{AKE_{ij} \times 365}$$

dengan:

TP_{ij} = ambang batas penduduk untuk jasa lingkungan penyedia pangan





pada grid i di wilayah j

EP_{ij} = ketersediaan bahan pangan / energy pangang pada grid i di wilayah j
(kcal/tahun)

P_{ij} = jumlah penduduk pada grid i di wilayah j (jiwa)

Ambang batas penduduk untuk jasa lingkungan penyedia pangan Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan agregasi ambang batas penduduk seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan.

Status DDLH indikatif untuk masing-masing grid dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$DDLH \text{ penyedia pangan} = TP_{ij} - P_{ij}$$

dengan:

TP_{ij} = ambang batas penduduk untuk jasa lingkungan penyedia pangan pada grid i di wilayah j

P_{ij} = jumlah penduduk pada grid i di wilayah j (jiwa)

Hasil perhitungan DDLH tersebut menunjukkan status DDLH indikatif. Jika nilai DDLH penyedia pangan pada grid ke-i bernilai positif, maka menunjukkan bahwa DDLH di grid tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangan di wilayah grid tersebut. Sebaliknya, jika nilai DDLH negative, maka DDLH di grid tersebut telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Provinsi, Kabupaten atau Kota merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan.

Seluruh status DDLH tiap grid perlu disajikan dalam peta agar lebih informatif dan memudahkan untuk mengidentifikasi lokasi. Penyajian informasi daya dukung lingkungan hidup untuk jasa penyedia pangan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu DDLH terlampaui dan DDLH belum terlampaui. Adapun hasil analisis penyediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada tabel dibawah ini :



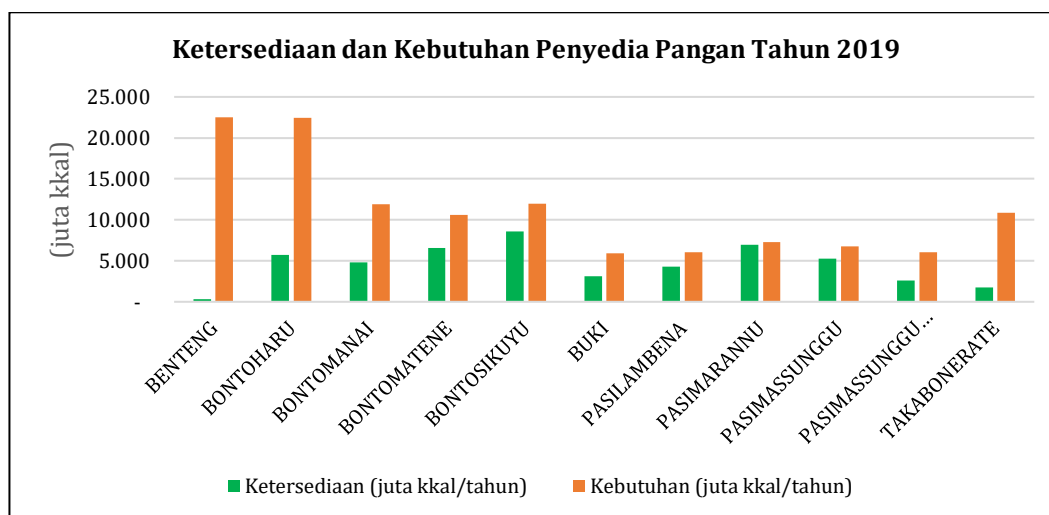


Tabel 3.6 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Volume Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Pasimarannu	6.942	7.305	-363,00
Pasilambena	4.286	6.044	-1.757,90
Pasimasunggu	5.243	6.780	-1.537,65
Pasimasunggu Timur	2.609	6.021	-3.411,47
Takabonerate	1.765	10.833	-9.068,13
Bontosikuyu	8.585	11.982	-3.397,41
Bontoharu	5.702	22.458	-16.755,94
Bontomanai	4.837	11.909	-7.071,59
Benteng	290	22.526	-22.236,35
Bontomatene	6.571	10.575	-7.071,59
Buki	3.114	5.892	-2.777,41
Grand Total	49.945	122.325	-72.380,49

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.9 Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019



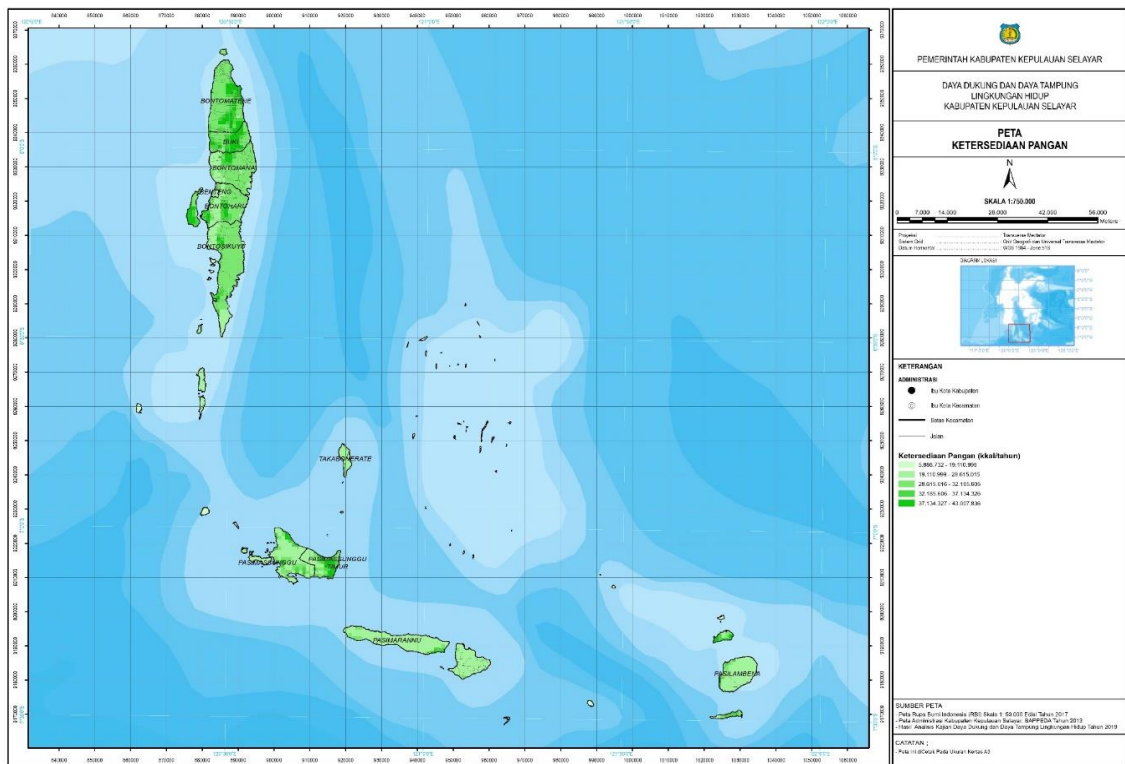
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Hasil analisis ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 49.945 kkal/tahun, sedangkan kebutuhan pangan berjumlah 122.325 kkal/tahun. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan yang telah melampaui ketersediaan terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar (-72.380,49 kkal/tahun). Hal ini dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kepadatan penduduk

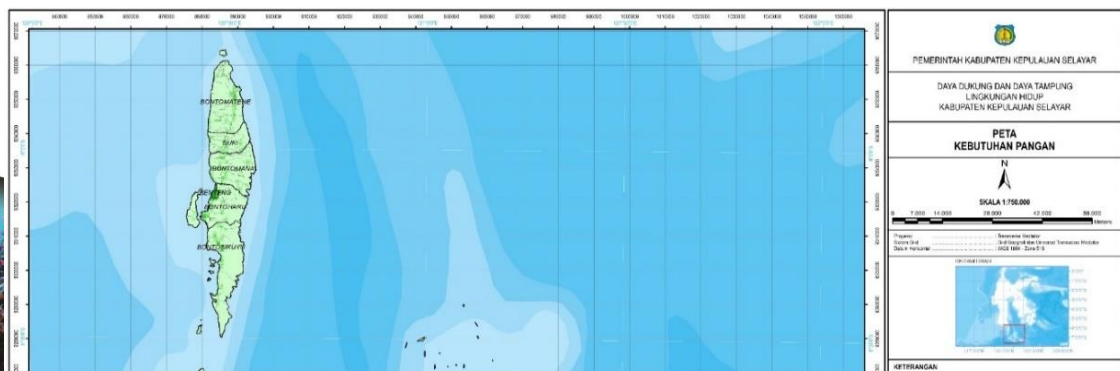




yang cukup tinggi sehingga kebutuhan pangan juga akan besar, sementara produksi pertaniannya paling kecil.



Gambar 3.10 Peta Ketersediaan Pangan





Gambar 3.11 Peta Kebutuhan Pangan

Tabel 3.7 Status Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimarannu	16.658,21	95,82	726,91	4,18
Pasilambena	9.057,81	88,25	1.206,10	11,75
Pasimasunggu	10.828,90	88,96	1.343,82	11,04
Pasimasunggu Timur	4.284,49	79,05	1.135,20	20,95
Takabonerate	1.836,25	71,31	738,79	28,69
Bontosikuyu	17.272,32	82,06	3.776,00	17,94
Bontoharu	9.407,14	73,55	3.383,35	26,45
Bontomanai	8.237,75	64,66	4.502,36	35,34
Benteng	38,30	7,73	457,39	92,27
Bontomatene	12.312,92	78,28	3.415,43	21,72
Buki	3.437,61	50,28	3.398,84	49,72
Total	93.371,68	79,50	24.084,18	20,50

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

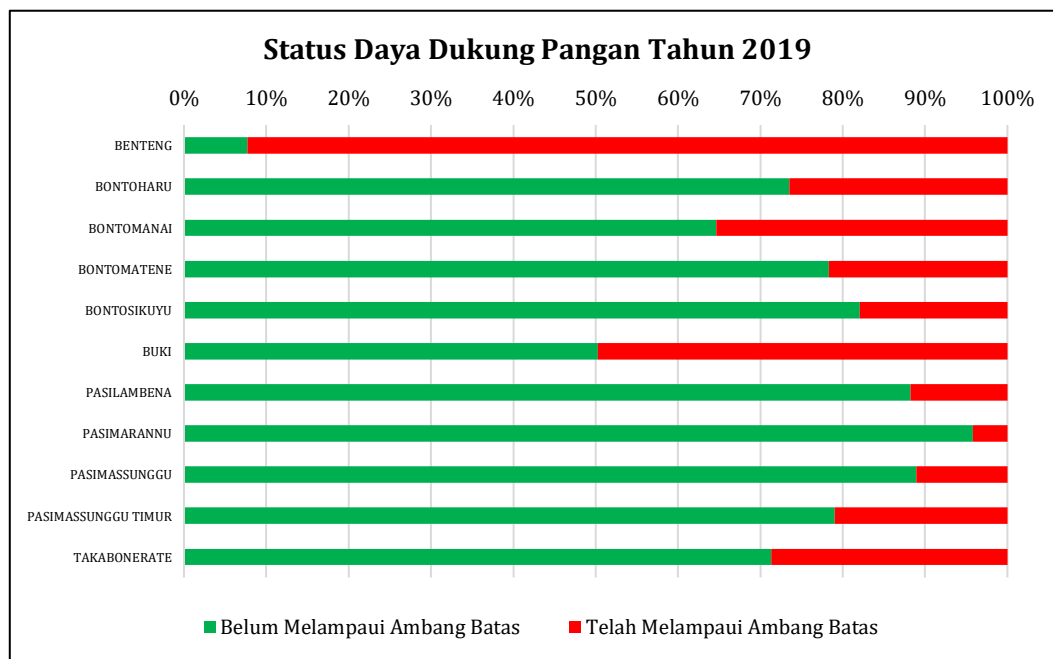


KLHS RPJMD

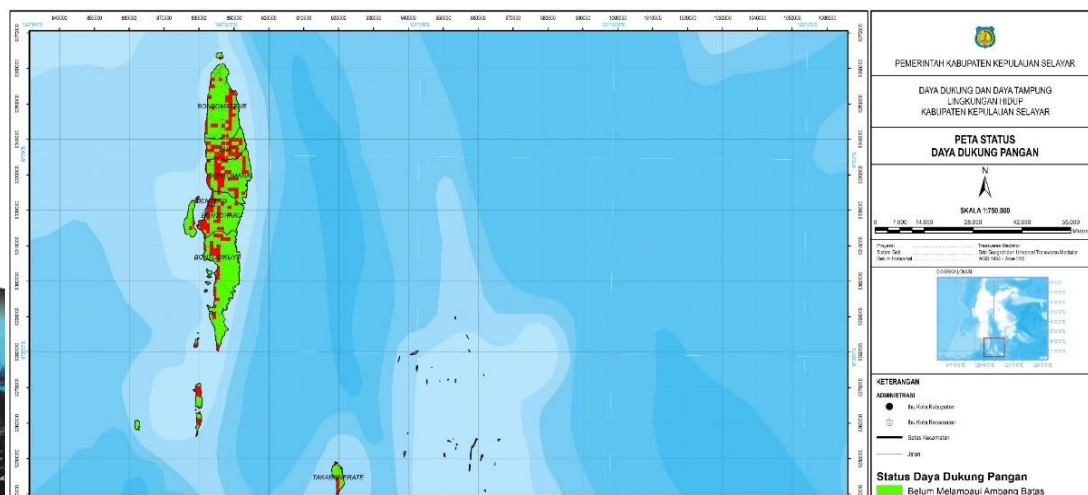
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status pangan pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 93.371,68 Ha atau sekitar 79,50 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 24.084,18 Ha atau sekitar 20,50 %. hal ini berarti ketersediaan pangan dan kebutuhan penyediaan pangan masih mencukupi dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada.



Gambar 3.12 Grafik Status Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar





Gambar 3.13 Peta Status Daya Dukung di Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 3.8 Proyeksi Volume Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Proyeksi Volume Pangan (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan 2019	Kebutuhan 2026
Pasimarannu	6.942	7.305	10.877
Pasilambena	4.286	6.044	9.343
Pasimasunggu	5.243	6.780	10.410
Pasimasunggu Timur	2.609	6.021	8.937
Takabonerate	1.765	10.833	16.668
Bontosikuyu	8.585	11.982	17.998
Bontoharu	5.702	22.458	34.040
Bontomanai	4.837	11.909	17.771
Benteng	290	22.526	36.095
Bontomatene	6.571	10.575	15.781
Buki	3.114	5.892	8.781
Grand Total	49.945	122.325	186.705

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2026 tidak mencukupi ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Penggunaan pangan di setiap kecamatan terlihat tidak cukup baik diperkirakan kebutuhan pangan





sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya hingga tahun 2026 yang masih dihitung tidak seimbang.

Untuk kebutuhan dan ketersediaan pangan hingga tahun 2026 selisih terbesar terlihat pada Kecamatan Benteng (35.805 kkal/tahun), sedangkan untuk selisih terkecil terlihat pada Kecamatan Bontosikuyu (9.413 kkal/tahun). Besarnya kebutuhan pangan pada kecamatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut yang sangat besar namun produksi pangannya masih kecil.

3.2 Perkiraan Mengenai Dampak Dan Resiko Lingkungan

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Namun sebelum dampak dapat terjadi, makhluk hidup dapat mengenali resiko yang merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/dampak dari sebuah aksi. Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif. Lalu sebagai bentuk dari dampak tersebut, maka akan terbentuk resiko-resiko yang akan membahayakan tidak hanya lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang resiko guna mencegah atau memperkecil dampak.

Resiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai resiko ekologis. Beragam permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam resiko ekologis, yaitu:

1. Resiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), yaitu aneka resiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya.
2. Resiko mental (*mental risk*), yaitu aneka resiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis.





3. Resiko sosial (*social risk*), yaitu aneka resiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (*social-ecological*)

Resiko fisik-ekologis dapat disebabkan oleh proses alam atau oleh kegiatan manusia (*manmade risk*). Salah satu contohnya adalah banjir yang paling sering menimbulkan kerusakan fisik-ekologis. Resiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kerusakan parah ekosistem mental disebabkan oleh pembiaran aneka resiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Resiko sosial adalah kerusakan bangunan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, dan industri. Pada umumnya resiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah resiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam resiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer dimana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan.

Salah satu kajian resiko yang dihadirkan pada laporan ini adalah kajian resiko bencana. Kajian ini didasarkan pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Pengkajian resiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan resiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian resiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Pada dasarnya, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilakukan di Sulawesi Selatan tahun 2011. Upaya tersebut adalah dengan penyusunan Dokumen RPB tahun 2011 sekaligus merangkum pengkajian resiko bencana. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian resiko





bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian resiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional. Pengkajian tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Pengkajian tersebut didasarkan dengan indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut untuk menghasilkan tingkat resiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian resiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan resiko. Adapun hasil pengkajian resiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Luas Berdasarkan Kriteria Potensi Bencana (Ha)			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Banjir	84.644,93	26.396,10	6.351,35	63,49
Tanah Longsor	84.916,60	1.135,45	19.494,43	11.909,38
Tsunami	99.812,10	11.576,27	2.563,27	3.504,23

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Berdasarkan **Tabel 3.9** hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis bahaya yang beresiko terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Banjir, Tanah Longsor, dan Tsunami. Adapun cakupan lokasi bahaya yang terbesar adalah Tanah Longsor sekitar 11.909,38 Ha. Kemudian diikuti dengan resiko Tsunami yaitu sekitar 3.504,23 Ha.





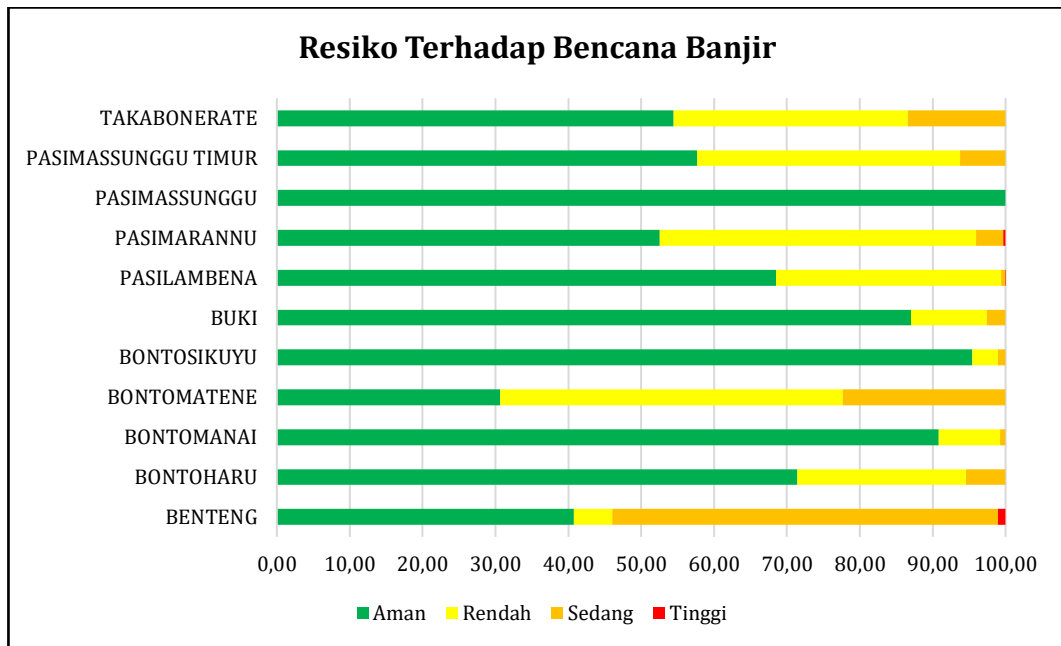
Tabel 3.10 Resiko Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Luas Kerawanan Bencana Banjir (Ha)			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Pasimarannu	9.141,34	7.541,73	649,24	52,82
Pasilambena	7.029,71	3.173,74	54,82	5,64
Pasimasunggu	12.172,72	-	-	-
Pasimasunggu Timur	3.126,99	1.952,49	340,21	-
Takabonerate	1.401,52	827,92	345,59	-
Bontosikuyu	20.085,54	743,46	219,31	-
Bontoharu	9.140,54	2.955,54	694,40	-
Bantomanai	11.575,81	1.065,99	98,31	-
Benteng	201,99	26,29	262,38	5,03
Bontomatene	4.821,56	7.394,49	3.512,31	-
Buki	5.947,21	714,47	174,77	-
Grand Total (Ha)	84.644,93	26.396,10	6.351,35	63,49
Grand Total (%)	72,07	22,47	5,41	0,05

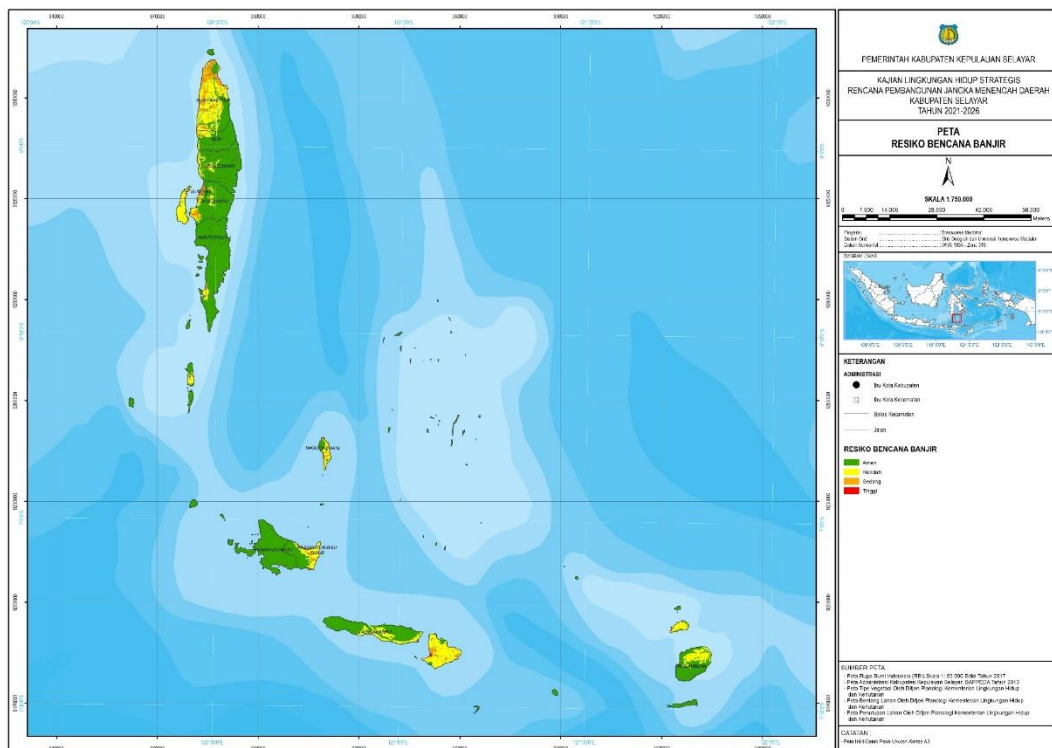
Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong kategori “aman” terhadap bencana banjir. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori “aman” terhadap rawan banjir sekitar 84.644,93 Ha atau 72,07 %. Khusus untuk Kecamatan Bontosikuyu yang merupakan Kecamatan yang terluas untuk kategori “aman” terhadap rawan banjir sekitar 20.085,54 Ha. Hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Bontosikuyu berupa wilayah perbukitan.





Gambar 3.14 Grafik Resiko Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 3.15 Peta Resiko Bencana Banjir





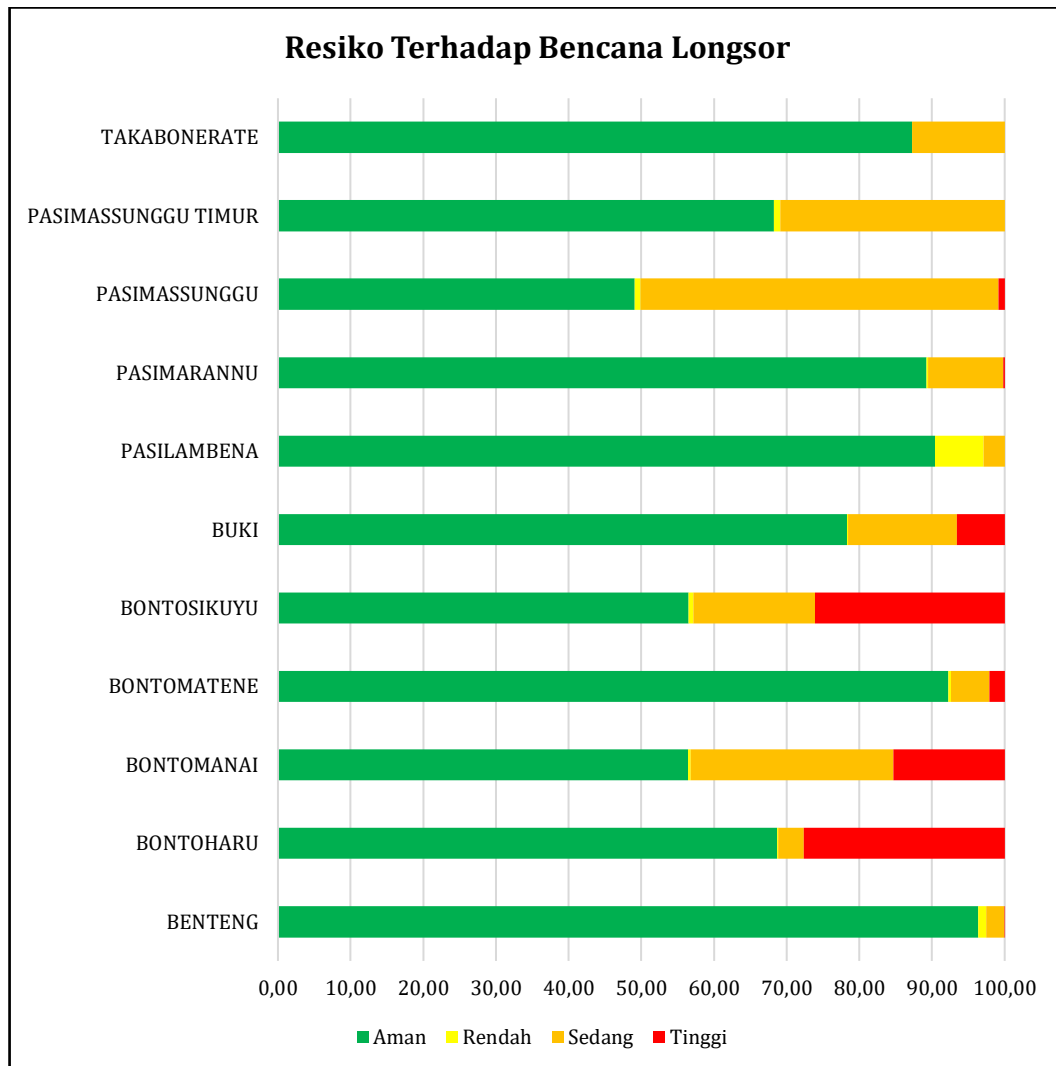
Tabel 3.11 Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Luas Kerawanan Bencana Tanah Longsor (Ha)			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Pasimarannu	15.509,10	43,32	1.797,34	35,35
Pasilambena	9.277,12	687,11	299,68	-
Pasimasunggu	5.976,08	94,99	5.993,86	107,79
Pasimasunggu Timur	3.699,98	45,52	1.674,18	-
Takabonerate	2.246,52	-	328,52	-
Bontosikuyu	11.892,28	137,78	3.515,92	5.502,33
Bontoharu	8.787,69	12,24	455,85	3.534,70
Bontomanai	7.188,61	45,08	3.554,12	1.952,30
Benteng	477,54	5,64	12,41	0,10
Bontomatene	14.509,13	52,22	840,64	326,36
Buki	5.352,56	11,53	1.021,91	450,45
Grand Total (Ha)	84.916,60	1.135,45	19.494,43	11.909,38
Grand Total (%)	72,30	0,97	16,60	10,14

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

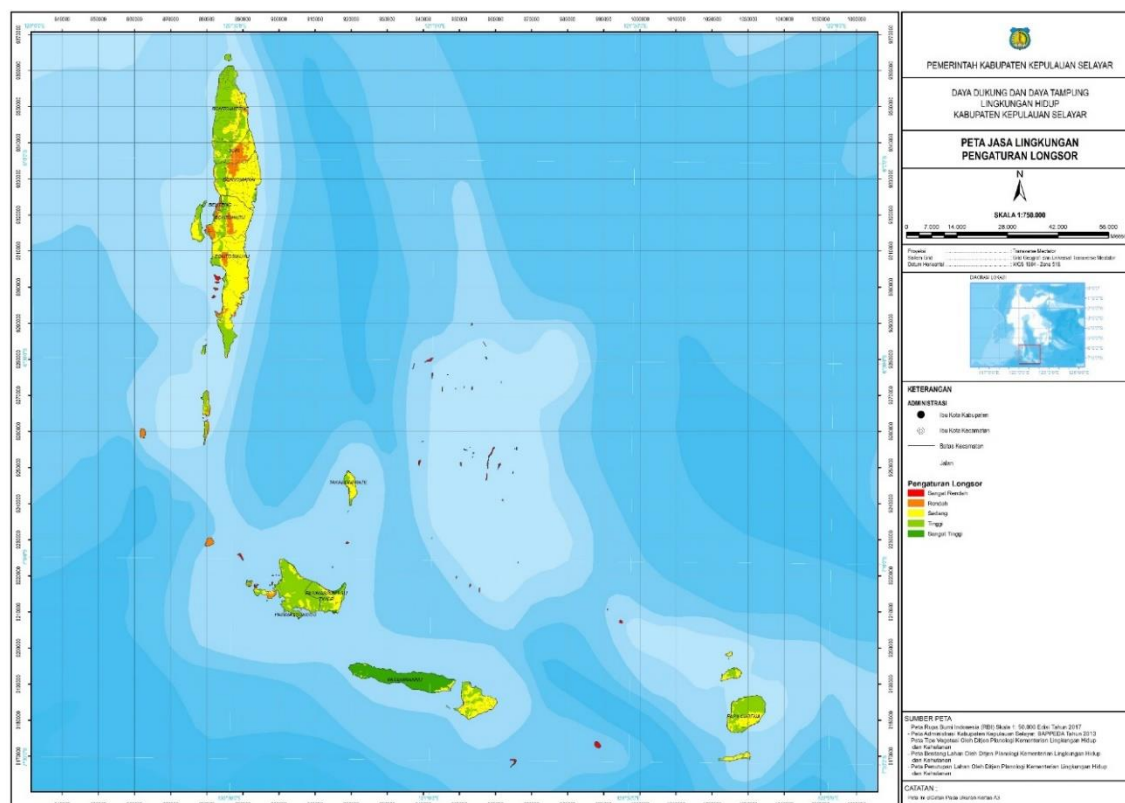
Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong kategori “aman” terhadap bencana tanah longsor. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori “aman” terhadap rawan longsor sekitar 84.916,60 Ha atau 72,30%. Khusus untuk Kecamatan Pasimarannu dan Bontomatene yang merupakan Kecamatan yang terluas untuk kategori “aman” terhadap rawan longsor. Hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Bontomatene berupa pegunungan dengan kelerengn rata-rata diatas 25%.





Gambar 3.16 Grafik Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kepulauan Selayar





Gambar 3.17 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Longsor

Tabel 3.12 Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Selayar

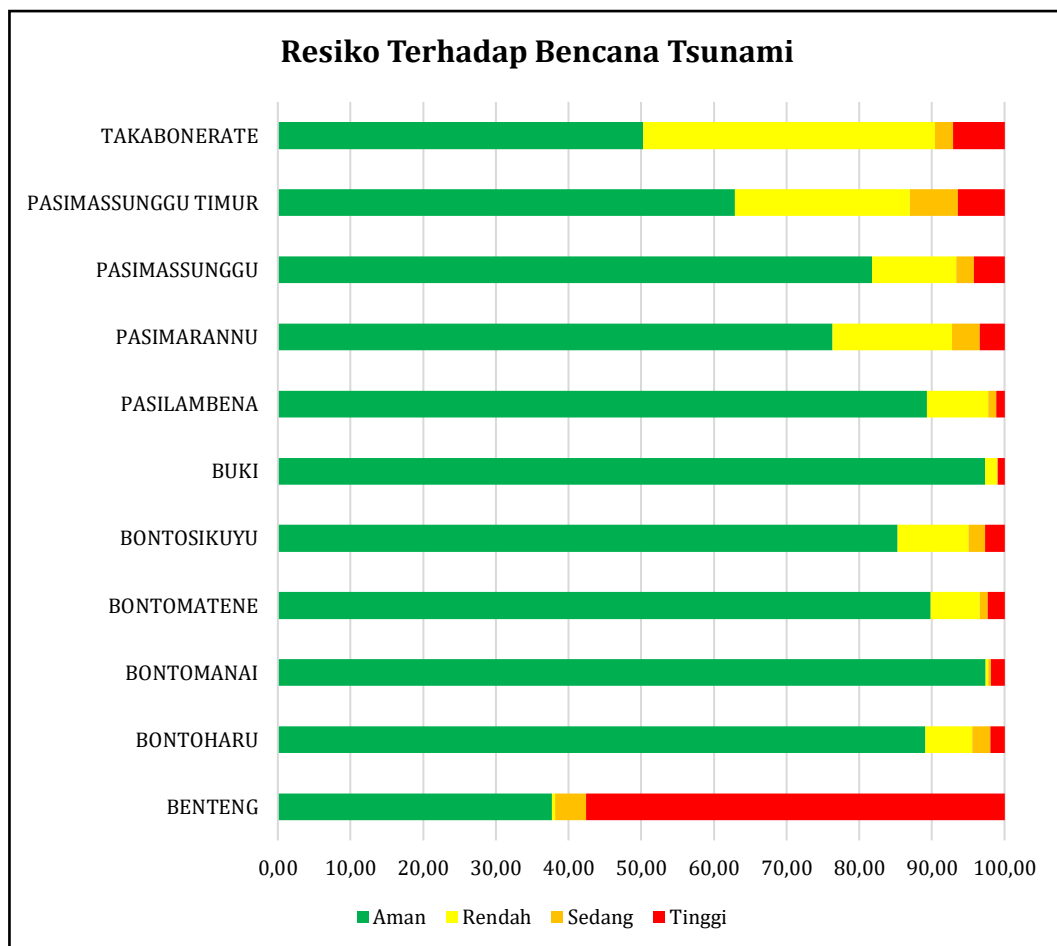
Kecamatan	Luas Kerawanan Bencana Tsunami (Ha)			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Pasimarannu	13.265,70	2.866,54	665,47	587,41
Pasilambena	9.166,99	869,06	112,10	115,75
Pasimasunggu	9.951,63	1.409,26	294,32	517,51
Pasimasunggu Timur	3.408,17	1.303,58	359,15	348,78
Takabonerate	1.294,17	1.034,19	64,81	181,87
Bontosikuyu	17.949,02	2.048,53	488,87	561,89
Bontoharu	11.391,96	830,53	320,81	247,19
Bontomanai	12.408,92	49,78	44,27	237,14
Benteng	187,08	2,14	21,04	285,42
Bontomatene	14.134,43	1.053,51	182,17	358,24
Buki	6.654,02	109,15	10,26	63,02
Grand Total (Ha)	99.812,10	11.576,27	2.563,27	3.504,23
Grand Total (%)	84,98	9,86	2,18	2,98

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020





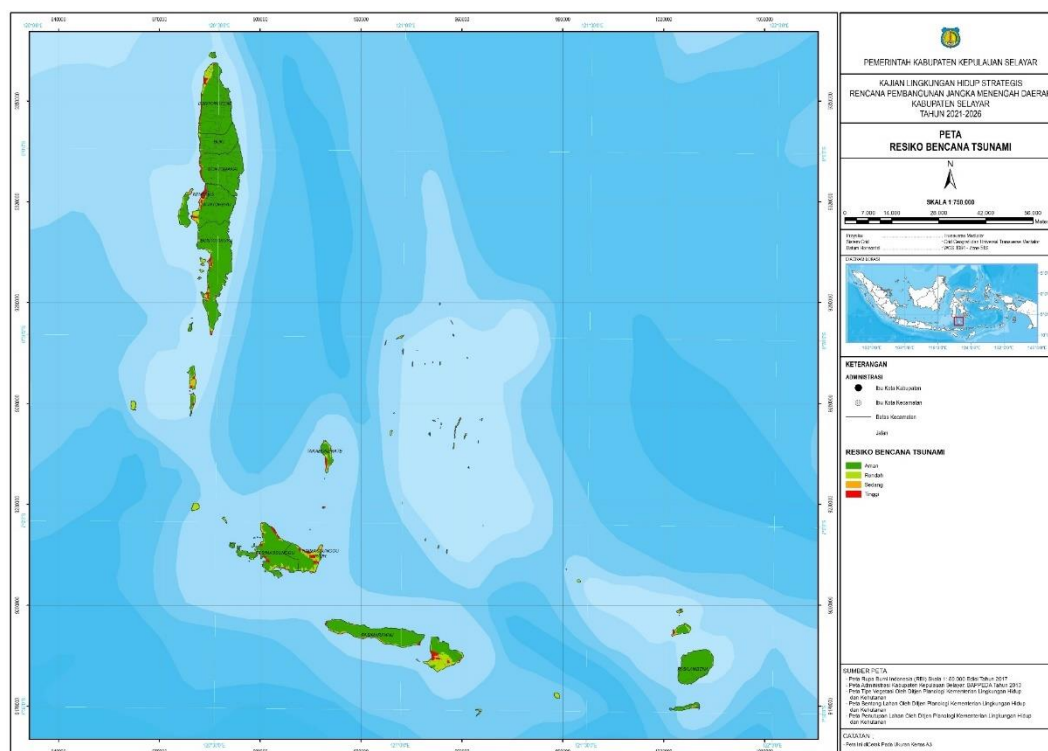
Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong kategori “aman” terhadap bencana tsunami. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori “aman” terhadap rawan tsunami sekitar 99.812,10 Ha atau 84,98 %. Khusus untuk Kecamatan Bontosikuyu yang merupakan kecamatan yang terluas untuk kategori “aman” terhadap rawan tsunami sekitar 17.949,02 Ha, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Bontosikuyu berada di daerah perbukitan.



Sumber : Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.18 Grafik Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Selayar





Gambar 3.19 Peta Resiko Bencana Tsunami

3.3 Jasa Lingkungan

3.3.1 Jasa Lingkungan Penyediaan (*Provisioning*)

3.3.1.1 Fungsi Kinerja Ekosistem Penyediaan Air

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Suprayitno 2008). Ada empat jasa lingkungan yang paling banyak dibayarkan (Landell-Mills dan Porras 2002) yaitu penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan DAS dan keindahan lanskap.





Salah satu bentuk jasa lingkungan yang keberadaannya menyangkut hajat hidup orang banyak adalah air. Pada pengelompokan jasa lingkungan bentuk jasa lingkungan air termasuk ke dalam jasa perlindungan DAS. Dixon dan Easter (1986) menyebutkan bahwa DAS merupakan penyatu ekosistem alami antara wilayah hulu (dari puncak gunung/bukit) dengan wilayah hilir (sampai dengan muara sungai dan wilayah pantai yang masih terpengaruh daratan) melalui siklus/daur hidrologi/air. Daerah hulu yang biasanya berupa kawasan hutan berfungsi sebagai penyedia air bagi masyarakat di sekitar kawasan maupun pengguna air di bagian hilir. Menurut Suprayitno (2008), Pemanfaatan jasa lingkungan air dari maupun di kawasan hutan telah dilakukan tanpa disadari oleh masyarakat, serta telah berlangsung baik secara non komersial (digunakan oleh masyarakat setempat guna keperluan rumah tangga) maupun komersial (perusahaan air minum, perusahaan air minum dalam kemasan, pembangkit listrik/*hydro-power*, perhotelan, perkebunan, dan lain-lain). Pemanfaatan air di dalam kawasan hutan ataupun hulu yang berkaitan dengan kelestarian ekosistem kawasan hutan belum diatur dalam regulasi. Sedangkan untuk pemanfaatan air di luar kawasan hutan ataupun hilir telah ada belum mengakomodir kepentingan bagi pendanaan untuk kepentingan pengelolaan dan kelestarian ekosistem hutan di bagian hulu (Suprayitno 2008).

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentan lahan.





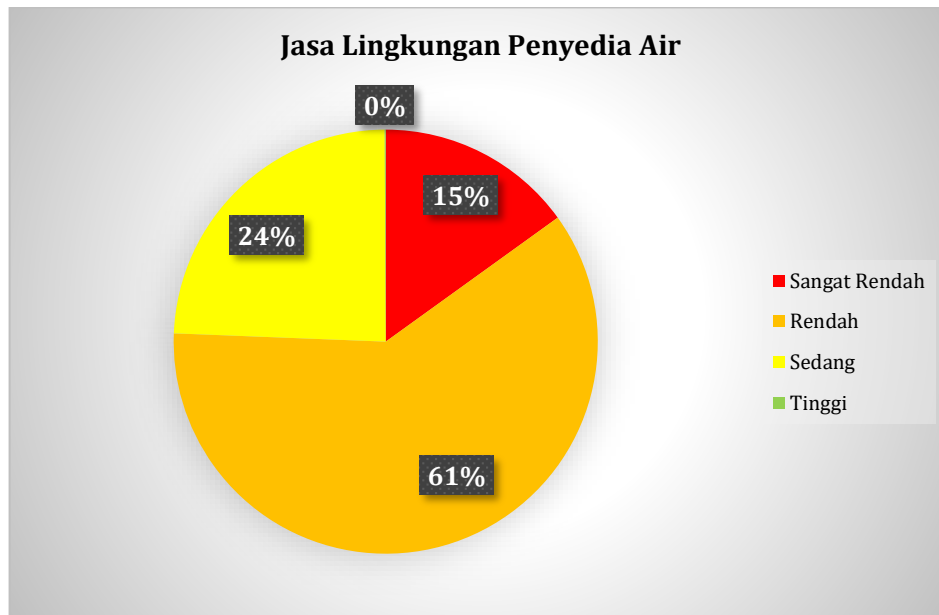
Tabel 3.13 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Penyedia Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Air (Ha)			
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
Pasimarannu	4.509,49	2.006,91	10.868,72	-
Pasilambena	3.440,23	5.618,06	1.205,61	-
Pasimasunggu	1.527,32	9.093,50	1.472,99	78,90
Pasimasunggu Timur	252,25	3.107,41	2.055,09	4,94
Takabonerate	2.107,36	466,34	1,34	-
Bontosikuyu	3.026,37	16.181,97	1.832,04	7,94
Bontoharu	1.686,83	8.242,54	2.861,11	-
Bontomanai	692,54	10.986,08	1.061,49	-
Benteng	301,29	190,31	4,09	-
Bontomatene	63,59	11.668,01	3.996,75	-
Buki	80,32	3.574,63	3.181,51	-
Grand Total (Ha)	17.687,59	71.135,77	28.540,74	91,77
Grand Total (%)	15,06	60,56	24,30	0,08

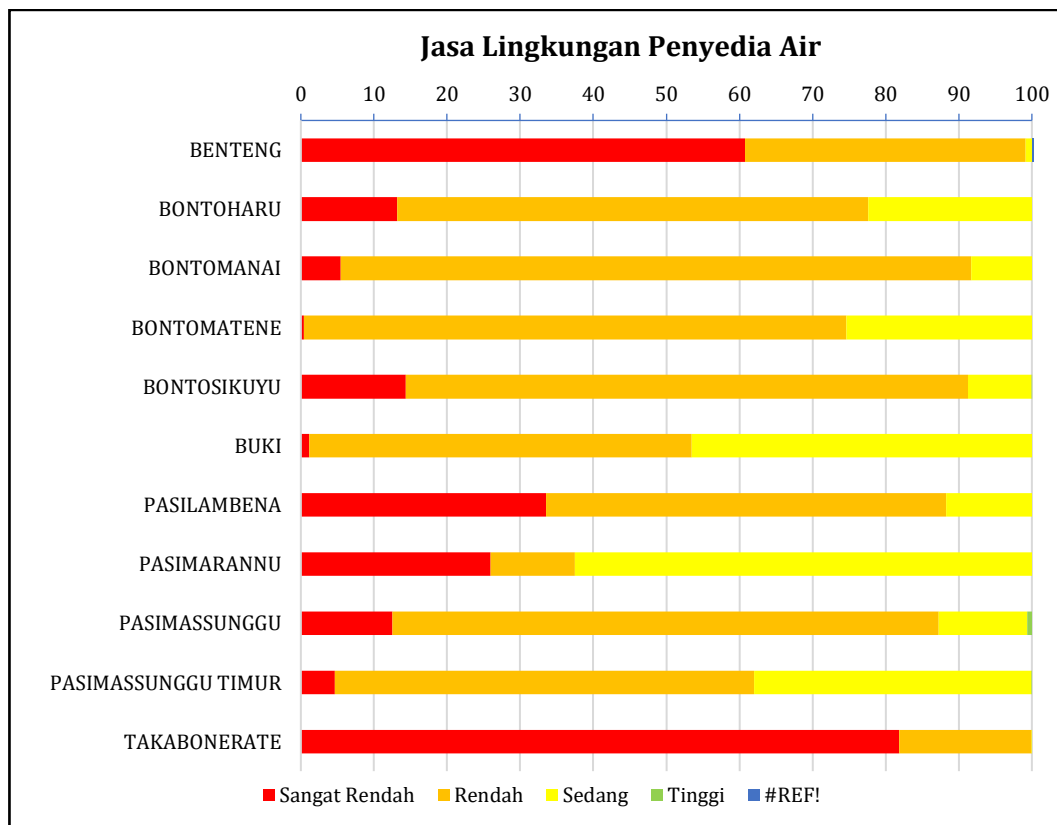
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi sebesar 0,08%. Kategori sedang sebesar 24,30%. Kategori rendah sebesar 60,56% dan untuk kategori kelas sangat rendah sebesar 15,06% dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum berada pada kategori sangat rendah untuk Jasa Ekosistem Penyediaan Airnya.





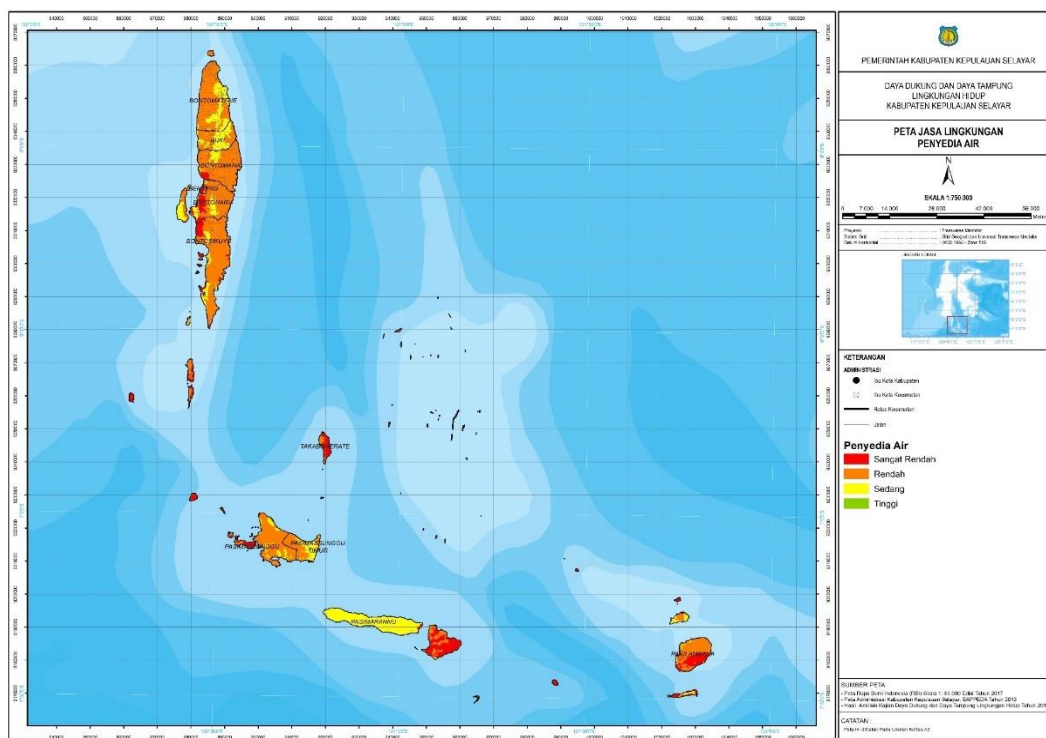
Gambar 3.20 Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Penyedia Air



Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.21 Grafik Jasa Lingkungan Penyedia Air





Gambar 3.22 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air

3.3.1.2 Fungsi Kinerja Ekosistem Penyediaan Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel 3.14 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	193,07	122,17	16.581,83	488,06	-
Pasilambena	462,12	-	8.562,91	1.238,87	-
Pasimasunggu	1.092,96	-	9.533,33	1.609,30	-
Pasimasunggu Timur	103,83	-	3.130,55	2.185,30	-

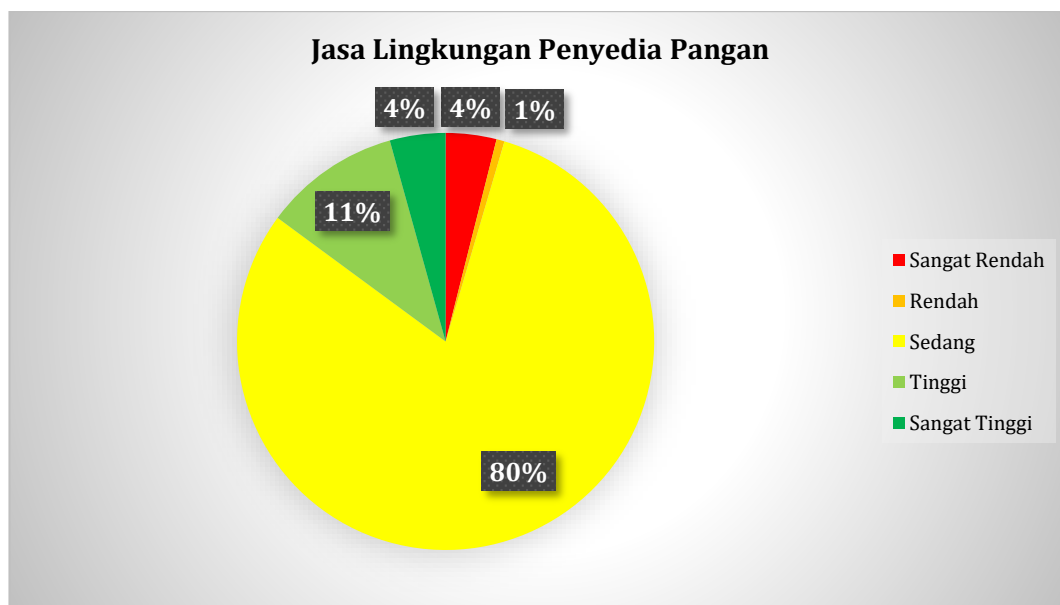




Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Takabonerate	843,66	-	1.730,04	1,34	-
Bontosikuyu	1.280,26	33,26	18.729,94	857,86	146,99
Bontoharu	191,55	47,80	9.594,18	1.750,35	1.206,60
Bontomanai	254,15	0,08	11.424,39	1.061,49	-
Benteng	116,39	184,90	190,31	4,09	-
Bontomatene	63,59	275,05	11.429,15	1.070,73	2.889,83
Buki	80,32	69,24	3.695,48	2.170,75	820,67
Grand Total (Ha)	4.618,89	732,50	94.602,13	12.438,27	5.064,09
Grand Total (%)	3,93	0,62	80,54	10,59	4,31

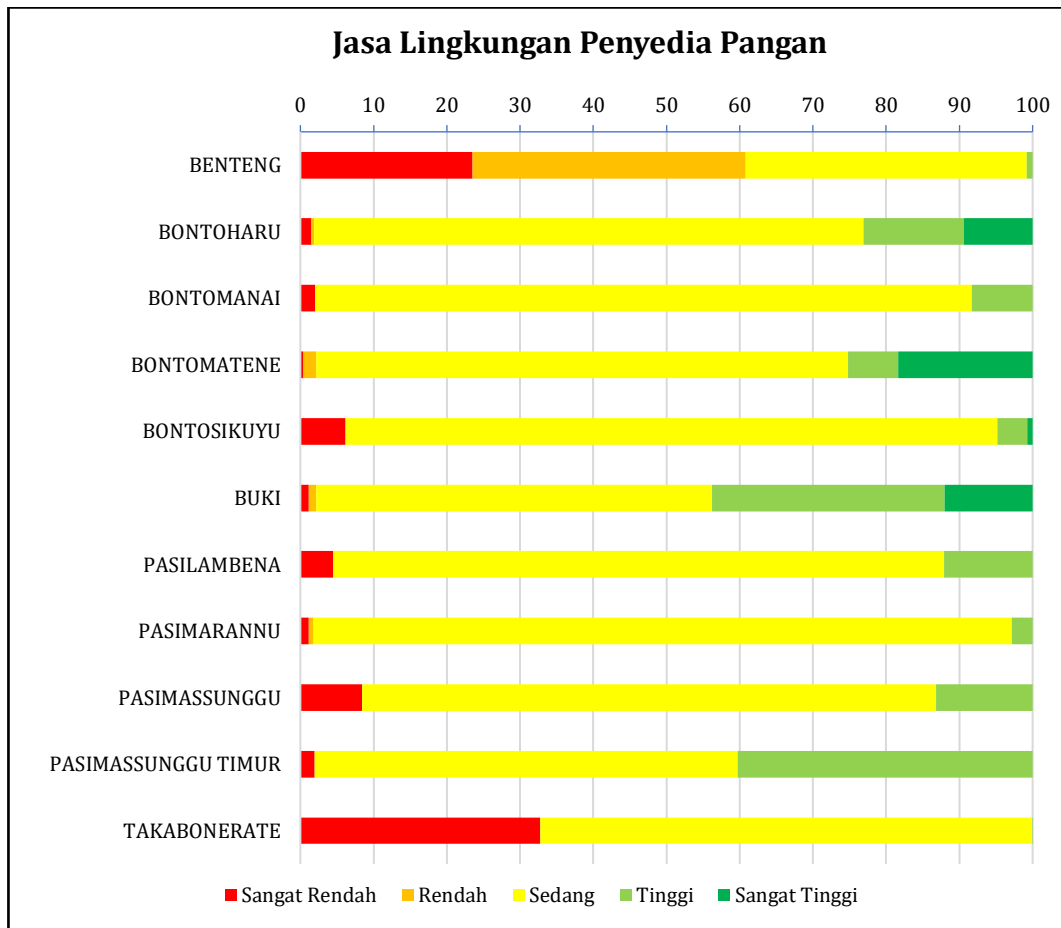
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 14,90 %. Kategori sedang sebesar 80,54 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 4,56 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar jasa ekosistem penyediaan pangan umumnya berada pada kategori Sedang dan Tinggi.



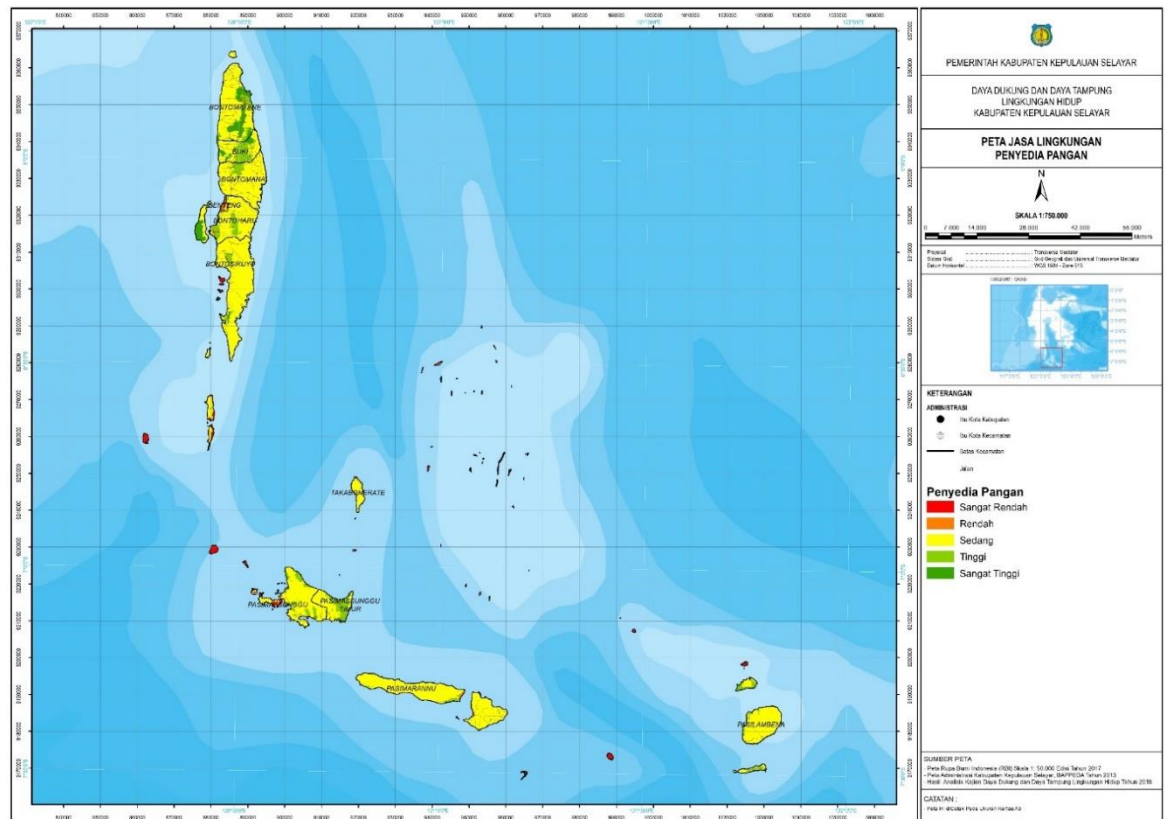
Gambar 3.23 Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Penyedia Pangan





Gambar 3.24 Grafik Jasa Lingkungan Penyedia Pangan





Gambar 3.25 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

3.3.2 Jasa Lingkungan Pengatur (*Regulating*)

3.3.2.1 Jasa Lingkungan Pengatur Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air





dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

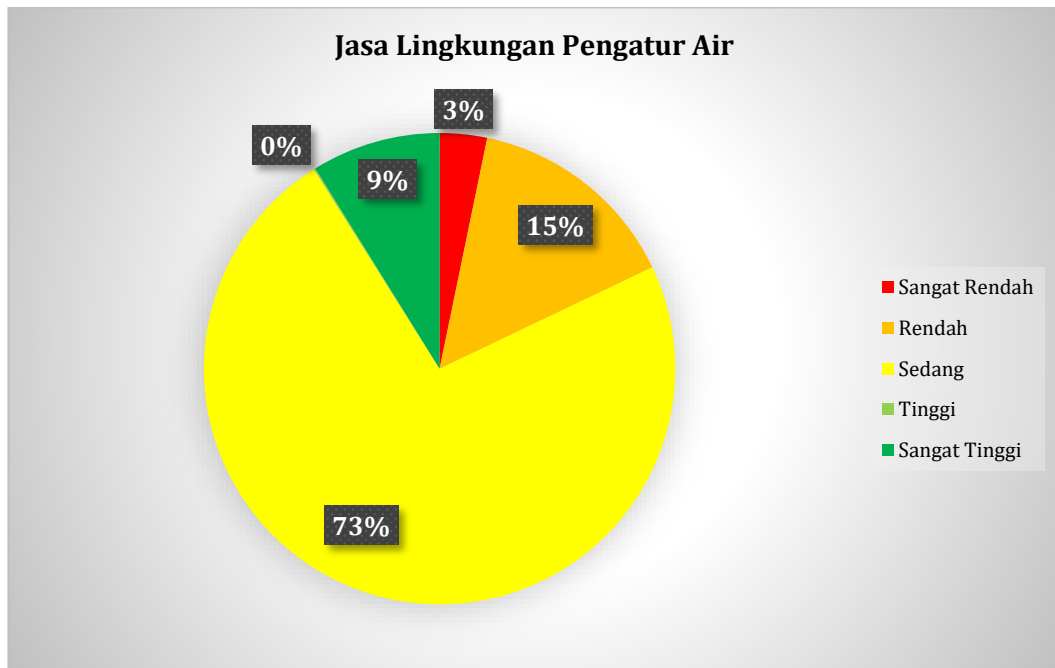
Tabel 3.15 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pengatur Air

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Air (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	108,58	73,71	6.822,17	-	10.380,66
Pasilambena	216,72	113,13	9.934,06	-	-
Pasimasunggu	222,05	1.117,73	10.754,04	78,90	-
Pasimasunggu Timur	1,99	101,84	5.310,92	-	4,94
Takabonerate	758,25	109,46	1.707,33	-	-
Bontosikuyu	1.151,85	3.170,58	16.679,91	45,97	-
Bontoharu	234,39	4.284,59	8.271,50	-	-
Bontomanai	198,37	1.766,81	10.774,93	-	-
Benteng	193,21	112,16	190,31	-	-
Bontomatene	601,42	3.687,28	11.439,65	-	-
Buki	123,60	2.699,47	4.013,37	-	-
Grand Total (Ha)	3.810,44	17.236,76	85.898,20	124,87	10.385,60
Grand Total (%)	3,24	14,68	73,13	0,11	8,84

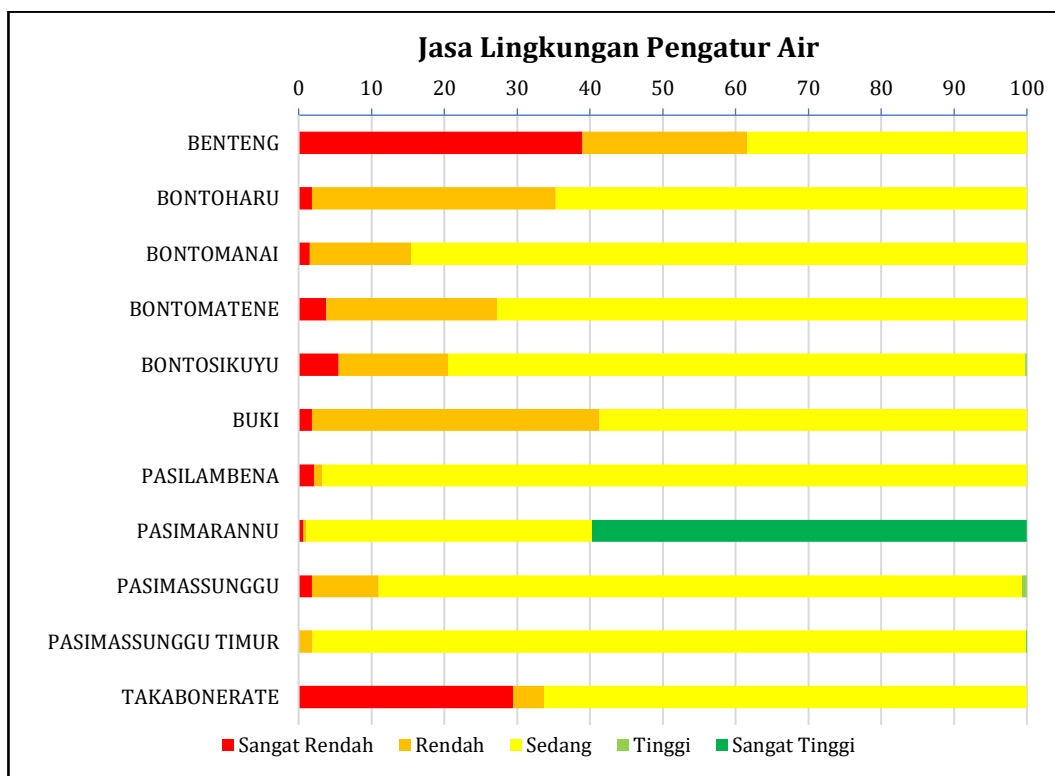
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa lingkungan pengatur air di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 8,95. Kategori sedang sebesar 73,13 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 17,92 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar jasa lingkungan pengatur air umumnya berada pada kategori rendah dan sedang.





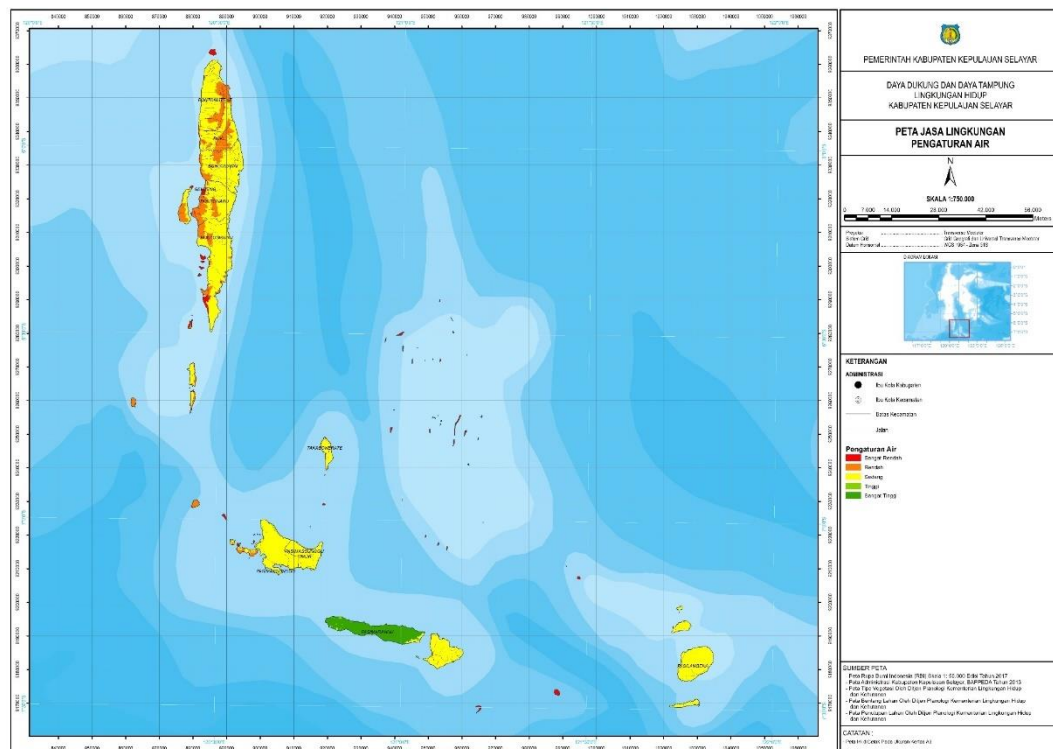
Gambar 3.26 Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Pengatur Air



Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.27 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Air





Gambar 3.28 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Air

3.3.2.2 Fungsi Kinerja Ekosistem Pengatur Iklim

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global.





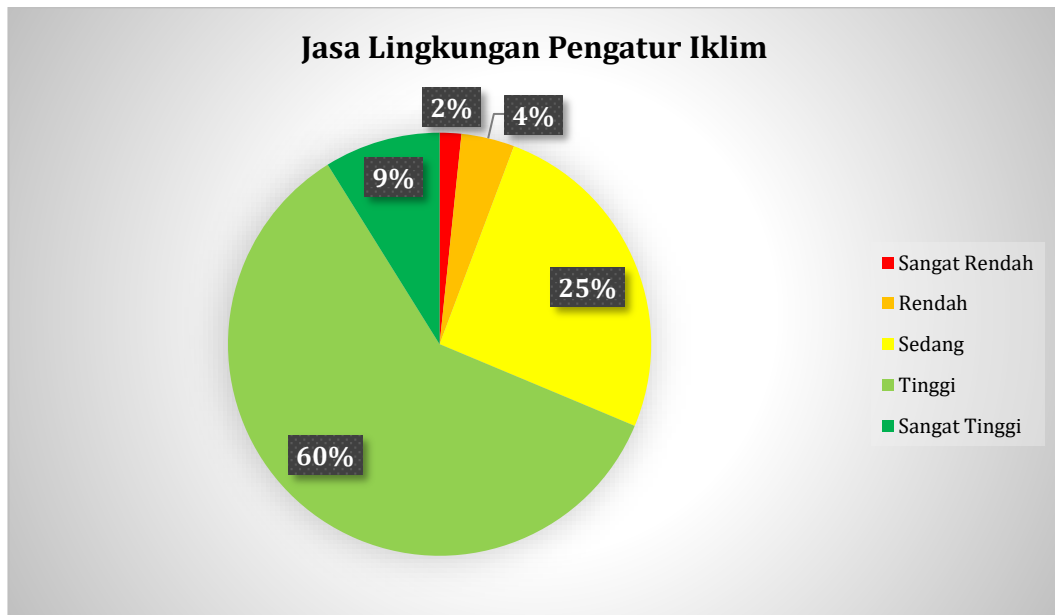
Tabel 3.16 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pengatur Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	108,58	73,71	4.816,27	2.005,90	10.380,66
Pasilambena	216,72	105,26	4.298,46	5.643,46	
Pasimasunggu	222,05	873,27	2.157,28	8.920,12	
Pasimasunggu Timur	1,99	418,60	1.761,48	3.237,62	
Takabonerate	666,37	173,32	1.298,36	436,98	
Bontosikuyu	431,94	1.322,52	3.115,45	16.140,37	38,03
Bontoharu	225,60	826,02	3.566,17	8.172,69	
Bontomanai	69,43	191,76	1.829,57	10.649,35	
Benteng	-	301,29	4,09	190,31	
Bontomatene	-	338,64	4.223,34	11.166,37	
Buki	-	149,55	2.991,42	3.695,48	
Grand Total (Ha)	1.942,68	4.,773,94	30.061,90	70.258,66	10.418,69
Grand Total (%)	1,65	4,06	25,59	59,82	8,87

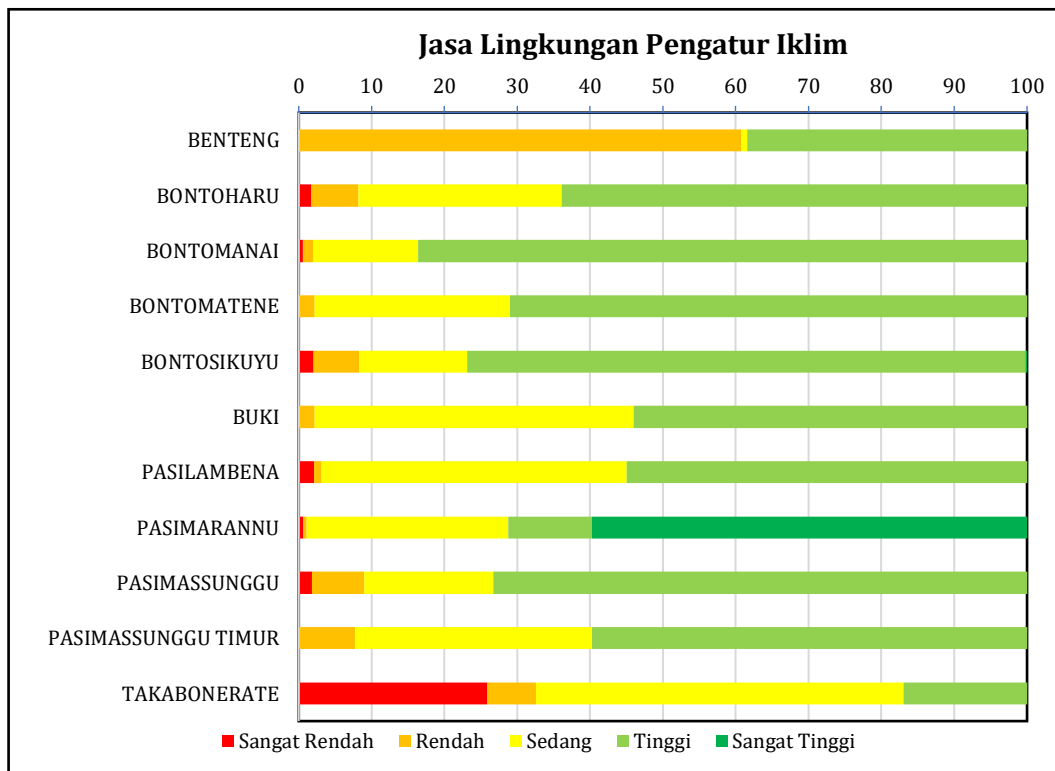
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 68,69 %. Kategori sedang sebesar 25,59 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 5,71 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar jasa ekosistem pengaturan iklim secara umum berada pada kategori tinggi.



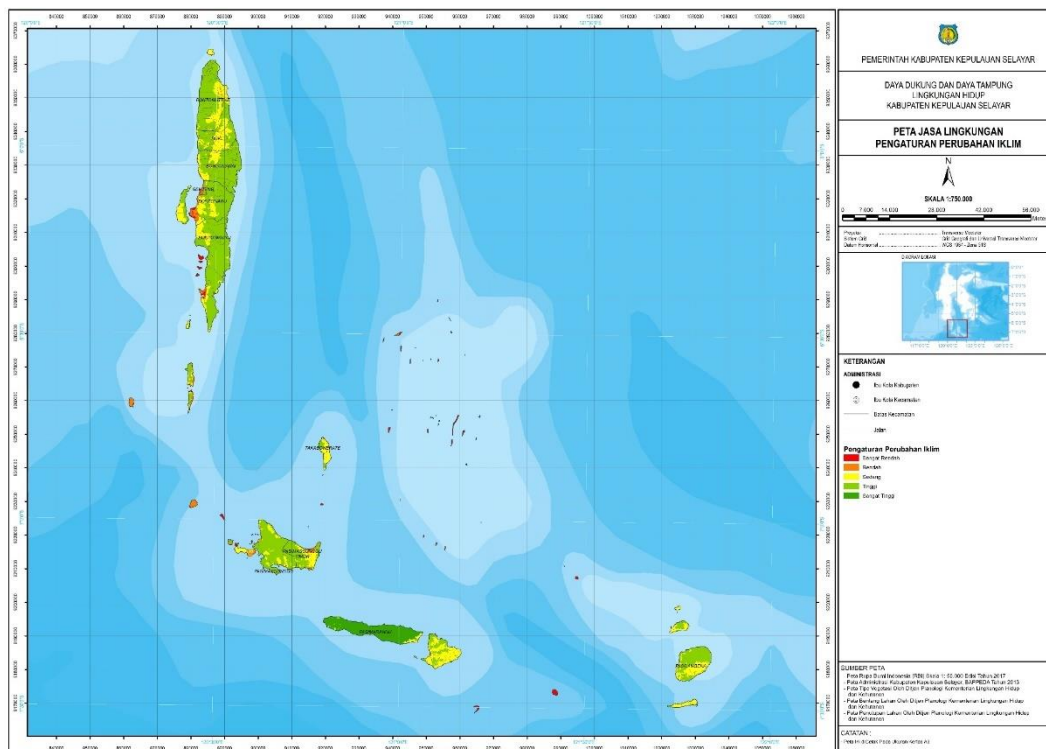


Gambar 3.29 Grafik Distribusi Kinerja Ekosistem Pengatur Iklim



Gambar 3.30 Grafik Jasa Lingkungan Pengatur Iklim





Gambar 3.31 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Perubahan Iklim

3.3.3 Jasa Lingkungan Pendukung (*Supporting*)

3.3.3.1 Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika terdapat suatu aliran air yang berlebihan merendam daratan. Rob adalah istilah lain untuk menyebutkan banjir pasang-surut. Banjir rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang menggenangi daratan, merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.

Tabel 3.17 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

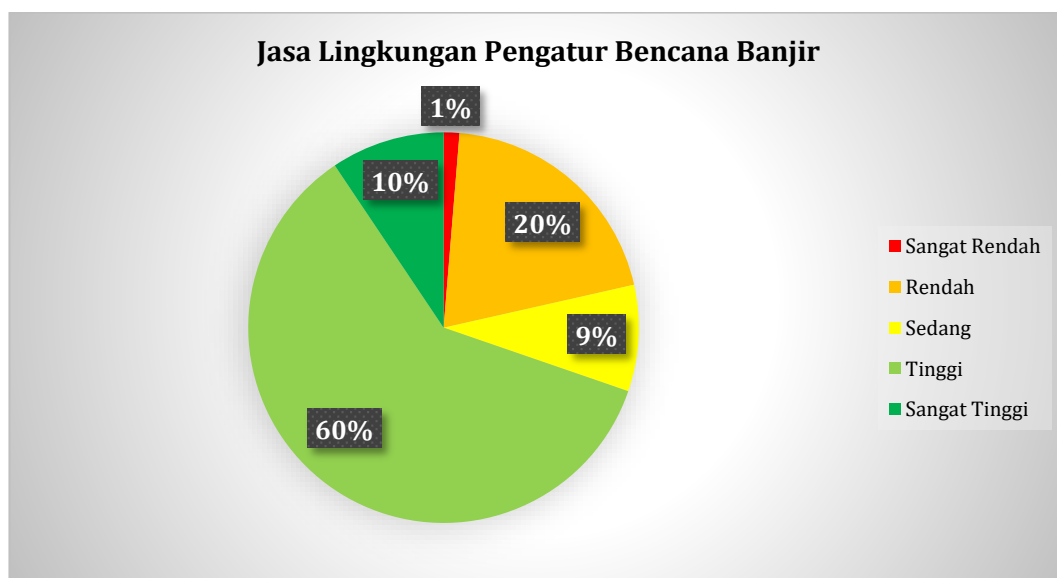




Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	108,58	561,77	4.328,21	2.005,90	10.380,66
Pasilambena	216,72	1.310,87	3.084,99	5.651,33	-
Pasimasunggu	222,05	2.280,90	439,83	9.229,94	-
Pasimasunggu Timur	1,99	2.156,93	23,15	3.237,62	-
Takabonerate	666,37	173,32	1.269,01	466,34	-
Bontosikuyu	313,26	3.252,98	802,92	16.241,81	437,34
Bontoharu	-	4.459,64	127,16	8.203,68	-
Bontomanai	-	1.747,10	7,00	10.986,00	-
Benteng	-	305,37	-	190,31	-
Bontomatene	-	4.299,20	262,78	11.130,17	36,19
Buki	-	3.140,97	-	3.505,39	190,09
Grand Total (Ha)	1.528,96	23.689,07	10.345,05	70.848,50	11.044,28
Grand Total (%)	1,30	20,17	8,81	60,32	9,40

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

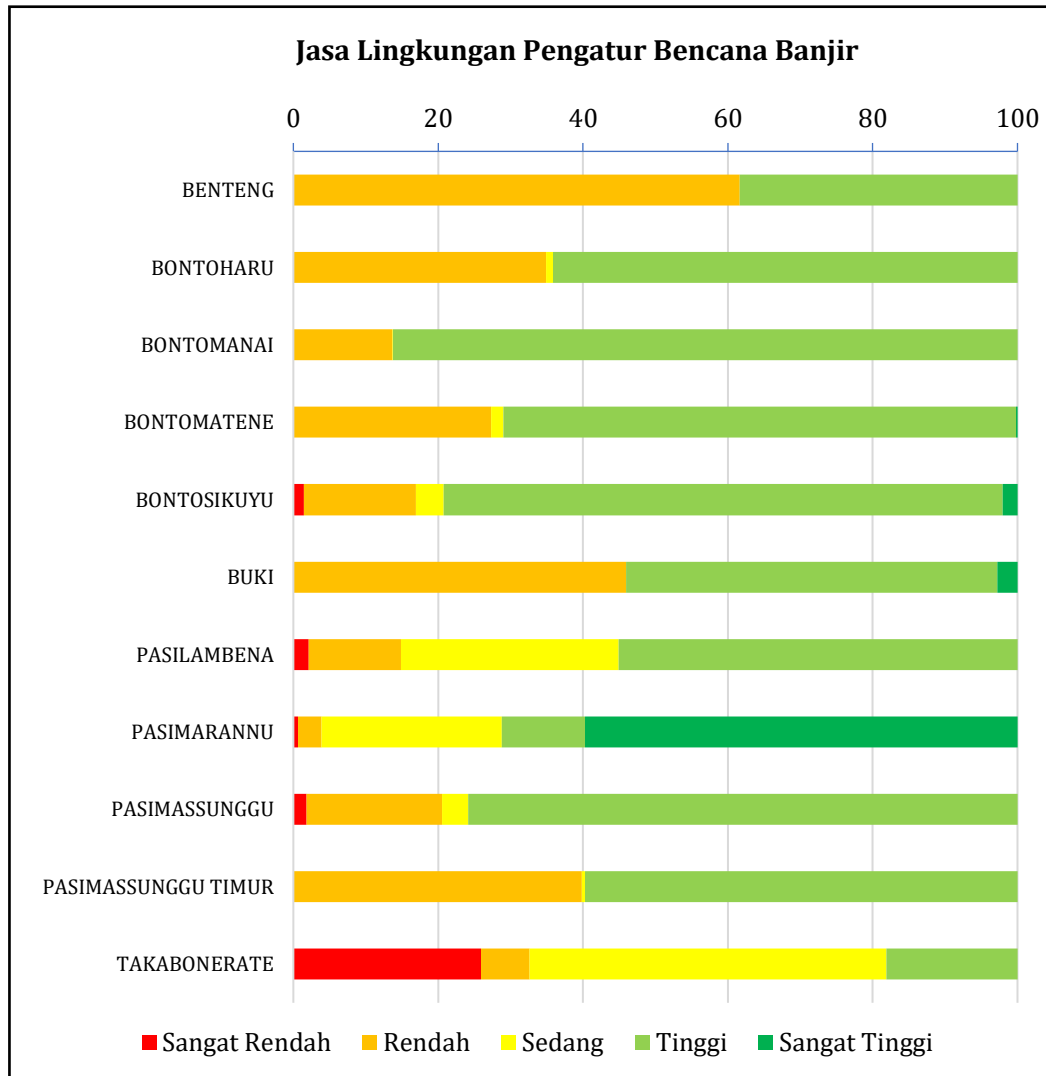
Berdasarkan hasil olah data, Jasa lingkungan mitigasi banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar jasa lingkungan mitigasi banjir umumnya berada pada kategori rendah dan sangat tinggi.

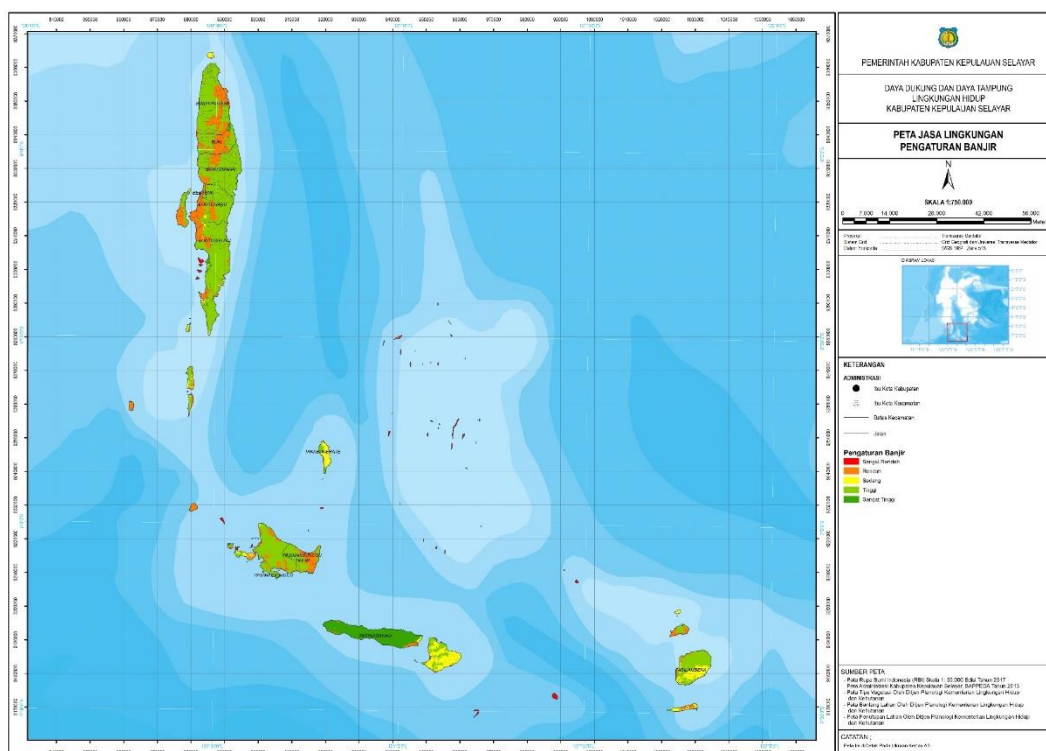




Gambar 3.32 Grafik Jasa Lingkungan Pengatur Bencana Banjir

Gambar 3.33 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Bencana Banjir





Gambar 3.34 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir

3.3.3.2 Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor. Bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudational dengan morfologi perbukitan.

Tabel 3.18 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor

Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	109,59	72,70	4.816,27	2.005,90	10.380,66
Pasilambena	216,72	105,26	4.290,60	5.618,06	33,26

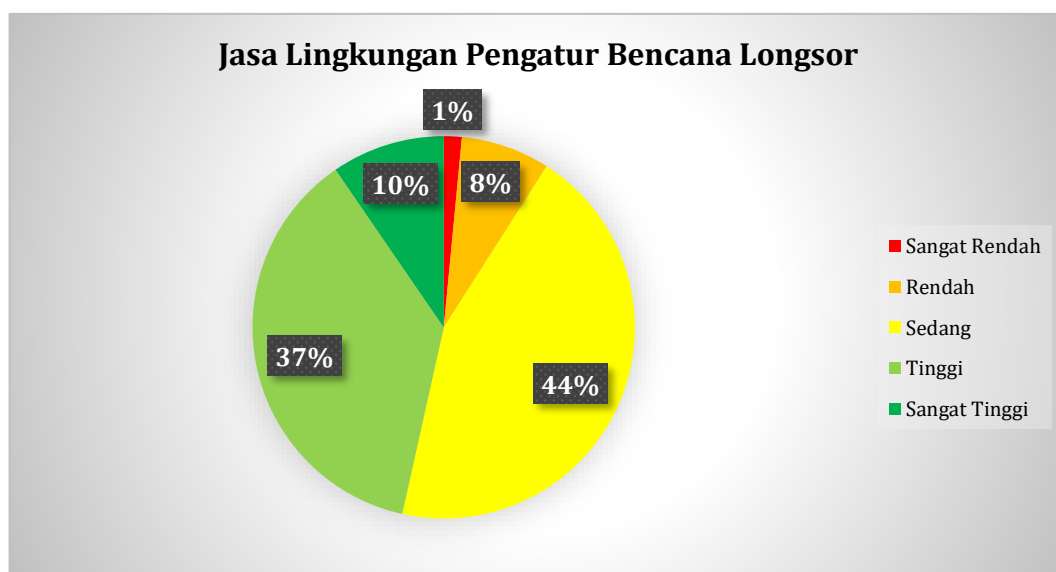




Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimasunggu	222,05	807,91	1.847,46	9.172,40	122,90
Pasimasunggu Timur	1,99	101,84	1.761,48	3.112,35	442,03
Takabonerate	758,25	80,11	1.269,01	466,34	1,34
Bontosikuyu	332,28	2.053,00	14.183,64	4.407,18	72,22
Bontoharu	73,77	1.774,06	7.884,47	2.865,56	192,64
Bontomanai	69,43	1.086,37	9.396,78	2.187,53	-
Benteng	-	301,29	13,70	180,70	-
Bontomatene	-	451,26	4.308,79	10.968,30	-
Buki	-	2.002,41	2.429,25	2.404,79	-
Grand Total (Ha)	1.784,07	8.836,20	52.201,45	43.389,12	11.245,04
Grand Total (%)	1,52	7,52	44,44	36,94	9,57

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa lingkungan mitigasi longsor di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 46,51 %. Kategori sedang sebesar 44,44 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 9,04 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar jasa lingkungan mitigasi longsor umumnya berada pada kategori sedang dan tinggi.

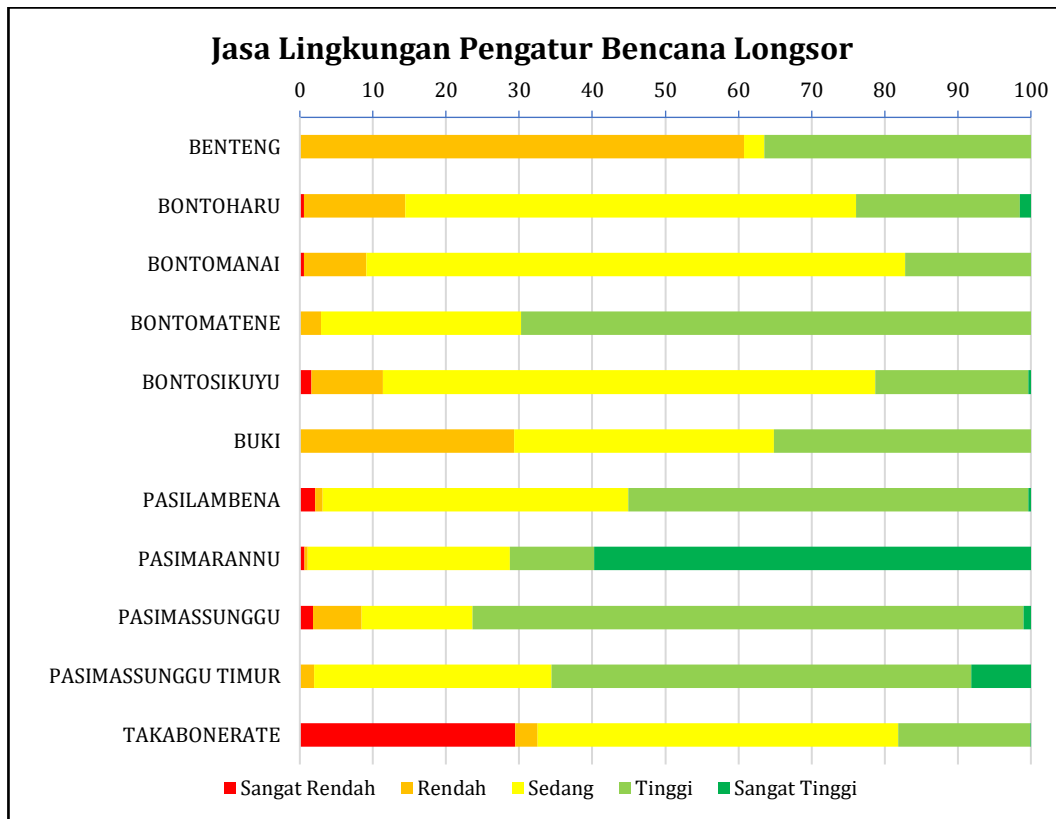


Gambar 3.35 Grafik Distribusi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor

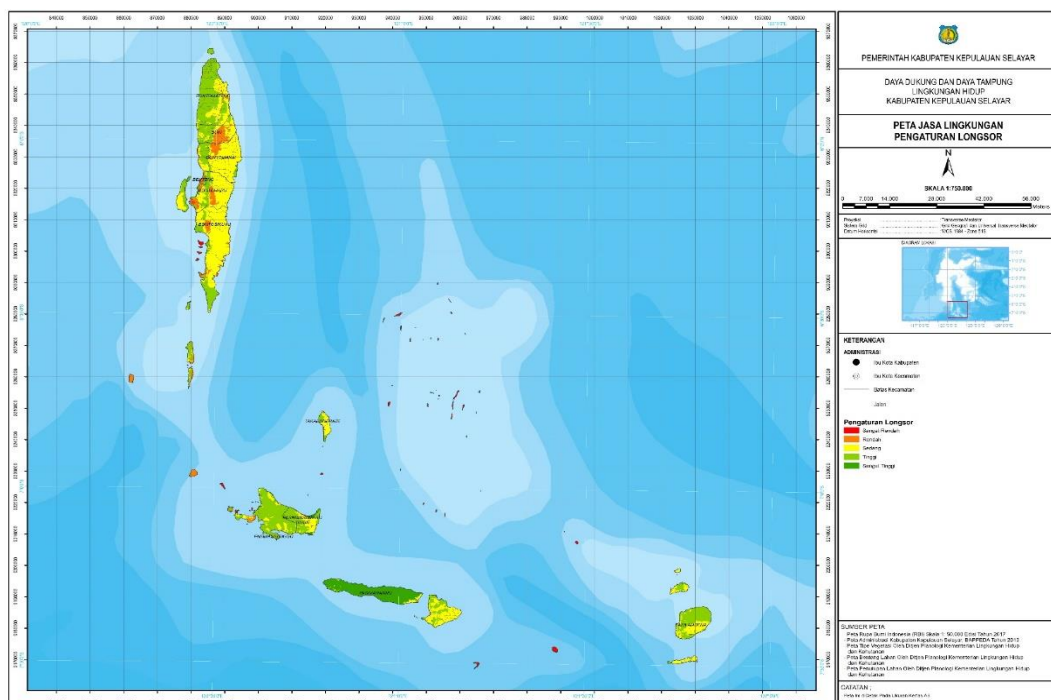


KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020



Gambar 3.37 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Longsor





3.3.3.3 Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (*Karhutla*)

Bencana alam lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

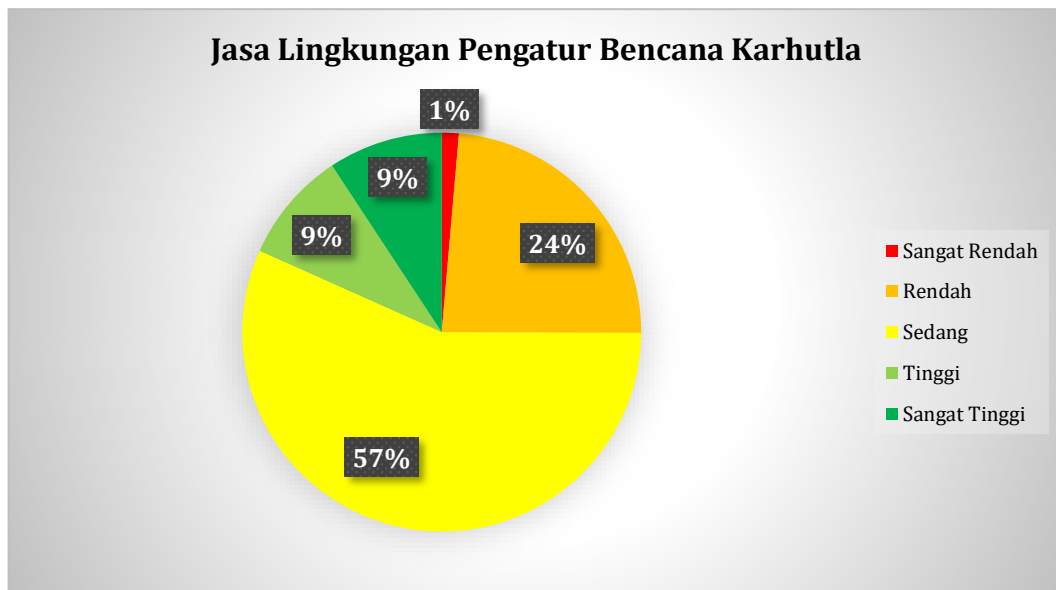
Tabel 3.19 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Karhutla Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Karhutla (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	108,58	4.762,82	2.120,27	12,80	10.380,66
Pasilambena	216,72	1.310,87	3.092,85	5.643,46	-
Pasimasunggu	222,05	2.245,70	7.344,35	2.229,66	130,95
Pasimasunggu Timur	1,99	1.840,17	1.975,70	1.280,13	321,69
Takabonerate	758,25	80,11	1.298,36	436,98	1,34
Bontosikuyu	313,26	3.662,77	16.493,16	526,29	52,83
Bontoharu	-	4.158,47	8.364,66	267,36	-
Bontomanai	-	1.749,46	10.990,65	-	-
Benteng	-	305,37	190,31	-	-
Bontomatene	-	4.561,98	11.130,17	36,19	-
Buki	-	3.140,97	3.505,39	190,09	-
Grand Total (Ha)	1.620,84	27.818,70	66.505,88	10.622,97	10.887,48
Grand Total (%)	1,38	23,68	56,62	9,04	9,27

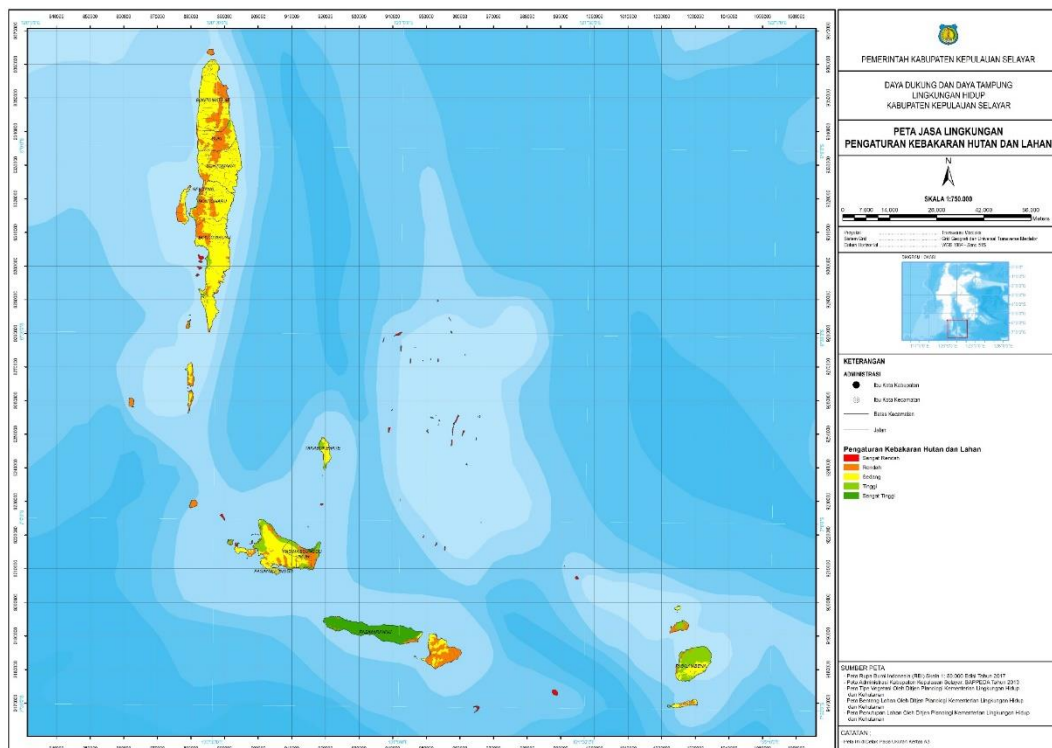
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa lingkungan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 18,31 %. Kategori sedang sebesar 56,62 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 25,06 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar jasa lingkungan mitigasi kebakaran hutan dan lahan umumnya berada pada kategori sedang.



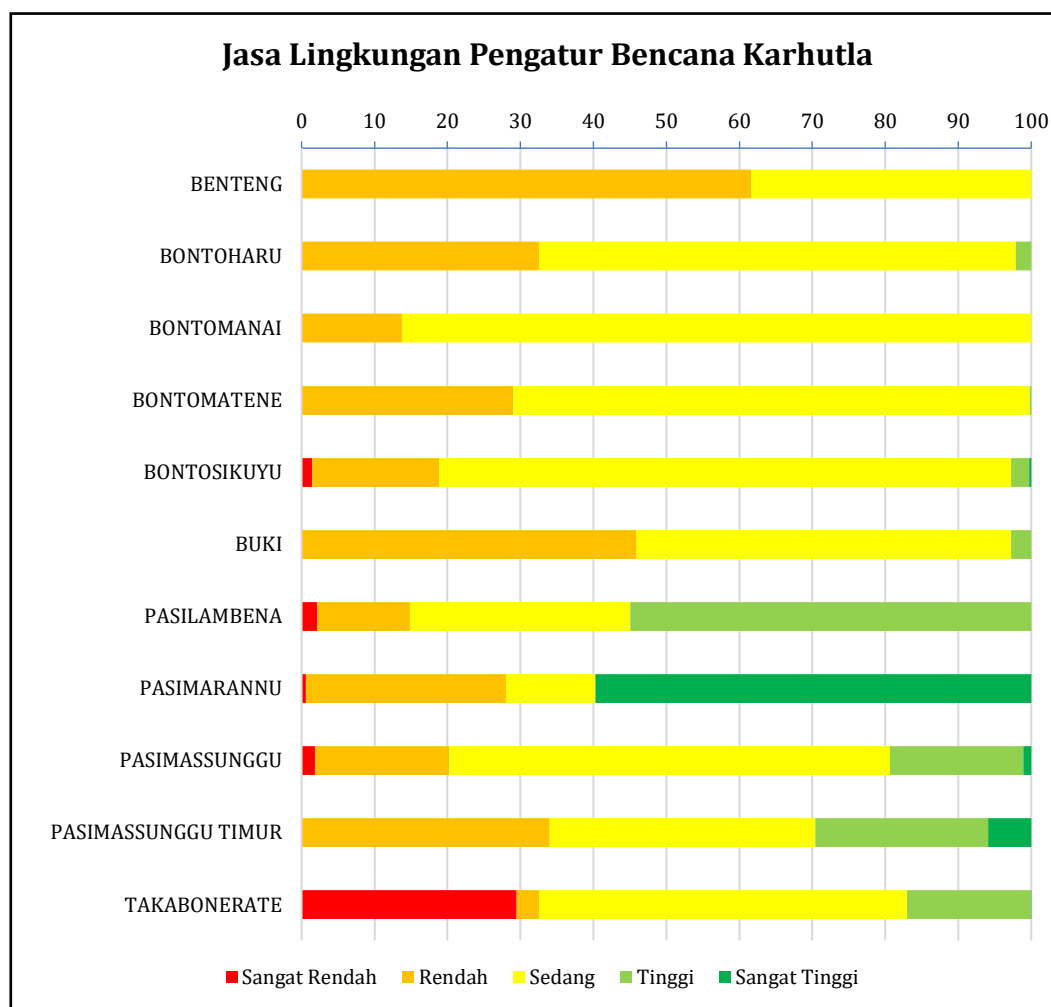


Gambar 3.39 Grafik Distribusi Kinerja Mitigasi Perlindungan Bencana Karhutla



Gambar 3.40 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran Hutan dan Lahan





3.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Secara harfiah efisien adalah penggunaan sumberdaya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip eko-efisiensi artinya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut.

Menurut Diana Puspita Sari (2012), eko-efisiensi merupakan strategi yang menggabungkan konsep efisiensi ekonomi dan konsep efisiensi ekologi berdasarkan prinsip efisiensi penggunaan Sumber Daya Alam. Eko-efisiensi menurut Kamus Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia didefinisikan sebagai suatu konsep efisiensi yang





memasukkan aspek sumber daya alam dan energi atau suatu proses produksi yang meminimalkan penggunaan bahan baku dari alam (misalnya air dan energi) serta meminimalkan dampak lingkungan akibat proses produksi.

Salah satu sumber daya alam pemanfaatannya tidak efisien di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sumber daya penutupan hutan dan lahan. Sektor kehutanan memegang peranan penting untuk kelancaran ekosistem lingkungan hidup, disamping menjaga kesinambungan sumberdaya air. Luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.362/Menhut-II/2019 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan. Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Penutup lahan atau tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati juga dapat didefinisikan sebagai suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Adapun secara umum penutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20.a Perubahan Penutupan Lahan Tahun 2019 di Kabupaten Selayar

PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2016	PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2019	LUAS PERUBAHAN (Ha)
Badan Air	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1,58
	Tubuh Air	85,78
Bandara/Pelabuhan	Bandara/Pelabuhan	31,59
Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Primer	225,79
	Lahan Terbuka	4,78
	Perkebunan	0,21
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	8,82
	Savana	1,43
	Semak Belukar	6,43



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2016	PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2019	LUAS PERUBAHAN (Ha)
Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Mangrove Sekunder	338,73
	Hutan Sekunder	0,97
	Lahan Terbuka	0,15
	Perkebunan	2,59
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,23
	Savana	0,29
	Semak Belukar	9,28
	Tambak	21,05
Hutan Primer	Hutan Mangrove Primer	26,56
	Hutan Primer	576,58
	Perkebunan	0,00
	Pertanian Lahan Kering	0,00
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	48,52
	Semak Belukar	10,52
Hutan Sekunder	Hutan Sekunder	15.781,82
	Lahan Terbuka	148,77
	Pemukiman	2,98
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,00
	Savana	0,00
	Semak Belukar	3,66
	Tambak	0,25
	Tubuh Air	0,04
Hutan Tanaman	Hutan Tanaman	1.158,01
	Lahan Terbuka	0,92
	Pemukiman	0,00
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,82
	Savana	0,00
	Semak Belukar	0,00
Lahan Terbuka	Hutan Mangrove Sekunder	0,00
	Lahan Terbuka	790,29
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3,92
	Semak Belukar	0,39
Pemukiman	Hutan Sekunder	0,03
	Lahan Terbuka	6,12
	Pemukiman	655,09
	Perkebunan	5,89
	Pertanian Lahan Kering	3,49
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	29,47



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2016	PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2019	LUAS PERUBAHAN (Ha)
Perkebunan	Semak Belukar	0,75
	Hutan Mangrove Primer	0,00
	Lahan Terbuka	6,95
	Pemukiman	0,02
	Perkebunan	11.631,81
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,14
	Savana	9,44
	Semak Belukar	0,05
	Tambak	9,25
	Pertanian Lahan Kering	Hutan Primer
Lahan Terbuka		42,71
Pemukiman		14,81
Perkebunan		0,17
Pertanian Lahan Kering		13.171,88
Pertanian Lahan Kering Campur Semak		4,91
Tambak		0,41
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Bandara/Pelabuhan	4,26
	Hutan Mangrove Primer	0,90
	Hutan Mangrove Sekunder	0,69
	Hutan Sekunder	94,56
	Hutan Tanaman	1,05
	Lahan Terbuka	205,73
	Pemukiman	55,47
	Perkebunan	9,34
	Pertanian Lahan Kering	5,04
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	43.058,07
	Savana	0,35
	Semak Belukar	12,72
	Tambak	0,05
Tubuh Air	0,00	
Savana	Savana	13.687,46
Sawah	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	10,03
	Sawah	38,63
Semak Belukar	Hutan Mangrove Sekunder	0,15
	Hutan Sekunder	0,03
	Hutan Tanaman	0,45
	Lahan Terbuka	406,63
	Pemukiman	4,10
	Perkebunan	3,04
	Pertanian Lahan Kering Campur	0,08



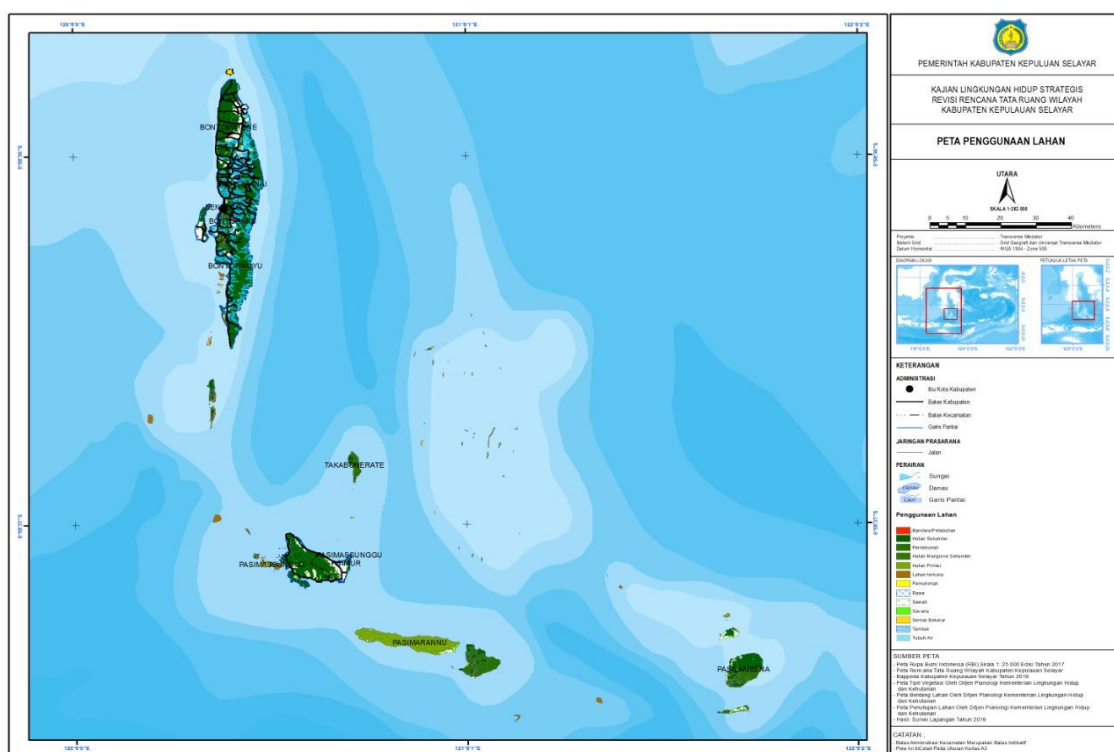
KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2016	PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2019	LUAS PERUBAHAN (Ha)
	Semak	
	Savana	5,69
	Semak Belukar	14.359,24
Semak Belukar Rawa	Semak Belukar Rawa	16,44
Tambak	Bandara/Pelabuhan	1,76
	Lahan Terbuka	0,09
	Perkebunan	0,00
	Pertanian Lahan Kering	2,32
	Tambak	584,34
Grand Total		117.455,87

Sumber : Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020



Gambar 3.41.a Peta Penutupan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar

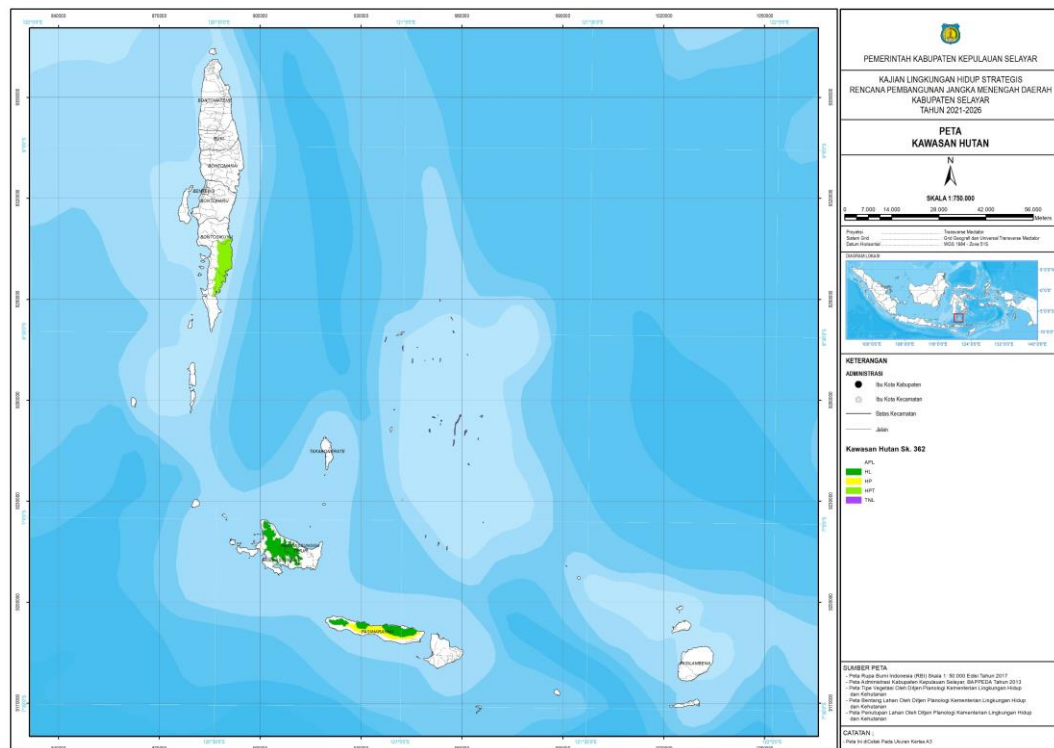
Berdasarkan hasil olah data penutupan lahan dominan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa pertanian lahan kering campur semak sebesar 36,99%, kemudian diikuti hutan sekunder sebesar 13,57%, belukar sebesar 12,58%, savana 11,65%. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya berupa penggunaan untuk perkebunan dan pertanian. Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan





lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar maka dilakukan analisis perubahan penutupan lahan.

Hasil analisis peta penutupan lahan antara tahun 2016 dan tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan penutupan lahan. Penutupan lahan yang mengalami pengurangan terbesar terdapat pada penutupan lahan semak belukar yaitu berkurang sekitar 420,18 Ha dari tahun 2016 ke 2019. Kemudian diikuti dengan pertanian lahan kering campur semak yang mengalami pengurangan sekitar 390,16 Ha. Untuk tutupan hutan sekunder mengalami pengurangan sekitar 155,70 Ha. Hal ini menunjukkan belum efisiennya pemanfaatan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar dikarenakan perubahan lebih besar dari pada yang tetap. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan akan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian.



Gambar 3.42.b Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Kepulauan Selayar





Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kawasan hutan sebesar 18.882,12 Ha atau sekitar 16,08% dari total luasan Kab.Kepulauan Selayar. Sementara tutupan hutan berdasarkan data penutupan lahan tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 18.206,33 Ha (15,50%). Hal ini menunjukkan terdapat inkonsistensi penggunaan lahan pada masing-masing fungsi kawasan hutan yang apabila tidak dikendalikan dapat mengancam kualitas dan ketersediaan sumber daya alam yang ada. Inkonsistensi tersebut diantaranya, terdapat pertanian lahan kering di kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Adapun tabel penggunaan lahan pada setiap kawasan diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.21.b Penutupan Lahan Tahun 2019 Pada Kawasan Hutan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penutupan Lahan Tahun 2019	SK. 362 Kawasan Hutan					Grand Total
	APL	HL	HP	HPT	TNL	
Bandara/Pelabuhan	37,61					37,61
Hutan Mangrove Primer	253,25					253,25
Hutan Mangrove Sekunder	339,56					339,56
Hutan Primer	372,73				203,85	576,58
Hutan Sekunder	4.513,37	8.517,04	2.847,01			15.877,41
Hutan Tanaman	1.159,52					1.159,52
Lahan Terbuka	1.491,52	113,47	7,29		0,85	1.613,14
Pemukiman	732,48					732,48
Perkebunan	11.653,04					11.653,04
Pertanian Lahan Kering	13.144,21			38,53		13.182,73
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	36.964,33	561,97	3,08	5.637,23		43.166,60
Savana	13.462,66	97,70	31,69		112,61	13.704,66
Sawah	38,63					38,63
Semak Belukar	13.712,28	687,86			2,89	14.403,04
Semak Belukar Rawa	16,44					16,44
Tambak	615,35					615,35
Tubuh Air	66,77	19,05				85,82
Grand Total	98.573,74	9.997,08	2.889,08	5.675,75	320,21	117.455,87

Sumber : Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020





3.5 Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Terhadap Perubahan Iklim

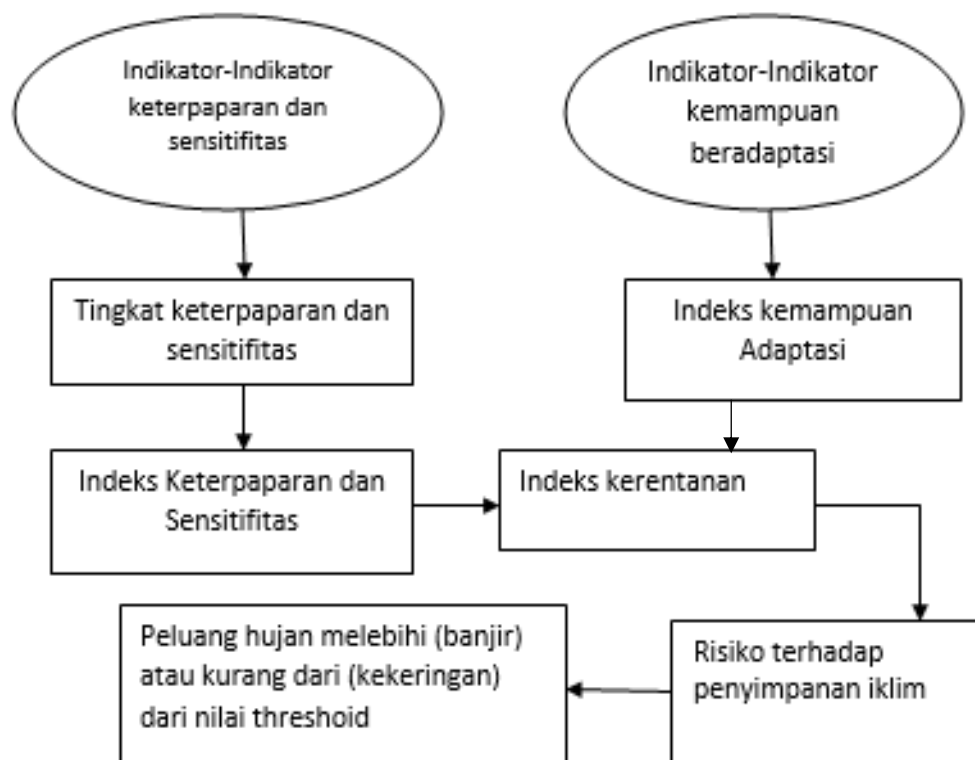
Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (*Exposure, E*), Sensitivitas (*Sensitivity, S*) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati batas toleransi dari sistem maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, Kerentanan (V) dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitivitas dan keterpaparan (*Sensitivity and Exposure Index, SEI*). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. Kapasitas (C) menunjukkan kemampuan untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usaha tani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian





alternatif yang banyak. Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam *Adaptive Capacity Index (ACI)*.



Gambar 3.43 Kerangka Pikir Perumusan Resiko Terhadap Penyimpangan Iklim

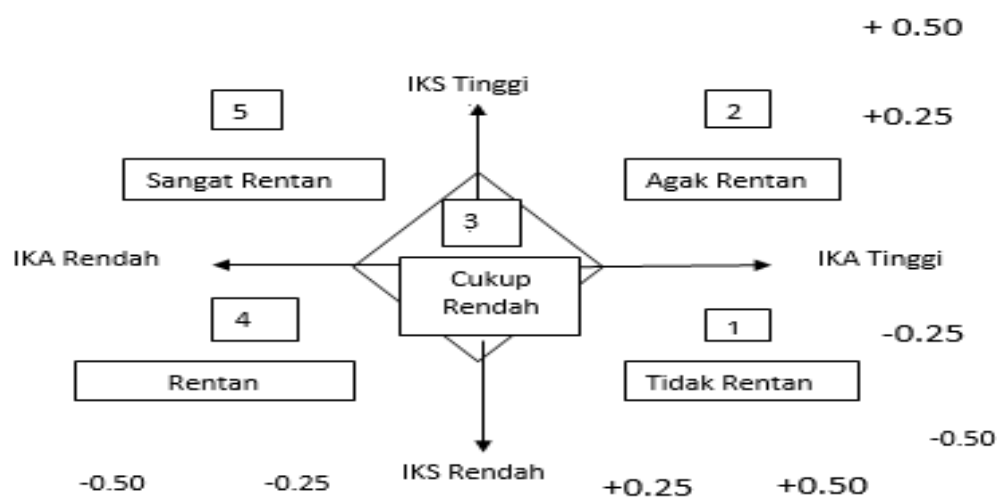
Nilai resiko dari dampak iklim tersebut selain dipengaruhi oleh indeks kerentanan, juga dipengaruhi oleh peluang kemunculannya. Seperti telah disebutkan diatas, besarnya dampak dipengaruhi tingkat toleransi sistem terhadap penyimpangan iklim yang terjadi. Dalam hal resiko terhadap bencana banjir dan kekeringan, maka peubah iklim curah hujan dapat dipergunakan sebagai pemicu kemunculan bencana. Dengan demikian, peluang kemunculan curah hujan di atas batas tertentu (untuk bencana banjir) atau curah hujan di bawah batas tertentu (dalam hal bencana kekeringan) bersama dengan indeks kerentanan dapat dipergunakan sebagai kategori terhadap nilai resiko yang akan terjadi. Gambar 3-43 menyajikan





logika berpikir dalam mengategorikan tingkat resiko terhadap penyimpangan iklim.

Untuk mendapatkan posisi kerentanan relatif desa terhadap desa lain dalam merespon bencana (*coping range*) ialah dengan melihat posisi nilai indeks kerentanan dan kapasitas desa/kelurahan dalam sistem kuadran. Sumbu mendatar mencerminkan kemampuan adaptasi (ACI) dan sumbu vertikal menyatakan tingkat keterpaparan (SEI), yang semuanya dinormalisasi pada internal (-0.5,0.5). Dengan demikian, sistem kuadran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 daerah seperti diperlihatkan pada Gambar 3.24. Sebagai contoh, apabila nilai indeks kerentanan dan kapasitas berada di kuadran 5, maka dikatakan selang toleransi desa terhadap kejadian bencana rendah (*coping range sempit*).



Kuadran 1 (Very Low)	: ACI High, SEI Low
Kuadran 2 (High)	: ACI High, SEI High
Kuadran 3 (Moderat)	: ACI Medium, SEI Medium
Kuadran 4 (Low)	: ACI Low, SEI Low
Kuadran 5 (Very High)	: ACI Low, SEI High

Gambar 3.44 Sistem Kuadran Indeks Kapasitas dan Indeks Kerentanan

Resiko terhadap penyimpangan merupakan fungsi dari tingkat kerentanan dan peluang terjadinya bencana iklim. Peluang terjadinya





bencana iklim diformulasikan berdasar peluang terjadinya curah hujan melebihi batas tertentu (untuk bencana banjir) atau peluang curah hujan di bawah nilai tertentu (untuk bencana kekeringan). Untuk memudahkan dalam memahami tingkat resiko ini selanjutnya dikategorikan menjadi 9 kelompok seperti disajikan pada gambar berikut.

Tingkat Kerentanan	Peluang Bencana Iklim				
	>0,9	0.6-0.9	0.6-0.3	0.3-0.1	<0.1
Sangat Tinggi	VVH	V-H	H	M-H	M
Tinggi	VH	H	M-H	M-H	L=M
Sedang	H	M-H	M	L-M	L
Rendah	M-H	M-H	L=M	L-M	VL
Sangat Rendah	M-H	L-M	L	VL	VVL

Keterangan:

VVH = Very Very High VH = Very High H = High
M-H = Medium to High M = Medium L-M = Medium to Low
L = Low VL = Very Low VVL = Very Very Low

Gambar 3.45 Kategorisasi Resiko Iklim dan Berdasarkan Tingkat Kerentanan dan Peluang Bencana Iklim

Adapun data hasil perhitungan tingkat kerentanan setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan uraian dibawah ini:

Tabel 3.22 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar

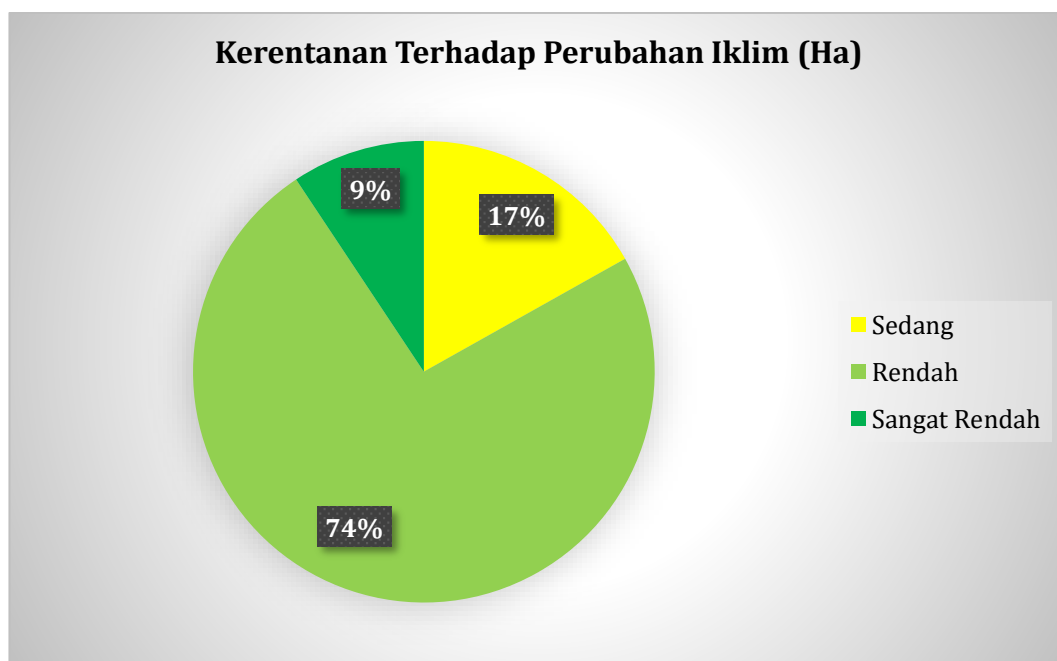
Kecamatan	Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (Ha)		
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang
Pasimarannu	-	11.939	5.446
Pasilambena	-	9.138	1.126
Pasimasunggu	5.047	4.853	2.273
Pasimasunggu Timur	5.420	-	-
Takabonerate	1.217	1.358	-
Bontosikuyu	-	20.163	885





Kecamatan	Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (Ha)		
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang
Bontoharu	-	12.040	744
Bontomanai	807	11.933	-
Benteng	-	-	489
Bontomatene	1.971	13.758	-
Buki	5.343	1.494	-
Grand Total (Ha)	19.804	86.676	10.963

Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020



Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Gambar 3.46 Grafik Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (Ha)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa luas untuk kategori “sedang” Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim terhitung 10.963 Ha yang kemudian pemasok terbanyak dari Kecamatan Pasimarannu yakni sebanyak 5.446 Ha, untuk kategori “rendah” Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim terhitung 86.676 Ha yang kemudian pemasok terbanyak dari Kecamatan Bontosikuyu yakni sebanyak 20.163 Ha, adapun untuk kategori “sangat rendah” Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim terhitung 19.804 Ha yang kemudian pemasok terbanyak dari Kecamatan Pasimasunggu Timur yakni sebanyak 5.240 Ha. Kategori tersebut merupakan hasil dari pembobotan berdasarkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di Kecamatan yang dilihat di





setiap desa, baik fasilitas kesehatan, pendidikan maupun kondisi dari infrastrukturnya.

Tabel 3.23 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (Desa)		
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang
Pasimarannu	-	4	2
Pasilambena	-	4	1
Pasimasunggu	2	3	1
Pasimasunggu Timur	4	-	-
Takabonerate	2	6	-
Bontosikuyu	-	10	1
Bontoharu	-	7	1
Bontomanai	1	7	-
Benteng	-	-	3
Bontomatene	2	9	-
Buki	3	2	-
Grand Total (Ha)	14	52	9

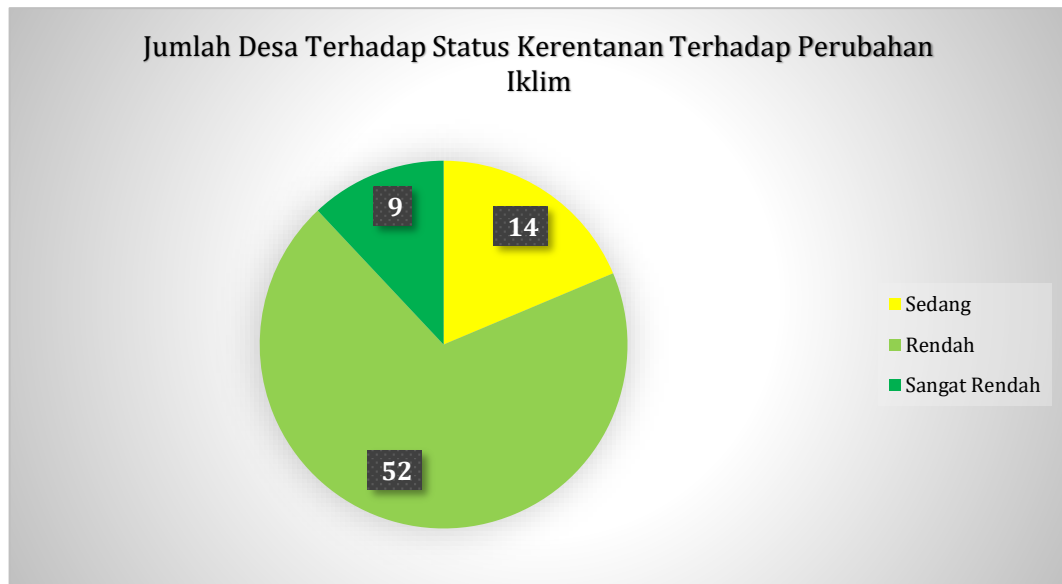
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan tabel diatas, secara umum di Kabupaten Kepulauan Selayar dari 88 jumlah Desa/Kelurahan, teridentifikasi memiliki 75 Desa/Kelurahan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kecamatan Bontomatene merupakan terbanyak jumlah Desa/Kelurahannya yang tergolong rentan yakni sebanyak 11 Desa/Kelurahan. Untuk kategori “sedang” Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim terhitung 9 Desa/Kelurahan yang kemudian pemasok terbanyak dari Kecamatan Benteng yakni sebanyak 3 Desa/Kelurahan, untuk kategori “rendah” Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim terhitung 52 Desa/Kelurahan yang kemudian pemasok terbanyak dari Kecamatan Bontosikuyu yakni sebanyak 10 Desa/Kelurahan, adapun untuk kategori “sangat rendah” Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim terhitung 14 Desa/Kelurahan yang kemudian pemasok terbanyak dari Kecamatan



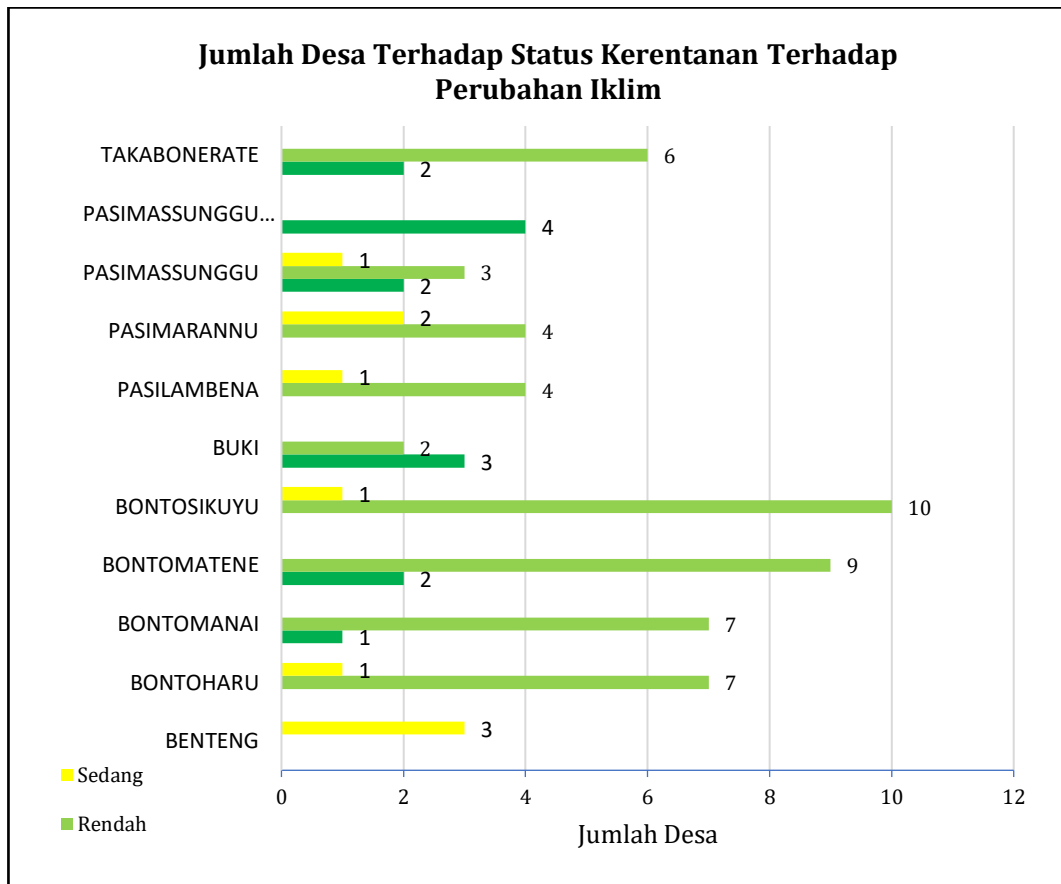


Pasimasunggu Timur yakni sebanyak 4 Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut umumnya berada pada tingkat keterpaparan dan sensitivitas yang sedang terhadap perubahan iklim, dan tingkat kapasitas untuk beradaptasinya juga cenderung sedang sampai rendah. Hal ini pada akhirnya tingkat kerentanannya menjadi sedang.



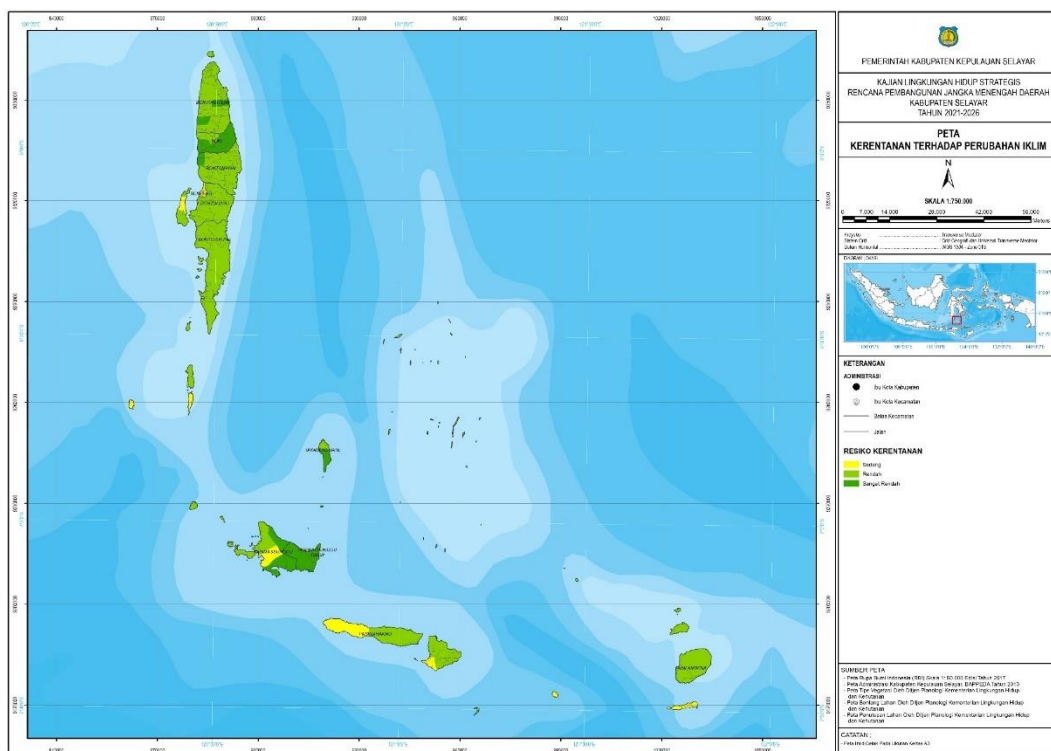
Gambar 3.47 Grafik Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim





Gambar 3.48 Grafik Jumlah Desa Terhadap Status Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim





Gambar 3.49 Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim

3.6 Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam menunjang pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal yang dikaji dalam melihat potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah potensi keanekaragaman genetik. Semakin tinggi keanekaragaman hayati atau genetik, maka semakin tinggi daya dukungnya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar berhubungan erat dengan Indikasi jasa penyedia sumber daya genetik dan indikasi jasa ekosistem pendukung habitat keanekaragaman hayati.





3.6.1 Indikasi Jasa Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman system ekologi di mana mereka hidup. Termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya (*Global Village Translations, 2007:4*). Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk derajat keanekaragaman sumberdaya alam hayati, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah.

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Tabel 3.24 Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversity (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pasimarannu	61,21	242,24	4.683,32	-	12.398,35
Pasilambena	62,18	254,05	4.164,07	-	5.783,60
Pasimasunggu	114,26	884,89	2.332,35	-	8.841,22
Pasimasunggu Timur	90,32	330,27	1.761,48	4,94	3.232,68
Takabonerate	101,90	422,20	1.516,77	-	534,16
Bontosikuyu	220,28	1.117,78	3.529,61	-	16.180,65
Bontoharu	224,66	282,05	4.080,10	-	8.203,68
Bontomanai	254,23	-	1.499,88	-	10.986,00
Benteng	289,65	11,64	4,09	-	190,31
Bontomatene	327,86	10,78	4.223,34	-	11.166,37

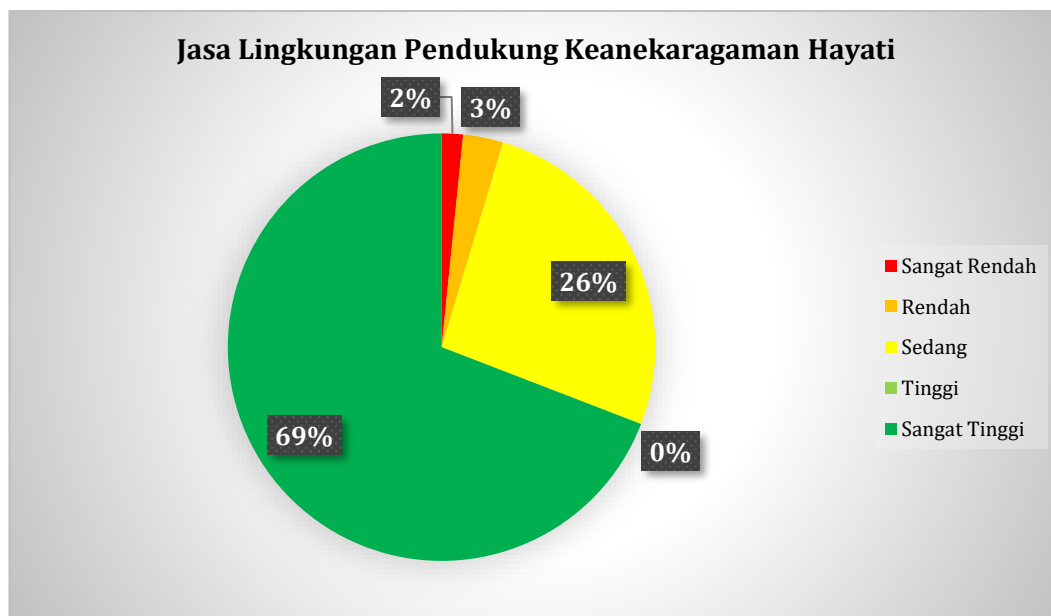




Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversity (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Buki	149,55	-	2.991,42	-	3.695,48
Grand Total (Ha)	1.896,11	3.555,90	30.786,41	4,94	81.212,51
Grand Total (%)	1,61	3,03	26,21	0,00	69,14

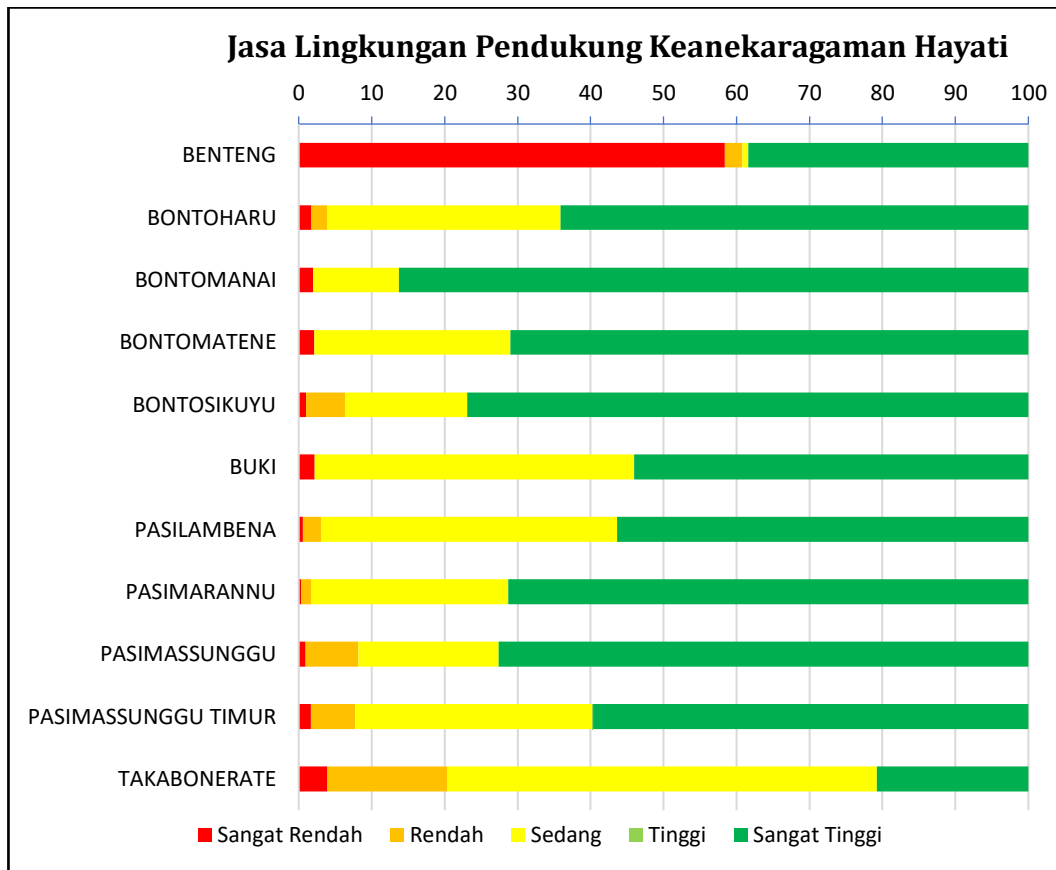
Sumber: Analisis Data Tim KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2020

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi - sangat tinggi) sebesar 69,14 %. Kategori sedang sebesar 26,21 % dan untuk kategori kelas rendah (rendah-sangat rendah) sebesar 4,64 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori sangat tinggi.



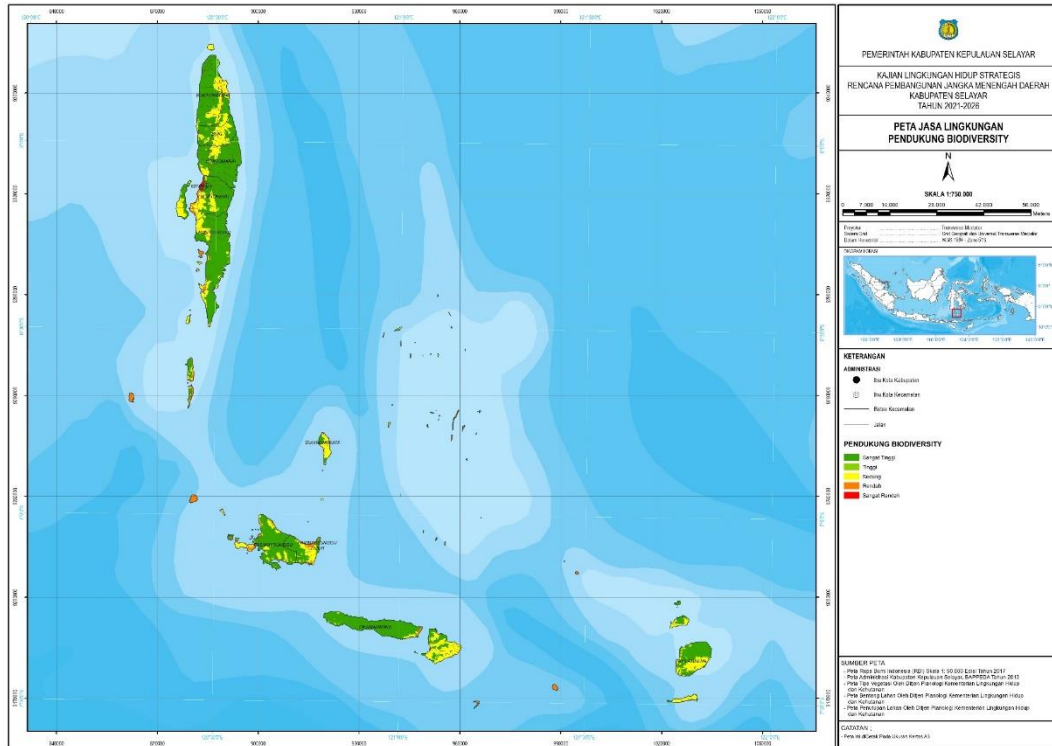
Gambar 3.50 Grafik Distribusi Luas Fungsi Kinerja Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kepulauan Selayar





Gambar 3.51 Grafik Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati



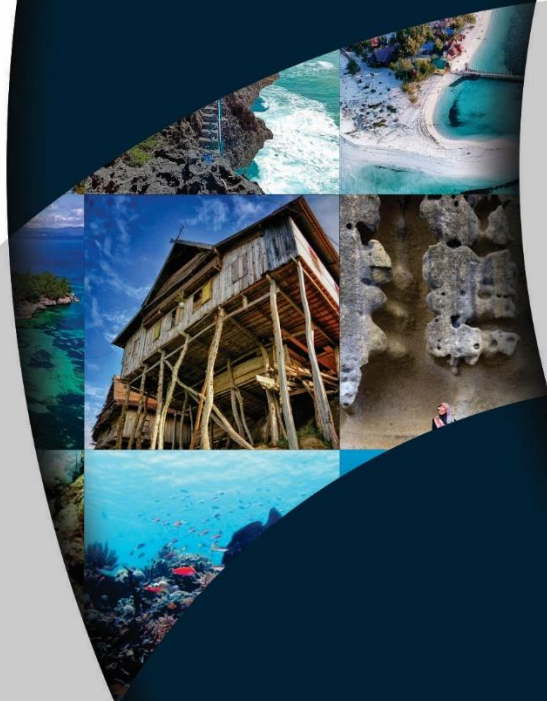


Gambar 3.52 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati



BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



4.1 Capaian TPB Menurut Kategori Capaian

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki target indikator sebanyak 196 yang akan dicapai untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang ditetapkan sebagai kewenangan kabupaten namun tidak terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti indikator terkait jalan tol, rel kereta api, daerah tertinggal, kota metropolitan, DAS Prioritas. Selain itu terdapat beberapa indikator yang ditetapkan secara nasional lebih cocok untuk di ukur pada level provinsi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, kategori capaian TPB Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
- B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
- C. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target





D. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 46% atau 90 capaian indikator, dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara itu, sebanyak 26% (51 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 17 capaian indikator atau 9% dari total indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 19% atau 38 indikator belum/tidak memiliki data. persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar secara lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 4.1** dan **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Capaian Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar

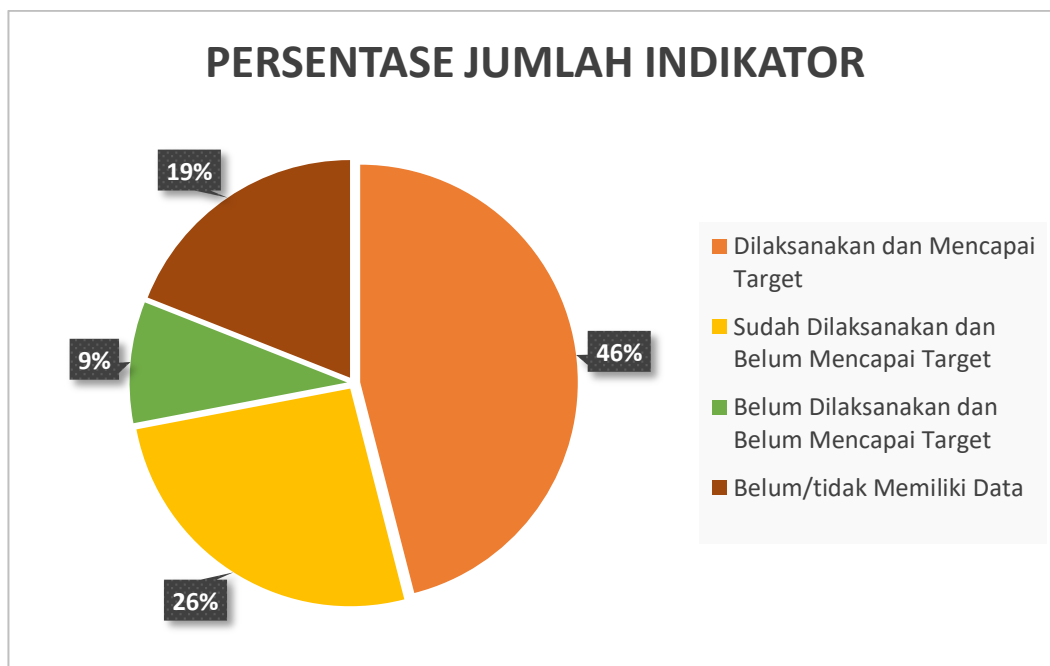
No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	90	46
2	B	51	26
3	C	17	9
4	D	38	19
Total Indikator		196	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020





Gambar 4.1 Grafik Persentase Jumlah Indikator



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Berdasarkan diagram diatas, indikator TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 dengan capaian indikator sebanyak 16 yakni Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. TPB 3 juga memiliki capaian kategori indikator terbanyak dalam kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dengan total 8 capaian. Sementara, pada kategori indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 16 memiliki jumlah terbanyak yaitu 4 indikator dengan tujuan Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan. Sedangkan pada kategori capaian indikator yang belum/tidak memiliki data, TPB 8 memiliki jumlah terbanyak yakni 9 indikator capaian dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator TPB pada masing-masing kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.





Tabel 4.2 Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori Indikator				
		A	B	C	D	Total
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	13	7	1	1	22
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	8	2	0	1	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	16	8	0	5	29
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	6	5	0	2	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	8	5	0	1	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6	4	3	0	13
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	1	1	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	6	4	0	9	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	2	0	0	7	9
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	0	2	5	10
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	2	3	3	0	8
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1	0	1	1	3
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	0	1	0	0	1
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	2	0	0	1	3
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	0	1	2	3
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,	11	6	4	0	21



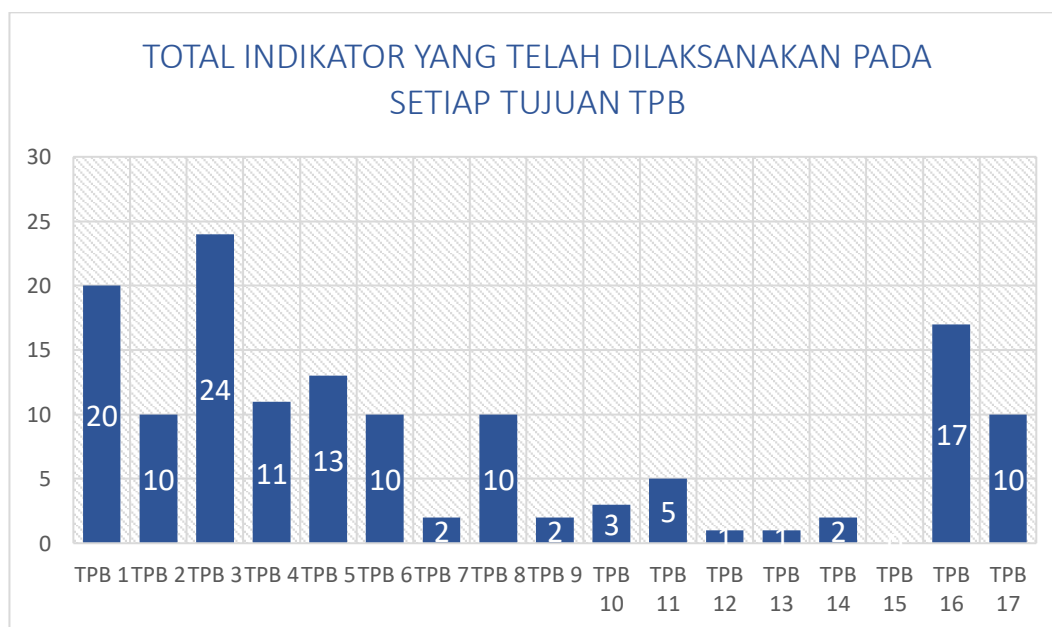


No. TPB	Tujuan TPB	Kategori Indikator				
		A	B	C	D	Total
	Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	5	2	3	15
Total		90	51	17	38	196

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Dari total 196 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah indikator yang telah dilaksanakan secara keseluruhan adalah 141 indikator, dimana TPB 3 merupakan indikator yang paling banyak dilaksanakan.

Gambar 4.2 Grafik Total Indikator Terlaksana Pada Setiap Tujuan TPB



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

4.1.1 Indikator Terlaksana dan Mencapai Target

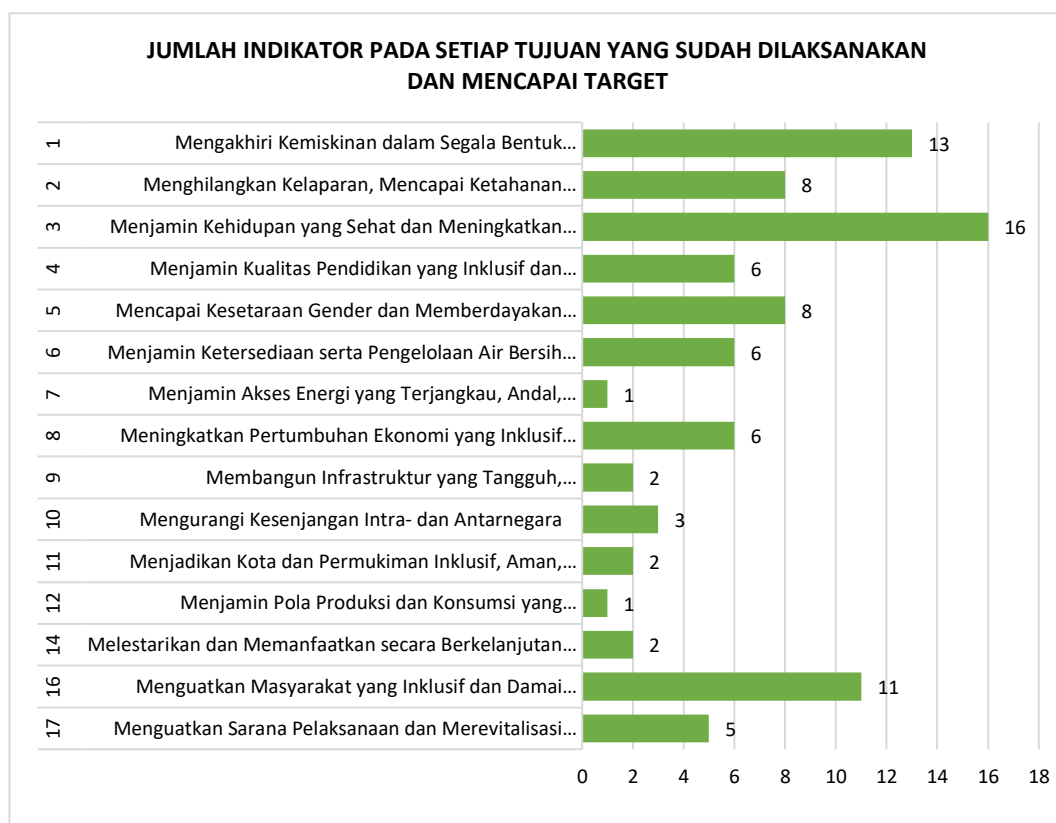
Jumlah indikator TPB yang sudah terlaksana dan mencapai target di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 90 indikator dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, terlihat bahwa TPB 3 dengan tujuan untuk Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan





Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia memiliki capaian indikator terbanyak yakni 16 indikator. Sementara TPB 7 dengan tujuan Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua dan TPB 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, memiliki capaian yang paling kecil yakni masing-masing 1 indikator.

Gambar 4.3 Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 15 tujuan TPB dengan jumlah total indikator sebanyak 90 dan telah mencapai target nasional. Seluruh indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target tersebut, sepatutnya dipertahankan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya tujuan pembangunan keberlanjutan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar.





Tabel 4.3 Realisasi Capaian Indikator TPB yang Terlaksana dan Mencapai Target

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
1	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	13	
		1.3.1.(c)	persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas.	Meningkat menjadi 17,12%			
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan	1.4.1.(a)	persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%		84%
			1.4.1.(b)	persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.		94%
			1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%		71%
			1.4.1.(d)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan	Meningkat menjadi 100%		100%





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
		berkelanjutan.				
		1.4.1.(e)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100%	
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	98%	
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	87%	
		1.4.1.(j)	persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	83%	
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	30	
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	0	





NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	0.3578	
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	0.0069	8
			2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	9%	
			2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan	Menurun	0.1283	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
	dan cukup sepanjang tahun.	Pangan.					
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	0.1899		
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	4%		
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	19%		
		2.2.2.(b)	persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	59%		
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	78,9; 111,6		
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	255	16
	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1.02	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	0.015	
		3.2.2.(b)	persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	93%	
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0%	
		3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	222	
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0.07	
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0.132	
		3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	0	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	kesejahteraan.				
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	73%
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	71%
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	0.311
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	2.125
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	100%





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang	3.b.1.(a)	persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	1





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
	menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	0.99	6
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	12.4		





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	0.9788	
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b) persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	0.9815	
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi	Meningkat	70	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).				
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	0.35
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0.0306
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan	Menurun menjadi	0%	8





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	eksploitasi lainnya.	terhadap anak perempuan.	kurang dari 20,48%		
		5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0.000231	
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0	
		5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	23	
		5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	31.12	
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	0.208	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	0	
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	6
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses	6.2.1.(b)	persentase rumah tangga yang memiliki akses	Meningkat menjadi 100%	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		terhadap layanan sanitasi layak.		
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	88
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	88
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	79.21





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	yang aman secara global.				
7	7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1* Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	1,960	1
8	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	0.0972	6
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	0.0117	





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
	perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	0		
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	1,068		
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	11,355		
		8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	3,281,167,163.36		
9	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	0.5	2





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	0.1575
10	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	6
		10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	4
		10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	1
					3





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
11	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	539	2
	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	4	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
	Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
12	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	633	1
14	14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Meningkat menjadi 6.982.560 ton (skala nasional)	28,268.3 Ton	2





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologinya.				
	14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	808 Orang
16	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	0
		16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	47 Orang
					11





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	0
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	0.00616
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0.077
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga : 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	85%
		16.6.1.(c)	persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi 80%	100%
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan	16.7.1.(a)	persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	0.208



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
	representatif di setiap tingkatan.						
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	0.9339		
		16.9.1.(a)	persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	83%		
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0.99	5





NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d) persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	60%	
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	
		17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses	Meningkat	8,889	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.				
		17.19.2.(d)	data dan informasi statistik melalui website. persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	1
TOTAL INDIKATOR					90

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020





4.1.2 Indikator Terlaksana dan Belum Mencapai Target

Jumlah indikator TPB yang terlaksana namun belum mencapai target di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 51 indikator dari total 196 indikator atau sebanyak 26%. Dari grafik 4 dapat dilihat bahwa TPB 3 merupakan TPB dengan jumlah indikator yang paling banyak dicapai yakni Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, dengan capaian 8 indikator.

Gambar 4.4 Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa jumlah tujuan TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 12 tujuan TPB dengan jumlah indikator sebanyak 51 dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan upaya-upaya tambahan demi





mencapai target nasional di masa depan. Gambaran mengenai realisasi capaian indikator TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target, dapat dilihat pada **Tabel 4.4** dibawah ini





Tabel 4.4 Realisasi Capaian Indikator TPB yang Terlaksana dan Belum Mencapai Target

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1* persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	11%	7
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	5,589	
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan	1.4.1.(k) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	4%	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	728 Jiwa
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	1 desa
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	412,998,000
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	42%



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.					
2	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	13%	2
	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	0.0344	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
3	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	84%	8
		3.1.2.(a)	persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	78%	
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	4.1	
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan	3.4.1.(a)	persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	6%	
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	33%	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	kesejahteraan.				
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	15%
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	1000
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	6%



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
4	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a) persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	68%	5
		4.1.1.(b) persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	69%	
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	109%	
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	98%	
	4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	67%	
5	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	15	5



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	40%
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	0.0541
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	11%
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	73%



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	review dari konferensi-konferensi tersebut.					
6	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	100	4
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	76	
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	220	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	4 WS	
7	7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	49%	1
8	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 % pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	0.089	4
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	47503.98	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator		
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	persentase tenaga kerja formal.	0.51	0.43	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	0.3184	
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	728 Jiwa	3



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	412998000	
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	13%	
13	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	728 Jiwa	1
16	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	0.000337	6
	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	3.7	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator	
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	0.88
			16.6.1.(b)	persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	83%
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Di atas 12%	11%
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	
					5	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	Total Indikator
	lainnya.				
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	89%
		17.18.1.(b)	persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	93%
		17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	1104
TOTAL INDIKATOR					51

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

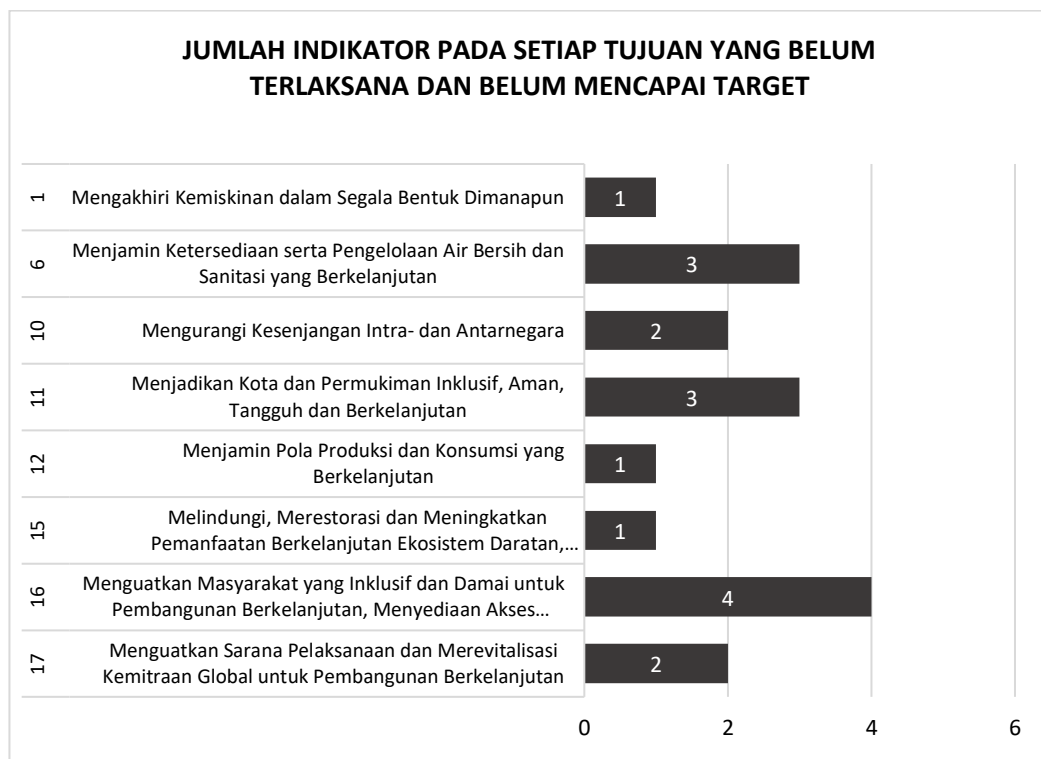




4.1.3 Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target

Jumlah indikator yang belum terlaksana dan belum mencapai target di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 17 indikator atau 9% dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada grafik 5, terlihat bahwa TPB 16 dengan tujuan Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, merupakan TPB dengan jumlah indikator terbanyak dibandingkan dengan TPB lainnya.

Gambar 4.5 Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8 tujuan TPB dengan jumlah indikator sebanyak 17 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Walaupun jumlah indikatornya lebih sedikit dibandingkan kategori lain, diharapkan tujuan TPB dan indikator yang belum



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



terlaksana tersebut dapat segera dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar





Gambar 4.6 Realisasi Capaian Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator	
1	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1
6	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	
	6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Ada	
	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	3



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator	
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	2
	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	
11	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	3
	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	
			11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

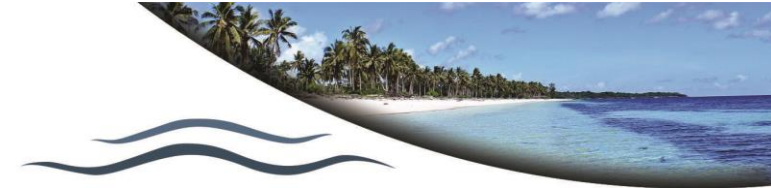


NO. TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator	
12	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	1
15	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1
16	16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	4
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator	
			16.6.2.(a)	persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan Undang-Undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	
17	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	2
			17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	
Total						17

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020





4.1.4 Indikator Belum/Tidak Ada Data

Jumlah indikator yang belum/tidak memiliki data di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 38 indikator atau 19% dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa TPB 8 dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, merupakan TPB dengan jumlah indikator terbanyak yakni 9 indikator. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.7 Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum/Tidak Ada Data



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 tujuan TPB dengan jumlah 38 indikator yang datanya belum tersedia, sehingga tidak dapat





dilakukan pengolahan data untuk mengetahui capaian indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Target Capaian. Oleh karena itu, diharapkan data terkait indikator yang belum tersedia agar dilakukan penyelesaian sehingga dapat dilakukan perhitungan mengenai capaian indikator tersebut dan tingkat keberhasilannya





Tabel 4.5 Indikator TPB Belum/Tidak ada data

NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	Total Indikator
1	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	1
2	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	1
3	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	5
	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	
			3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator		
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%		
	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Meningkat
4	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	2
	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	
5	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	1
8	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	9
		8.10.1.(a)	Rata-rata jarak	Menurun (mendekat)		



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator
			lembaga keuangan (Bank Umum).	
		8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat
		8.3.1.(b)	persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat
		8.3.1.(c)	persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0.25
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator		
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	
9	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	7
			9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	
	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	
			9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	
			9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	
			9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Total Indikator		
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	5	
			10.1.1.(a)	persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Menurun menjadi 7-8%
	10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 % dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		Menurun
	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		Meningkat menjadi 87
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta		



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	Total Indikator
12	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	1
14	14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a)	persentase kepatuhan pelaku usaha.	Meningkat menjadi 87%	1
15	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	2



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



NO. TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	Total Indikator
	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	
17	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	3
			17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	
	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	
TOTAL						38

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

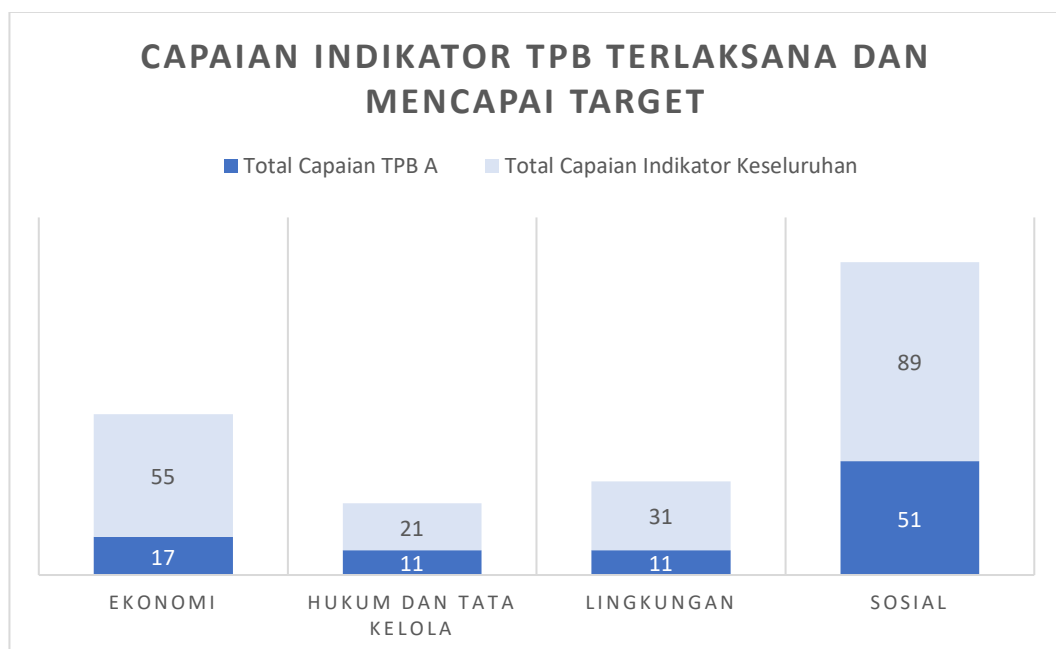




4.2 Capaian TPB Menurut Pilar Pembangunan

Terdapat 4 (empat) pilar pembangunan yang digunakan sebagai tolak ukur capaian TPB yakni ekonomi, hukum dan tata Kelola, lingkungan serta sosial. Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 90 indikator dari total 196 indikator. Pilar pembangunan TPB yang mencapai indikator paling banyak yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah pilar sosial yaitu sebanyak 51 indikator dari total keseluruhan 89 indikator. Sementara, pilar pembangunan TPB yang memiliki pencapaian terendah namun sudah mencapai target nasional adalah pilar hukum & tata Kelola dan pilar lingkungan dengan capaian masing-masing 11 indikator dari total indikator keseluruhan yang berbeda-beda.

Gambar 4.8 Grafik Capaian Indikator TPB Terlaksana dan Mencapai Target Menurut Pilar Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

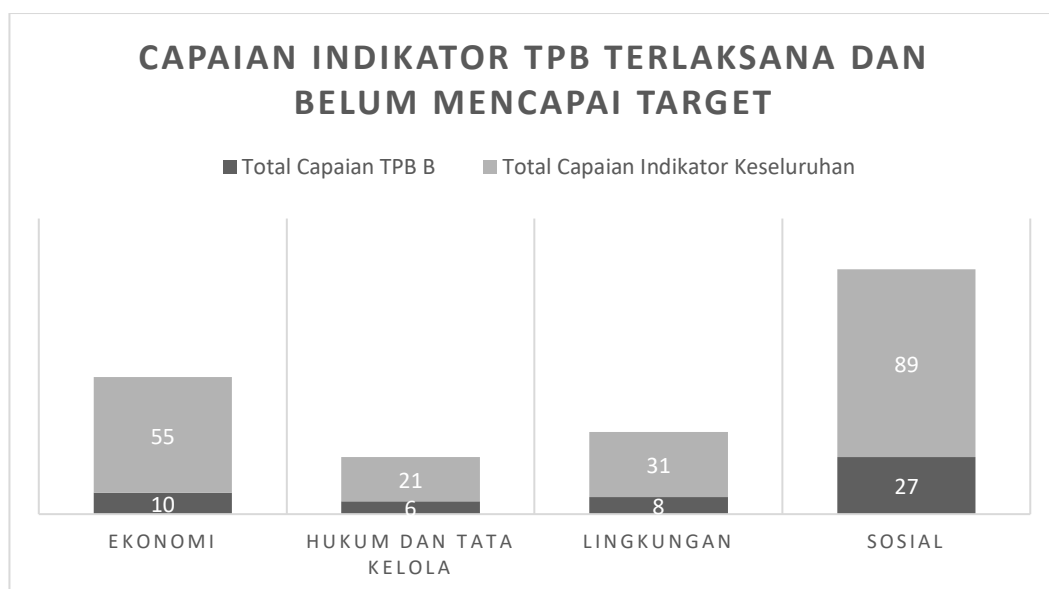
Kategori indikator TPB yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 51 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan





pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni 196. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan membandingkan keempat pilar TPB, terlihat pada gambar 8 bahwa pilar sosial merupakan pilar yang memiliki banyak indikator yang terlaksana namun belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 27 indikator dari total 89 indikator. Sementara itu, pilar pembangunan dengan jumlah indikator pencapaian terendah adalah pilar hukum & tata kelola yaitu sebanyak 6 indikator dari total 21 indikator. Jumlah indikator setiap pilar yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.9 Grafik Capaian Indikator TPB Terlaksana dan Belum Mencapai Target Menurut Pilar Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

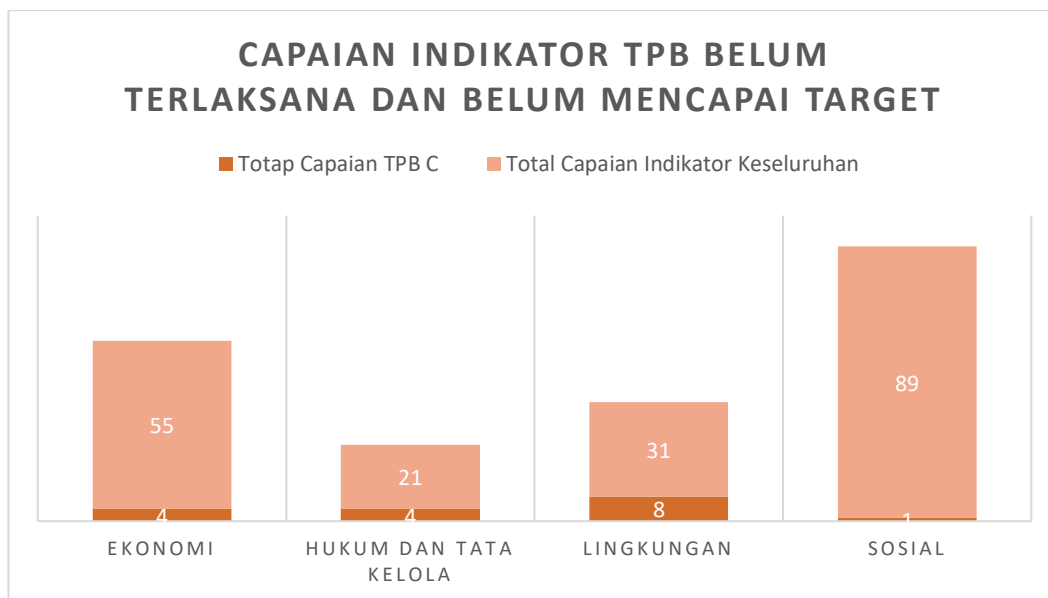
Kategori indikator TPB yang belum terlaksana dan belum mencapai target nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 17 indikator dari total 196 indikator. Indikator TPB yang paling banyak belum terlaksana dan belum mencapai target nasional terdapat pada pilar lingkungan dengan jumlah indikator sebanyak 8 dari total indikator keseluruhan yaitu 31 indikator. Sedangkan, indikator yang paling sedikit belum terlaksana dan belum mencapai target terdapat pada pilar sosial dengan 1 indikator. Gambaran mengenai kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan





belum mencapai target nasional berdasarkan pilar pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.10 Grafik Capaian Indikator TPB Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target Menurut Pilar Pembangunan



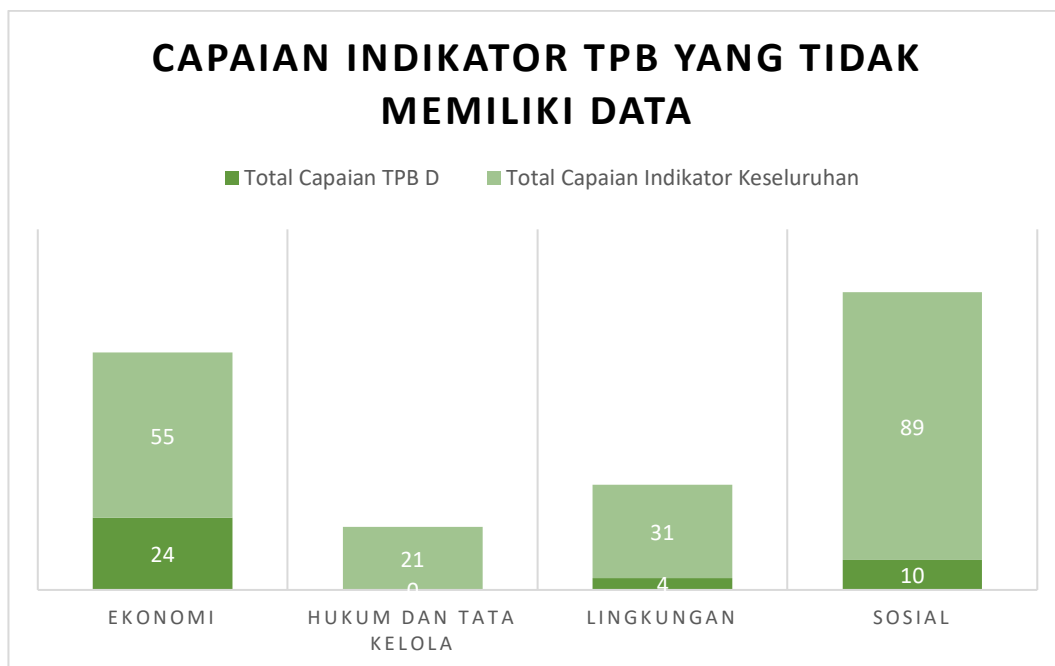
Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, terdapat 38 indikator di Kabupaten Kepulauan Selayar dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Indikator TPB yang paling banyak belum/tidak memiliki data terdapat pada pilar ekonomi dengan jumlah indikator sebanyak 24 dari total keseluruhan indikator ekonomi yakni 55 indikator. Sementara, pilar pembangunan hukum & tata kelola tidak memiliki capaian indikator TPB yang tidak memilih data. Gambaran mengenai indikator yang belum/tidak memiliki data pada masing-masing pilar pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 4.11 Grafik Capaian Indikator Belum/Tidak Memiliki Data



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

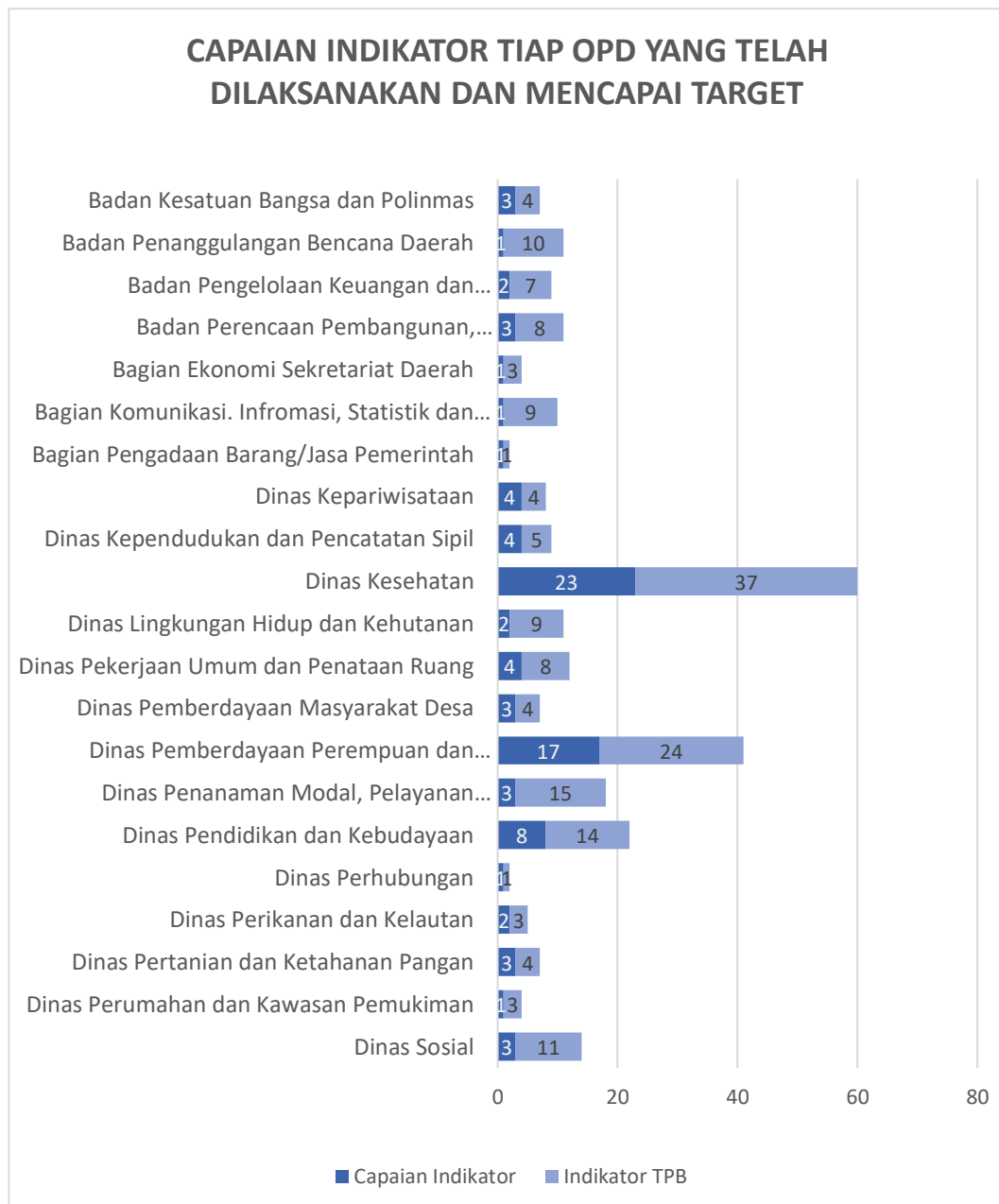
4.3 Pencapaian Indikator TPB Untuk Setiap Organisasi Perangkat Daerah

Terdapat sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki capaian indikator TPB bervariasi. Setiap OPD memiliki kewenangan tersendiri dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mengukur capaian indikator TPB pada setiap OPD, dilakukan analisis terkait jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan OPD tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat 21 OPD dengan jumlah capaian indikator TPB sebanyak 90 indikator yang sudah melaksanakan dan mencapai target nasional. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki pencapaian terbanyak dibandingkan dengan OPD lainnya dengan total capaian sebanyak 23 indikator. Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator setiap OPD dijelaskan pada grafik gambar berikut.





Gambar 4.12 Grafik Capaian TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Mencapai Target Nasional



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

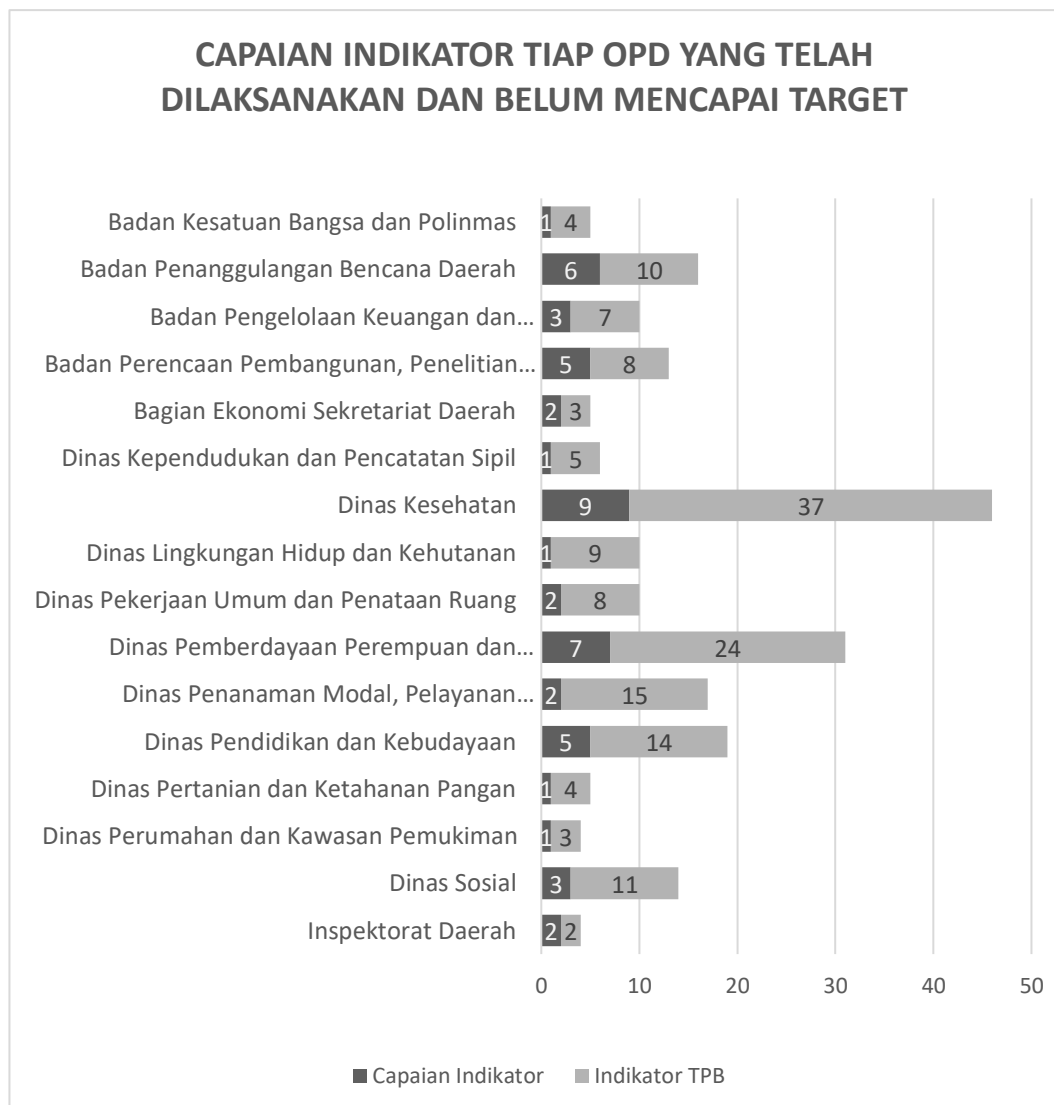
Selanjutnya, terdapat 16 OPD dengan total capaian indikator TPB sebanyak 51 indikator telah melaksanakan namun belum mencapai target nasional. OPD yang paling banyak memiliki capaian dibandingkan OPD lainnya pada kategori ini adalah Dinas Kesehatan dengan total capaian indikator TPB sebanyak 9 indikator dari total keseluruhan indikator TPB





sebanyak 37. Capaian TPB setiap OPD yang telah melaksanakan namun belum mencapai target nasional dapat dilihat pada grafik gambar berikut.

Gambar 4.13 Grafik Capaian TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

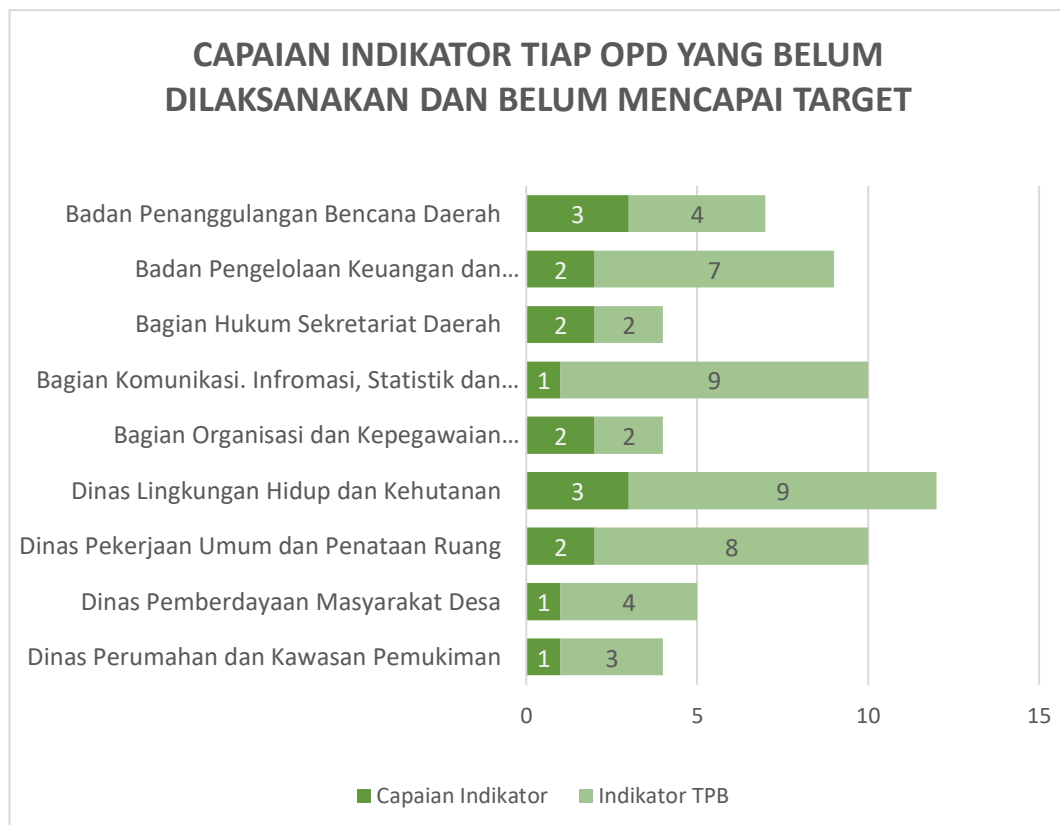
Sementara itu, terdapat 9 OPD dengan total capaian indikator sebanyak 17 yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan OPD yang paling banyak belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional dengan jumlah indikator masing-masing sebanyak 3 indikator. Data OPD lainnya yang termasuk dalam kategori belum





melaksanakan dan belum mencapai target, dapat dilihat pada grafik gambar berikut.

Gambar 4.14 Grafik Capaian TPB Tiap OPD yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



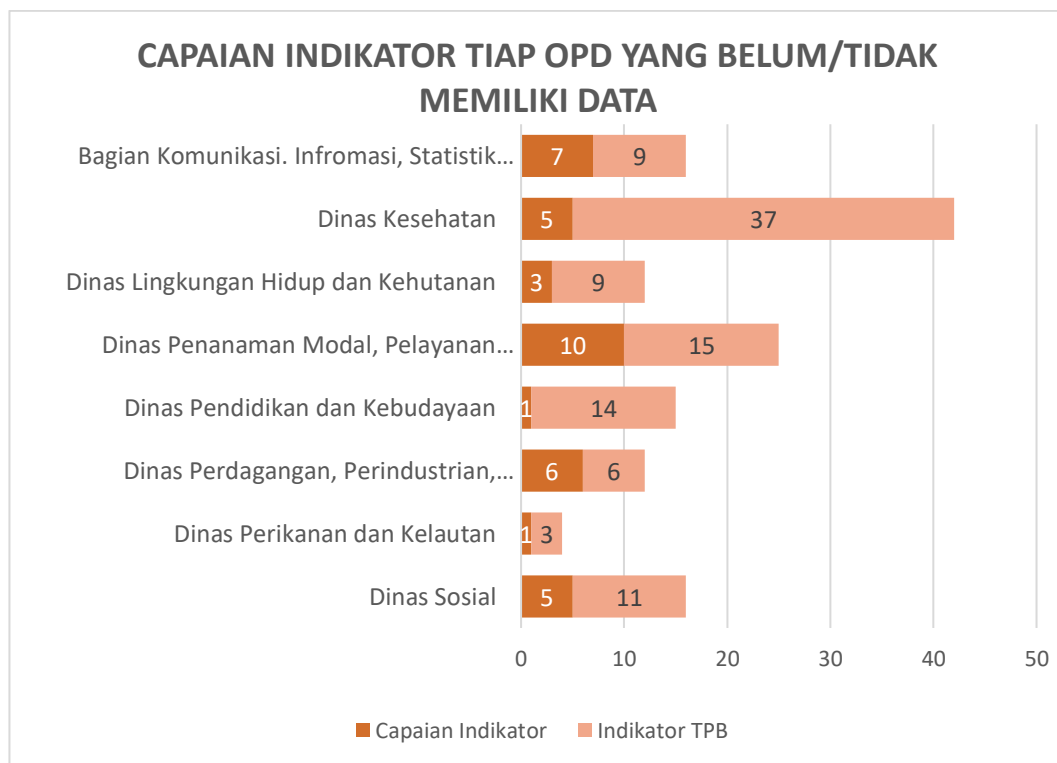
Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Pada kategori OPD yang belum/tidak memiliki data indikator, terdapat sebanyak 8 OPD dengan total indikator TPB sebanyak 38 indikator. OPD yang paling banyak belum/tidak memiliki data indikator capaian adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker dengan jumlah indikator sebanyak 10 dari total keseluruhan indikator khusus OPD ini adalah 15. Beberapa OPD lainnya yang belum/tidak memiliki data terkait indikator capaian TPB dapat dilihat pada grafik gambar berikut.





Gambar 4.15 Grafik Capaian Indikator Tiap OPD yang Belum/Tidak Memiliki Data



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

4.4 Indikator TPB Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pada sub-bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai pencapaian indikator TPB masing-masing OPD berdasarkan kategori indikatornya. Sub-bab ini menjabarkan indikator-indikator yang merupakan tanggung jawab tiap OPD tersebut. Untuk kategori OPD yang telah melaksanakan dan mencapai target nasional, terdapat 90 indikator dari total 196 dimana Dinas Kesehatan memiliki capaian terbanyak yakni 23 indikator. Uraian indikator yang merupakan tanggung jawab setiap OPD dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.





Tabel 4.6 Indikator TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Mencapai Target Nasional

No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	3
		16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah	16.6.1.(a)	persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	2
		17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	3
		17.18.1.(d)	persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	
		17.19.2.(d)	persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	
5	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	7.3.1*	Intensitas energi primer.	1
6	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	1
7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	16.6.1.(c)	persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	1
8	Dinas Kepariwisata	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	4





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	
		8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.4.1.(j)	persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	4
		16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	
		16.9.1.(a)	persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	
		17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	
10	Dinas Kesehatan	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	23
		1.4.1.(a)	persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
		1.4.1.(b)	persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	
		2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	
		2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	
		2.2.2.(b)	persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	
		3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	
		3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	
		3.2.2.(b)	persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	
		3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	
		3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	
		3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	
		3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	
		3.b.1.(a)	persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	
		6.2.1.(b)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	2
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.4.1.(d)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	4
		1.4.1.(e)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	
		6.1.1.(a)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	3
		10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	
		10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	17
		16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	
		16.7.1.(a)	persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	
		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
		5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
		5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	
		5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	
		9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	8
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	
		4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	
		4.6.1.(b)	persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	
		4.c.1*	persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	
17	Dinas Perhubungan	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	1
18	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	2
		14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	3
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1
21	Dinas Sosial	1.3.1.(c)	persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas.	3
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	
TOTAL				90

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Selanjutnya, pada kategori OPD yang telah melaksanakan namun belum mencapai target, terdapat 51 indikator capaian dari total 196 indikator. OPD yang paling banyak memiliki capaian adalah Dinas Kesehatan dengan total 9 indikator capaian. Penjabaran dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Indikator TPB Tiap OPD yang Telah Melaksanakan dan Belum Mencapai Target

No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	1
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	6
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah.	
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
			orang.	
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	3
		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.18.1.(a)	persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	5
		17.18.1.(b)	persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	
		17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	
		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	
5	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	1.4.1.(k)	persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	2
		7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.9.1.(b)	persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	1
7	Dinas Kesehatan	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	9





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	
		3.1.2.(a)	persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	
		3.4.1.(a)	persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	
		3.a.1*	persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	
		6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.6.1.(a)	persentase sampah perkotaan yang tertangani.	1
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	2
		6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	16.7.1.(b)	persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	7
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	
		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	
		5.2.2.(a)	persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
	Keluarga Berencana		komprehensif.	
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	8.3.1.(a)	persentase tenaga kerja formal.	2
		8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.1.1.(a)	persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	5
		4.1.1.(b)	persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	
		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	1
14	Dinas Sosial	1.2.1*	persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	3
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	
15	Inspektorat Daerah	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	2
		16.6.1.(b)	persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	
TOTAL				51

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Pada kategori OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional, terdapat 17 indikator OPD dari total keseluruhan 196 indikator. OPD yang paling banyak belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional dibandingkan dengan OPD lainnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah indikator masing-masing OPD adalah 3 indikator. Penjabaran indikator capaian setiap OPD yang masuk pada kategori belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Indikator TPB Tiap OPD yang Belum Melaksanakan dan Belum Mencapai Target

No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	3
		11.5.1.(a)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI).	
		11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	2





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
	Pengelolaan Aset Daerah	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	2
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	
4	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1
5	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	16.6.1.(d)	persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	2
		16.6.2.(a)	persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	3
		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	
		6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	2
		6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	1





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1
TOTAL				17

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020

Terakhir, pada kategori OPD yang belum/tidak memiliki data, terdapat 38 indikator dari total 196 indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar. OPD yang paling banyak belum/tidak memiliki data adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker dengan total indikator sebanyak 10. Untuk lebih jelasnya, penjabaran indikator TPB masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Indikator TPB Tiap OPD yang Belum/Tidak Memiliki Data

No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
1	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	7
		17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	
		17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	
		5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	
		9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	
		9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	
2	Dinas Kesehatan	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	5





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	
		3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	
		3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	3
		15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	10
		2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	
		4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	
		8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	
		8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	
		8.3.1.(b)	persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	
		8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	
		8.6.1*	persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	





No	OPD PELAKSANA	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Total Indikator
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.6.1.(a)	persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	1
6	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	6
		8.3.1.(c)	persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	
		9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	
		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	
		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	
		9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.6.1.(a)	persentase kepatuhan pelaku usaha.	1
8	Dinas Sosial	10.1.1*	Koefisien Gini.	5
		10.1.1.(a)	persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	
		10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 % dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	
		10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
TOTAL				38

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS, 2020





4.5 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan TPB tentunya harus berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB melalui berbagai kegiatan dan langkah-langkah strategis Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengemukakan bahwa harus ada kerjasama antara masyarakat sipil, pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat lokal, akademisi dan semua aktor terkait lainnya, agar TPB dapat tercapai.

Hal ini dapat dipahami, mengingat bahwa pelaksanaan TPB yang sebenarnya terjadi di tingkat lokal atau daerah. Program pemerintah pusat dan strategi nasional dapat membantu pelaksanaan TPB seperti memberikan dana dan dukungan lainnya, itu saja tidak cukup karena TPB memerlukan tindakan pada level daerah. Pemerintah pusat sebaiknya lebih memberikan proporsi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan juga partisipasi publik. Sementara pemerintah daerah harus memainkan peran yang lebih menonjol dalam pencapaian TPB. Seperti menyediakan sarana fasilitas air bersih, ketersediaan infrastruktur yang baik, kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim, mengurangi serta menghapus daerah kumuh, memastikan tersedianya perumahan yang layak, tersedianya sarana transportasi yang berkualitas. Dengan demikian akan mengurangi dampak buruk dari masing-masing daerah.

Secara khusus di Kabupaten Kepulauan Selayar berbagai pihak telah berkontribusi dalam pencapaian TPB. Pembagian peran dalam pencapaian TPB telah terlaksana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah pusat berkontribusi melalui pengalokasian dana transfer daerah dalam bentuk tugas pembantuan dan DAK. Pemerintah daerah berkontribusi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di perangkat daerah sesuai urusan kewenangan yang terkait dengan TPB. Sementara kontribusi organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi masih sulit diidentifikasi secara jelas dalam kaitannya dengan pencapaian TPB dikarenakan tidak





tersedianya data hasil inventarisasi kegiatan yang terkait TPB, untuk mengakomodir hasil identifikasi pihak lain tersebut maka digunakan data hasil kerjasama atau MOU pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan.

Berikut dibawah ini akan diuraikan beberapa peran para pihak dalam pencapaian TPB melalui penyediaan program dan kegiatan yang terkait:

4.5.1 Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB oleh berbagai perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 25 perangkat daerah yang berkontribusi langsung dalam pencapaian TPB. Terdapat juga perangkat pemerintah daerah lain yang mendukung dalam pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu 11 kantor kecamatan dan 81 kantor desa serta 7 kelurahan. Namun masih sulit mendapatkan informasi detail pencapaian TPB yang dilaksanakan oleh kecamatan dan desa, dikarenakan belum tersedianya data yang memadai. Informasi yang diperoleh beberapa kegiatan yang dilakukan di kecamatan dan desa secara tidak langsung telah mendukung pencapaian TPB, khususnya pada TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun), 10 (Mengurangi Kesenjangan), 16 (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan), dan 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan). Adapun kontribusi 25 perangkat daerah tersebut berbeda satu dengan yang lainnya bergantung pada jumlah TPB yang terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah, alokasi anggaran, dan persentase capaian TPB.





Tabel 4.10 Peran Perangkat Daerah Dalam Pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2019.

No.	Perangkat Daerah	TPB Terkait	Jumlah Indikator	% Capaian TPB				Pembiayaan Untuk Capaian TPB			% Pembiayaan TPB
				A	B	C	D	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas	16	4	75	25	0	0	Rp1,641,000,000	Rp1,344,914,271	81.96	0.13
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1, 11, 13	10	10	60	30	0	Rp17,896,150,000	Rp16,626,818,564	92.91	1.59
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah	16, 17	7	29	43	29	0	Rp5,378,817,500	Rp4,605,040,572	85.61	0.44
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1, 8, 17	8	38	63	0	0	Rp3,634,395,750	Rp2,537,184,780	69.81	0.24
5	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	1, 7	3	33	67	0	0	Rp749,665,000	Rp743,669,018	99.20	0.07
6	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	10, 16	2	0	0	100	0	Rp1,298,000,000	Rp1,079,971,035	83.14	0.10
7	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	5, 9, 16, 17	9	11	0	11	78	Rp586,160,000	Rp516,690,743	88.15	0.05
8	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat	16	2	0	0	100	0	Rp212,000,000	Rp211,867,440	99.94	0.02
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	16	1	100	0	0	0	Rp370,600,000	Rp337,882,512	91.17	0.03
10	Dinas Kepariwisata	8	4	100	0	0	0	Rp9,130,704,600	Rp8,793,510,431	96.31	0.84
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1, 16, 17	5	80	20	0	0	Rp2,615,527,000	Rp2,349,578,436	89.83	0.22
12	Dinas Kesehatan	1, 2, 3, 6	37	62	24	0	14	Rp145,736,178,500	Rp139,335,678,167	95.61	13.34
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6, 11, 12, 15	9	22	11	33	33	Rp10,321,400,000	Rp9,327,227,834	90.37	0.89
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1, 6, 11	8	50	25	25	0	Rp173,277,526,432	Rp147,537,652,544	85.15	14.12
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	4	75	0	25	0	Rp5,662,000,000	Rp5,370,906,555	94.86	0.51
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1, 3, 5, 16	24	71	29	0	0	Rp8,488,380,000	Rp7,813,266,190	92.05	0.75
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	1, 2, 4, 8, 9	15	20	13	0	67	Rp12,622,305,000	Rp10,088,280,991	79.92	0.97
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1, 4	14	57	36	0	7	Rp52,884,593,000	Rp48,119,214,798	90.99	4.61
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8, 9	6	0	0	0	100	Rp12,628,897,145	Rp12,014,601,797	95.14	1.15
20	Dinas Perhubungan	9	1	100	0	0	0	Rp5,917,900,000	Rp4,221,260,554	71.33	0.40
21	Dinas Perikanan dan Kelautan	14	3	67	0	0	33	Rp14,326,822,000	Rp11,591,859,668	80.91	1.11
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	4	75	25	0	0	Rp23,596,082,000	Rp22,951,766,602	97.27	2.20
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6, 11	3	33	33	33	0	Rp10,375,000,000	Rp8,475,742,378	81.69	0.81
24	Dinas Sosial	1, 10	11	27	27	0	45	Rp18,500,400,000	Rp9,424,810,648	50.94	0.90
25	Inspektorat Daerah	16	2	0	100	0	0	Rp2,546,154,000	Rp2,270,322,537	89.17	0.22
Jumlah								Rp537,929,897,927	Rp475,543,307,333	88.40	45.52

Keterangan:
 * Pembiayaan Untuk TPB dihitung dari Total Belanja Honor + Belanja barang dan jasa + Belanja Modal
 % Pembiayaan TPB = Realisasi Belanja Per Perangkat Daerah / Total Realisasi Belanja Daerah

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS, 2020.

Berdasarkan diatas, setiap perangkat daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian TPB yang berbeda-beda jumlahnya. Terdapat perangkat daerah yang berkontribusi hanya pada 1 (satu) TPB seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas, Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dinas Kepariwisata, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat. Namun juga terdapat perangkat daerah yang berkontribusi pada 4 (empat) TPB atau lebih, seperti Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker. Bila dilihat lebih jauh kontribusi perangkat daerah dalam pencapaian TPB juga berbeda-beda berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Terdapat perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkontribusi langsung





pada pencapaian TPB seperti pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Terdapat juga perangkat daerah yang tidak berkontribusi langsung dalam pencapaian TPB. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait pada 3 (tiga) TPB, namun kontribusinya dalam peningkatan pencapaian TPB tidak secara langsung, dikarenakan kewenangannya hanya pada pengumpulan data pencapaian TPB. Untuk itu perangkat daerah yang berkontribusi langsung dalam pencapaian TPB perlu didukung anggaran dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Selain itu, kontribusi pencapaian TPB setiap perangkat daerah juga ditentukan dari jumlah indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab indikator paling banyak adalah Dinas Kesehatan yaitu 37 indikator, diikuti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24 indikator, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 15 indikator. Sedangkan perangkat daerah yang tanggungjawab indikatornya paling sedikit adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dinas Perhubungan masing-masing 1 indikator.

Keberhasilan kontribusi terhadap pencapaian TPB oleh perangkat daerah diperlihatkan oleh persentase capaian TPB yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. persentase capaian TPB diukur berdasarkan perbandingan realisasi indikator TPB didaerah terhadap target nasional. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa perangkat daerah yang memiliki capaian TPB tertinggi (100% kategori A) adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1 indikator), Dinas Kepariwisata (4 indikator), dan Dinas Perhubungan (9 indikator). Sementara perangkat daerah yang capaian TPB nya sangat rendah (100% kategori D) seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (6 indikator) yang belum ada data, diikuti Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah yang 100% kategori C. persentase capaian TPB untuk





setiap perangkat daerah tidak dapat dijadikan satu-satunya standar kinerja perangkat daerah, hal ini karena jumlah indikator setiap perangkat daerah tidak sama. Untuk itu perlu juga dilihat terhadap jumlah indikator yang mencapai target. Jika berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target maka Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang paling banyak capaian indikator TPB-nya mencapai target yaitu 23 indikator.

Kontribusi lain dalam mendukung pencapaian TPB juga dapat ditunjukkan dari kebijakan alokasi anggaran. Berdasarkan analisis alokasi anggaran, secara umum 45,52% dari total anggaran APBD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang digunakan untuk mendukung pencapaian TPB. Namun persentase tersebut sudah termasuk belanja tidak langsung pada tiap OPD yang penggunaannya tidak berhubungan langsung dalam pencapaian TPB. Nilai ini terbilang masih kecil untuk mendukung pencapaian TPB karena masih berada dibawah 50%, hal ini berarti kebijakan anggaran yang ada belum sepenuhnya mengakomodir prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Alokasi anggaran terbesar masih terdapat pada belanja tidak langsung berupa belanja pegawai.

Alokasi anggaran terbesar untuk pencapaian TPB terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang sekitar 14,12%, dan diikuti Dinas Kesehatan 13,34% dari total APBD. Untuk alokasi anggaran terkecil terdapat pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah yaitu 0,02% dari total APBD. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran belum sepenuhnya berkorelasi dengan pencapaian TPB seperti pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang yang memiliki anggaran paling besar hanya terkait pada 3 TPB, itu pun pencapaian TPB-nya belum dilaksanakan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum difokuskan pada pencapaian TPB. Terdapat juga perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab indikator TPB yang cukup banyak namun persentase alokasinya masih dibawah 1% seperti pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian





Penduduk dan Keluarga Berencana alokasi anggaran hanya 0,75% dari total APBD, sementara bertanggung jawab terhadap pencapaian 24 indikator dari 4 TPB.

4.5.2 Peran Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peran pemerintah pusat dan provinsi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian TPB dapat ditunjukkan dari dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah. Berdasarkan rekapitulasi data pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pusat dan provinsi serta pendapatan lain yang sah pada tahun 2019. Khususnya pada dana alokasi khusus, pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, penyesuaian dana otonomi khusus atau dana desa dan dana insentif daerah. Alokasi anggaran tersebut secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi dalam mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 4.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71.524.920.000,00	63.692.350.911,00	89,05
2	Dana Perimbangan	837.960.298.000,00	828.949.727.831,00	98,92
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	152.036.993.000,00	152.709.458.000,00	100,44
Jumlah		1.061.522.211.000,00	1.044.666.536.809,57	98,41

Sumber: LKPJ Kab. Selayar, 2019

Berdasarkan tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai Rp. 828.949.727.831 atau sekitar 79,35% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan / kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat terutama melalui dana perimbangan. Alokasi dana perimbangan yang dapat berkontribusi





langsung dengan pencapaian TPB umumnya berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi khusus ini merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dana alokasi khusus di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas 2 yaitu dana alokasi khusus yang sifatnya fisik dan dana alokasi khusus yang sifatnya non fisik. Dana alokasi khusus ini umumnya terkait dengan pencapaian TPB 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia), TPB 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) dan TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan).

persentase anggaran DAK ini terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 22,22% atau Rp 232.128.162.022 dari total APBD pada tahun 2019. Umumnya anggaran untuk pencapaian TPB yang ada di perangkat daerah berasal dari dana alokasi khusus atau dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berkontribusi kecil terhadap pencapaian TPB, dikarenakan pendapatan asli daerah hanya dapat digunakan untuk belanja rutin pemerintahan, belum dapat dimaksimalkan dan dikreasikan untuk mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran belum sepenuhnya mengakomodir prinsip pembangunan yang berkelanjutan, karena umumnya belanja tidak langsung yang penggunaannya tidak berhubungan langsung dalam pencapaian TPB.

4.5.3 Peran Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, dan Akademisi

Pencapaian target TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, baik di daerah atau pemerintah pusat. Namun juga telah didukung oleh peran organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha dan akademisi. Peran organisasi masyarakat dan pelaku usaha yang terdokumentasikan hanya berdasarkan data hasil MOU pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercatat pada bagian kerjasama





sekretariat daerah. Adapun beberapa bentuk kerjasama tersebut diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pihak ke3

NO	MITRA KERJASAMA	BIDANG DAN NAMA KEGIATAN	TPB Terkait
1.	8 Kabupaten di Sulawesi Selatan dan 6 Kabupaten di Sulawesi Tenggara yaitu : Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Bone; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Wajo; Kabupaten Luwu; Kabupaten Palopo; Kabupaten Luwu Utara; Kabupaten Luwu Timur; Kabupaten Kolaka Utara; Kabupaten Kolaka; Kabupaten Bombana; Kabupaten Muna; Kabupaten Bau-Bau dan Kabupaten Buton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan, pengendalian dan pengamanan sumberdaya alam pesisir, laut, dan perikanan secara terpadu terhadap pencurian, perampokan serta pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan ekosistem wilayah Teluk Bone. 2. Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, sumberdaya alam, pesisir dan laut secara terpadu dan berkesinambungan serta sumberdaya lainnya terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Teluk Bone, serta 3. Kerjasama mengelola wilayah teluk Bone secara bersama, terpadu, optimal dan berkelanjutan. 	<p>TPB 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan);</p> <p>Target 14.4 (Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.).</p>

Sumber: LKPJ Kab. Selayar Tahun 2019



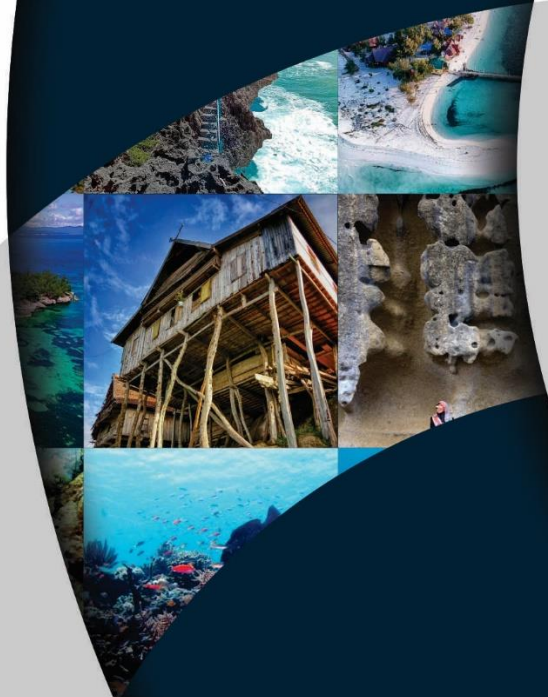


Berdasarkan hasil rekapitulasi data kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pihak ke3 lainnya menunjukkan umumnya kerjasama yang ada berkontribusi pada pencapaian TPB, khususnya, TPB 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan). Secara khusus kerjasama yang ada dimaksudkan untuk mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak.



BAB V

ALTERNATIF & SKENARIO PENCAPAIAN TPB



BAB V

ALTERNATIF & SKENARIO PENCAPAIAN TPB



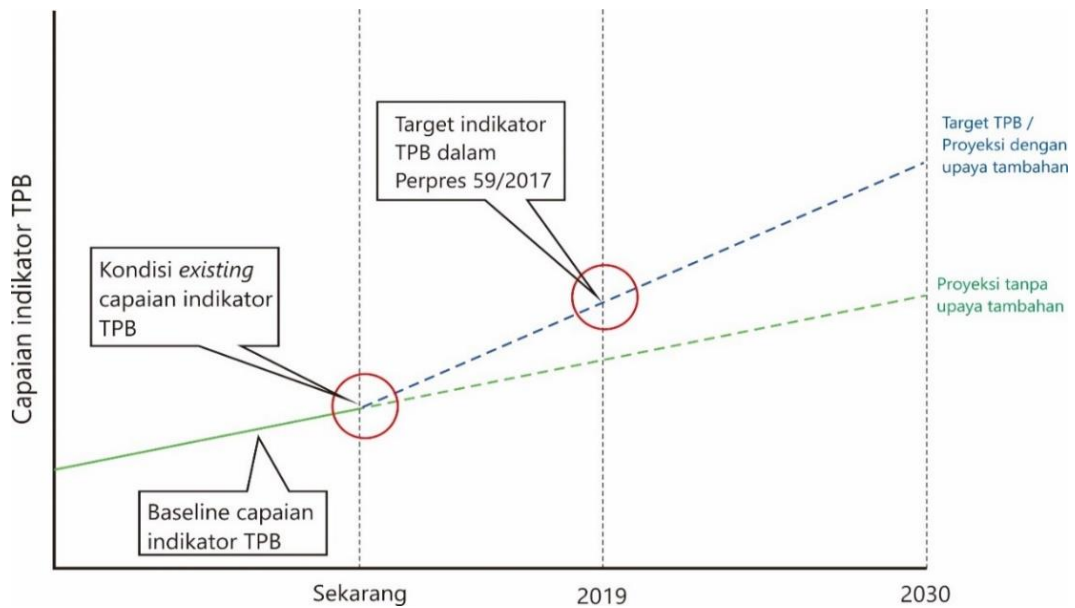
5.1 Mekanisme Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Skenario pembangunan berkelanjutan merupakan rencana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dibuat berdasarkan alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB berupa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tersebut disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. **Gambar 5.1** menunjukkan contoh proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan dan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan.





Gambar 5.1 contoh proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan dan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan



Selanjutnya alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Isu strategis adalah rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang dimaksud berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun sasaran strategis merupakan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan.

5.1.1 Proyeksi Capaian Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan

Proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan merupakan gambaran pencapaian indikator TPB yang diperoleh berdasarkan tren historis data capaian indikator TPB yang telah dilaksanakan sebelumnya (*business as usual*). Metodologi yang digunakan untuk memproyeksi data *baseline* adalah *compound annual growth rate (CAGR)*. Proyeksi dilakukan dengan melakukan regresi variabel tak bebas (*dependent variable*) yang nilainya ingin diprediksi pada masa depan. Berikut formula *compound annual growth rate (CAGR)*:





$$\text{CAGR} = (\text{EV} / \text{BV})^{1/n} - 1$$

Dimana:

EV = Nilai akhir

BV = Nilai awal

n = jumlah periodik (bulan, tahun, dll)

Selain menggunakan model *compound annual growth rate*, proyeksi juga dapat dilakukan dengan cara menghitung rata-rata data baseline dengan asumsi bahwa pertumbuhan capaian indikator TPB tertentu sama setiap tahun. Berdasarkan capaian TPB 2014-2017 dilakukan proyeksi dalam keadaan BAU untuk mengetahui pemenuhan target TPB tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030.

5.1.2 Proyeksi Capaian Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan

Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan disusun dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya tambahan tersebut disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pencapaian target tanpa upaya tambahan;
- Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
- Potensi, daya saing dan inovasi daerah;
- Daya dukung dan daya tampung daerah; dan
- Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah.

Upaya tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator TPB sehingga dapat mencapai target baik yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030.

Dalam memproyeksi capaian indikator dengan upaya tambahan, variabel yang di proyeksi adalah variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang mempengaruhi variabel tak bebas (*dependent variable*) dalam rumus perhitungan indikator. Indikator TPB yang tidak terpenuhi target TPB-nya di tahun 2019, 2021 dan 2030 dengan proyeksi BAU, selanjutnya dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan.





5.2 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH

Uraian skenario dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait DDDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah:

5.2.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
Nomor Indikator: 1.5.1*
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir . Berdasarkan hasil analisis DDDTLH Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir, memiliki tingkat penyedia pengaturan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang sampai pada tahun 2019 adalah 728 jiwa . Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Menurun Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Menurun . Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan

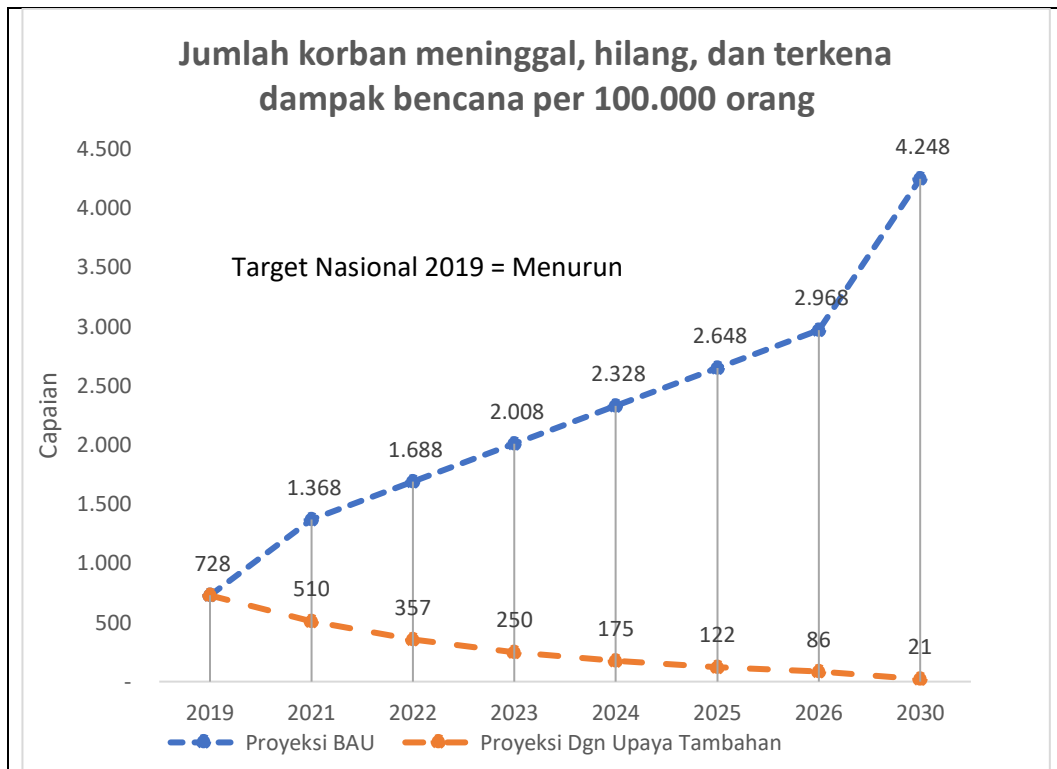




menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **21 jiwa**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (jiwa)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (jiwa)
<i>Base Line</i>		
2016	244	
2017	358	
2018	719	
2019	728	728
Proyeksi		
2021	1.368	510
2022	1.688	357
2023	2.008	250
2024	2.328	175
2025	2.648	122
2026	2.968	86
2030	4.248	21





Isu Strategis: Masih tingginya Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana
 - Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
- b. Strategi dan Arah Kebijakan:
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kebencanaan
 - Perumusan langkah pencegahan dan penanggulangan bencana
- c. Outcome/Program:
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- d. Instansi Pelaksana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah





e. Kegiatan:

- Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
- Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk
- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk

5.2.2 Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Resiko Bencana Daerah

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Nomor Indikator: 1.5.1.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini terkait dengan **Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir**. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir, memiliki tingkat penyedia pengaturan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah sampai pada tahun **2019** adalah **1 desa**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat** Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan *baseline* data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian





target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **10 desa**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (lokasi)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (desa)
<i>Base Line</i>		
2016	0	
2017	0	
2018	1	
2019	1	1
Proyeksi		
2021	1	2
2022	1	3
2023	1	4
2024	1	5
2025	1	6
2026	1	7
2030	1	10





Isu Strategis: Masih rendahnya jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah.

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
- c. Outcome/Program: Penanggulangan bencana.
- d. Instansi Pelaksana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Kegiatan:
 - Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
 - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi





bencana

- Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan

5.2.3 Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Nomor Indikator: 1.5.2.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini terkait dengan **Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir**. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir, memiliki tingkat penyedia pengaturan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana** sampai pada tahun **2019** adalah **Rp. 412.998.000**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun** Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan.

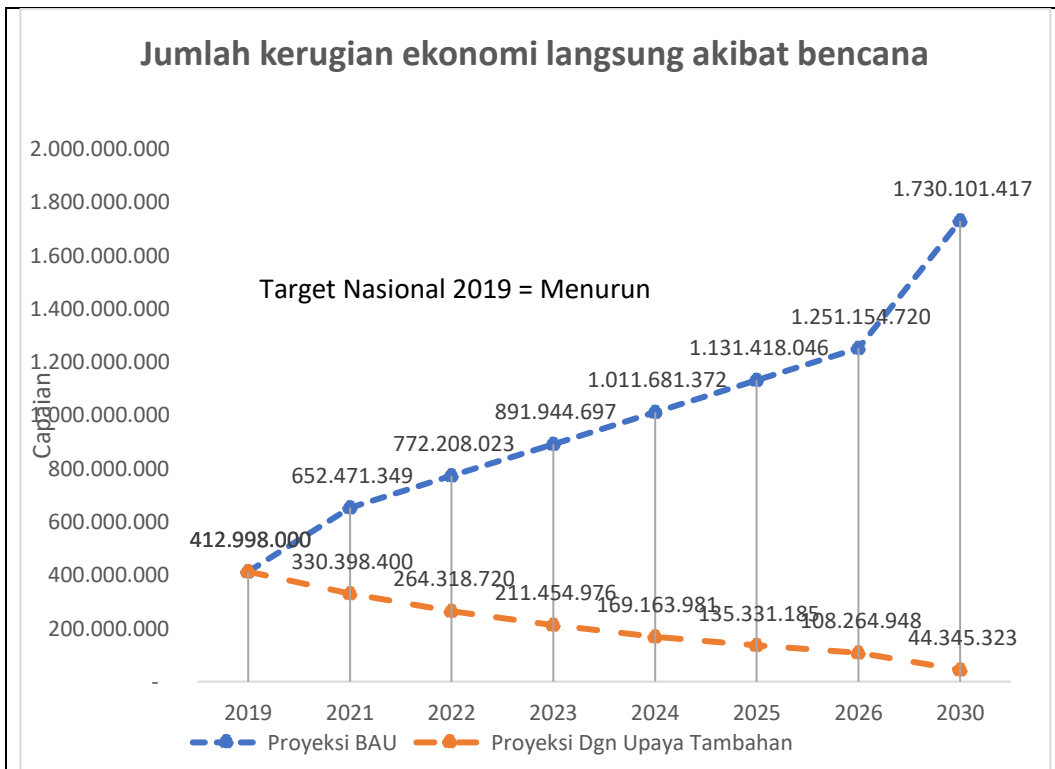




Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **Rp. 44.345.323**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (Rp.)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (Rp.)
<i>Base Line</i>		
2016	192.423.850	
2017	148.000.000	
2018	527.500.000	
2019	412.998.000	412.998.000
Proyeksi		
2021	652.471.349	330.398.400
2022	772.208.023	264.318.720
2023	891.944.697	211.454.976
2024	1.011.681.372	169.163.981
2025	1.131.418.046	135.331.185
2026	1.251.154.720	108.264.948
2030	1.730.101.417	44.345.323





Isu Strategis: Masih tingginya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Rekomendasi:

- a. Sasaran :
 - Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana
 - Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kebencanaan
 - Perumusan langkah pencegahan dan penanggulangan bencana
- c. Outcome/Program :
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- d. Instansi Pelaksana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Kegiatan :





- Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
- Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk
- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk

5.2.4 Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Nomor Indikator: 2.1.2.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem **penyediaan pangan**. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Penyediaan pangan memiliki tingkat penyediaan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 14,90 %. Kategori sedang sebesar 80,54 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 4.56 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari sampai pada tahun **2019** adalah **12,80%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun menjadi 8,5%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun menjadi 8,5%**.

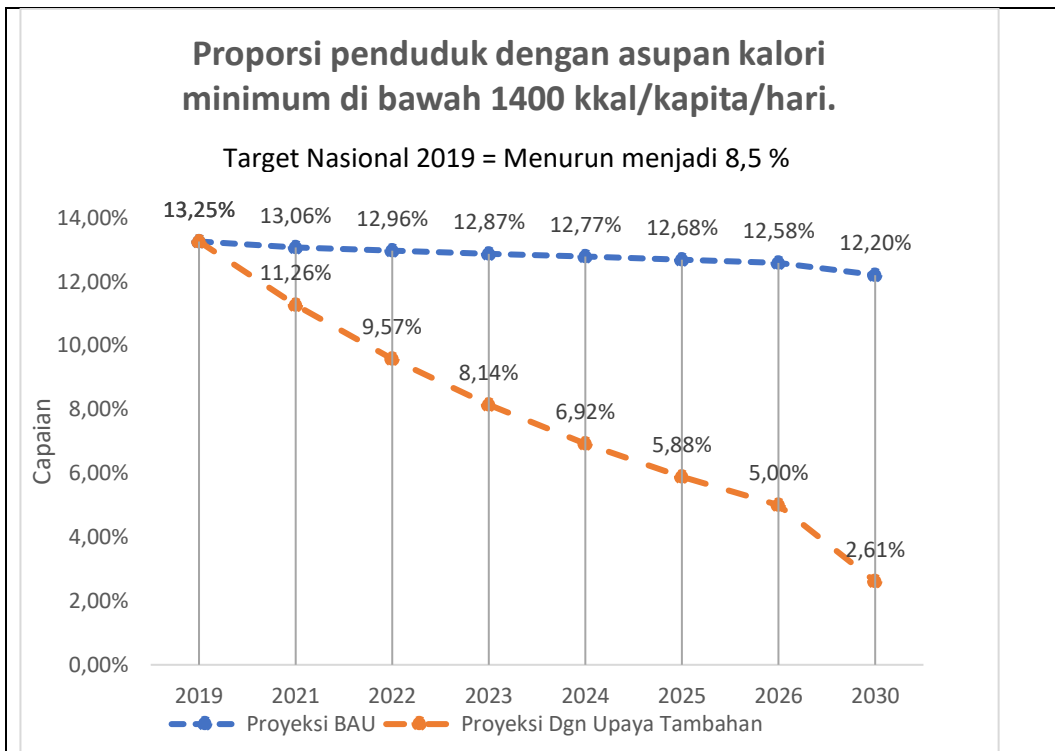




Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2023**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 2,61%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	13,08	
2017	13,25	
2018	13,10	
2019	12,80	12,80
Proyeksi		
2021	12,62%	11,26%
2022	12,52%	9,57%
2023	12,43%	8,14%
2024	12,34%	6,92%
2025	12,25%	5,88%
2026	12,16%	5,00%
2030	11,79%	2,61%





Isu Strategis: Masih tingginya penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok.
- c. Outcome/Program:
 - Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan
 - Peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura
 - Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.
 - Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.





- Peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat.
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Ketahanan Pangan
- e. Kegiatan:
- Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai
 - Peningkatan produksi cabai dan bawang merah
 - Peningkatan produksi gula tebu
 - Peningkatan produksi daging sapi dan kerbau
 - Pengembangan ketersediaan dan penanganan

5.2.5 Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
Nomor Indikator: 6.3.1.(b)
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah . Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Penyediaan pangan memiliki tingkat penyediaan dengan kategori rendah seluas 65.277,83 Ha (18,53%), sedang 129.052,37 Ha (36,62%), tinggi 158.037,38 Ha (44,85%), sehingga secara umum DDDTLH tercukupi.
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sampai pada tahun 2019 adalah 220 rumah tangga . Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam

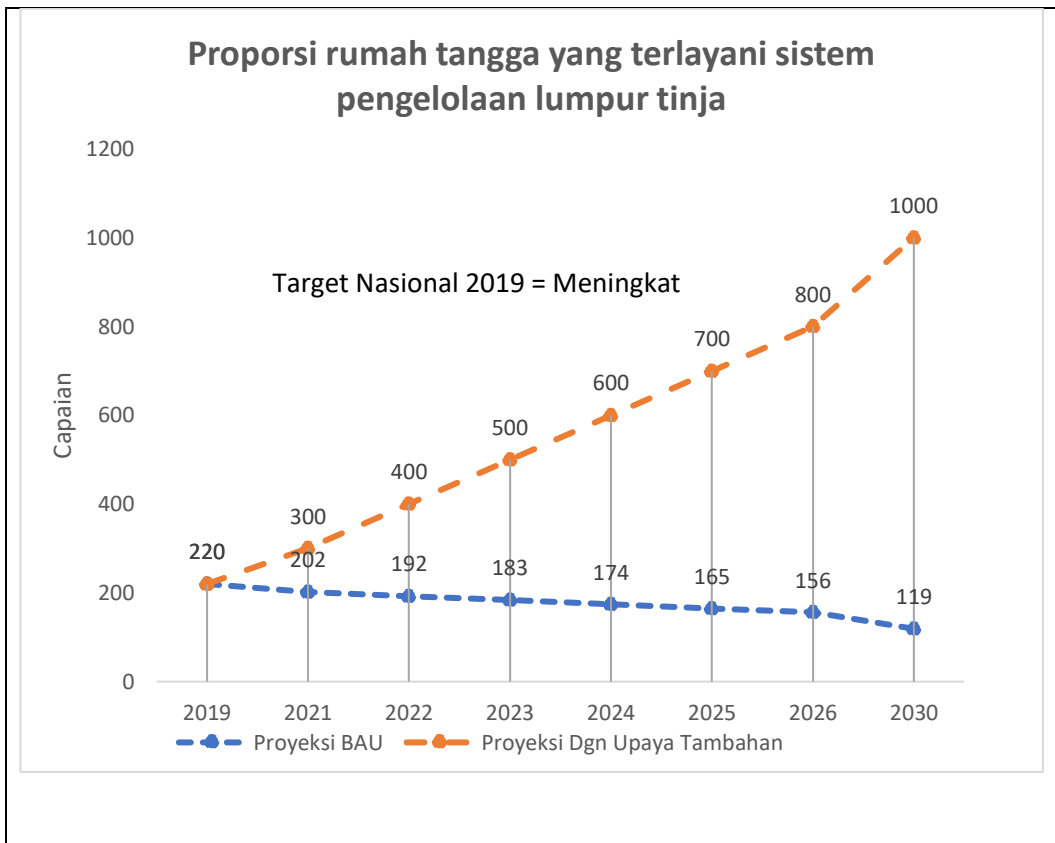




Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 1000 rumah tangga**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (rumah tangga)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (rumah tangga)
<i>Base Line</i>		
2016	250	
2017	300	
2018	240	
2019	220	220
Proyeksi		
2021	202	300
2022	192	400
2023	183	500
2024	174	600
2025	165	700
2026	156	800
2030	119	1000





Isu Strategis: Masih tingginya penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok.
- c. Outcome/Program:
 - Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan
 - Peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura
 - Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.
 - Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.





- Peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat.
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Ketahanan Pangan
- e. Kegiatan:
- Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai
 - Peningkatan produksi cabai dan bawang merah
 - Peningkatan produksi gula tebu
 - Peningkatan produksi daging sapi dan kerbau
 - Pengembangan ketersediaan dan penanganan

5.2.6 Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
Nomor Indikator: 11.5.1*
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir . Berdasarkan hasil analisis DDDTLH Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir, memiliki tingkat penyedia pengaturan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang sampai pada tahun 2019 adalah





728 jiwa. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun** Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **20 jiwa**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (jiwa)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (jiwa)
<i>Base Line</i>		
2016	244	
2017	358	
2018	719	
2019	728	728
Proyeksi		
2021	1.368	500
2022	1.688	400
2023	2.008	300
2024	2.328	200
2025	2.648	100
2026	2.968	50
2030	4.248	20





Isu Strategis: Masih tingginya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Rekomendasi:

- a. Sasaran :
 - Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana
 - Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kebencanaan
 - Perumusan langkah pencegahan dan penanggulangan bencana
- c. Outcome/Program :
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- d. Instansi Pelaksana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah





- e. Kegiatan :
- Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
 - Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk
 - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk

5.2.7 Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Nomor Indikator: 11.5.2.(a)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan **Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir**. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir, memiliki tingkat penyedia pengaturan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana** sampai pada tahun **2019** adalah **Rp. 412.998.000**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun** Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian

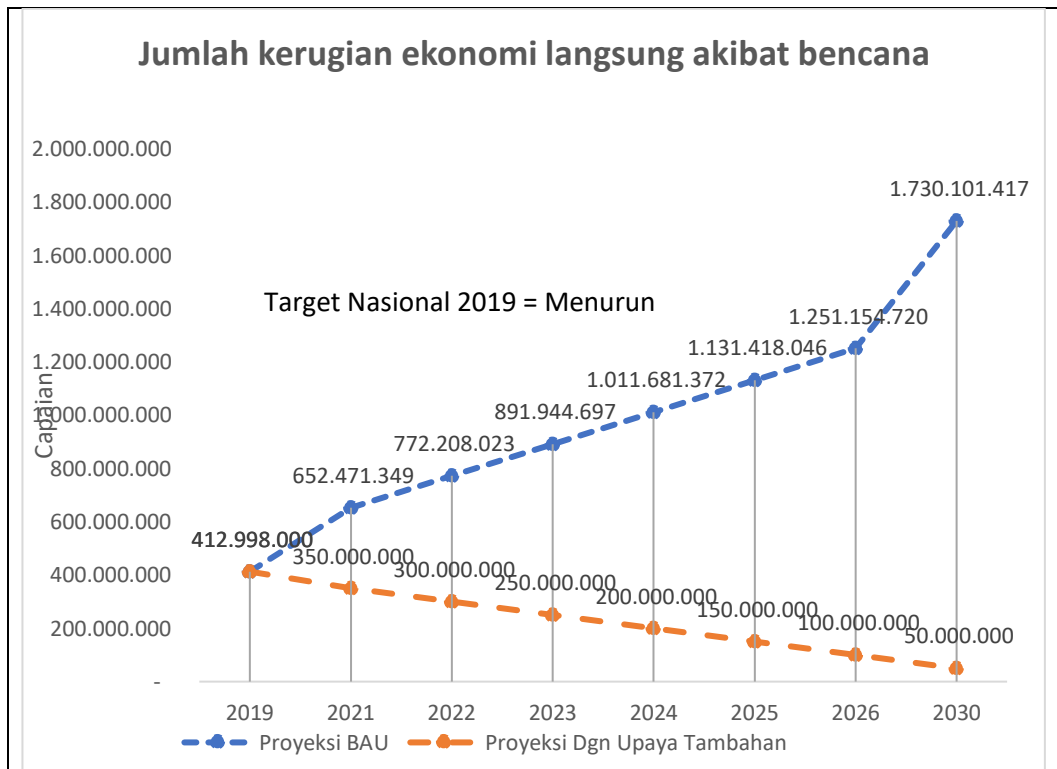




target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **Rp. 50.000.000**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (rupiah)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (rupiah)
<i>Base Line</i>		
2016	192.423.850	
2017	148.000.000	
2018	527.500.000	
2019	412.998.000	412.998.000
Proyeksi		
2021	652.471.349	350.000.000
2022	772.208.023	300.000.000
2023	891.944.697	250.000.000
2024	1.011.681.372	200.000.000
2025	1.131.418.046	150.000.000
2026	1.251.154.720	100.000.000
2030	1.730.101.417	50.000.000





Isu Strategis: Masih tingginya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Rekomendasi:

- a. Sasaran :
 - Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana
 - Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kebencanaan
 - Perumusan langkah pencegahan dan penanggulangan bencana
- c. Outcome/Program :
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- d. Instansi Pelaksana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Kegiatan :





- Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
- Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk
- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk

5.2.8 Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Nomor Indikator: 11.6.1.(a)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem **Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah**. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Penyediaan pangan memiliki tingkat penyediaan dengan kategori rendah seluas 65.277,83 Ha (18,53%), sedang 129.052,37 Ha (36,62%), tinggi 158.037,38 Ha (44,85%), sehingga secara umum DDDTLH tercukupi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **persentase sampah perkotaan yang tertangani** sampai pada tahun **2019** adalah **12,89%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat menjadi 80%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat menjadi 80%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2030**.

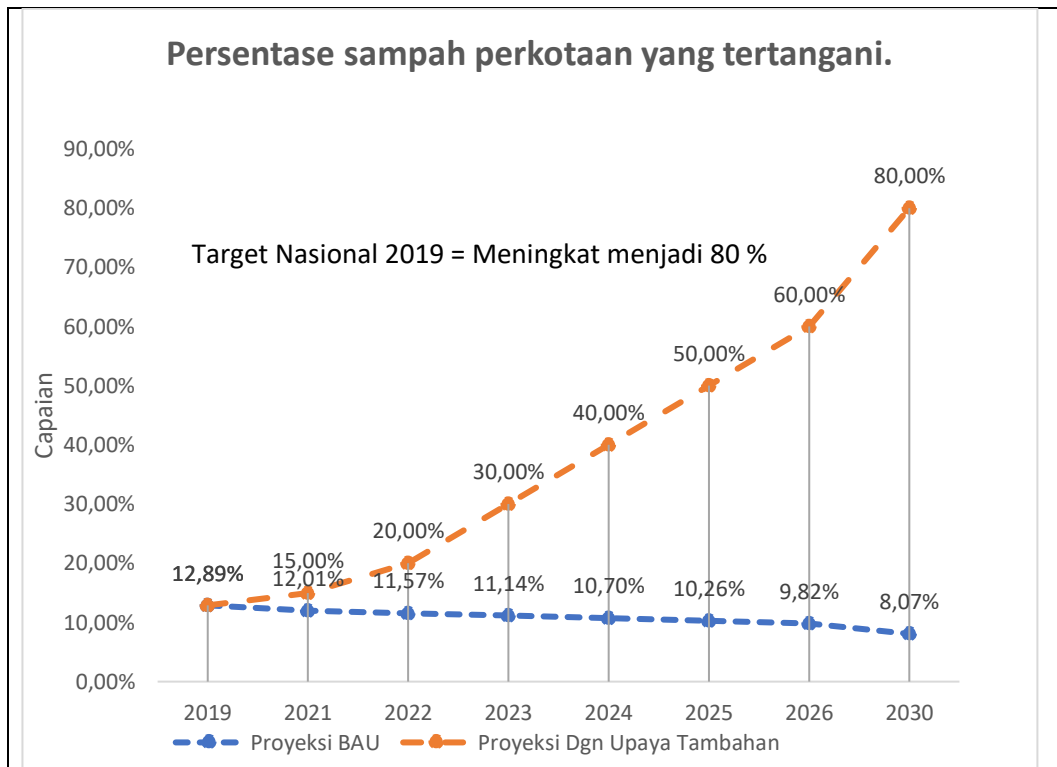




Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **80,00%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	14,30	
2017	13,25	
2018	0,00	
2019	12,89	12,89
Proyeksi		
2021	12,01	15,00
2022	11,57	20,00
2023	11,14	30,00
2024	10,70	40,00
2025	10,26	50,00
2026	9,82	60,00
2030	8,07	80,00





Isu Strategis: Masih rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani

Rekomendasi:

- Sasaran : Meningkatnya angka penanganan sampah
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (reduce, reuse and recycle).
- Strategi dan Arah Kebijakan : Membangun tempat pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
Mengubah sampah menjadi rupiah. (meningkatkan nilai sampah).
- Outcome/Program :
 - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang berstandar
 - Penyusunan panduan manajemen pengelolaan sampah untuk wilayah perkotaan kabupaten dan kota.
- Instansi Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup.
- Kegiatan:





- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembangunan TPA ramah lingkungan.
- Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan.
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
- Pengembangan teknologi pengolahan persampahan, sampah menjadi energi listrik.
- Bimbingan teknis pengolahan persampahan.
- Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan tingkat kabupaten.
- Koordinasi pengelolaan persampahan.
- Koordinasi pengelolaan sampah antar daerah.
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

5.2.9 Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang

Tujuan: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Target: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Nomor Indikator: 13.1.2*

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir, memiliki tingkat penyedia pengaturan untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 69,72 %. Kategori sedang sebesar 8,81 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 21,47 % dari total





luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang** sampai pada tahun **2019** adalah **728 jiwa**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun** Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **20 jiwa**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

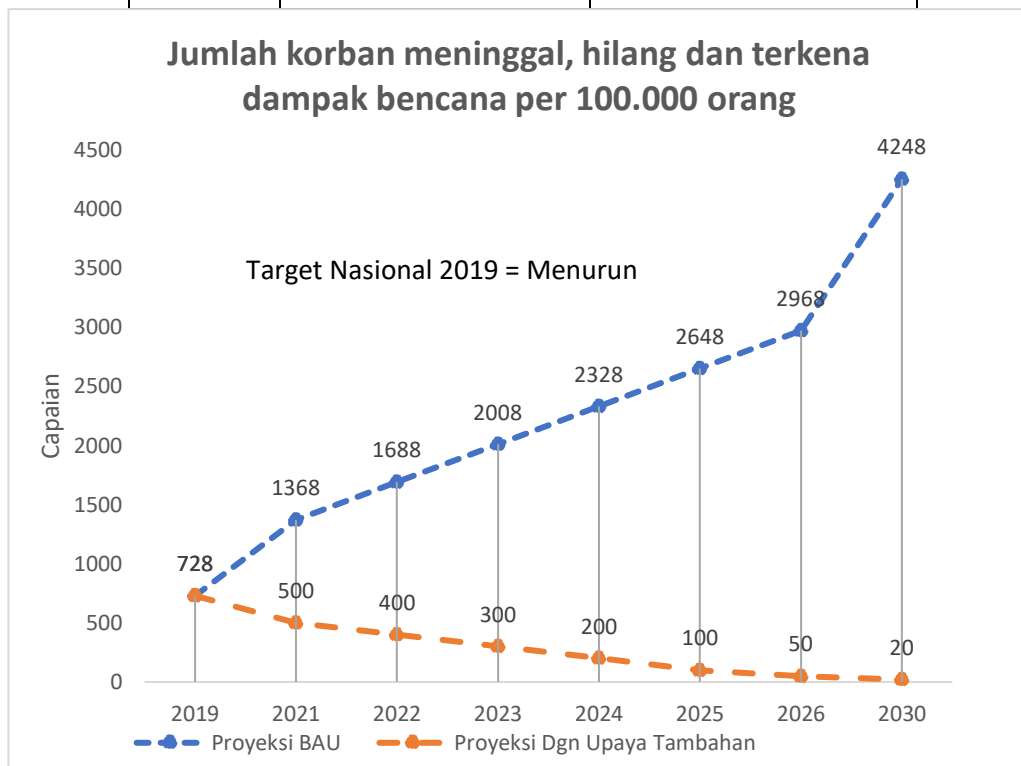


KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (jiwa)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (jiwa)
<i>Base Line</i>		
2016	244	
2017	358	
2018	719	
2019	728	728
<i>Proyeksi</i>		
2021	1368	500
2022	1688	400
2023	2008	300
2024	2328	200
2025	2648	100
2026	2968	50
2030	4248	20



Isu Strategis: Masih tingginya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang





Rekomendasi:

- a. Sasaran : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim
 - Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana)
 - Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan.
 - Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan.
- c. Outcome/Program : Program Penanggulangan Bencana
- d. Instansi Pelaksana : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- e. Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

5.3 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDTLH

Uraian skenario dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait Non DDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah:

5.3.1 Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Tujuan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Target: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Nomor Indikator: 1.2.1*
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis

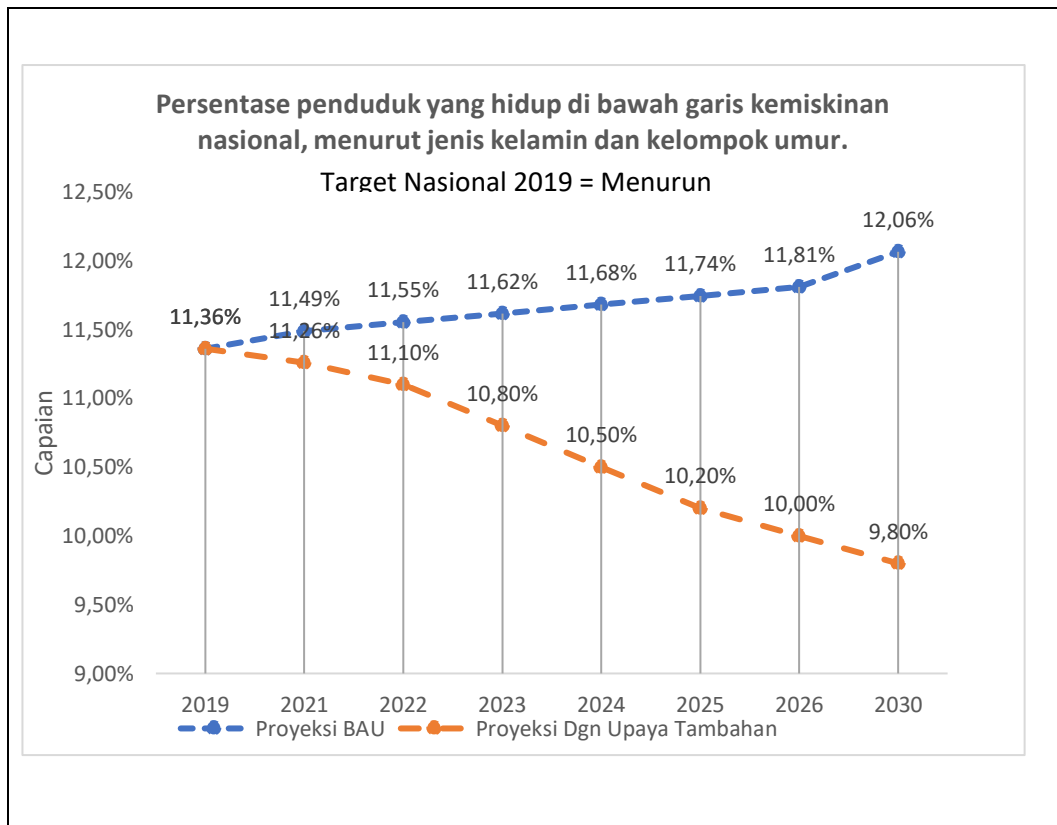




kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur sampai pada tahun **2019** adalah **11,36%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun** Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 9,80%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	11,17	
2017	11,17	
2018	11,36	
2019	11,36	11,36
Proyeksi		
2021	11,49	11,26
2022	11,55	11,10
2023	11,62	10,80
2024	11,68	10,50
2025	11,74	10,20
2026	11,81	10,00
2030	12,06	9,80





Isu Strategis: Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Rekomendasi:

- a. **Sasaran :** Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
- b. **Strategi dan Arah Kebijakan :**
 - Peningkatan kualitas kebijakan fiskal melalui perbaikan sistem perpajakan yang memastikan kuintil teratas membayar pajak dengan semestinya, peningkatan *collection rate*, serta redistribusi sistem pendapatan yang merata.
 - Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk infrastruktur, sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi);
 - Memperbesar investasi padat pekerja;





- Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro;
 - Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif;
 - Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
 - Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;
 - Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar; dan
 - Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.
- c. **Outcome/Program** : Program Perlindungan Jaminan Sosial
- d. **Instansi Pelaksana** : Dinas Sosial
- e. **Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5.3.2 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
Nomor Indikator: 1.3.1.(d)
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan sampai pada tahun 2019 adalah 5589 . Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030





yaitu **Menurun**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 4.000 rumah tangga**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (rumah tangga)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (rumah tangga)
<i>Base Line</i>		
2016	2.032	
2017	4.062	
2018	5.884	
2019	5.589	5.589
Proyeksi		
2021	10.073	5.300
2022	12.314	5.100
2023	14.556	5.000
2024	16.798	4.900
2025	19.040	4.800
2026	21.281	4.500
2030	30.248	4.000





Isu Strategis: Masih tingginya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
 - Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
 - Pengembangan penghidupan berkelanjutan
- c. Outcome/Program :
 - Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Penanganan Fakir Miskin
 - Pemberdayaan Sosial
- d. Instansi Pelaksana : Dinas Sosial





e. Kegiatan

- Jaminan sosial keluarga; Bantuan tunai untuk keluarga miskin
- Perlindungan sosial korban bencana alam
- Penanganan fakir miskin perkotaan
- Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)

5.3.3 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Nomor Indikator: 1.4.1.(k)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN** sampai pada tahun **2019** adalah **4,06%**. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat menjadi 100%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat menjadi 100%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2030**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 9,00%**. Untuk

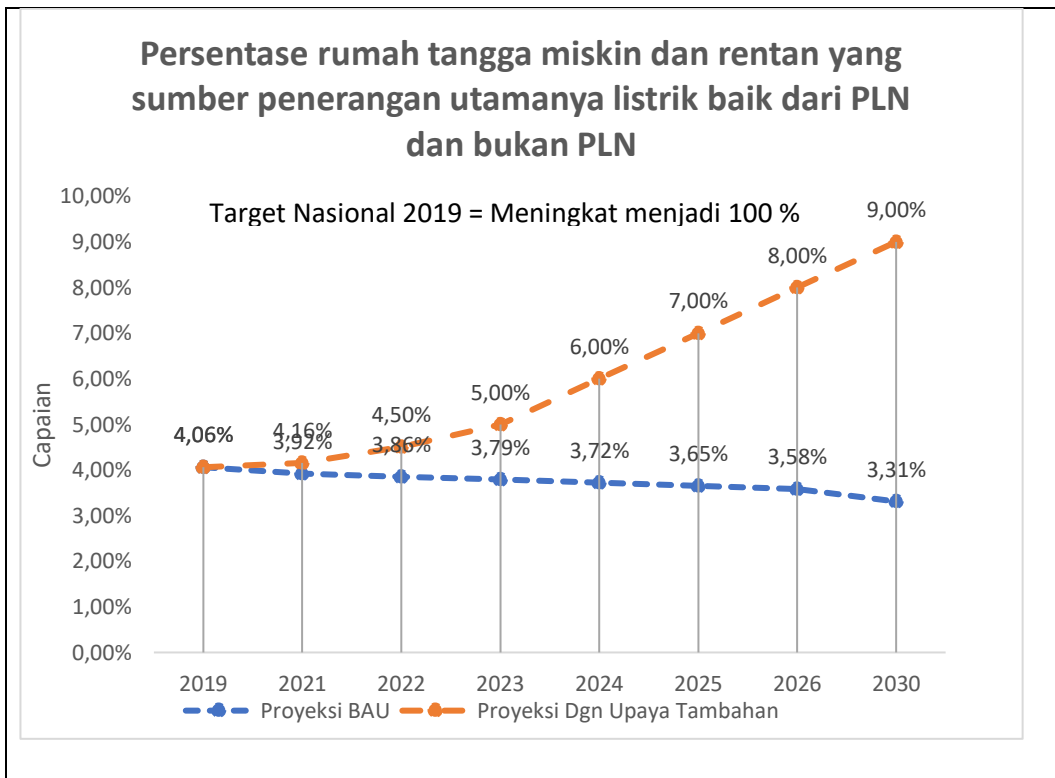




mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2014	0	
2015	4,20	
2016	4,20	
2017	4,06	4,06
Proyeksi		
2021	3,92	4,16
2022	3,86	4,50
2023	3,79	5,00
2024	3,72	6,00
2025	3,65	7,00
2026	3,58	8,00
2030	3,31	9,00





Isu Strategis: Masih terdapat rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya bukan listrik.

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
 - Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
 - Pengembangan penghidupan berkelanjutan
- c. Outcome/Program :
 - Pengelolaan ketenagalistrikan
 - Penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat





transportasi dan elektronika

d. Instansi Pelaksana : Dinas Perdagangan Perindustrian dan ESDM

e. Kegiatan:

- Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

5.3.4 Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah secara Langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

Nomor Indikator: 1.a.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan** sampai pada tahun **2019** adalah **42%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan.

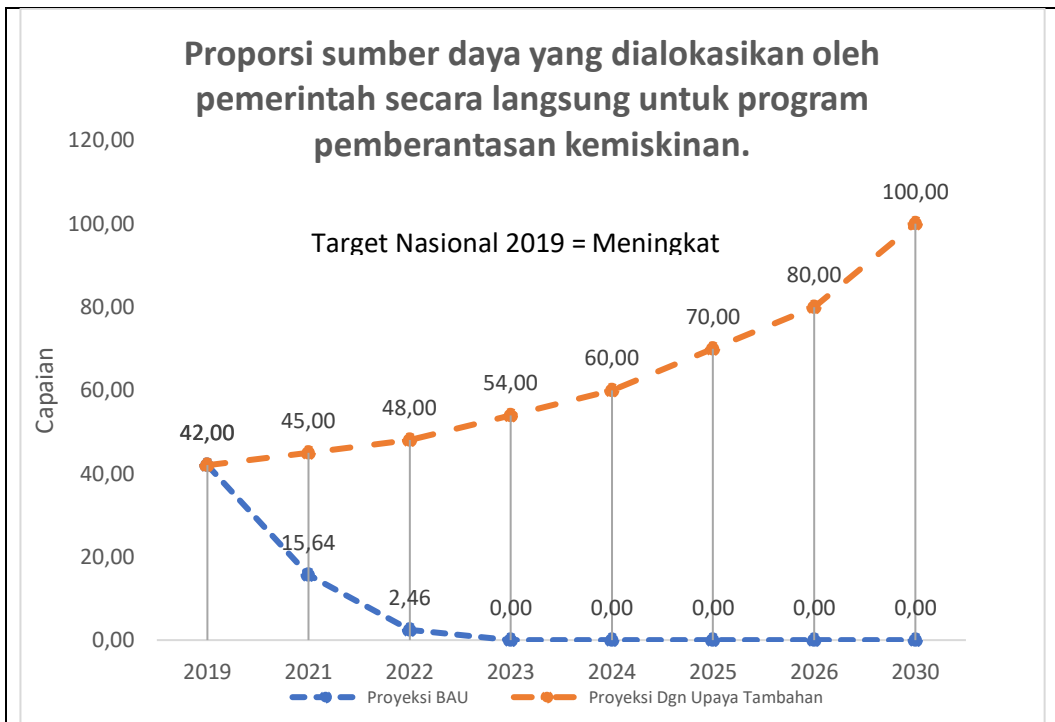




Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 50,00%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	130	
2017	130	
2018	93	
2019	42	42
Proyeksi		
2021	15,64	43,00
2022	2,46	45,00
2023	0	46,00
2024	0	48,00
2025	0	49,00
2026	0	50,00
2030	0	50,00





Isu Strategis: Masih rendahnya Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah secara Langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan : Penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
- c. Outcome/Program : Program Perlindungan Jaminan Sosial





- d. Instansi Pelaksanaan : Dinas Sosial
- e. Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5.3.5 Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang Dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target:

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Nomor Indikator: 2.2.2*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe** sampai pada tahun **2019** adalah **3,44%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 0,10%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian

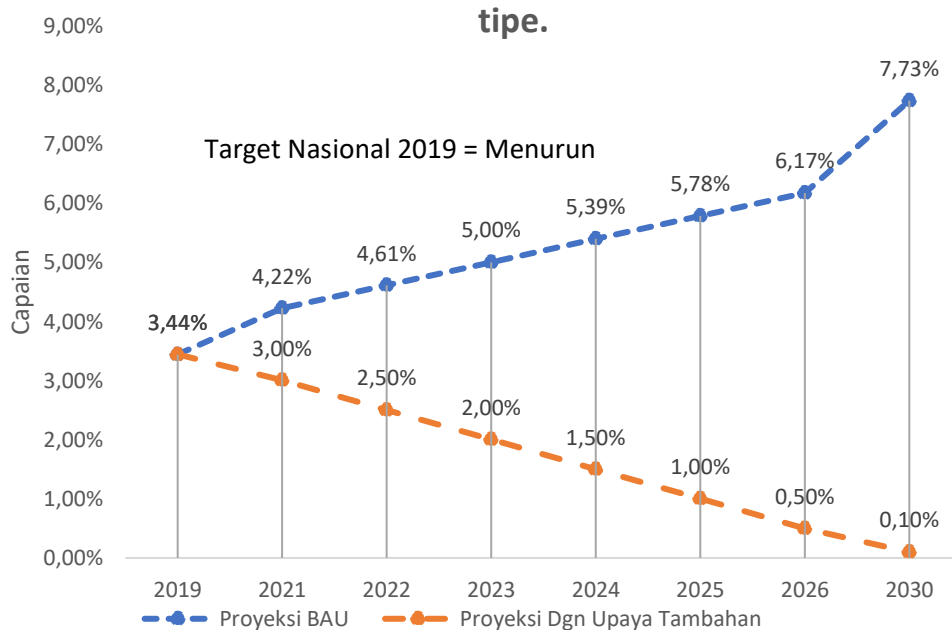




indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	0	
2017	0	
2018	3,09	
2019	3,44	3,44
<i>Proyeksi</i>		
2021	4,22	3,00
2022	4,61	2,50
2023	5,00	2,00
2024	5,39	1,50
2025	5,78	1,00
2026	6,17	0,50
2030	7,73	0,10

Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.





Isu Strategis: Masih tingginya Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang Dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Menjaring keikutsertaan yang lebih luas dari berbagai lintas sektor, stakeholder, serta trans disiplin baik dalam tanggung jawab pelaksanaan maupun pencapaian Sasaran, melalui aktivitas yang dimungkinkan
 - Penggabungan atau pengintegrasian program Kegiatan yang ada di berbagai SKPD yang difokuskan pada Tujuan yang sama, penurunan prevalensi wasting
 - Mengoptimalkan daya dukung sumber daya yang tersedia dengan memfokuskan penanganan masalah wasting pada daerah yang bermasalah
- c. **Outcome/Program** : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- d. **Instansi Pelaksana** : Dinas Kesehatan
- e. **Kegiatan:** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)





5.3.6 Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup

<p>Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</p>
<p>Target:</p> <p>Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p>
<p>Nomor Indikator: 3.2.2*</p>
<p>Proyeksi Capaian Indikator TPB:</p> <p>Capaian indikator angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup sampai pada tahun 2019 adalah 4,1. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Menurun. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2021. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 44,58%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:</p>



KLHS RPJMD

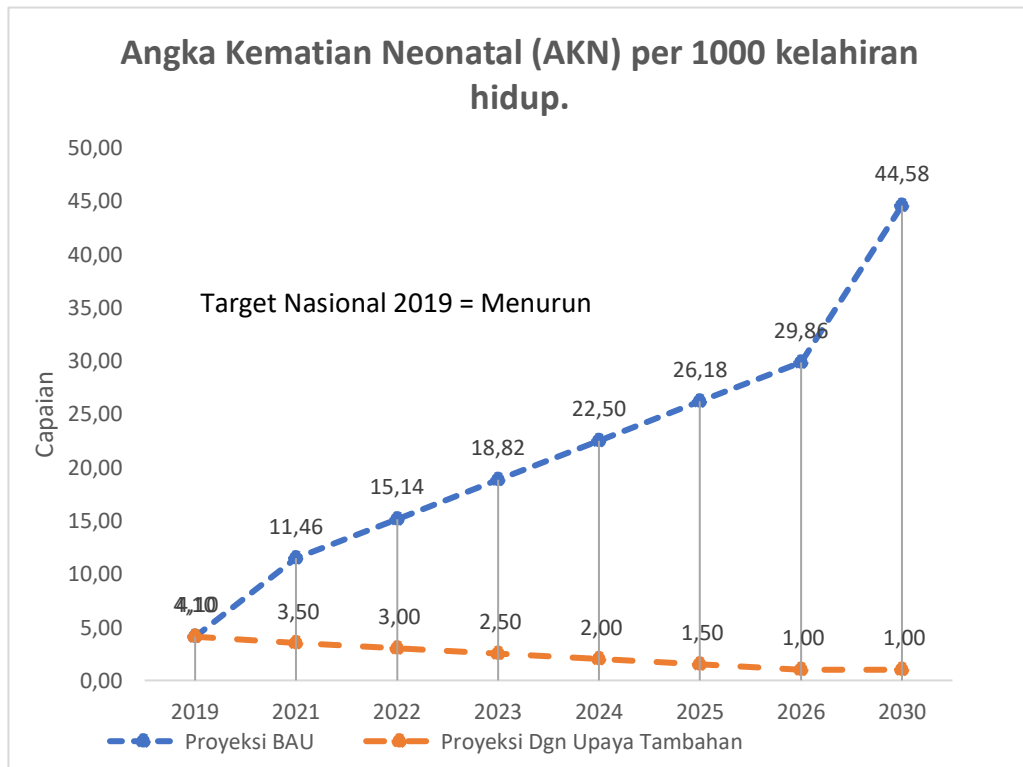
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	0,6	
2017	4,2	
2018	1,9	
2019	4,1	4,1
<i>Proyeksi</i>		
2021	11,46	3,50
2022	15,14	3,00
2023	18,82	2,50
2024	22,50	2,00
2025	26,18	1,50
2026	29,86	1,00
2030	44,58	1,00





Isu Strategis: Masih tingginya angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

Rekomendasi:

a. **Sasaran:**

Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

b. **Strategi dan Arah Kebijakan:**

- Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas
- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
- Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

c. **Outcome/Program:**

- Pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak
- Penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan
- Penyehatan lingkungan
- Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan

d. **Instansi Pelaksana:** Dinas Kesehatan

e. **Kegiatan:**

- Pembinaan Gizi Masyarakat
- Pembinaan Kesehatan Keluarga
- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)





5.3.7 Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤18 Tahun

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Target: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Nomor Indikator: 3.4.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun** sampai pada tahun **2019** adalah **5,70%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 5,70%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

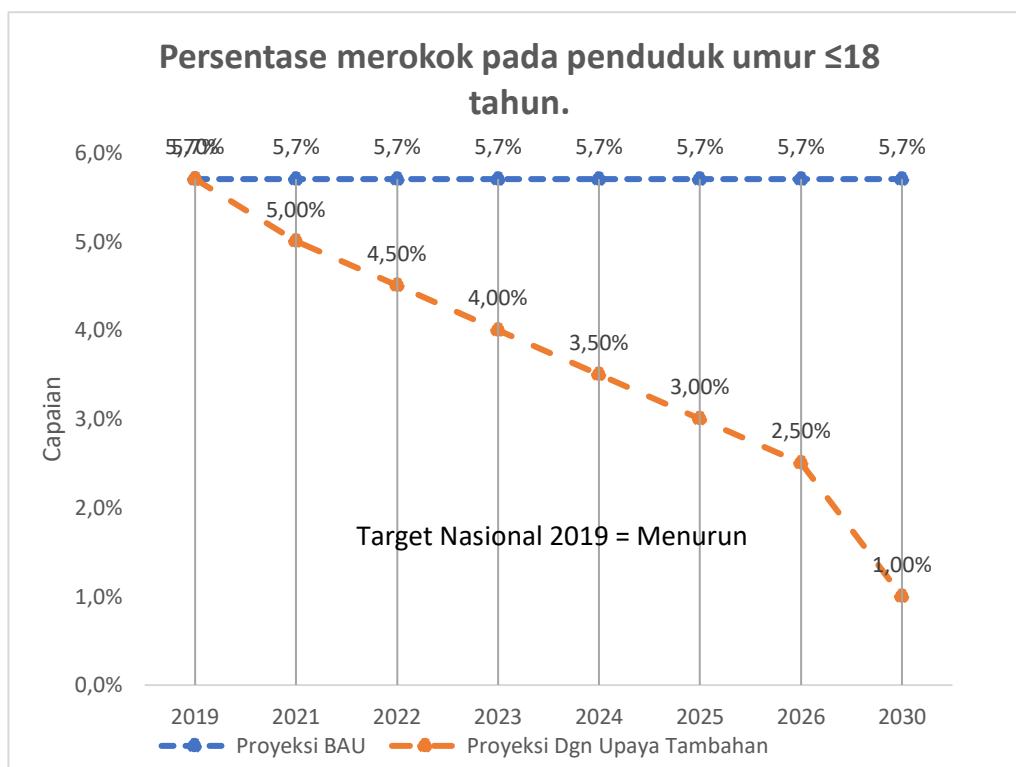
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	5,70	
2017	5,70	
2018	5,70	
2019	5,70	5,70
<i>Proyeksi</i>		
2021	5,70	5,00
2022	5,70	4,50
2023	5,70	4,00
2024	5,70	3,50
2025	5,70	3,00
2026	5,70	2,50
2030	5,70	1,00





Isu Strategis: Masih tingginya persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
- c. Outcome/Program: Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Kegiatan: Pengendalian penyakit tidak menular

5.3.8 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Nomor Indikator: 3.4.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Prevalensi tekanan darah tinggi sampai pada tahun **2019** adalah **33%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun menjadi 24,3%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun menjadi 24,3%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target

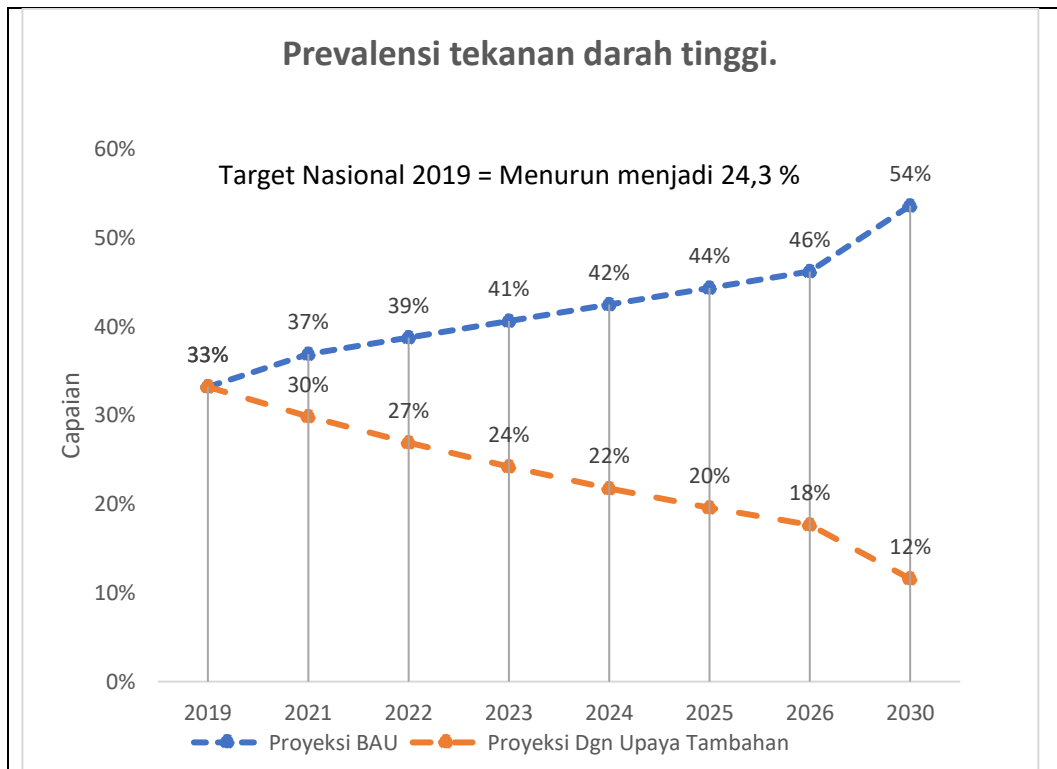




indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2023**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 54%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	28	
2017	29	
2018	33	
2019	33	33
Proyeksi		
2021	37	30
2022	39	27
2023	41	24
2024	42	22
2025	44	20
2026	46	18
2030	54	12





Isu Strategis: Masih tingginya Prevalensi tekanan darah tinggi.

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan:
 - Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
 - Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
 - Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan;
 - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
 - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang





berkualitas;
▪ Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
▪ Meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
▪ Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
▪ Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
▪ Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan
▪ Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
c. Outcome/Program: Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
d. Instansi Pelaksana: Dinas Kesehatan
e. Kegiatan: Pengendalian Penyakit tidak Menular

5.3.9 Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
Nomor Indikator: 3.7.1.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator angka penggunaan metode kontrasepsi jangka

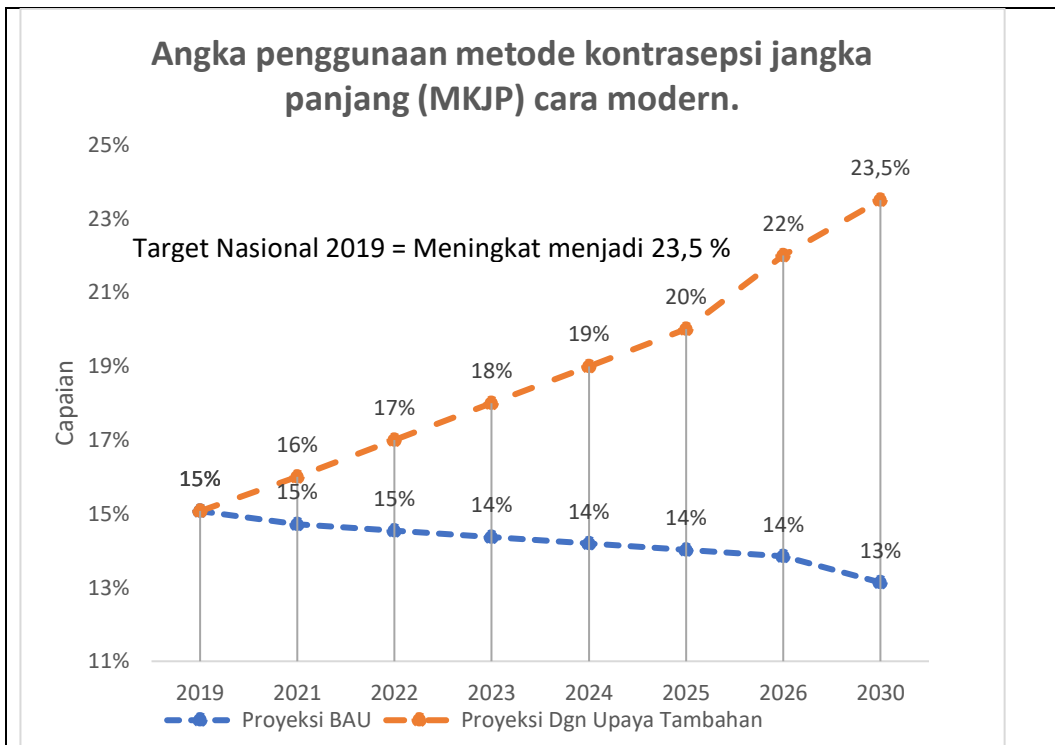




panjang (MKJP) cara modern sampai pada tahun **2019** adalah **15%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat menjadi 23,5%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat menjadi 23,5%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2030**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 13%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	16	
2017	15	
2018	0	
2019	15	15
Proyeksi		
2021	15	16%
2022	15	17%
2023	14	18%
2024	14	19%
2025	14	20%
2026	14	22%
2030	13	23,5%





Isu Strategis: Masih rendahnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan:
 - menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;
 - menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan;
 - meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam





- berkeluarga;
 - meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga;
 - menguatkan landasan hukum dan menyetarakan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan.
- c. Outcome/Program: Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Kegiatan:
 - Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah
 - Pembinaan Ketahanan Remaja
 - Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
 - Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga
 - Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi





5.3.10 Jumlah Penduduk yang Dicapuk Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target:

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Nomor Indikator: 3.8.2*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk** sampai pada tahun **2019** adalah **1.000 penduduk**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 1.000**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (penduduk)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (penduduk)
<i>Base Line</i>		
2016	1.000	
2017	1.000	
2018	1.000	
2019	1.000	1.000
<i>Proyeksi</i>		
2021	1.000	1.500
2022	1.000	2.000
2023	1.000	2.500
2024	1.000	3.000
2025	1.000	3.500
2026	1.000	4.000
2030	1.000	5.500





Isu Strategis: Masih rendahnya jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
- b. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. Outcome/Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat .
- d. Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)

5.3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target:

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(e)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat sampai pada tahun **2019** adalah **98%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019

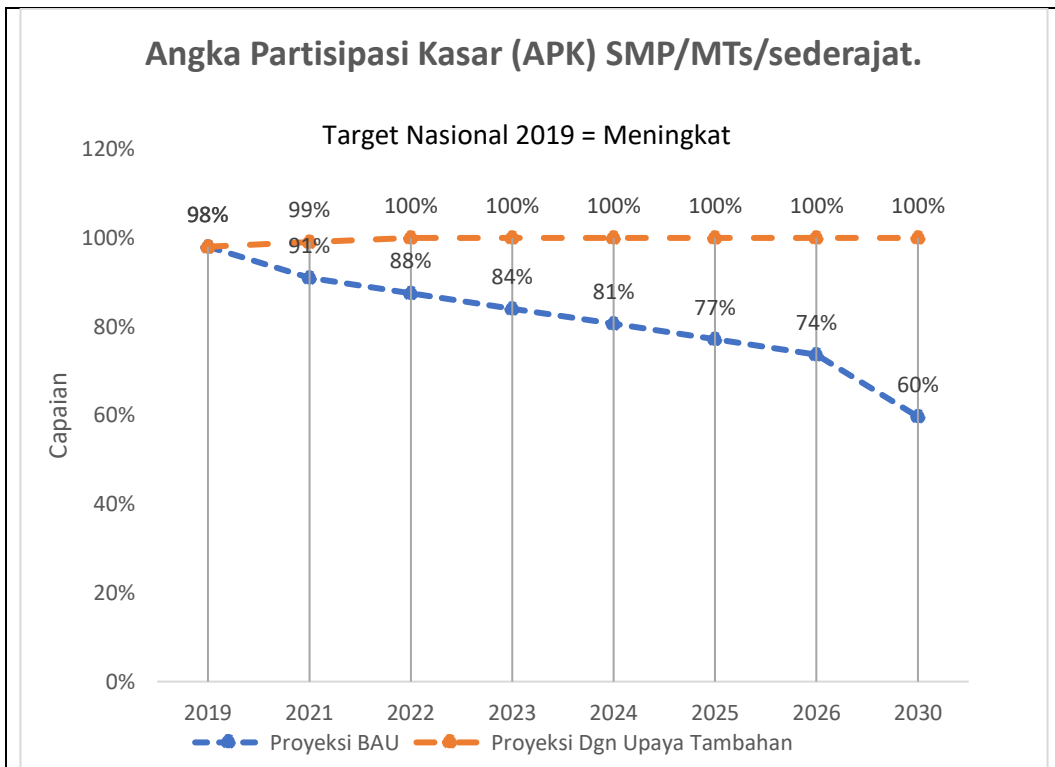




maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 60%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	109	
2017	111	
2018	109	
2019	98	98
Proyeksi		
2021	91	99
2022	88	100
2023	84	100
2024	81	100
2025	77	100
2026	74	100
2030	60	100





Isu Strategis: Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu, pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),





- dan perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan.
- Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan
- c. Outcome/Program : Program Pengelolaan Pendidikan
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Pendidikan
- e. Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

5.3.12 Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Tujuan: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

Target: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Nomor Indikator: 5.1.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan** sampai pada tahun **2019** adalah **15 kebijakan**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Bertambah sebanyak 16 kebijakan**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Bertambah sebanyak 16 kebijakan**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara di proyeksi capaian pada tahun **2030 adalah 15 kebijakan**. Untuk mencapai target sesuai

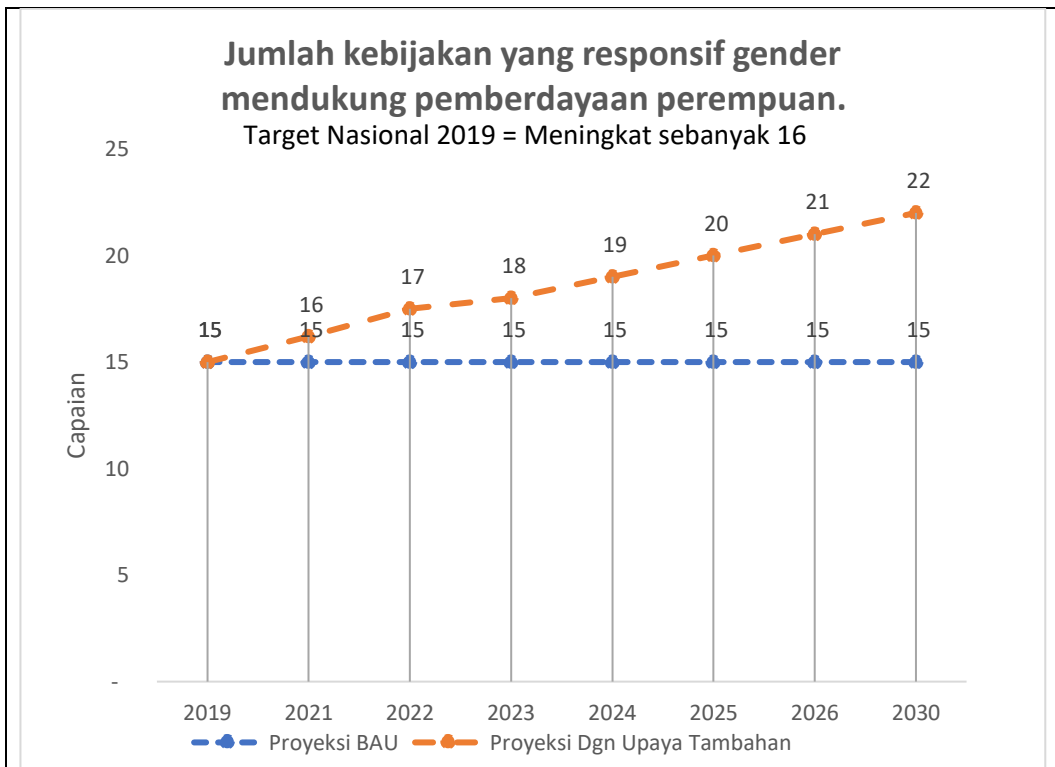




proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (kebijakan)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (kebijakan)
<i>Base Line</i>		
2016	15	
2017	15	
2018	0	
2019	15	15
Proyeksi		
2021	15	16
2022	15	17
2023	15	18
2024	15	19
2025	15	20
2026	15	21
2030	15	22





Isu Strategis: Masih rendahnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Rekomendasi:

- Sasaran : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- Strategi dan Arah Kebijakan : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
- Outcome/Program : Program Perlindungan Perempuan
- Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota).





5.3.13 persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Nomor Indikator: 5.2.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif** sampai pada tahun **2019** adalah **40%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat menjadi 70%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat menjadi 70%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2024**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **28%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

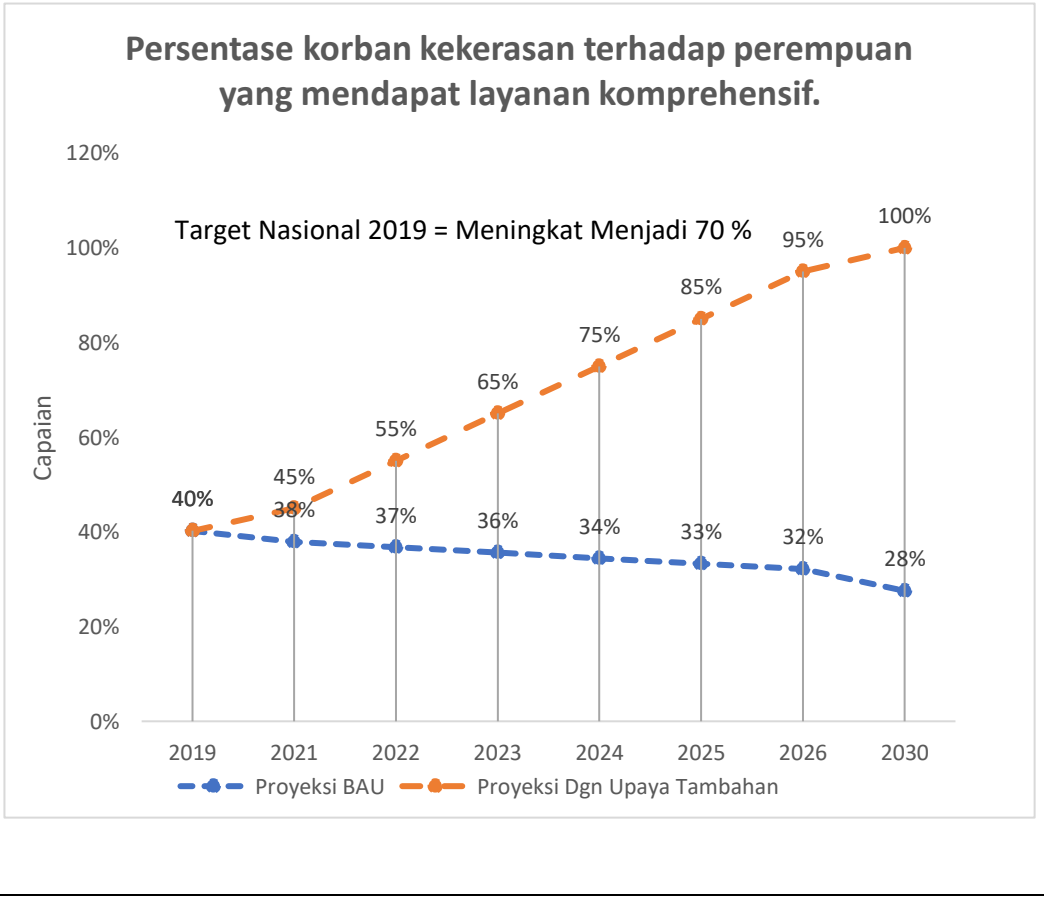
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	44	
2017	62	
2018	40	
2019	40	40
<i>Proyeksi</i>		
2021	38	45
2022	37	55
2023	36	65
2024	34	75
2025	33	85
2026	32	95
2030	28	100





Isu Strategis: Masih rendahnya persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

Rekomendasi:

a. **Sasaran:**

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

b. **Strategi dan Arah Kebijakan:**

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

c. **Outcome/Program:**

Program Perlindungan Perempuan

d. **Instansi Pelaksana:**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

e. **Kegiatan:**

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota)

5.3.14 Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target:

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Nomor Indikator: 5.5.2*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial**

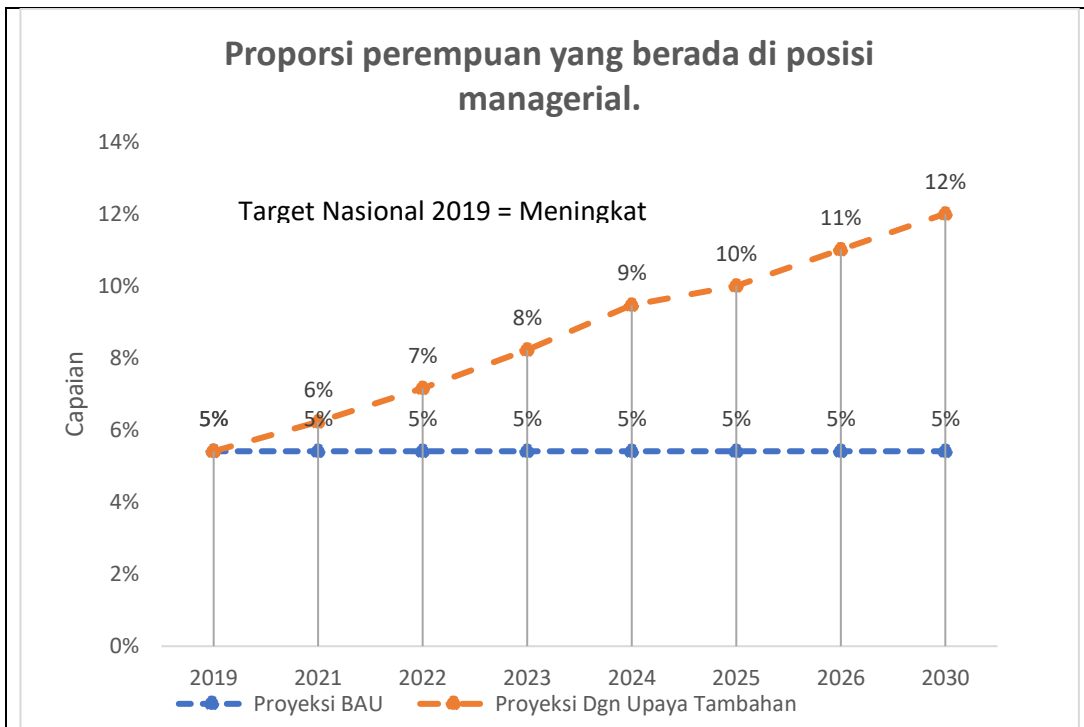




sampai pada tahun **2019** adalah **5%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **5%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	5	
2017	5	
2018	5	
2019	5	5
<i>Proyeksi</i>		
2021	5	6
2022	5	7
2023	5	8
2024	5	9
2025	5	10
2026	5	11
2030	5	12





Isu Strategis: Masih rendahnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan peran perempuan di bidang politik
- c. Outcome/Program: Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Kegiatan:
 - Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
 - Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan





5.3.15 Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Metode Kontrasepsi Modern

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target:

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

Nomor Indikator: 5.6.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern** sampai pada tahun **2019** adalah **72,50%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat menjadi 85%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat menjadi 85%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2023**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **73,01%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

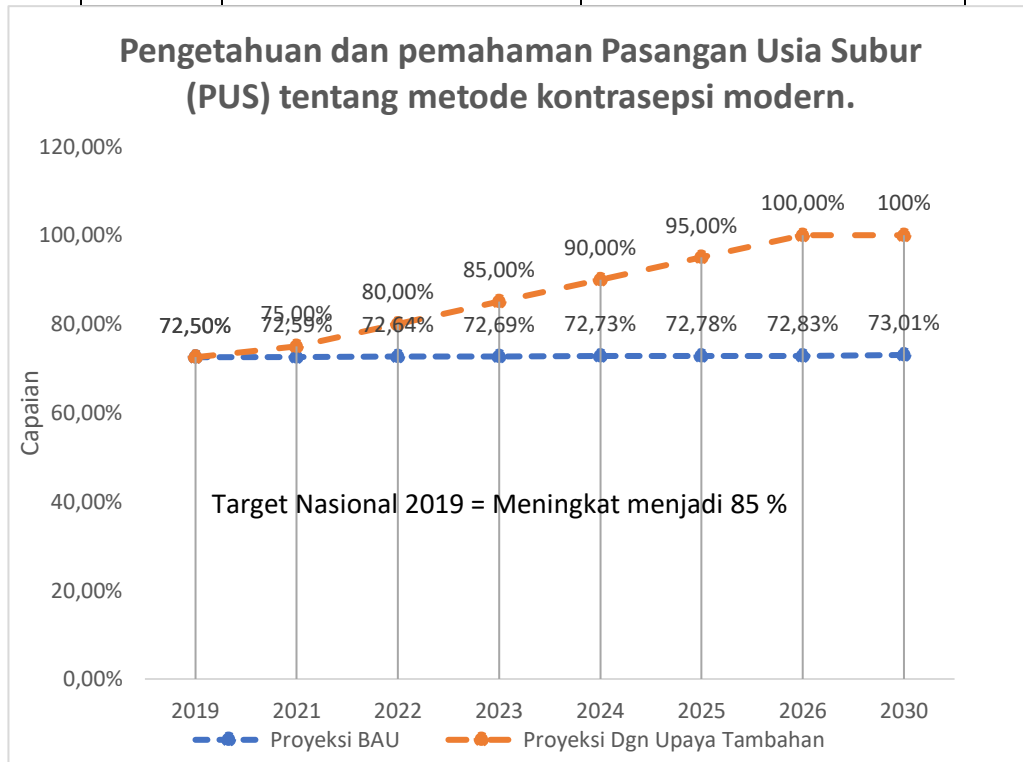


KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	72,36	
2017	72,28	
2018	72,50	
2019	72,50	72,50
<i>Proyeksi</i>		
2021	72,59	75,00
2022	72,64	80,00
2023	72,69	85,00
2024	72,73	90,00
2025	72,78	95,00
2026	72,83	100,00
2030	73,01	100,00



Isu Strategis: Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.





Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Outcome/Program: Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga.
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Kegiatan:
 - Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah
 - Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
 - Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
 - Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga

5.3.16 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.





Nomor Indikator: 6.2.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir sampai pada tahun **2019** adalah **76**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **72%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

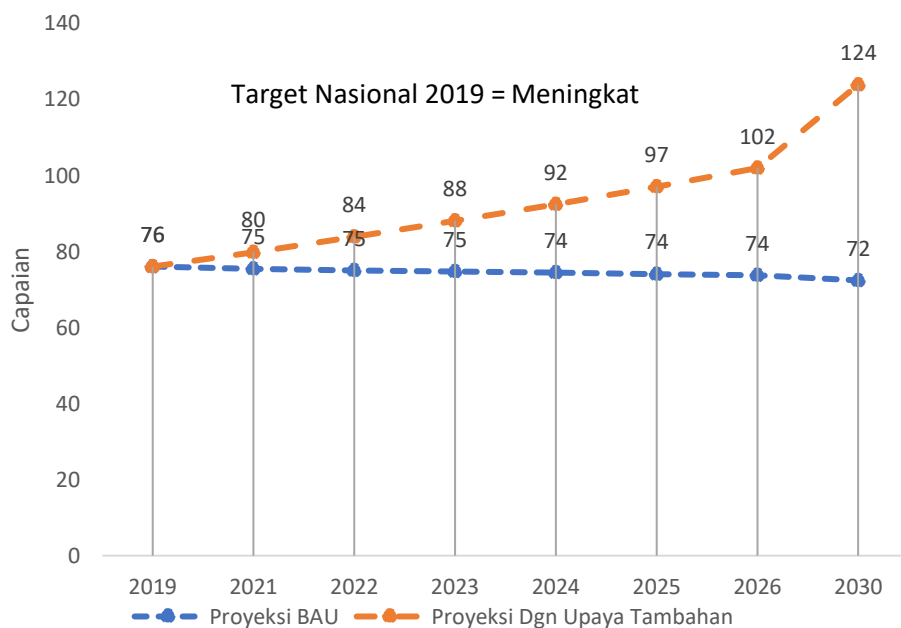
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016		77
2017		12
2018		33
2019	76	76
<i>Proyeksi</i>		
2021	75	80
2022	75	84
2023	75	88
2024	74	92
2025	74	97
2026	74	102
2030	72	124

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.





Isu Strategis: Masih tingginya proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan.
- c. Outcome/Program:
 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Perlindungan anak
 - Penanganan kekerasan terhadap perempuan.
- d. Instansi Pelaksana: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Kegiatan:
 - Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak
 - Peningkatan Perlindungan Anak di daerah
 - Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

5.3.17 Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target:

Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

Nomor Indikator: 6.5.1.(c)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk** sampai pada tahun **2019** adalah **4 unit**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di

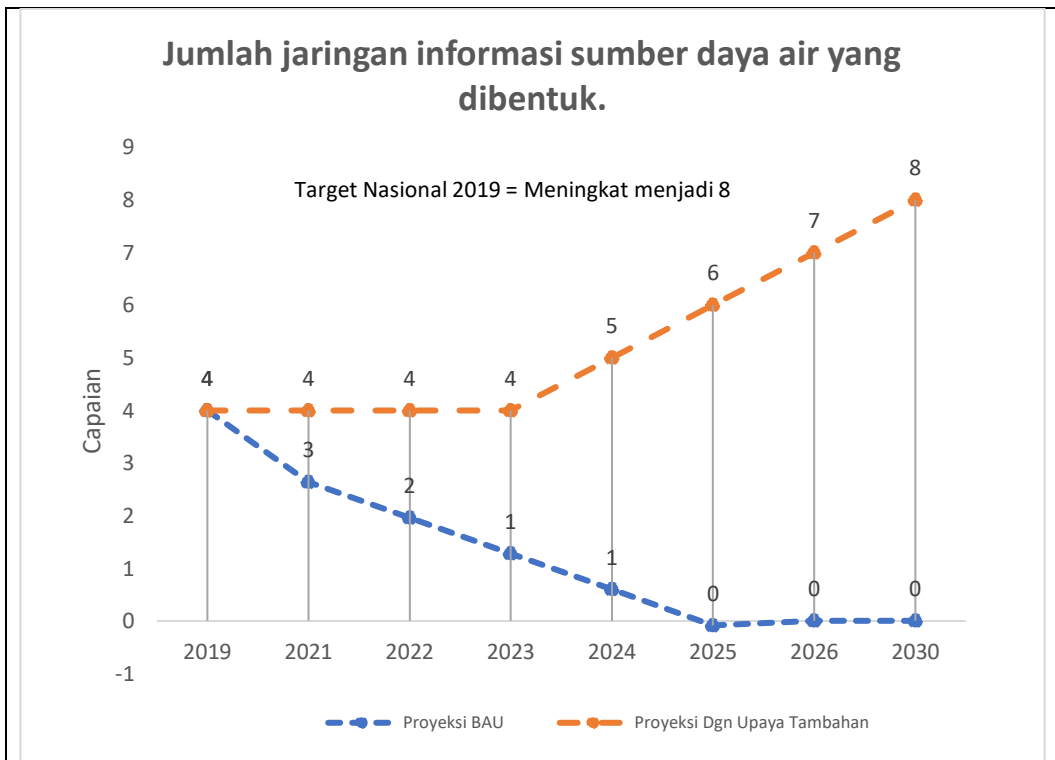




tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **8**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **8 unit jaringan informasi**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2024**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **-3**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (unit)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (unit)
<i>Base Line</i>		
2016	7	
2017	4	
2018	4	
2019	4	4
Proyeksi		
2021	3	5
2022	2	6
2023	1	7
2024	1	8
2025	0	9
2026	0	10
2030	0	12





Isu Strategis: Masih rendahnya Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan:
 - Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat;
 - Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
 - Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
 - Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu,





efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.
c. Outcome/Program: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
d. Instansi Pelaksana: Dinas Lingkungan Hidup
e. Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota)

5.3.18 Bauran Energi Terbarukan

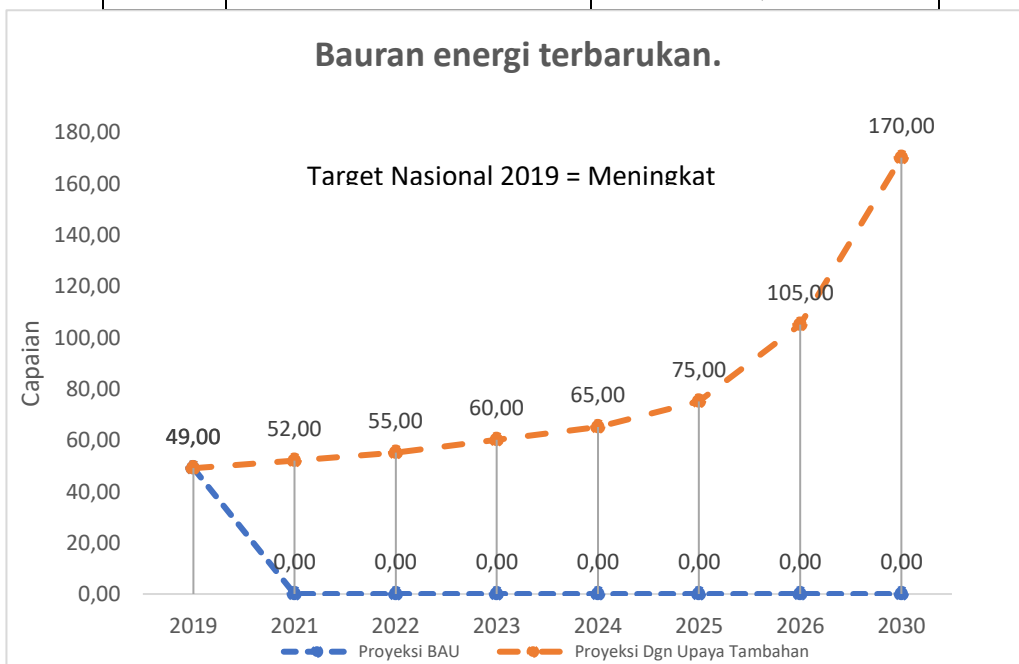
Tujuan: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Target: Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
Nomor Indikator: 7.2.1*
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Bauran energi terbarukan sampai pada tahun 2019 adalah 49 . Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkat . Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Meningkat . Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2021 . Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah -232,68 . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang





dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
<i>Base Line</i>		
2016	0	
2017	215	
2018	74	
2019	49	49
<i>Proyeksi</i>		
2021	0	55,00
2022	0	60,00
2023	0	65,00
2024	0	70,00
2025	0	75,00
2026	0	80,00
2030	0	90,00



Isu Strategis: Masih rendahnya bauran energi terbarukan





Rekomendasi:

- a. **Sasaran:** Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global
- b. **Strategi dan Arah Kebijakan:**
 - Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya.
 - Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi.
 - Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi.
 - Menyempurnakan kelembagaan dan regulasi energi dan ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang andal termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah.
 - Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
 - Meningkatkan aksesibilitas energi.
 - Meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
 - Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran.
 - Memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- c. **Outcome/Program:** Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
- d. **Instansi Pelaksana:** Dinas ESDM
- e. **Kegiatan:** Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota





5.3.19 Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target:

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 % pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Nomor Indikator: 8.1.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Laju pertumbuhan PDB per kapita** sampai pada tahun **2019** adalah **8,90%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **1,46%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

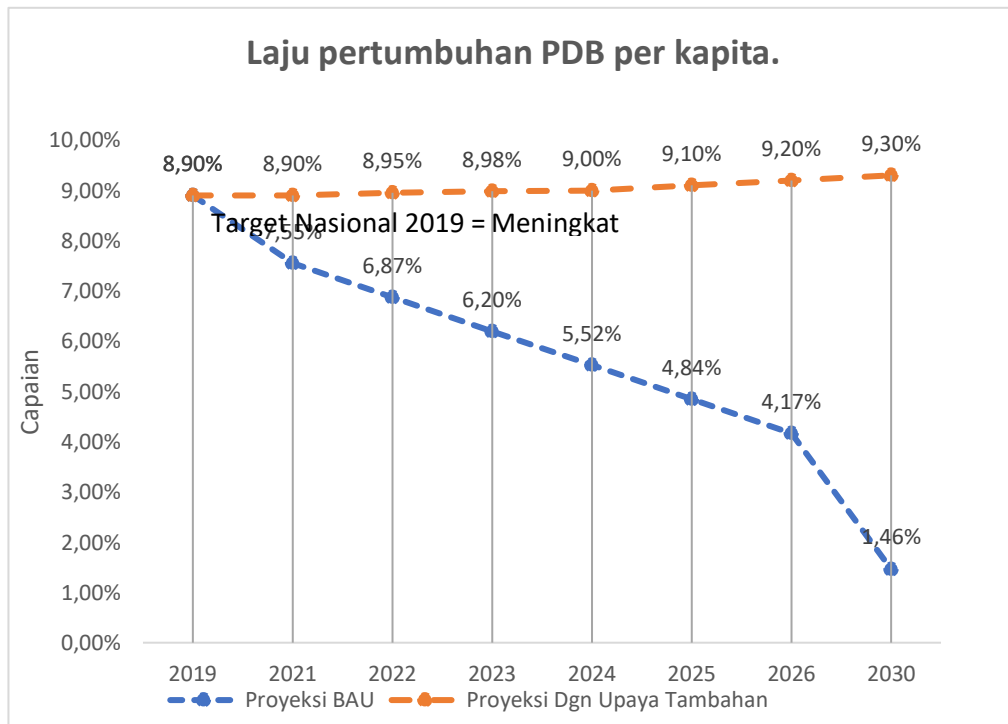
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	11,28	
2017	10,76	
2018	11,07	
2019	8,90	8,90
<i>Proyeksi</i>		
2021	7,55	8,90%
2022	6,87	8,95%
2023	6,20	8,98%
2024	5,52	9,00%
2025	4,84	9,10%
2026	4,17	9,20%
2030	1,46	9,30%





Isu Strategis: Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Rekomendasi:

- a. **Sasaran :** Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 % pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- b. **Strategi dan Arah Kebijakan :**
 - Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan;
 - Sektor ekonomi yang kokoh, serta
 - Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
- c. **Outcome/Program :**
 - Penumbuhan dan pengembangan industri kimia, tekstil, dan aneka
 - Penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro
 - Penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika
 - Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
 - Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri
 - Pengembangan kepariwisataan
- d. **Instansi Pelaksana :** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. **Kegiatan:**
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir (Baru)
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-Logam
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar





- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika (Baru)
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (Baru)
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
- Pengembangan Wilayah Industri I
- Pengembangan Wilayah Industri II
- Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata

5.3.20 Tingkat Setengah Pengangguran

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target:

Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Nomor Indikator: 8.5.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Tingkat setengah pengangguran** sampai pada tahun **2019** adalah **32%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan

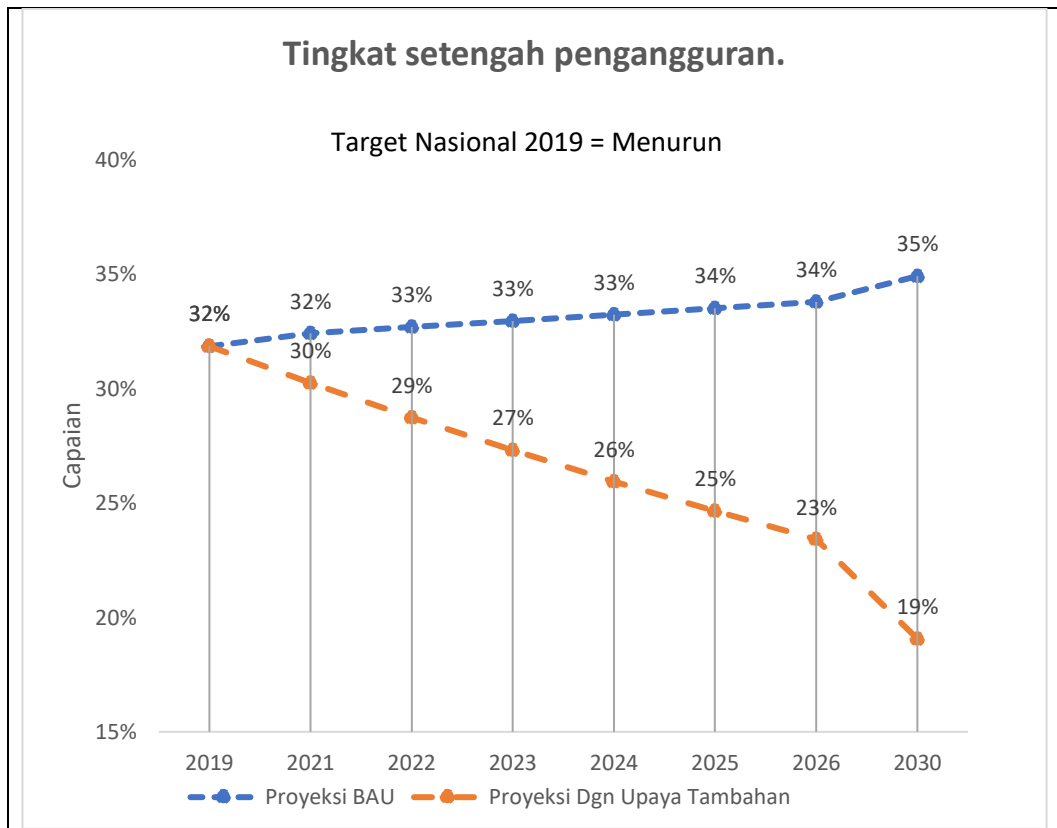




dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Menurun**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Menurun**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **19%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	0	
2017	31%	
2018	31%	
2019	32	32
<i>Proyeksi</i>		
2021	32	30
2022	33	29
2023	33	27
2024	33	26
2025	34	25
2026	34	23
2030	35	19





Isu Strategis: Masih tingginya Tingkat setengah pengangguran

Rekomendasi:

- a. Sasaran :Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan;
 - Sektor ekonomi yang kokoh, serta
 - Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
- c. Outcome/Program :
 - Penempatan dan perluasan kesempatan kerja
 - Pengembangan kepariwisataan
 - Pengembangan perdagangan dalam negeri (program tambahan)





- d. Instansi Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja
- e. Kegiatan:
- Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja
 - Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
 - Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
 - Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

5.3.21 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses

Target: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Nomor Indikator: 16.1.4*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya** sampai pada tahun **2019** adalah **3,4%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2022**. Sementara

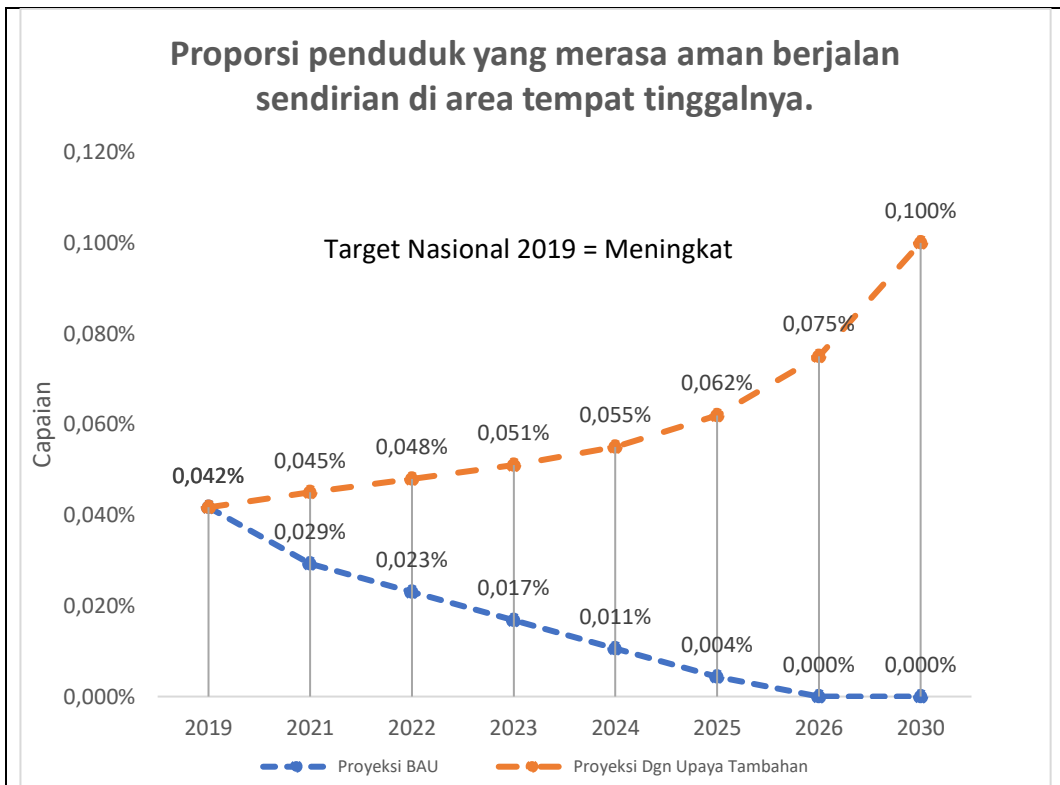




diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **35,0%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	5,5	
2017	3,2	
2018	4,2	
2019	3,4	3,4
Proyeksi		
2021	2,4	1,0
2022	1,9	5,0
2023	1,4	10,0
2024	0,9	15,0
2025	0,4	20,0
2026	0	25,0
2030	0	35,0





Isu Strategis: Masih rendahnya proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian
 - Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
- c. Outcome/Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Instansi Pelaksana : Dinas Keamanan
- e. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota





5.3.22 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Nomor Indikator: 16.5.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)** sampai pada tahun **2019** adalah **3,7**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat menjadi 4,0%**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat menjadi 4,00%**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2023**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **5,0%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

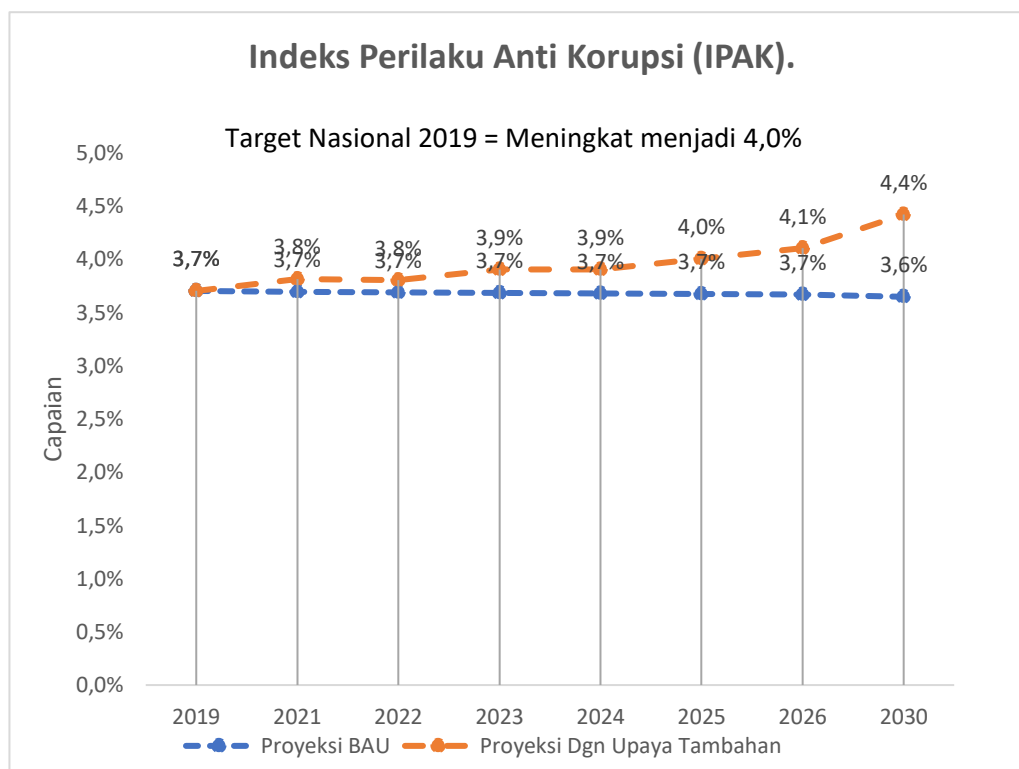
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
<i>Base Line</i>		
2016	0	
2017	3,71	
2018	3,66	
2019	3,7	3,7
<i>Proyeksi</i>		
2021	3,7	3,8
2022	3,7	3,9
2023	3,7	4,0
2024	3,7	4,2
2025	3,7	4,3
2026	3,7	4,4
2030	3,6	5,0





Isu Strategis: Masih rendahnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
- c. Outcome/Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Instansi Pelaksana : Komisi Anti Korupsi
- e. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

5.3.23 Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui

Tujuan: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

Target: Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui

Nomor Indikator: 16.6.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui** sampai pada tahun **2019** adalah **88%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target

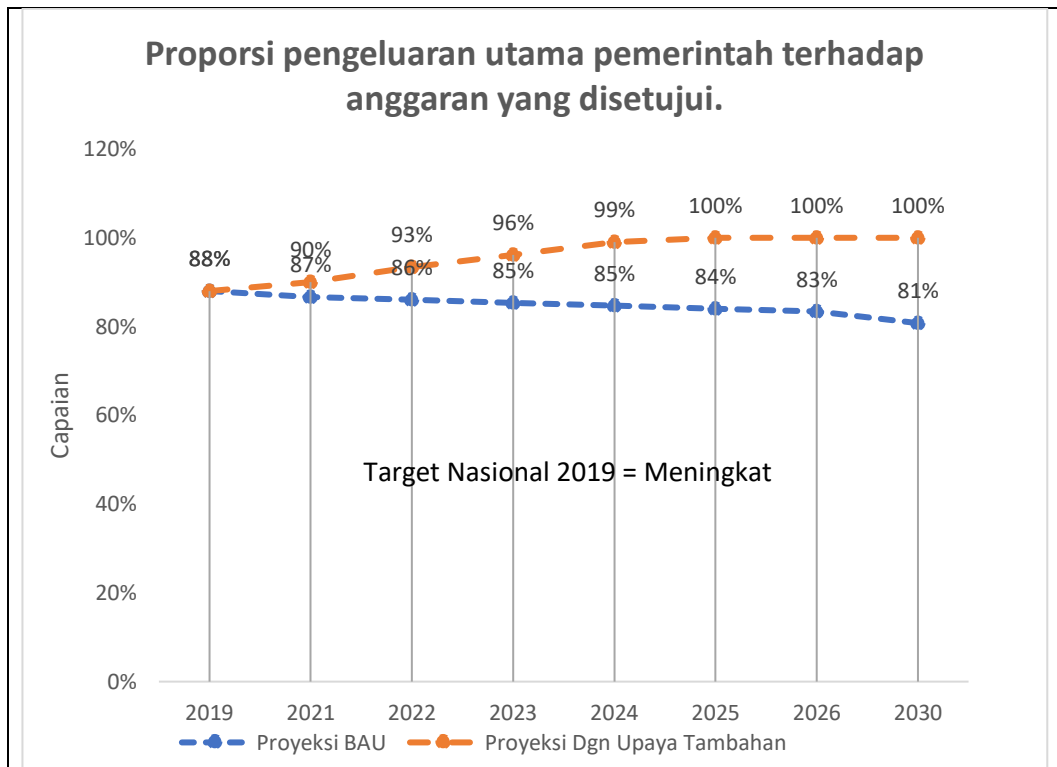




indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **100%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	90	
2017	90	
2018	91	
2019	88	88
Proyeksi		
2021	87	90
2022	86	93
2023	85	96
2024	85	99
2025	84	100
2026	83	100
2030	81	100





Isu Strategis: Masih rendahnya proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Rekomendasi:

- Sasaran : Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
- Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- Outcome/Program :
 - Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Instansi Pelaksana : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- Kegiatan : Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah





5.3.24 Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Nomor Indikator: 16.7.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) sampai pada tahun **2019** adalah **7%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 15%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

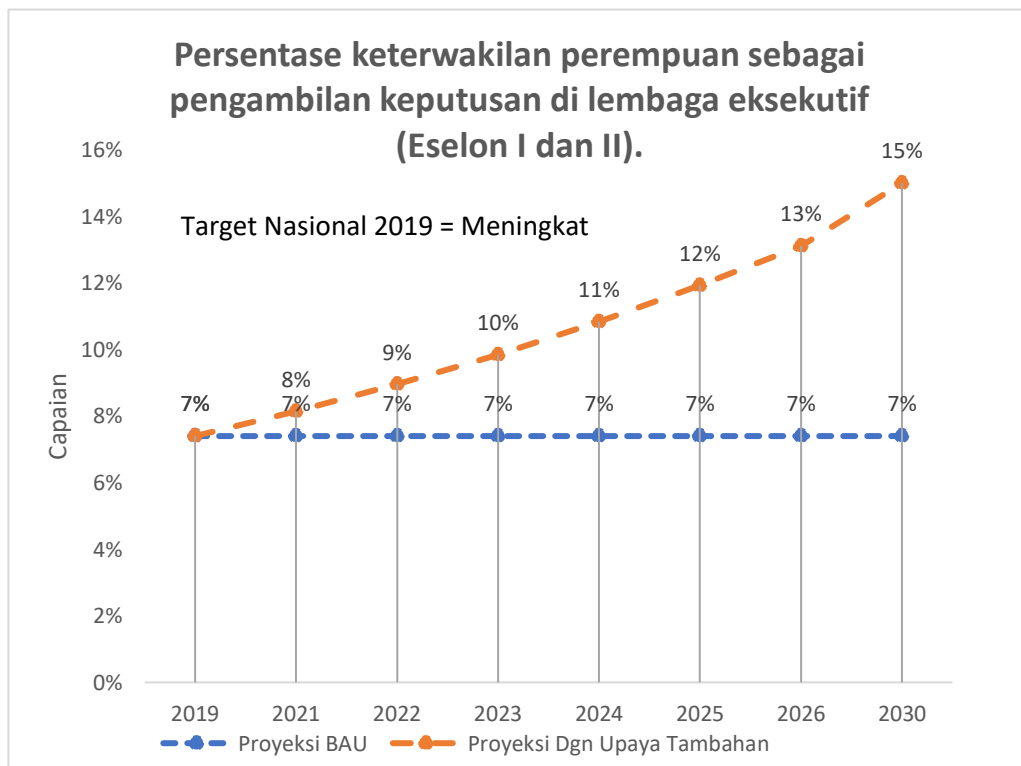
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	7	
2017	7	
2018	7	
2019	7	7
<i>Proyeksi</i>		
2021	7	8
2022	7	9
2023	7	10
2024	7	11
2025	7	12
2026	7	13
2030	7	15



Isu Strategis: Masih rendahnya persentase keterwakilan perempuan





sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)

Rekomendasi:

- a. Sasaran: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- b. Strategi dan Arah Kebijakan: Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan Politik dan Pemberdayaan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum, Kemendagri)
 - Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (KPU)
 - Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu)
- d. Instansi Pelaksana:
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Kegiatan:
 - Daerah yang terfasilitasi Pendidikan Politik Untuk Politisi Perempuan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
 - Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
 - Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan
 - Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan





5.3.25 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target:

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Nomor Indikator: 17.1.2*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **Rasio penerimaan pajak terhadap PDB** sampai pada tahun **2019** adalah **15,64%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **20,50%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



KLHS RPJMD

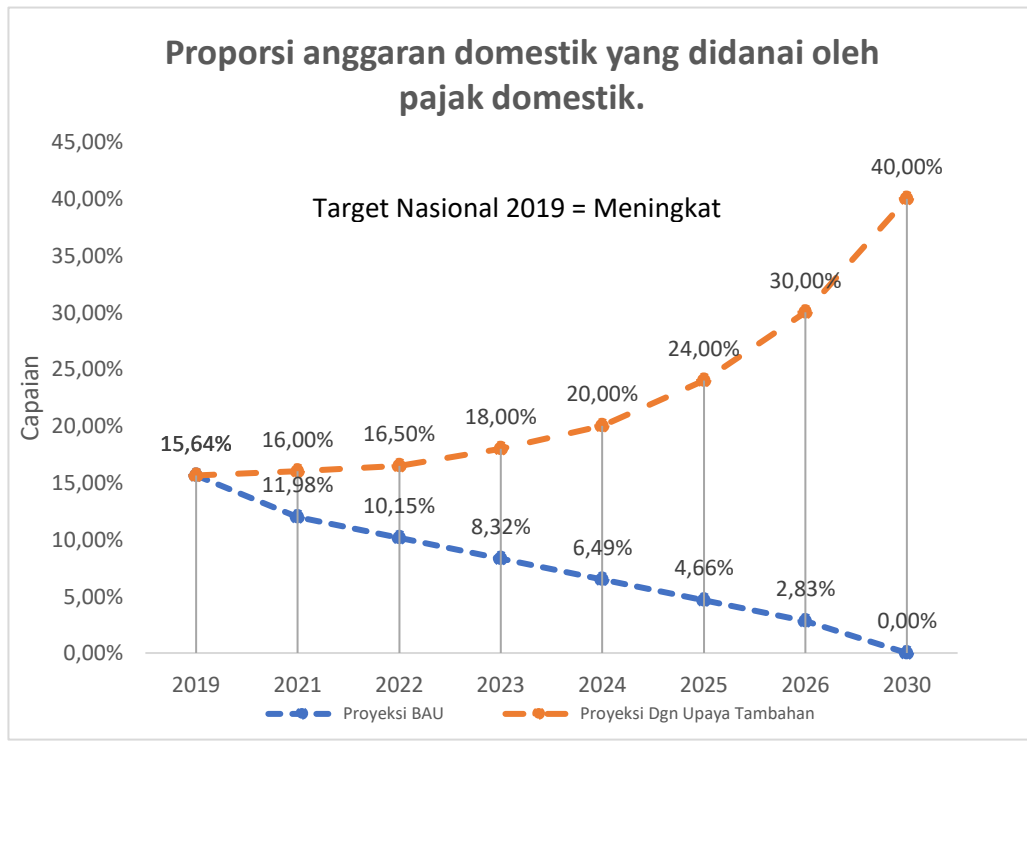
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	22,72	
2017	12,42	
2018	17,67	
2019	15,64	15,64
<i>Proyeksi</i>		
2021	11,98	17,00
2022	10,15	17,50
2023	8,32	18,00
2024	6,49	18,50
2025	4,66	19,00
2026	2,83	19,50
2030	0	20,50





Isu Strategis: Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB
Rekomendasi: <ol style="list-style-type: none">Sasaran: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.Strategi dan Arah Kebijakan: Kerjasama multi pihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta.Outcome/Program: Program Pengelolaan Pendapatan DaerahInstansi Pelaksana: KeuanganKegiatan: Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

5.3.26 Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
Target: <p>Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>
Nomor Indikator: 17.18.1.(a)
Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik sampai pada tahun 2019 adalah 89%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan

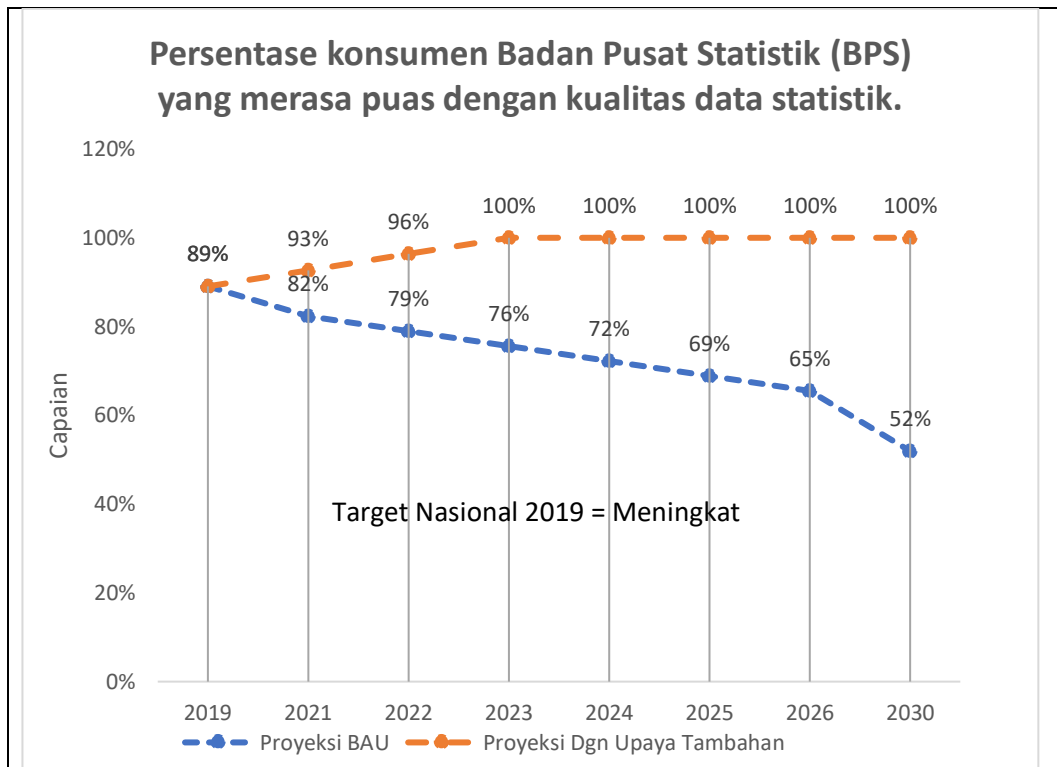




dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **100%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	100	
2017	100	
2018	100	
2019	89	89
Proyeksi		
2021	82	93
2022	79	96
2023	76	100
2024	72	100
2025	69	100
2026	65	100
2030	52	100





Isu Strategis: Masih rendahnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Rekomendasi:

- Sasaran: Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- Strategi dan Arah Kebijakan:
 - Kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta;
 - Peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi;





- Monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.
- c. Outcome/Program: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- d. Instansi Pelaksana: Badan Pusat Statistik
- e. Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5.3.27 persentase Konsumen yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target:

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Nomor Indikator: 17.18.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator **persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama** sampai pada tahun **2019** adalah **93%**. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan

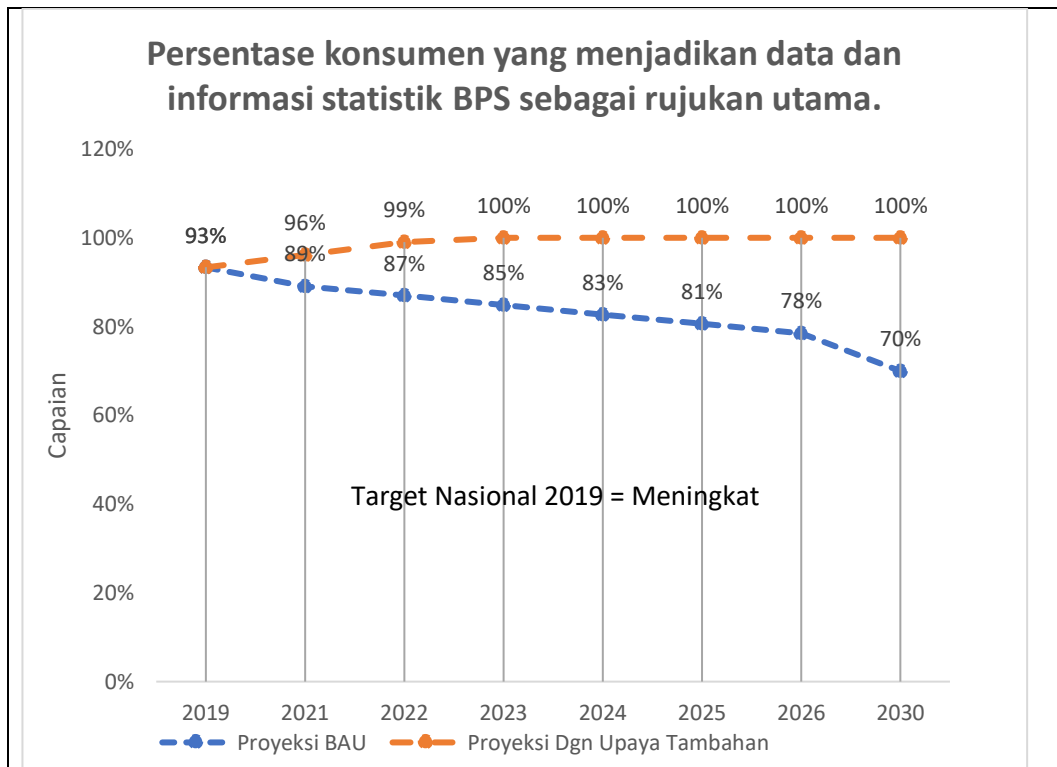




upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **100%**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (%)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (%)
<i>Base Line</i>		
2016	100	
2017	100	
2018	91	
2019	93	93
Proyeksi		
2021	89	96
2022	87	99
2023	85	100
2024	83	100
2025	81	100
2026	78	100
2030	70	100





Isu Strategis: Masih rendahnya persentase Konsumen yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama

Rekomendasi:

- a. Sasaran : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
- b. Strategi dan Arah Kebijakan :
 - Kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta;
 - Peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi;
- c. Program: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- d. Satuan Pelaksana : Badan Pusat Statistik
- e. Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota





5.3.28 Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus yang Terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target:

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Nomor Indikator: 17.18.1.(c)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) sampai pada tahun **2019** adalah **1104** metadata. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu **Meningkat**. Untuk mengetahui capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 s/d 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu **Meningkat**. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun **2021**. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah **5.500 metadata**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upayan Tambahan. Proyeksi capaian indikator



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

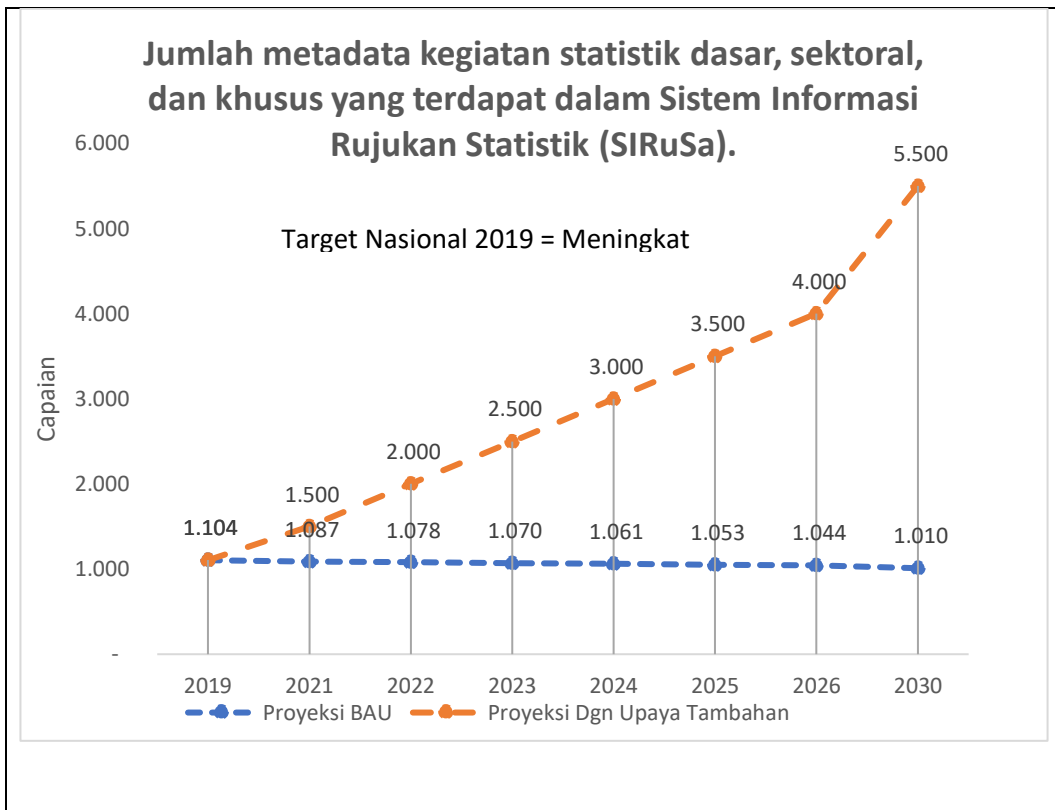
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) (metadata)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan (metadata)
<i>Base Line</i>		
2016		1.130
2017		1.085
2018		1.270
2019	1104	1104
Proyeksi		
2021	1.087	1.500
2022	1.078	2.000
2023	1.070	2.500
2024	1.061	3.000
2025	1.053	3.500
2026	1.044	4.000
2030	1.010	5.500





Isu Strategis: Masih rendahnya Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Rekomendasi:

- a. **Sasaran :** Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- b. **Strategi dan Arah Kebijakan :**
 - peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
 - peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta;





- meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data;
 - peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional, integritas, dan amanah; serta
 - peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik.
- c. **Outcome/Program** : Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik
- d. **Instansi Pelaksana** : Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- e. **Kegiatan** : Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik



BAB VI

ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



BAB VI

ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

6.1 Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Tingkat Capaian indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan. Dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis capaian Indikator TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2019 hanya berkisar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum tercapai dengan baik. Umumnya dari 17 TPB yang ada, terdapat 3 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 50%. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian



pada periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Tingkat pencapaian TPB ditentukan berdasarkan jumlah indikator yang berada pada kategori A (Indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target) terhadap jumlah indikator yang telah dilaksanakan (jumlah indikator A dan B). Adapun tingkat pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1 Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. TPB	Tujuan TPB	A	B	C	D	Tingkat Pencapaian TPB (%)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	13	7	1	1	65%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	8	2		1	80%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	16	8		5	66,67%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	6	5		2	54,55%
5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	8	5		1	61,54%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6	4	3		60%
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	1	1			50%
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	6	4		9	60%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	2			7	100%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan	3		2	5	100%





No. TPB	Tujuan TPB	A	B	C	D	Tingkat Pencapaian TPB (%)
	Antarnegara					
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	2	3	3		40%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1		1	1	100%
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		1			0%
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	2			1	100%
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			1	2	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	11	6	4		64,71%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	5	2	3	50%

Keterangan:

A: Dilaksanakan dan mencapai target

B: Dilaksanakan dan belum mencapai target

C: Belum dilaksanakan dan belum mencapai target

D: Tidak ada data





Berdasarkan pada **Tabel 6.1** di atas disimpulkan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% terdiri dari:

- a. (11) Ruang terbuka hijau
- b. (13) Antisipasi perubahan iklim
- c. (15) Alih fungsi lahan

Isu antisipasi perubahan iklim dan isu alih fungsi lahan menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan umumnya indikator pada tujuan ini belum dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara isu ruang terbuka hijau menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan indikator pada tujuan ini belum mencapai target.

6.2 Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Melalui Konsultasi Publik

Sebagaimana dipahami bahwa KLHS bukan hanya tentang studi teknis. Namun KLHS juga tentang bagaimana mengatur platform untuk dialog antar stakeholder dan proses fasilitasi dalam pengambilan keputusan. Komponen Komunikasi dan Pelibatan Multipihak penting dilakukan untuk mengetahui sumber informasi yang tepat, jaringan dan pelibatan publik. Hal ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, berbagi perspektif, merumuskan pendapat, dan mengintegrasikan visi dengan membangun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan penting.

Selain itu PP 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan KLHS telah mengamanatkan bahwa penyusunan KLHS dilaksanakan melalui konsultasi publik. Segala bentuk konsultasi publik tersebut harus terdokumentasi dalam bentuk foto dan berita acara, serta dijadikan sebagai lampiran pada laporan akhir. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilaksanakan konsultasi publik. Namun sebelum dilaksanakan konsultasi publik telah dilaksanakan survei isu pembangunan berkelanjutan secara online yang dapat diakses melalui link



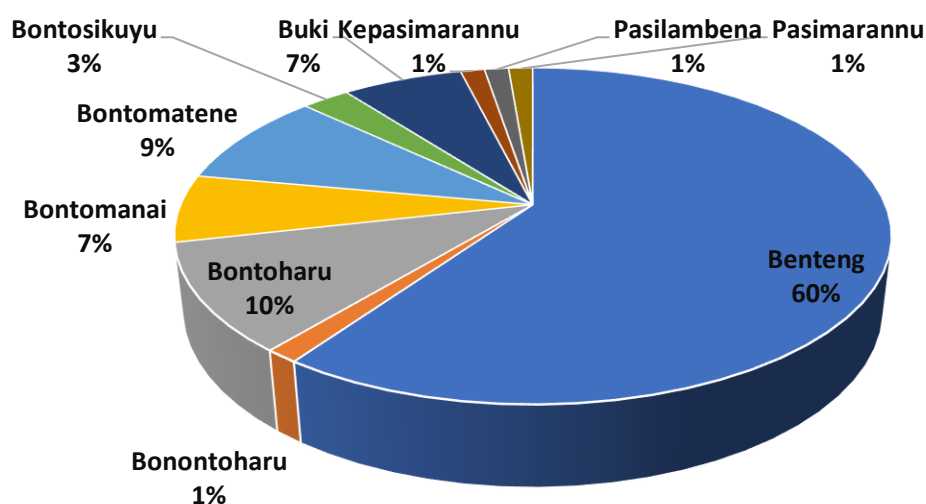


<http://bit.ly/isupembangunan>. Adapun hasil survei tersebut diperlihatkan pada uraian dibawah ini.

6.2.1 Hasil Survei Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, keterlibatan publik dalam survei online ini umumnya berasal dari publik yang bermukim di Kecamatan Benteng yaitu 60%, Bontoharu 10%, Bontomatene 9%, Bontomanai 7%, Buki 7%, Bontosikuyu 3%, Bontoharu 1%, Pasimarannu 1%, Pasilambena 1% dan Pasimarannu 1%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil survei secara umum mewakili kondisi kawasan perkotaan. Adapun partisipasi publik dalam survei ini diperlihatkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 6.1 Partisipasi dalam Survei Isu Pembangunan Berkelanjutan

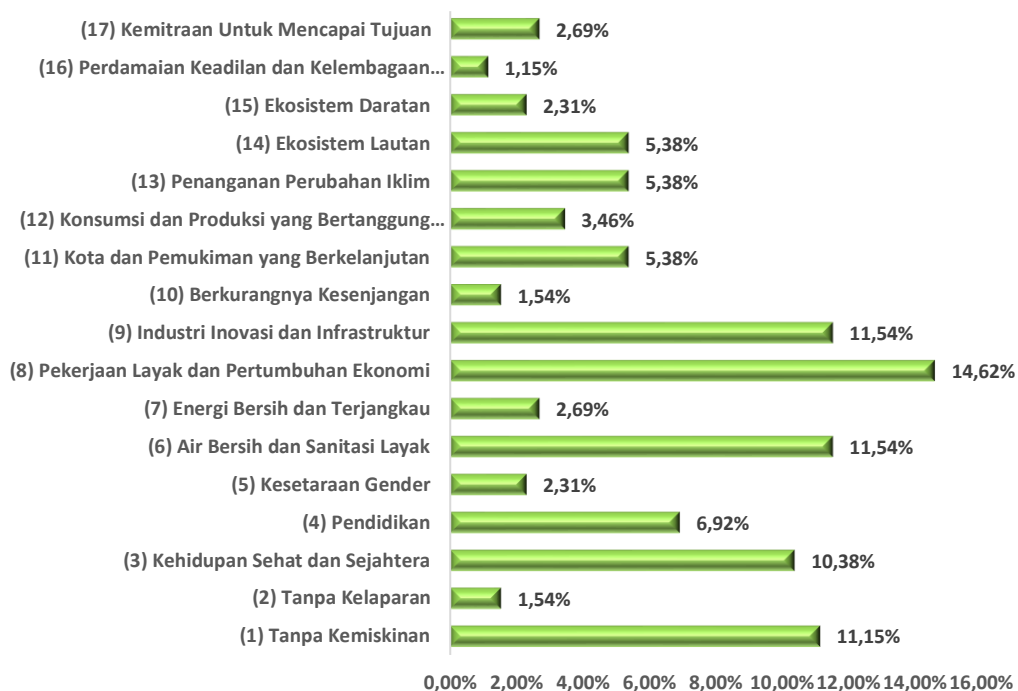


Adapun hasil survei TPB prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar yang perlu mendapatkan perhatian dari 17 TPB yang ada, menurut publik antara lain tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, tujuan (4) Pendidikan, tujuan (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, tujuan (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, tujuan (1) Tanpa Kemiskinan tujuan (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. persentase hasil survei TPB prioritas diperlihatkan pada **Gambar 6.2 Hasil Survei TPB Perioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar** dibawah ini.





Gambar 6.2 Hasil Survei TPB Prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar



Hasil survei TPB prioritas diatas, jika dibandingkan hasil profil pencapaian TPB yang masih rendah terdapat 2 tujuan yang sejalan yaitu tujuan (4) pendidikan dan tujuan (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan hasil survei publik dengan pencapaian TPB yang berasal dari OPD, khususnya pada 2 tujuan tersebut. Untuk itu 2 tujuan tersebut harus mendapatkan perhatian dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar ke depannya.

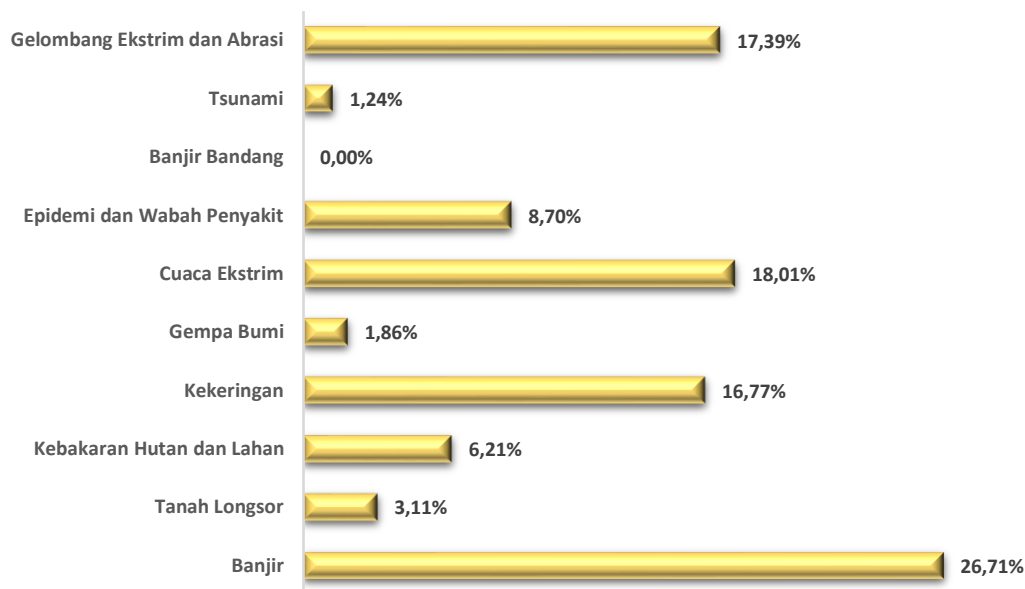
Untuk isu bencana yang sering terjadi dan dikhawatirkan oleh publik saat ini dan akan datang, berdasarkan hasil survei persentase tertinggi adalah isu bencana banjir yaitu 26,71%. Hal ini dapat dipahami dikarenakan dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kerugian dan dampak yang besar dari kejadian bencana banjir seperti kerugian berupa gagal panen akibat lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Selain itu terdapat isu bencana lain menurut publik seperti kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor,





dsb. Adapun persentase hasil survei bencana diperlihatkan pada **Gambar 6.3** dibawah ini

Gambar 6.3 Hasil Survei Isu Bencana Yang Sering Terjadi dan Mengkhawatirkan di Kabupaten Kepulauan Selayar

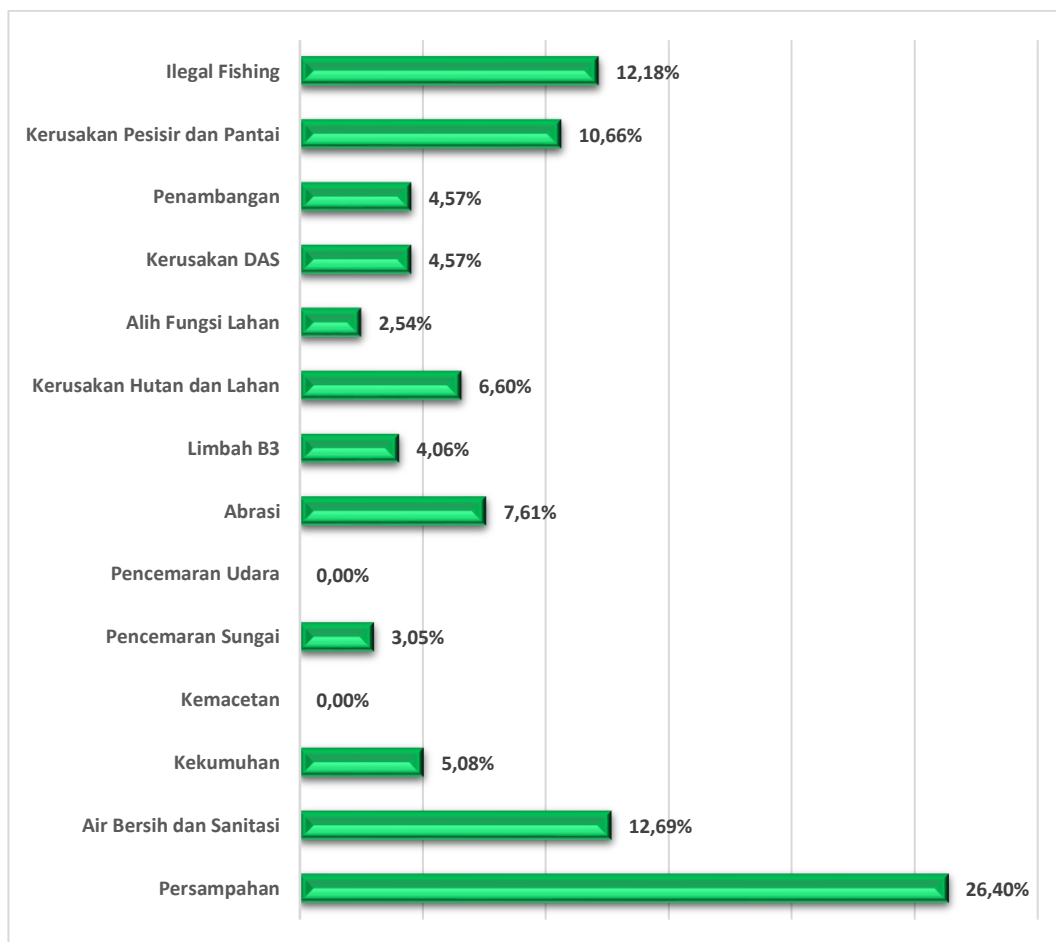


Sementara berdasarkan hasil survei diperoleh setidaknya 12 isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar ke depannya. Isu lingkungan tersebut antara lain persampahan, air bersih dan sanitasi, pencemaran sungai, penambangan, kerusakan DAS, alih fungsi lahan, kerusakan hutan dan lahan, kekumuhan, limbah B3, Abrasi, Kerusakan Pesisir dan Pantai serta Illegal Fishing. Namun secara umum persentase isu lingkungan tertinggi menurut publik adalah persampahan yaitu 26,40% dan air bersih dan sanitasi yaitu 26,69%. Dua Isu lingkungan ini merupakan isu lingkungan yang umum terjadi pada daerah perkotaan dan di Kabupaten Kepulauan Selayar juga menjadi perlu untuk mendapatkan perhatian. Adapun persentase hasil survei isu lingkungan ditunjukkan pada **Gambar 6.4** dibawah ini.





Gambar 6.4 Hasil Survei Isu Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Adapun detail deskripsi isu lingkungan yang disampaikan publik sebagai hasil dari survei online yang dilaksanakan, diperlihatkan pada **Tabel 6.2** dibawah ini:

Tabel 6.2 . Daftar Isu Lingkungan Hasil Survei di Kabupaten Kepulauan Selayar

Tema Isu Lingkungan	Deskripsi Isu Lingkungan
Isu Persampahan	Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Selayar pada semua kecamatan khususnya kecamatan daratan perlu penanganan yang serius mengenai penanganan sampah yang tidak efisien, tidak benar, menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah, kemampuan dalam mendaur ulang sampah maupun pemanfaatan barang bekas, bank-bank sampah di tiap kecamatan masih sangat kurang, yang ada bank sampah cuma di ibukota kecamatan (Benteng) dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan bank-bank sampah belum mengerti &





<p>memahami apa fungsi bank sampah tersebut. Dampak yang dapat diakibatkan oleh sampah berbagai macam penyakit (diare, kolera & tipus), mempercepat pemanasan global, menyebabkan banjir, dan dapat merusak pemandangan.</p>
<p>Masalah sampah adalah masalah paling pelik dan berimbas paling parah terhadap lingkungan, dimana untuk mengatasi hal ini perlu perencanaan penanganan secara spesifik mulai dari pemilahan sampai pemilihan lokasi penampungan yang tidak berimbas kepada siklus pencemaran serta menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar.</p>
<p>Sampah merupakan masalah global baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dari individu untuk membuang sampah pada tempatnya ataupun kurangnya upaya pengolahan sampah rumah tangga. Dengan intensitas sampah yang semakin banyak/ menumpuk akan berdampak pada keseimbangan lingkungan.</p>
<p>Termasuk persampahan masih banyak sampahnya buang langsung ke laut termasuk industri rumah tangga limbahnya dibuang ke laut.</p>
<p>Armada Kekurangan Personil</p>
<p>Masyarakat yg kurang perhatian terhadap sampah dan juga tdk ada lokasi pembuangan sampah. Masyarakat biasanya membuang sampah mereka di sungai.</p>
<p>Jadwal pengangkut sampah yang datang kerumah-rumah kadang satu minggu sekali yang menyebabkan pembusukan sampah di TPS.</p>
<p>Akibat dari selokan tersumbat sampah menumpuk yang menyebabkan banyaknya nyamuk yang bisa mengancam kesehatan masyarakat</p>
<p>Parappa tidak ada tong sampah di masing-masing rumah penduduk dan tidak ada mobil pengangkut sampah sehingga untuk mengurangi tumpukan sampah terpaksa sampah harus dibakar dan ini bisa menyebabkan polusi udara</p>
<p>Lokasinya di Jln. D.I. Panjaitan Setapak 4. Selokan atau drainase di sepanjang setapak 4 itu penuh dengan sampah plastik/bekas makanan dan minuman ringan. air selokan tidak mengalir karena ada beberapa pemilik rumah yang menimbun selokan didepan rumahnya dengan tanah sehingga air selokan menumpuk disatu tempat dan itu menjadi sarang nyamuk</p>





	untuk berkembang biak.
	Sampah di sepanjang pesisir pantai akibat belum sadarnya masyarakat dalam pengelolaan sampah, banyak yang menjadikan laut dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah yang terjadi setiap saat, mengakibatkan terumbu karang tertutupi sampah dan ekosistem laut jadi terganggu.
	Kerusakan pesisir dan pantai akibat pembuangan sampah, penambangan karang, aktifitas buang jangkar, <i>run off</i> dari sungai yang menyebabkan kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan pantai menjadi rusak dan tergerus
	Sampah di wilayah Pantai, penyebabnya ombak, Lingkungan pantai kurang indah
	Suatu daerah tidak akan bisa dikatakan maju selama sampah belum teratasi dgn benar apa lagi, potensi yg paling cocok untuk daerah kita adalah pengembangan pariwisata
	Banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang pesisir pantai selayar sebenarnya dapat diatasi dengan adanya daur ulang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
	Persampahan di kota Benteng, jumlah sampah domestik yang terus bertambah seiring jumlah penduduk terus bertambah, dampak hal tersebut adalah permukiman menjadi kumuh dan tidak sehat.
	keterlambatan pengambilan sampah
	Hewan/Ternak liar yang menghambur tempat sampah pada malam hari. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah plastik bekas minuman pada tempatnya
	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya misalnya pembuangan limbah sampah disembarang tempat juga menjadi salah satu faktor permasalahan yang ada. limbah sampah akan semakin tidak terkontrol dengan kurang tersedianya tempat pembuangan akhir sampah sehingga peningkatan wabah penyakit relatif akan semakin tinggi.
	Tidak adanya TPA Sampah di Desa sehingga masyarakat membuang sampah di sembarang tempat
	Jarangnya pengangkut sampah datang mengambil sampah ke rumah-rumah khususnya daerah perkotaan, sehingga sampah menumpuk dan membusuk yang bisa mengakibatkan penyakit
	Persoalan persampahan, masih banyak wilayah di Kec. Benteng yang belum tercover. untuk wilayah Kec. Bontoharu juga perlu menjadi perhatian karena merupakan pintu masuk





wisatawan / pengunjung dari luar kabupaten.
Sampah rumah tangga yang belum dikelola penanganannya di semua desa dalam wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sehingga sampah masih dibuang pada tempat pembuangan yang seharusnya seperti sungai, sehingga berdampak pencemaran air sungai dan penyempitan daerah aliran sungai
Sepanjang Dusun Boneria dan Dusun Barat Lambongan yang menyebabkan pemukiman terancam sehingga sangat dibutuhkan tanggul dan penanganan sampah musiman
Di Batangmata tidak ada lokasi pembuangan sampah
Permasalahan persampahan dalam makna yang luas dapat menimbulkan permasalahan baru antara lain terjadinya banjir. Ini dapat disaksikan bersama kejadian banjir pada musim hujan yang melanda pada setiap tahun di sebagian wilayah Kota Benteng. Penyebab utamanya adalah tidak terurusnya sampah (saluran air tersumbat) yang berdampak pada kondisi kesehatan lingkungan dan masyarakat setempat jika tidak segera diatasi.
Permasalahan persampahan dan kerusakan pesisir dan pantai terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan intensitas yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
Sampah anorganik/plastik yg banyak berserakan di bantaran sungai, tepi pantai dan tempat-tempat keramaian lainnya yg sulit dikendalikan akibat kurangnya kesadaran manusia yang berdampak pada selokan tersumbat/banjir, pemandangan jorok dan kumuh.
Tempat pengangkutan sampah tidak tersedia
Kurangnya sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah agar dapat diterapkan 3R. Karena kurangnya pengetahuan pula sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai membuang sampah mereka ke laut
Jl. Jeruk, penyebabnya yaitu masyarakat sering buang sampah sembarangan, hampir tiap hari.
Jl. Jeruk, penyebabnya yaitu masyarakat sering buang sampah sembarangan, hampir tiap hari.
Belum tersedia TPS3R dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah di rumah tangga sehingga semua sampah berkumpul di TPA tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu





	<p>persampahan : Tidak ada lokasi pembuangan akhir</p> <p>Permasalahan lingkungan yang ada disekitar wilayah saya tepatnya di sekitar Jln.S. Siswomiharjo Kel. Benteng yaitu permasalahan persampahan yang berserakan di jalan, ini disebabkan banyaknya hewan peliharaan (anjing) yang menumpahkan sampah dari tong sampah sehingga dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan polusi udara akibat bau yang tidak sedap bagi pengguna jalan dan dapat pula menimbulkan bibit penyakit.</p>
Isu Illegal Fishing	<p>Karena Selayar merupakan daerah kepulauan dimana dikelilingi oleh lautan dimana mempunyai puluhan gugusan pulau sebagian pekerjaannya menggantungkan hasil laut banyaknya ilegal fishing</p>
	<p>Pemboman ikan</p>
	<p>Penyebab illegal fishing dikecamatan kepulauan dikarenakan karena kurangnya inovasi di bidang perikanan laut yang bisa diadopsi oleh masyarakat nelayan menyebabkan nelayan sering melakukan aktifitas illegal untuk mendapatkan hasil laut yang sangat berdampak pada kelestarian terumbu karang yang mengancam keberlangsungan biota laut</p>
	<p>Illegal fishing yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat perikanan yang tidak bertanggung jawab dalam mengeksploitasi laut dan masih marak terjadi menyebabkan rusaknya ekosistem penting di wilayah pesisir seperti terumbu karang, mangrove dan lamun</p>
	<p>Illegal fishing merupakan hal yang paling penting untuk mendapat perhatian. Karena kita adalah daerah kepulauan yg berpotensi besar disektor perikanan, tapi nyatanya kebanyakan harga ikan lebih mahal dari Makassar</p>
	<p>Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dengan adanya ilegal fishing, ini menjadi pokok permasalahan yang perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah. Terkait ilegal fishing, dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada ekonomi daerah, tetapi juga ekosistem laut akan mengalami kerusakan.</p>
	<p>Masih ada masyarakat dari luar yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan menggunakan Bom / bius sehingga menyebabkan rusak ekosistem bawa laut / Terumbu Karang.</p>
	<p>Untuk permasalahan illegal fishing banyak terjadi di wilayah Tambolongan, Polassi hingga Kecamatan-Kecamatan Pulau seperti Takabonerate dengan intensitas yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan banyak faktor seperti kurangnya kesadaran terkait pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan</p>





	<p>ekosistem maupun kurangnya koordinasi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran.</p>
	<p>Persoalan Illegal Fishing, tidak ada koordinasi antara pihak TNI AD/TNI AL dan Satpol.PP dalam hal penanganan ilegal fishing yang terjadi di Desa-desa. Biasanya Kepala desa hanya melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk persoalan Illegal Fishing dan Illegal Logging, padahal Satpol PP sebagai Penegak PERDA pun bisa dilibatkan dalam penanganan hal tersebut.</p>
	<p>Illegal fishing yang masih terjadi di perairan sekitar desa Maharayya diantaranya penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa racun seperti penggunaan tuba dan potasium atau racun serangga untuk menangkap ikan selain itu ada nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti samba. Illegal fishing disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.</p>
	<p>Maraknya penggunaan bom dan bahan kimia dalam menangkap ikan menyebabkan terumbu karang mati dan menyebabkan berkurangnya jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan tradisional</p>
	<p>Permasalahan ilegal fishing banyak terjadi di wilayah kecamatan kepulauan dengan intensitas yg cukup tinggi yang disebabkan kurangnya koordinasi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran serta kurangnya kesadaran terkait pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem perairan.</p>
Isu Kerusakan Lahan	<p>Banyaknya aktivitas tambang baik dari galian A,B, ataupun C, kalau ada dimana semau-maunya melakukan pekerjaan itu tanpa ada surat keterangan atau izin lingkungan</p>
	<p>Masyarakat sering melakukan pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan tanpa menyadari dampak dari perbuatannya yang bisa merusak hutan dan juga masih banyak masyarakat yg melakukan penebangan pohon secara liar.</p>
	<p>Selayar akan banjir bila masyarakat tidak bertanggung jawab merusak hutan</p>
	<p>Kerusakan lahan menyebabkan berkurangnya sumber air dan tanah longsor.</p>
	<p>Selama ini kontroling untuk penambangan ilegal tidak maksimal, sebagai contoh: pengerukan gunung, tambang galian</p>





	<p>C, bahkan penggalian pasir dipantai yg akan menimbulkan akibat buruk yg banyak untuk kedepannya</p> <p>Desa Polebunging, penyebabnya karena banyaknya penebangan hutan secara liar (illegal logging) serta berdampak kurangnya ketersediaan air bersih</p> <p>Penambangan yang terjadi di Sumingi dan jalan Masuk ke Kolo-kolo, masyarakat masih saja melakukan penambangan meskipun telah diberi peringatan untuk tidak melakukan penambangan secara ilegal, dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tetap beraktivitas meskipun mereka sudah mengetahui apa yang mereka lakukan itu salah</p> <p>Terjadi banyak penambangan yang tidak berizin dan merusak lingkungan yang mengakibatkan banjir, longsor dan abrasi.</p> <p>Penyebabnya adanya Penambangan/Pengambilan Pasir dan batu kali yang tidak terkendali di sungai tersebut yang tidak berizin dari instansi terkait. Contoh: Mobil pengangkut Pasir dan Batu Kali sudah turun ke sungai mengangkut pasir dan batu kali/kerikil (sudah bertentangan dengan PERDA terkait Izin Penambangan Galian Golongan C. Penyebab lainnya, Pemerintah setempat tidak peduli dengan aktivitas penambangan liar tersebut yang sudah nyata telah menimbulkan kerusakan lahan perkebunan di pinggir sungai (kerusakan DAS) khususnya di Lingkungan Tabang Kelurahan Putabangun. Instansi terkait (mungkin) tidak pernah melakukan pengawasan lingkungan dan atau tidak melakukan tindakan pemberian sanksi,</p> <p>Kerusakan yang dimaksud, lebar sungai setiap tahun bertambah, pepohonan: pohon kayu, pohon kelapa dan rumpun bambu bertumbangan/rebah dan jatuh kesungai setiap datang musim hujan, yang secara otomatis lebar/luas lahan perkebunan masyarakat semakin berkurang.</p> <p>Adanya penambang liar di Desa Bontotangnga Dusun Tanabau pada sebelah timur jembatan yang menyebabkan bibir sungai longsor hingga saat ini skitar 40x70 m1 sektor</p> <p>Di daerah perkampungan basis perkebunan rakyat, penyebabnya antara lain penebangan hutan dan lahan kebun berpindah-pindah, hampir tiap tahun, dampaknya memicu banjir</p> <p>Kerusakan hutan dan lahan di Desa Patilereng disebabkan banyaknya pembukaan lahan perkebunan baru.</p>
Isu Kerusakan DAS	<p>Matalalang mengalami banjir akibat sedimentasi DAS hampir setiap tahun</p> <p>Penebangan Pohon di pinggir sungai</p>





	<p>Kepulauan Selayar pada umumnya memiliki catchement DAS kecil, akhir ini kerusakan di DAS harus menjadi perhatian khusus untuk menjaga ketersediaan air di musim kemarau</p> <p>Kerusakan DAS penyebab banyaknya penebangan pohon di daerah aliran sungai.</p>
Isu Air Bersih dan Sanitasi	<p>Ketersediaan air bersih sangat perlu agar masyarakat bisa hidup sehat dengan mngkonsumsi air yang bersih.</p> <p>Kurangnya air bersih yang layak minum</p> <p>Kurangnya air bersih layak minum</p> <p>Air bersih dan Sanitasi di semua daerah, hampir sebagian besar masyarakat belum mendapatkan air dari PDAM sehingga perlu sumber air swadaya masyarakat, dampak dari hal tersebut adalah dari segi kesehatan akan ketersediaan air bersih.</p> <p>Masalah air bersih dan sanitasi di Selayar disebabkan karena kurangnya sistem infrastuktur yang memadai</p> <p>Belum tercukupinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi yang layak sehingga masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dan masih ada masyarakat yang numpang di tetangga/ sembarang tempat.</p> <p>Lokasi terdampak kekurangan air bersih dan sanitasi berada di seluruh wilayah Desa Kohala meliputi 4 dusun yakni Dusun Lebo, Dusun Karebosi, Dusun Kadempak, Dusun Muntea. Penyebabnya aliran sungai berada di bawah perkampungan dan letak perkampungan lokasinya lebih tinggi sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkan air bersih utamanya di musim kemarau.</p> <p>Kekumuhan disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga rumah sebahagian warga masih kurang layak huni, selain itu belum adanya sarana sanitasi umum seperti tempat pembuangan sampah.</p> <p>Semua dusun di Desa Pamatata, debit air dari sumber air yg kurang yang berdampak pada kekurangan air bersih masyarakat</p> <p>Di Desa Buki Timur, karena kurangnya sanitasi air beDsih, sehingga masyarakat kesulitan dalam segala aspek baik itu di bidang pertanian maupun penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari hari</p> <p>Masyarakat Desa Bontotangnga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani untuk itu kami butuh pengairan pertanian/ persawahan dan bantuan air bersih pada masyarakat kami, maka dengan ini kami butuh bantuan dari</p>





	<p>pemerintah terkait untuk membantu petani kami pengadaan jaringan air untuk petani dan jaringan air bersih untuk bisa di konsumsi, karna air PDAM belum layak konsumsi untuk masyarakat.</p>
	<p>Tempat pembuangan air tinja tidak ada</p>
	<p>Permasalahan lain yaitu sanitasi lingkungan, bahwa setiap tahun di Kota Benteng Kelurahan Benteng selalu terjadi genangan air hujan di beberapa tempat tepatnya di Jl. Dr. Mukhtar depan Puskesmas Benteng dan dan Jl. Piere Tendeau sebelah Utara dari Kantor Balai Takabonerate, dan beberapa tempat lainnya. Permasalahan timbulnya genangan air ini disebabkan oleh kondisi saluran air (drainase) yang ada sekarang ini tidak mendukung untuk mengalirkan air. Drainase yang ada sekarang ini kebanyakan berfungsi sebagai tempat genangan air, bukan tempat mengalirkan air. Pihak Instansi terkait dengan urusan drainase seharusnya setiap musim hujan melakukan pemantauan air genangan tersebut akan mengalir kemana. Sebaiknya air genangan di drainase di wilayah tersebut diupayakan dialirkan ke arah yang lebih rendah ke arah sungai di Utara Kota Benteng.</p>
	<p>Air Bersih khususnya di Kota Benteng yang di kelola PDAM Selayar sangat tidak layak konsumsi karena air yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk selaku pengguna /pemanfaat air PDAM, karna bukan air hasil olahan sesuai standar kesehatan. Air yang diterima masuk ke kran air penduduk kota benteng, terkadang berbau payau, keruh dan lain-lain. PDAM Selayar sebagai satu-satunya pengelola air yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk kota Kelurahan Benteng terkesan tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, dan tidak ada upaya menghadirkan sarana dan prasarana pengolahan air yang sesuai standar kesehatan. Kondisi ini sudah sejak lama berlangsung. Terkesan tampak bahwa kerja PDAM Selayar selama ini hanya mengalirkan air melalui pipa dari sumber air baku tanpa melalui proses pengolahan air sesuai standar kesehatan ke rumah-rumah penduduk.</p>
	<p>Beberapa Desa di Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene masih ada yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan air bersih. Hal ini terjadi disebabkan kondisi alam (kemarau panjang yang berefek pada menurunnya debit air) maupun terbatasnya kemampuan pendanaan. Hal ini juga terjadi di beberapa tempat di Kecamatan Benteng yang pasokan airnya tidak lancar yang dalam sehari air tidak seutuhnya bisa mengalir, hanya pada jam-jam tertentu.</p>





	<p>Kurangnya Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak sangat rentan terhadap kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat dapat terserang berbagai macam penyakit seperti kolera, diare dan stunting.</p>
<p>Isu Kerusakan Ekosistem Pesisir</p>	<p>kerusakan pesisir dan pantai: penambangan pesisir di wilayah Sumingi, dampaknya Abrasi</p>
	<p>Tidak ada nya pemecah ombak di sepanjang pinggir pantai di Dusun Saburangia Desa Mekar Indah, sehingga bisa menyebabkan abrasi dan kerusakan pesisir pantai setiap musim barat setiap tahunnya.</p>
	<p>Abrasi disebabkan oleh pengikisan tanah oleh gelombang laut akibat tidak adanya tanggul pemecah ombak sehingga menyebabkan kerusakan pesisir dan pantai. Lokasi terdampak di muara Sungai Tulang ke Sumingi.</p>
	<p>Pengambilan pasir yang sering terjadi di lokasi pantai yang bisa menyebabkan abrasi padahal lokasi tersebut bisa dijadikan tempat wisata apalagi kalau lokasi tersebut dekat dengan lokasi industri.</p>
	<p>Tidak ada pemecah ombak di Batangmata</p>
	<p>Lokasi abrasi adalah kampung penyu yang terletak di Desa Barugaiya, Kec. Bontomanai dengan intensitas yang cukup tinggi yang disebabkan penggalian pasir laut di sekitar Kampung Penyu. Hal ini mengakibatkan air laut semakin dekat dengan penangkaran penyu dan akan merusak bangunan penangkaran penyu tersebut.</p>
	<p>Banyak terjadi penambangan pasir pantai demi berjalannya sebuah proyek pembangunan tanpa mempedulikan mengenai dampak abrasi pantai yang dapat ditimbulkan</p>
	<p>Desa Parak, Abrasi</p>
	<p>Desa Kalaotoa yang berada di pesisir wilayah tenggara Pulau Kalaotoa intens terjadi abrasi akibat gelombang laut ketika memasuki musim timur</p>
<p>Abrasi pantai, pada musim barat gelombang pasang, perlu ada pemecah ombak</p>	
<p>Isu Pencemaran Sungai</p>	<p>Di Desa Lalang Bata terjadi pencemaran sungai yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sehingga banyak diantara mereka yang membuang sampah di sungai ketika beraktivitas di sungai seperti mencuci dan mandi</p>





Isu Limbah B3	Jumlah unit usaha penghasil limbah B3 pada bulan Juli tercatat sebanyak 596. Dari jumlah tersebut yang paling urgen untuk ditangani adalah limbah B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dimana sampai saat ini belum ada insinerator yang dapat digunakan untuk mengolah limbah tersebut, sehingga peluang terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah medis sangat besar. Sejauh ini, fasyankes hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai transportir yang akan mengangkut limbah B3 yang dihasilkan ke tempat pengelolaan limbah B3 selanjutnya.
----------------------	---

Sumber: Hasil Survei Tim KLHS RPJMD Kab. Selayar, 2020

Survei lain yang dilakukan terhadap isu-isu sosial, ekonomi dan tata kelola menunjukkan setidaknya terdapat 13 tema isu. Namun umumnya isu tersebut berupa persoalan kemiskinan, lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial dan lapangan pekerjaan. Adapun detail deskripsi isu dan temanya tersebut diperlihatkan pada **Tabel 6.3** dibawah ini:

Tabel 6.3 Daftar Isu Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Hasil Survei di Kabupaten Kepulauan Selayar

Tema Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola	Deskripsi Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola
Kemiskinan & Pengangguran	Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu masih adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan dimana salah satu penyebabnya adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak sehingga berdampak di masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan.
	Di Desa Buki Timur masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni, demikian pula dari segi ekonomi, masih terdapat sebagian masyarakat kurang mampu.
	Kelayakan hidup masyarakat miskin yg seolah-olah berharap pada kebijakan pemerintah terkait perhatian pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti bantuan sosial dan bedah rumah.
	Kemiskinan yang masih tinggi di Kab. Kepulauan Selayar
	Pendapatan masyarakat yang tidak sebanding dengan pengeluaran serta masalah kemiskinan
	Pada sektor sosial, masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan tdk punya tempat tinggal yg layak. Pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah





Tema Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola	Deskripsi Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola
	<p>semakin meningkat. Pada sektor tata kelola pemerintahan,</p> <p>Pemberantasan kemiskinan & perlunya peningkatan Pendapatan masyarakat rumah tidak layak huni</p> <p>Perhatian terhadap masyarakat miskin dan kaum difabel.</p> <p>Tingkat kepedulian Pemerintah / masyarakat / organisasi wanita dll terhadap fakir miskin / keluarga tdk mampu dan anak yatim/piatu masih perlu ditingkatkan</p> <p>untuk permasalahan sosial adalah penanganan tingkat pengangguran, untuk ekonomi adalah peningkatan income per kapita masyarakat</p> <p>yang perlu mendapatkan perhatian pada sektor sosial ekonomi yaitu masih perlunya pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat sehingga pengangguran bisa dapat teratasi.</p>
<p>Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>keteladanan, penegakan hukum disemua bidang kehidupan (<i>Reward dan Punishment</i>)</p> <p>Koordinasi yang sudah terjalin di dalam instansi pemerintah untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar kinerja, strategi yang akan dijalankan, keputusan yang akan diambil atau dilaksanakan serta program kerja dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Penempatan jabatan ASN sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Tata Kelola Pemerintahan yang baik yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi</p> <p>Tata Kelola Pemerintahan : Perencanaan</p> <p>Tatakelola pemerintahan, perlunya peningkatan Etos kerja bagi ASN</p> <p>Tata kelola pemerintahan mungkin masih perlu ditingkatkan dan perlu ada pembinaan dan dampingan ke aparatur pemerintahan kebawah.</p> <p>Seharusnya penataan birokrasi tetap pada penerapan seleksi sesuai kompetensi dan <i>basic</i> pendidikan untuk memposisikan pejabat-pejabat daerah dan yg terpenting adalah kinerja</p> <p>Haruslah adil misalnya ada pembagian sumbangan atau sembako, harus betul-betul yg berhak yg diberi jgn krn ada sistem kekerabatan dan faktor lain tp betul sampai pd keluarga yg sangat membutuhkan, dililhat betul faktor kemendesakan</p> <p>Tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good govermenance</i>) dan efisien</p>





Tema Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola	Deskripsi Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola
	<p>Penempatan pegawai pemerintahan pada jabatan yang tidak berdasarkan latar belakang pendidikan.</p> <p>Tata kelola pemerintahan : Korupsi, Kolusi, Nepotisme</p> <p>Sektor tata kelola pemerintahan terhadap masalah transparansi dan akuntabilitas</p> <p>Sulitnya sistem pengelolaan anggaran desa sehingga waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas.</p> <p>Pelayanan publik dan birokrasi yang baik.</p> <p>Pelayanan yg memadai Dan penggunaan Dana yang transparan</p> <p>Perlunya peningkatan kerjasama diberbagai pihak agar kebijakan pemerintah dapat direalisasikan dengan baik, sehingga masalah sosial ekonomi lebih cepat teratasi.</p> <p>Perlu adanya integritas yang tinggi bagi Pelaku Pemerintahan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sebagai unsur layanan tanpa adanya intervensi kekuasaan /politik.</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.</p> <p>Pendampingan dari pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa.</p> <p>Peran serta dan koordinasi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat</p> <p>Sektor tata kelola pemerintahan transparansi & tanggung jawab dalam sikap dan perilaku kekuasaan, birokrasi pemerintahan dan supremasi hukum diletakkan & dilakukan secara konsisten.</p> <p>Sektor tata kelola pemerintahan, bagaimana menciptakan <i>good govermant</i> dan <i>goods governance</i> ditunjang dengan efektifitas dan efisiensi birokrasi.</p> <p>Sektor tata kelola pemerintahan, budaya kerja/etos kerja pemerintahan yang masih jauh dari reformasi birokrasi.</p> <p>Tata kelola pemerintahan: regulasi dan pelayanan yg belum maksimal</p> <p>Masih banyaknya membudaya praktek gratifikasi sehingga masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan.</p> <p>Tata Kelola Pemerintahan: Perwujudan <i>Good Goverment</i> dan <i>Clean Governance</i></p> <p>Korupsi dan cara kerja sebahagian ASN yg belum maksimal (masi banyak santai/tdk kreatif, tdk inovatif, dan selalu menunggu perintah)</p>
Lapangan Kerja	<p>mata pencaharian alternatif yg terbuka lebar</p> <p>lapangan kerja bagi masyarakat perlu diciptakan</p>





Tema Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola	Deskripsi Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola
	<p>perlu dibukanya lapangan kerja dan lapangan usaha terutama di sektor pariwisata</p> <p>kurangnya lahan kerja</p> <p>Kurangnya lapangan kerja dan harga hasil pertanian yang terus menurun sedangkan harga kebutuhan semakin naik</p>
Ekonomi	<p>pendampingan dan pembinaan usaha kecil serta pemasaran hasil bumi dan UKM</p> <p>fasilitas kredit ringan untuk modal usaha kecil</p> <p>tidak normalnya harga hasil pertanian dan perkebunan</p> <p>pendapatan masyarakat yang tidak sebanding dengan pengeluaran serta masalah kemiskinan</p> <p>bagaimana menggerakkan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian</p> <p>bagaimana menarik minat investor untuk berinvestasi di Kab. Kepulauan Selayar.</p> <p>peningkatan <i>income</i> per kapita masyarakat</p> <p>Usaha peningkatan ekonomi mikro, untuk mendorong daya beli masyarakat</p> <p>Harga komoditas pertanian/perkebunan (kelapa, cengkeh, pala dan jambu mente) yang turun secara drastis dalam 3 tahun terakhir mengakibatkan masyarakat resah. Masyarakat petani telah banyak menanggung keresahan</p> <p>Di Desa Buki Timur masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni, demikian pula dari segi ekonomi, masih terdapat sebagian masyarakat kurang mampu</p> <p>peningkatan daya beli masyarakat</p> <p>Perlu pelaksanaan pelatihan UKM serta bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa</p> <p>Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bernilai ekonomis</p> <p>Peningkatan investasi dan lapangan kerja</p> <p>Karena adanya aktivitas penambang pasir yang serampangan, pencurian buah kelapa yang merajalela khusus di wilayah Lingkungan Tabang dan Tabang Baru dan terakhir harga-harga komoditi pertanian/perkebunan turun drastis yang menimbulkan permasalahan ekonomi di masyarakat</p>
Pemberdayaan Masyarakat	<p>pendampingan dan pembinaan usaha kecil serta pemasaran hasil bumi dan UKM</p> <p>Meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat</p> <p>Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bernilai ekonomis</p> <p>menempatkan orang-orang yang memang ahli dibidangnya</p>





Tema Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola	Deskripsi Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola
	peningkatan kualitas hidup masyarakat Kab. Kep. Selayar Perhatian terhadap masyarakat miskin dan kaum difabel
Bantuan Sosial	bantuan modal alat pertukangan/pertanian/nelayan/produksi bagi pekerja pemula Bantuan permodalan bantuan sosial dan bedah rumah bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah di Desa Pengadaan bantuan bagi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin serta bantuan bagi masyarakat non produktif (Jompo) Pemberian bantuan sosial ke masyarakat miskin modal usaha kecil akses bagi penyandang disabilitas
Pendidikan	rendahnya minat belajar anak karena pengaruh teknologi Hp/game online Penanganan bagi remaja putus sekolah penanganan kebiasaan anak merokok dalam lingkungan sekolah
Peningkatan SDM	Peningkatan SDM di Desa masih kurangnya SDM sehingga masih perlu diadakan pembinaan Masih kurang SDM yg terampil yg bisa memanfaatkan segala sumber daya yg ada masih kurangnya SDM yang mumpuni di bidangnya. Pelatihan keterampilan tupoksi perangkat desa dan pelatihan - pelatihan lainnya.
Pengelolaan SDA	belum adanya model yang dikembangkan untuk pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan sumberdaya alam tetap terjaga kelestariannya sumber daya apa yg paling pas untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Penambangan pasir dan batu kali di sungai secara bebas dan serampangan dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah setempat (Kepala Lingkungan dan Kelurahan) dapat berdampak konflik sosial di masyarakat karena pihak pemilik lahan di sekitar penambangan tersebut berupaya untuk mencegah/melarang penambang, tetapi pihak penambang tidak peduli dengan larangan tersebut dan tetap terus melakukan penambangan pasir dengan cara menggali pasir sampai mendekati tebing sungai atau menggali mendekati pinggir lokasi perkebunan masyarakat di sekitar





Tema Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola	Deskripsi Isu Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola
	<p>sungai</p> <p>Peningkatan harga produksi tanaman perkebunan khususnya kelapa</p> <p>Masyarakat Petani Kelapa dan Jambu Mente merasa resah dengan banyaknya kasus pencurian buah kelapa dan buah jambu mente khususnya di wilayah Lingkungan Tabang Kelurahan Putabangun. Solusi: seharusnya dibuatkan aturan paling tidak aturan larangan memungut buah kelapa jatuh (aturan di tingkat Kelurahan/Desa) dan pemiliknya sendiri yang boleh memungut buah kelapa jatuh dari pohonnya, atau kalau boleh mungkin dibuatkan aturan Perda. Ini penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat petani kelapa dan petani jambu mente</p>
<p>Penyakit Masyarakat</p>	<p>Kenakalan Remaja</p> <p>perlu perhatian terhadap masalah kriminalisasi</p> <p>Perlunya penegakan Perda (aktifkan pengawasan oleh POLPP) terkait permasalahan penyakit masyarakat (ketentraman dan ketertiban umum) antara lain pengawasan terhadap rumah-rumah kost, tempat tempat tertentu (taman-taman) yang kalau malam hari terkesan dibiarkan gelap tanpa lampu, atau ada lampu tapi nyalanya tidak maksimal. contoh di Taman Pelangi, Menara Taman Pelangi, dan Taman Pusaka, Taman dekat Kantor Pos, Tanggul tanggul pantai mulai dari sekitar Taman Pusaka terus ke arah Utara dekat jemabatan, dekat SMP Standar sampai tanggul dekat Terminal, Kondisi gelapnya di tempat tersebut terkesan sengaja dibiarkan dan disiapkan untuk jadi tempat-tempat mesum di malam hari. Tempat lain yaitu pinggir tanggul di Appabatu. Terkait dengan ini perlunya keseriusan semua pihak terkait: PLN, POLPP, POLRI dan Pemerintah setempat. Kalau kondisi tersebut tidak tertangani, maka persolan soal pasti muncul, perkelahian, main hakim sendiri, dan lain-lain.</p> <p>kenakalan remaja serta penanganan kebiasaan anak merokok</p> <p>banyaknya kasus pencurian buah kelapa dan buah jambu mente khususnya di wilayah Lingkungan Tabang Kelurahan Putabangun</p>

Sumber: Hasil Survei Tim KLHS RPJMD Kab. Selayar, 2020

Berdasarkan hasil konsultasi publik II yang dilaksanakan pada Kamis 26 November 2020 di Kabupaten Selayar, disepakati 8 isu pembangunan berkelanjutan yaitu:





1. Pengentasan Kemiskinan
2. Alih Fungsi Lahan
3. Degradasi Lahan Pertanian
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Belum Optimal Pengelolaan Persampahan
8. Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan

6.3 Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan rumusan isu-isu yang diperoleh pada konsultasi publik I, tim KLHS menelaah keterkaitannya dengan hasil analisis kondisi 6 muatan KLHS di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III laporan ini. Hasil kajian 6 muatan KLHS menggambarkan kondisi lingkungan biofisik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana secara umum akan sangat mempengaruhi terjadinya berbagai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti hasil kajian 6 muatan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana potensi isu-isu pembangunan berkelanjutan itu bisa terjadi.

Beberapa hasil muatan KLHS yang memiliki korelasi dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan seperti isu potensi kerusakan lahan. Hasil kajian kapasitas daya dukung lahan menunjukkan bahwa 39,69% kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kelas kemampuan lahan VI s/d VIII. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar berfungsi lindung atau seharusnya tetap dipertahankan dalam kondisi bervegetasi. Oleh karena itu pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan seperti perkebunan dengan perakaran dangkal dan tanaman musiman serta kegiatan pertambangan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana longsor. Selain itu alih fungsi lahan yang tadinya bervegetasi menjadi lahan terbuka menyebabkan





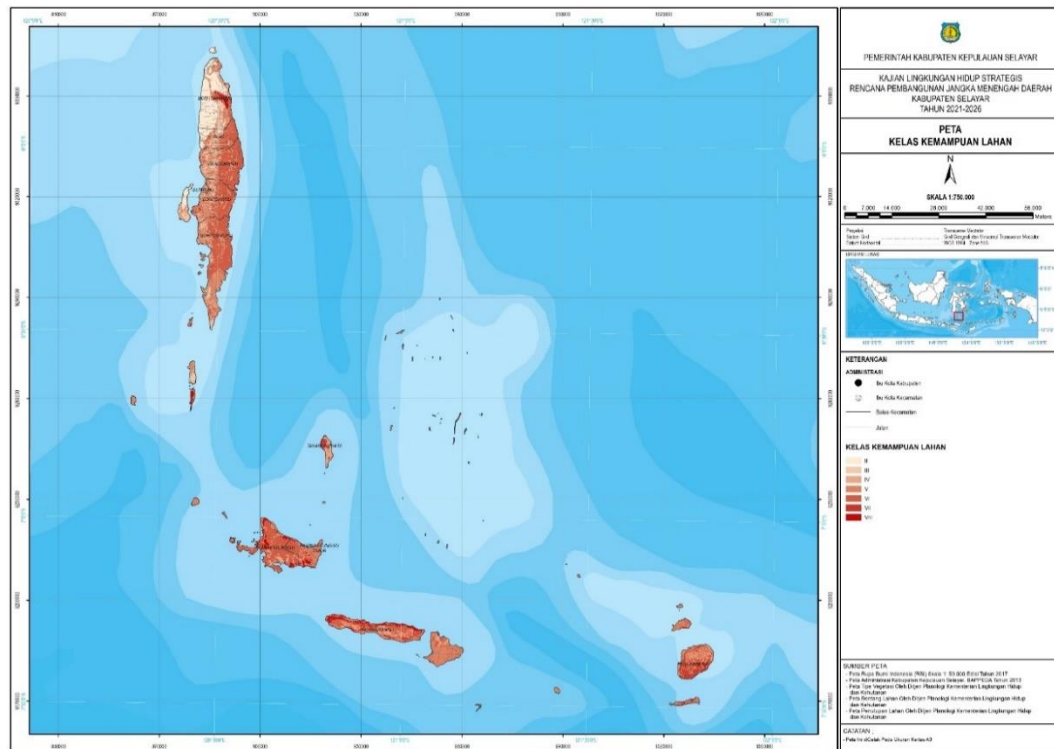
berkurangnya daerah tangkapan air, sehingga beberapa sumber mata air mengalami kekeringan atau pengurangan debit. Adapun peta kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada gambar 6.4.

Hasil analisis proyeksi daya dukung air dengan model *system dynamic* di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 s/d 2030 menunjukkan terdapatnya 2 kondisi yang berbeda signifikan pada saat debit andalan sungai besar disebabkan curah hujan tinggi dari air limpasan dari wilayah di sekitarnya dan debit andalan sungai kecil disebabkan curah hujan yang rendah serta tidak adanya air limpasan dari wilayah di sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis, ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kegiatan domestik dan non domestik diperkirakan sekitar $9,04 \times 10^{11} \text{ m}^3$ s/d $91,28 \times 10^{11} \text{ m}^3$ dari tahun 2020 s/d 2030. Sementara ketersediaan air pada saat curah hujan tinggi sekitar $11,91 \times 10^{12} \text{ m}^3$ dan saat curah hujan rendah ketersediaan air sekitar $5,955 \times 10^{12} \text{ m}^3$. Adapun ketersediaan dan kebutuhan air pada saat curah hujan tinggi diperlihatkan **Tabel 6.4** dan **Gambar 6.6** Grafik Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Saat Curah hujan tinggi. Sementara untuk ketersediaan dan kebutuhan air pada saat curah hujan rendah diperlihatkan **Tabel 6.5** dan **Gambar 6.7** Grafik Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Saat Curah hujan rendah. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut menunjukkan bahwa pada saat curah hujan tinggi wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar kelebihan air, sementara pada saat curah hujan rendah wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar kekurangan air. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bencana banjir pada satu waktu dan kekeringan di waktu lainnya.

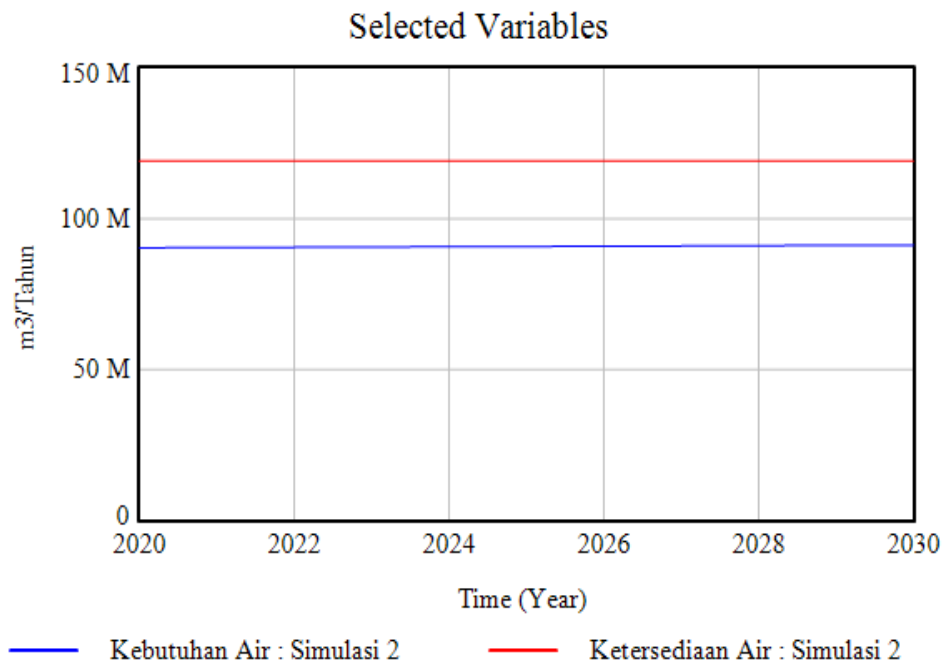




Gambar 6.5 Peta Kemampuan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 6.6 Grafik Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Saat Curah hujan tinggi



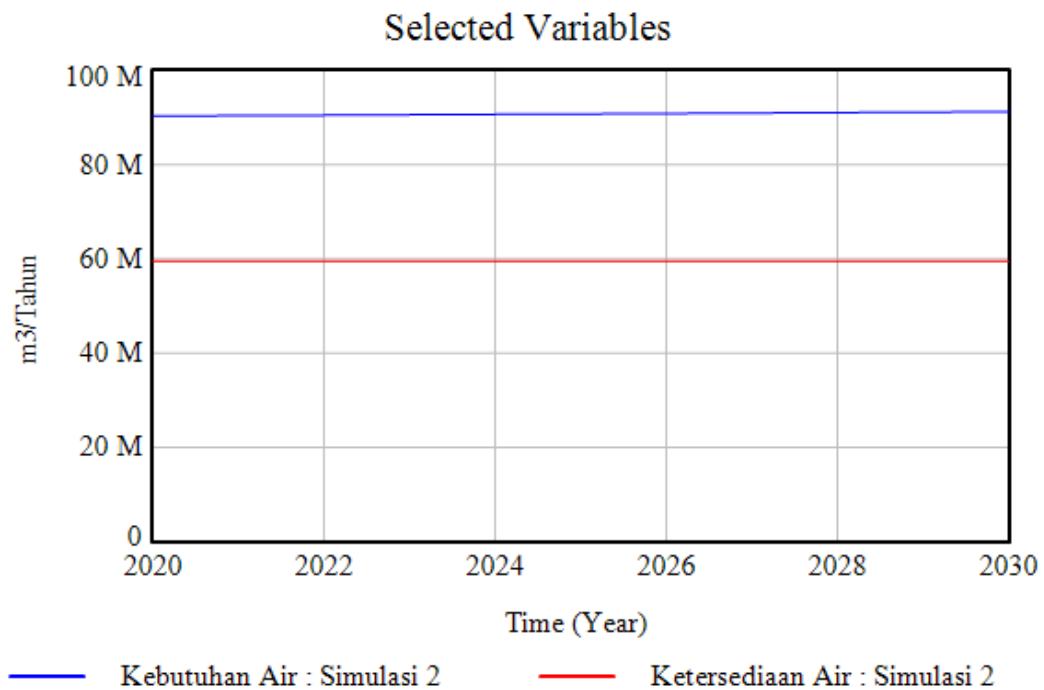


Tabel 6.4 Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Saat Curah hujan tinggi

Tahun	Kebutuhan Air (m ³)	Ketersediaan Air (m ³)
2020	903.750.000.000	11.910.700.000.000
2021	9.046.160.000.000	11.910.700.000.000
2022	9.054.910.000.000	11.910.700.000.000
2023	9.063.750.000.000	11.910.700.000.000
2026	9.072.680.000.000	11.910.700.000.000
2025	9.081.690.000.000	11.910.700.000.000
2026	909.080.000.000	11.910.700.000.000
2027	9.099.990.000.000	11.910.700.000.000
2028	9.109.280.000.000	11.910.700.000.000
2029	9.118.660.000.000	11.910.700.000.000
2030	9.128.130.000.000	11.910.700.000.000

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Gambar 6.7 Grafik Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Saat Curah hujan rendah





Tabel 6.5 Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Saat Curah hujan rendah

Tahun	Kebutuhan Air (m ³)	Ketersediaan Air (m ³)
2020	903.750.000.000	5.955.330.000.000
2021	9.046.160.000.000	5.955.330.000.000
2022	9.054.910.000.000	5.955.330.000.000
2023	9.063.750.000.000	5.955.330.000.000
2026	9.072.680.000.000	5.955.330.000.000
2025	9.081.690.000.000	5.955.330.000.000
2026	909.080.000.000	5.955.330.000.000
2027	9.099.990.000.000	5.955.330.000.000
2028	9.109.280.000.000	5.955.330.000.000
2029	9.118.660.000.000	5.955.330.000.000
2030	9.128.130.000.000	5.955.330.000.000

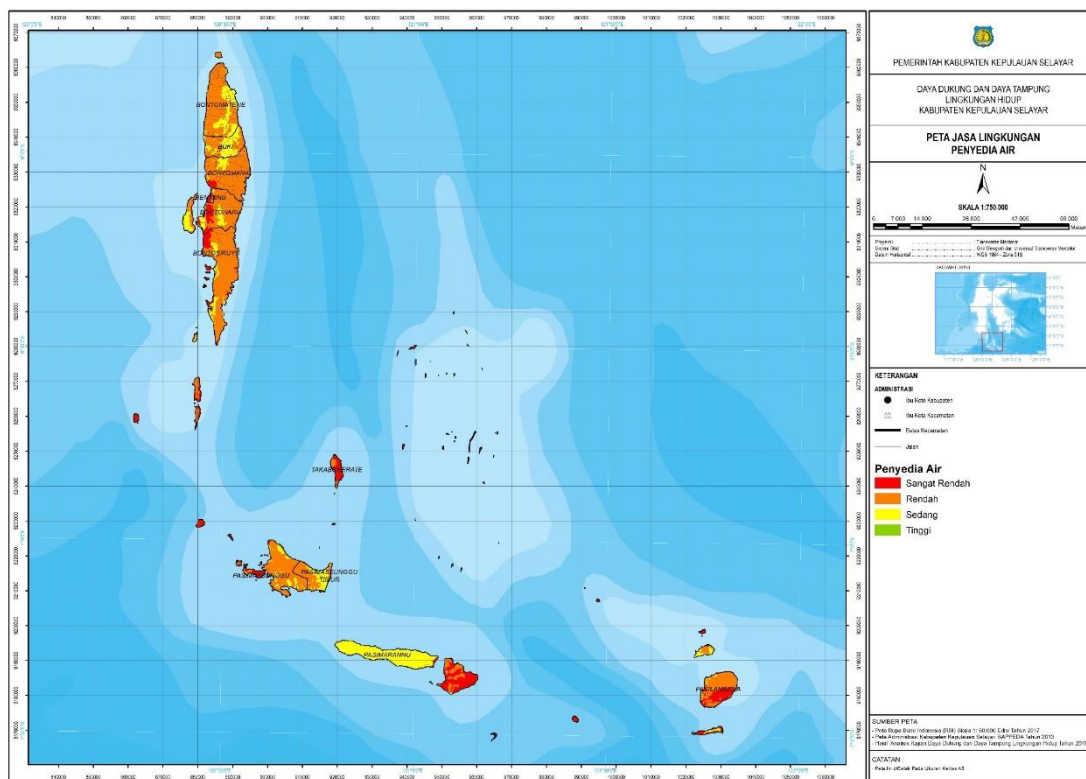
Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Potensi terjadinya bencana banjir dan kekeringan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar juga dapat dijelaskan dari kondisi jasa ekosistem yang ada, khususnya jasa ekosistem penyedia air, pengatur tata aliran air dan pendukung mitigasi banjir. Berdasarkan kondisi jasa ekosistem penyedia air, wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jasa penyedia air umumnya pada kategori sedang (24,30%), rendah (60,56%) dan sangat rendah (15,06%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kemampuan menyediakan air yang rendah pada saat musim kering. Kondisi ini dikarenakan kemampuannya untuk menyimpan air pada saat berlebih kecil, sehingga air yang ada pada saat musim hujan, banyak yang menjadi limpasan dan tidak tersimpan. Pada akhirnya kondisi kekeringan mengancam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat curah hujan rendah. Adapun gambaran kondisi jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Kepulauan Selayar di tunjukkan pada peta dibawah ini.





Gambar 6.8 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Kepulauan Selayar

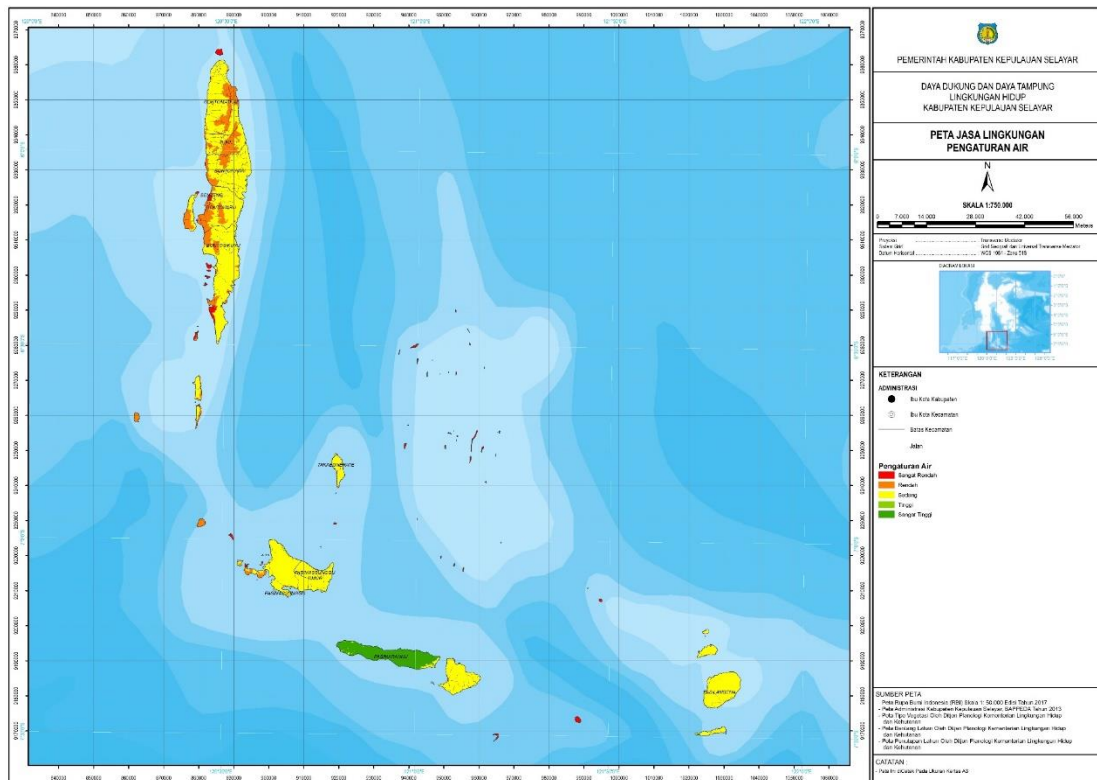


Selain itu berdasarkan jasa ekosistem pengatur tata aliran air, wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya berada pada kategori sedang (73,13%) dan rendah (17,92%). Hal ini menyebabkan bila curah hujan tinggi akan berpotensi terjadinya banjir, dikarenakan air banyak yang menjadi limpasan dipermukaan. Kondisi ini juga diperkuat dari hasil analisis jasa ekosistem pendukung mitigasi banjir yang umumnya berada pada kategori tinggi (69,72%). Adapun kondisi jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan jasa ekosistem pendukung mitigasi banjir diperlihatkan seperti pada **Gambar 6.10** dan **Gambar 6.10**





Gambar 6.9 Peta jasa lingkungan pengaturan tata aliran air

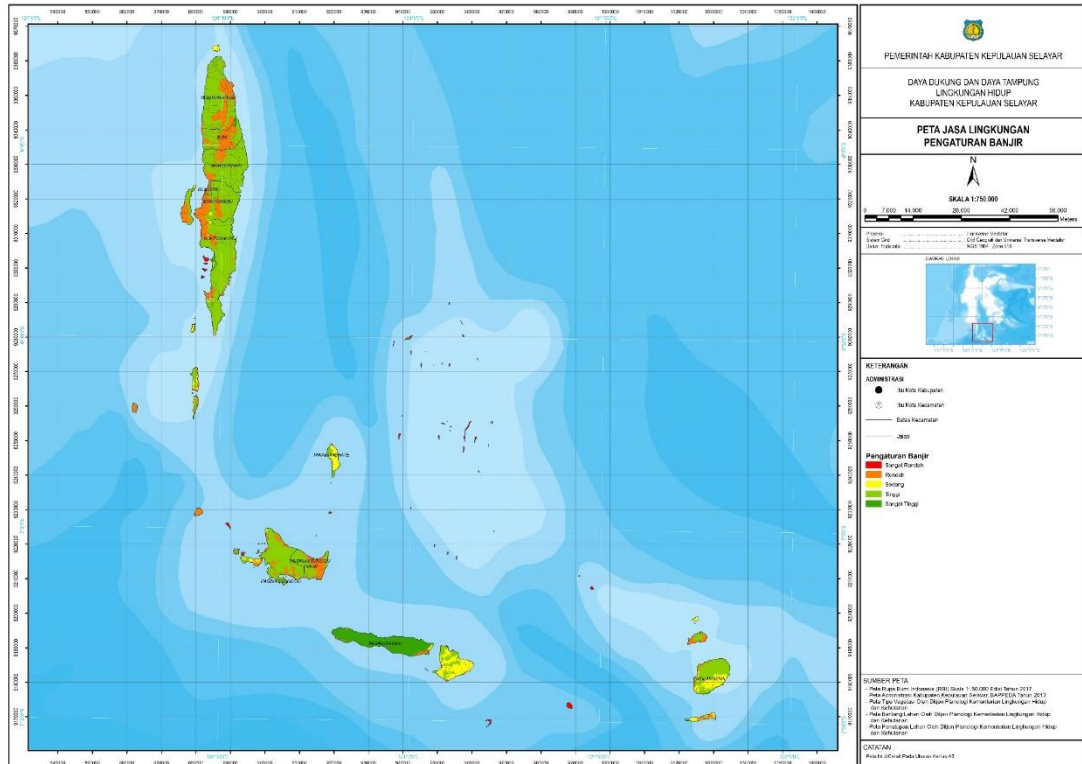


Pada akhirnya berdasarkan hasil analisis kajian 6 muatan KLHS, khususnya pada kondisi kemampuan lahan, daya dukung air, jasa ekosistem penyedia air, jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan jasa ekosistem pendukung mitigasi banjir, disimpulkan bahwa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum berpotensi terjadinya isu pembangunan berkelanjutan berupa kerusakan lahan, potensi bencana kekeringan dan banjir.





Gambar 6.10 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Mitigasi Banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar



6.4 Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil proyeksi indikator TPB yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 5, dapat ditentukan isu-isu pembangunan berkelanjutan ditinjau dari sudut pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu pembangunan ditentukan dari indikator TPB yang skenario proyeksi pencapaiannya membutuhkan upaya tambahan. Dalam hal ini indikator tersebut sulit tercapai di tahun-tahun yang akan datang bila hanya berdasarkan pada Business As Usual (BAU). Melalui indikator yang butuh upaya tambahan tersebut kita menentukan isu pembangunan berkelanjutan sesuai tujuan dimana indikator tersebut berada. Adapun beberapa kelompok isu-isu pembangunan berkelanjutan yang digali dari proyeksi capaian TPB diperlihatkan pada tabel bawah ini.





Tabel 6.6 Kelompok Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Proyeksi Indikator TPB

NO	TUJUAN TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	Isu Kemiskinan	1.2.1*	persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
		1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
		2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
2	Isu Bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah.
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
3	Isu Kesehatan	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
		3.4.1.(a)	persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)





NO	TUJUAN TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
			cara modern.
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
4	Isu Pendidikan	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
5	Isu Kesetaraan Gender	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		5.2.2.(a)	persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
		6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
		8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.
8	Persampahan	11.6.1.(a)	persentase sampah perkotaan yang tertangani.
9	Isu Tata Kelola Pemerintahan	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
		16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.





NO	TUJUAN TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
		16.7.1.(b)	persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
		17.18.1.(a)	persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
		17.18.1.(b)	persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
		17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Berdasarkan hasil pengelompokan isu di atas setidaknya terdapat 9 isu pembangunan berkelanjutan yang diperoleh dari indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Beberapa isu yang terungkap pada sub bab ini, sebelumnya juga telah diungkap pada sub bab sebelumnya seperti isu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa isu-isu tersebut perlu mendapat perhatian pada penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salah satu indikator yang cukup mempengaruhi dalam pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah produksi hasil pertanian khususnya produksi padi. Hal ini dapat dipahami dikarenakan sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi lapangan usaha pertanian yaitu 36.412% di tahun 2020. Oleh karena itu bila sektor pertanian mengalami masalah maka TPB yang lain sulit tercapai. Untuk itu pada penyusunan KLHS RPJMD ini secara khusus dilakukan analisis *system dynamic* untuk menentukan target proyeksi produksi pertanian pada tahun-tahun yang akan datang dengan merujuk pada berbagai faktor penghambat peningkatan produksi pertanian seperti alih fungsi lahan sawah,

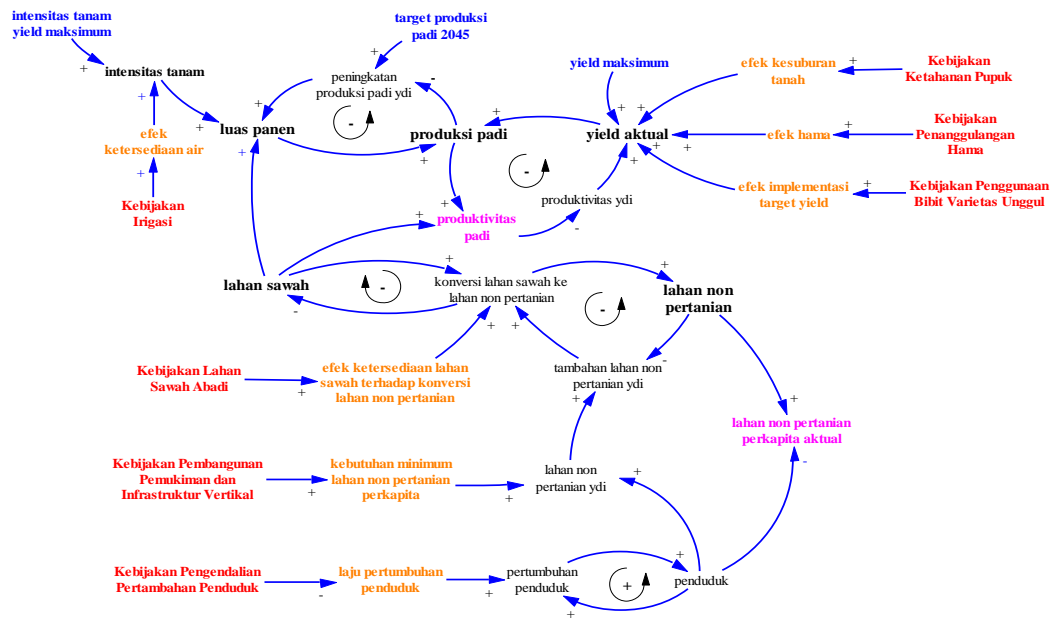




ketersediaan air, serangan hama, jenis varietas yang digunakan dan kondisi kesuburan lahan pertanian.

Secara teori produksi beras dalam setahun (ton/tahun) ditentukan oleh luas lahan yang ditanami padi (ha), yield per hektar varietas (bibit) padi yang ditanam (ton/ha), faktor pengali tingkat kesuburan tanah (tanpa dimensi), faktor pengali gangguan hama (tanpa dimensi), dan intensitas penanaman padi dalam setahun (/tahun). Berdasarkan pada konsep tersebut dengan menggunakan model global produksi padi dibuat *causal loop* diagram model produksi padi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun contoh gambaran modelnya diperlihatkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 6.11 Diagram Model Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar



Berdasarkan hasil analisis dari model produksi padi yang dijalankan setelah diinput dengan data-data eksisting dari Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh produksi padi paling optimal pada tahun 2030 adalah sebesar 38.655 Ton/Tahun dengan tetap melebihi proyeksi permintaan padi. Adapun hasil proyeksi produksi padi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada berbagai skenario ditujukan pada **Tabel 6.7** dan **Gambar 6.12** Grafik Proyeksi Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar dibawah ini.



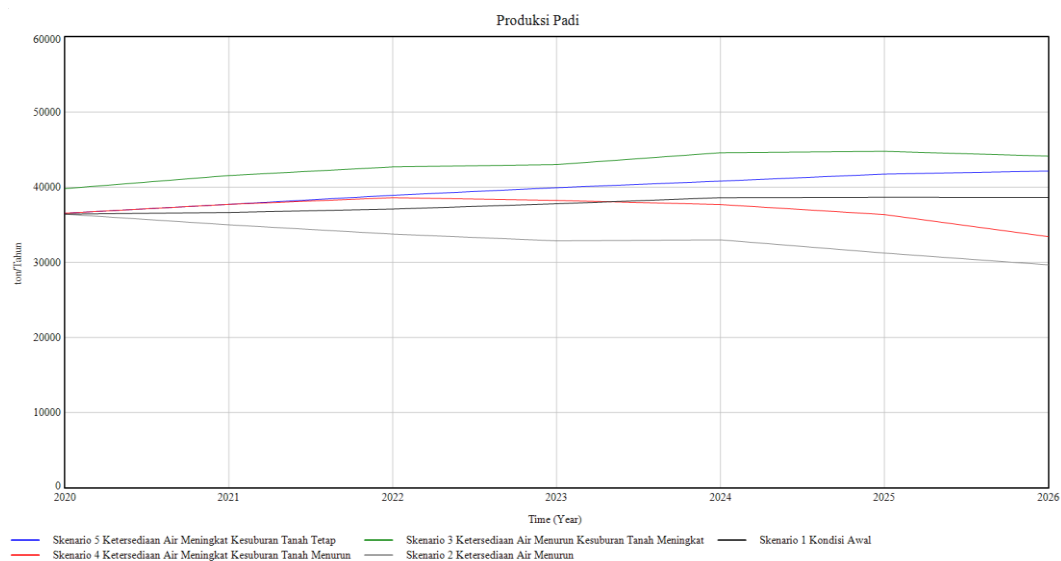


Tabel 6.7 Proyeksi Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar

Skenario Kebijakan	Produksi Padi (Ton/Tahun)					
	2020	2021	2022	2023	2026	2025
Permintaan Padi: Skenario 1 Kondisi Awal (Ton/Tahun)	22.604	22.830	23.058	23.289	23.522	23.757
Produksi Padi : Skenario 1 Kondisi Awal (Ton/Tahun)	36.412	36.644	37.095	37.802	38.613	38.672
Permintaan Padi: Skenario 1 Kondisi Awal (Ton/Tahun)	22.604	22.830	23.058	23.289	23.522	23.757

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Gambar 6.12 Grafik Proyeksi Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Selayar



Berdasarkan pada hasil analisis diatas, jika pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan meningkatkan produksi pertanian maka ketersediaan air menjadi variabel utama yang diikuti dengan kesuburan tanah. Untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan air pemerintah daerah wajib mengoptimalkan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi sangat penting dikarenakan juga terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan lainnya seperti resiko bencana banjir dan kekeringan. Sementara untuk meningkatkan kesuburan tanah pemerintah harus mendorong program





pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan serta memastikan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Peningkatan produksi pertanian sangat penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk itu program dan kegiatan yang terkait harus didorong sebagai program prioritas pemerintah daerah.

6.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan Perioritas

Berdasarkan pada analisis isu pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya baik isu pembangunan yang berasal dari hasil survei dan konsultasi publik, kondisi 6 muatan KLHS dan hasil proyeksi indikator TPB yang butuh upaya tambahan dilakukan analisis integrasi untuk melihat keterkaitan antara satu permasalahan atau isu dengan permasalahan lainnya. Adapun klasifikasi isu-isu pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya diperlihatkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.13 Klasifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Isu Pembangunan Berkelanjutan Hasil Survei	Isu Kondisi Lingkungan (D3TLH)	Isu SDGs/TPB
<ul style="list-style-type: none">• Pengentasan Kemiskinan• Alih Fungsi Lahan• Degradasi Lahan Pertanian• Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air• Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi• Tata Kelola Pemerintahan• Belum Optimal Pengelolaan Persampahan• Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan	<ul style="list-style-type: none">• 36,58% pada kemampuan lahan VI• Ketersediaan air berlebih saat curah hujan tinggi dan ketersediaan air tidak mencukupi saat curah hujan rendah.• Jasa ekosistem penyedia air umumnya rendah dan sangat rendah• Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air Umumnya Rendah• Jasa ekosistem pendukung mitigasi banjir juga rendah.	<ul style="list-style-type: none">• Kemiskinan• Kesehatan• Pendidikan• Kesetaraan Gender• Resiko Bencana• Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi• Air Bersih dan Sanitasi Layak• Persampahan• Tata Kelola

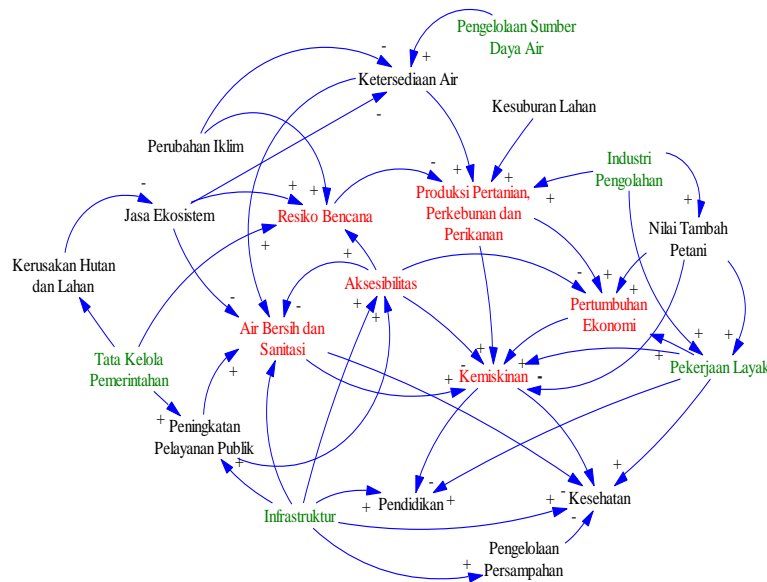
Pada laporan ini digunakan pendekatan *system thinking* untuk melihat keterkaitan antara berbagai isu diatas. Melalui pendekatan *system thinking* keterhubungan antara berbagai variabel ditunjukkan dalam diagram model *causal loop* sebagai satu sistem yang saling terkait. Hubungan antara variabel dalam sistem ditunjukkan dengan anak panah yang diberi simbol positif bila





akan menambah kondisi atau keadaan variabel dan minus bila akan mengurangi kondisi atau keadaan variabel. Melalui *system thinking* kita dapat menentukan variabel kunci yang menentukan suatu sistem dan saat bersamaan dapat juga ditentukan titik ungkit yang dapat memperbaiki kondisi sistem.

Gambar 6.14 Model System Thingking Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Selayar



Berdasarkan pada model *system thinking* yang dibuat diatas terlihat bahwa terdapat 3 variabel atau faktor kunci dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu potensi kerusakan lahan, resiko bencana dan kemiskinan. Faktor atau variabel kunci ini ditentukan berdasarkan arah keterkaitan berbagai variabel dalam suatu sistem. Ketiga faktor kunci ini mewakili aspek lingkungan berupa potensi kerusakan lahan dan aspek sosial ekonomi berupa kemiskinan. Sementara penghubung antara aspek lingkungan dan sosial ekonomi adalah resiko bencana.





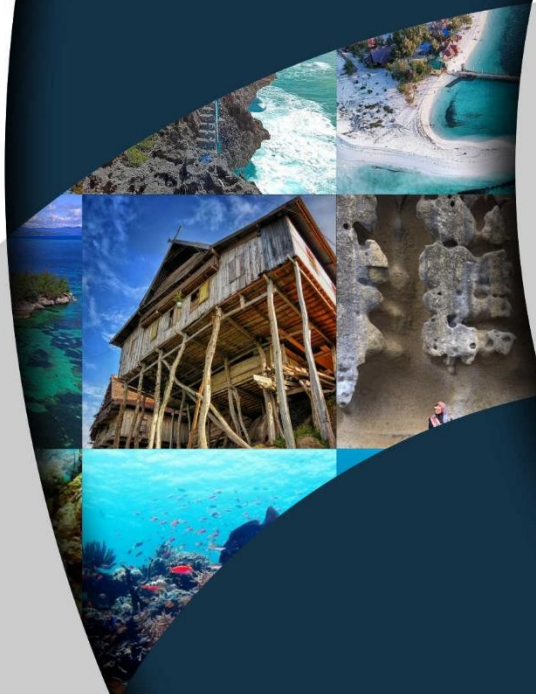
Selain menentukan faktor kunci pengambilan keputusan, melalui model ini juga dapat ditunjukkan variabel ungkit yang dapat mengubah atau mengintervensi sistem, diantaranya; pengelolaan sumber daya air, pekerjaan layak, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan pada hasil analisis ini maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan dalam beberapa hal diantaranya:

- a. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan
- b. Resiko Bencana
- c. Kemiskinan
- d. Pengelolaan Sumber Daya Air
- e. Pekerjaan Layak
- f. Infrastruktur
- g. Tata Kelola Pemerintahan.



BAB VII

**REKOMENDASI
DAN INTEGRASI
KLHS RPJMD
KABUPATEN
KEPULAUAN
SELAYAR**



BAB VII

REKOMENDASI DAN INTEGRASI KLHS RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

7.1 Rekomendasi KLHS RPJMD

Rekomendasi pada bab ini disusun sebagai hasil dari tindaklanjut terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB VI. Rekomendasi ini berupa rumusan kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagai skenario upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut dapat dilihat pada **Tabel 7.1** di bawah ini.

Tabel 7.1 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
2.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
3.	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
4.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.
5.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan
6.	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020





Selain itu sebagai tindak lanjut dari isu prioritas pembangunan berkelanjutan direkomendasikan di antaranya 34 sasaran. Adapun beberapa sasaran tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 % pertumbuhan produk domestik regional bruto per tahun.
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya.
3. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
4. Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
6. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
8. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
9. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.





10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
11. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
12. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
13. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
14. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
15. Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
16. Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
17. Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.





18. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
19. Memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
20. Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
21. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
22. Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
23. Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
24. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
25. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
26. Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
27. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah,





- dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
28. Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
 29. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
 30. Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
 31. Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
 32. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
 33. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.
 34. Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria pengukuran. Terdapat 93 indikator TPB yang direkomendasikan. Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut direkomendasi beberapa program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat mendukung pencapaian TPB dan penyelesaian isu prioritas pembangunan berkelanjutan. Adapun rincian dari seluruh Indikator TPB, targetnya, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB, skenario pencapaiannya serta penanggung jawabnya dapat



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



dilihat pada **Tabel 7.2** Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD di bawah ini.





Tabel 7.2 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

PILAR	NO. TPB	TUJUAN TPB	Kebijakan	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Program	Kegiatan	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Skenario Pencapaian	Penanggung Jawab
EKONOMI	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
					8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	#N/A	#N/A	Menurun (mendekat)	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
					8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah





							Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro)			
			Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker





				Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
				Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat 50%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
				Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
				Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Pemberdayaan Melalui	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah





							Kemitraan Usaha Mikro)			
			Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
			Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
		8.5.2*		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	
		8.5.2.(a)		Tingkat setengah pengangguran.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	





										Pintu dan Naker
			Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dipertahank an dan ditingkatkan pencaipaann ya	Dinas Kepariwisataa n
				8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dipertahank an dan ditingkatkan pencaipaann ya	Dinas Kepariwisataa n
				8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dipertahank an dan ditingkatkan pencaipaann ya	Dinas Kepariwisataa n
				8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot	Meningkat	Dipertahank an dan ditingkatkan pencaipaann ya	Dinas Kepariwisataa n





							a				
					8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	1). Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan 2). Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kotora	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kotora	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	





				Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Perhubungan
				Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian





				mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.				Kabupaten/Kot a		instansi terkait	
					9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
					9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
HUKUM & TATA KELOLA	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua,	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah





dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkat menjadi 60%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkat menjadi 50%	Butuh Upaya Tambahan	Inspektorat Daerah
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Menjadi 80%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi)	Meningkat menjadi 45%	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah





				16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	Meningkat menjadi 80%	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
			Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah (Fasilitasi Bantuan Hukum)	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





				16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
			Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kot a	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,





				(Eselon I dan II).		Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kot a			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.				16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat menjadi 85%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





				Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas
					16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas
					16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas
					16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas
				Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Inspektorat Daerah





LINGKUNGAN	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.	<p>Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</p>	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	#N/A	#N/A	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				<p>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat</p>	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Kesehatan
					6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 100%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



				rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan
					6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan
					6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman





				Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkat menjadi 100%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku)	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkat menjadi 100%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



							WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
				6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota)	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,					





				mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
					6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kotora (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.	<p>Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.</p>	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	ada	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			<p>Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan</p>	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



			permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
			Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah (Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi 80%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah





				secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kotora	Menurun menjadi 30%	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kotora	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kotora	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SOSIAL	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	Meningkat menjadi 95%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan





				substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
					1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Sosial
					1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Sosial
				Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Sosial





			menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kotora	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.1.(a)		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kotora	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.5.1.(b)		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kotora	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Sosial	
		1.5.1.(c)		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Sosial	



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



							Kabupaten/Kot a		ya		
					1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
					1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulang an Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode Perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
				Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Menurun menjadi 7-8%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Sosial





				Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan
				Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan
				Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kotora	Meningkat menjadi 65%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





					1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkat menjadi 100%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 100%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Kabupaten/Kota	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat .	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



					1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	#N/A	#N/A	Meningkat menjadi 100%	Butuh Upaya Tambahan	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
--	--	--	--	--	-----------	--	------	------	------------------------	----------------------	-----------------------------------

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

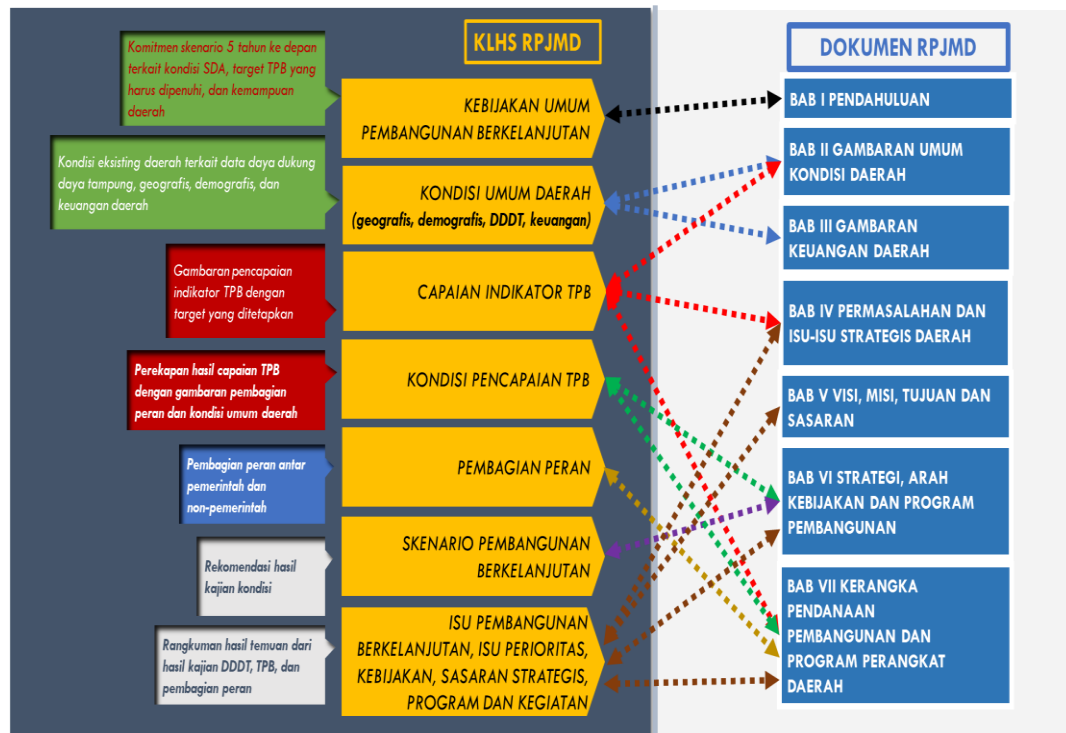




7.2 Integrasi KLHS RPJMD

Tahap Integrasi KLHS RPJMD Kab. Selayar dalam dokumen RPJMD merupakan tahap akhir dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kab. Selayar. KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan pendekatan ex-ante, di mana KLHS disusun sebelum adanya muatan KRP. Pada posisi ini KLHS akan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga diharapkan Dokumen RPJMD yang disusun dapat memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka direncanakan integrasi dokumen KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilakukan pada keseluruhan bagian dari dokumen RPJMD mulai dari Bab I s.d. Bab VII. Adapun gambaran integrasi tersebut diperlihatkan pada **Gambar 7.1** di bawah ini.

Gambar 7.1 Rencana Integrasi KLHS RPJMD Ke Dalam Dokumen RPJMD





Berdasarkan **Gambar 7.1** diatas diperlihatkan bahwa terdapat 7 bagian muatan KLHS RPJMD Kab. Selayar yang akan di integrasi ke dalam Dokumen RPJMD, adapun penjelasan dari bagian-bagian tersebut akan diuraikan dibawah ini:

- a. Kebijakan umum pembangunan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai maksud dan tujuan dari pelaksanaan dan penyusunan KLHS RPJMD yang tertuang dalam BAB I KLHS akan menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD sebagaimana yang akan diuraikan dalam BAB pendahuluan dokumen RPJMD.
- b. Kondisi umum daerah khususnya terkait kondisi geografis, demografis, daya dukung dan daya tampung, serta kondisi keuangan yang terdapat dalam BAB II dan BAB III KLHS RPJMD akan menjadi bahan untuk BAB II dalam dokumen RPJMD. Gambaran kondisi keuangan dalam dokumen KLHS akan menjadi bahan masukan dalam Bab III RPJMDK.
- c. Capaian indikator TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi bahan masukan untuk Bab II (Gambaran Umum), Bab IV (Permasalahan dan Isu Strategis) dan Bab VII (Kerangka Pendanaan) RPJMDK.
- d. Kondisi pencapaian TPB akan menjadi masukan pada Bab VI (Strategi dan Araha Kebijakan) dan Bab VII (Kerangka Pendanaan) RPJMDK.
- e. Rangkuman hasil kajian DDDTLH, TPB dan pembagian peran dalam dokumen KLHS akan menjadi bahan masukan dalam Bab IV (Permasalahan dan Isu Strategis), V (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran), VI (Strategi, Arah Kebijakan dan Program), dan VII (Kerangka Pendanaan) RPJMDK.
- f. Pembagian peran para pihak dalam mendukung pencapaian TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam BAB VII Dokumen RPJMD.



KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

- g. Skenario pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam BAB V KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam BAB VI Dokumen RPJMD.
- h. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas, kebijakan dan sasaran strategis, serta program yang terdapat dalam BAB VI dan VII KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2020), Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka Tahun 2020.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (2020), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (2019), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (2018), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (2017), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup, (2014), Pedoman Penentuan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- Muta'ali, L., (2019), Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muta'ali, L., (2019), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Untuk Perencanaan Lingkungan Hidup, Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, (2009), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Republik Indonesia, (2016), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Republik Indonesia, (2017), Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- Republik Indonesia, (2017), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026



Republik Indonesia, (2018), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Taun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

